



BADAN STANDARDISASI  
INSTRUMEN PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN

LAPORAN

# KEUANGAN

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna  
Anggaran Eselon I (UAPPAE-1)



TAHUN  
2024

**AUDITED**



Jl. Raya Ragunan No. 29  
Pasarmingu, Jakarta 12540  
021 7806202

[www.bsip.pertanian.go.id](http://www.bsip.pertanian.go.id)

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Standardisasi Instrumen Pertanian adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan *Audited* TA 2024 Badan Standardisasi Instrumen Pertanian mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan *Audited* TA 2024 ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan Tahunan *Audited* TA 2024 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Disamping itu, Laporan Keuangan *Audited* TA 2024 ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Mei 2025

Kepala Badan



Prof. Dr. Fadjry Djufry, M.Si, GRCE ✓  
NIP 196903141994031001

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2. Belanja

B.3. Belanja Pegawai

B.4. Belanja Barang

B.5. Belanja Modal

B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.5.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

B.5.3. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

B.5.4. Belanja Modal Lainnya

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

C.1.4. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

C.1.5. Piutang Bukan Pajak

C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

C.1.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

C.1.8. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

C.1.9. Persediaan

C.1.10. Persediaan yang Belum Diregister

C.2. Aset Tetap

C.2.1. Tanah

C.2.2. Peralatan dan Mesin

C.2.3. Peralatan dan Mesin Belum Diregister

C.2.4. Gedung dan Bangunan

C.2.5. Gedung dan Bangunan Belum Diregister

C.2.6. Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.7. Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister

C.2.8. Aset Tetap Lainnya

C.2.9. Konstruksi Dalam Pengerjaan

C.2.10. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3. Piutang Jangka Panjang

C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

C.3.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

C.4. Aset Lainnya

C.4.1. Aset Tak Berwujud

- C.4.2. Aset Lain-lain
  - C.4.3. Aset Lainnya yang Belum Diregister
  - C.4.4. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya
- C.5. Kewajiban Jangka Pendek
  - C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga
  - C.5.2. Hibah Yang Belum Disahkan
  - C.5.3. Pendapatan Diterima Dimuka
  - C.5.4. Uang Muka dari KPPN
- C.6. Ekuitas
  - C.6.1. Ekuitas
- D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
  - D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
  - D.2. Beban Pegawai
  - D.3. Beban Persediaan
  - D.4. Beban Barang dan Jasa
  - D.5. Beban Pemeliharaan
  - D.6. Beban Perjalanan Dinas
  - D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
  - D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi
  - D.9. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
  - D.10. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
  - E.1. Ekuitas Awal
  - E.2. Surplus/Defisit-LO
  - E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
    - E.3.1. Koreksi Nilai Persediaan
    - E.3.2. Koreksi Atas Reklasifikasi
    - E.3.3. Selisih Revaluasi Aset Tetap
    - E.3.4. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi
    - E.3.5. Koreksi Lain-lain
  - E.4. Transaksi Antar Entitas
    - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
    - E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar
    - E.4.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung
  - E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
  - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
  - F.2. Pengungkapan Lain-lain

## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan *Audited* TA. 2024 Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan *Audited* TA 2024 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan *Audited* TA. 2024 tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Mei 2025

Kepala Badan



Prof. Dr. Fadjry Djufry, M.Si, GRCE  
NIP 196903141994031001

Laporan Keuangan *Audited* Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun Anggaran 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

## **I. Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2024 adalah berupa Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp 40.148.871.686,00** atau mencapai **175%** dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar **Rp22.899.394.000,00**

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp849.745.515.714,00** atau mencapai **90,99%** dari alokasi anggaran sebesar **Rp933.853.861.000,00**

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal terdapat koreksi pencatatan sehingga posisi Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2024 *Audited* adalah sebagai berikut :

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp850.019.118.647,00** atau mencapai **91,02%** dari alokasi anggaran sebesar **Rp933.853.861.000,00**.

## **II. Neraca**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar **Rp44.250.513.858.396,00** yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar **Rp21.575.472.988,00**; Aset Tetap (neto) sebesar **Rp44.114.342.833.216,00**; Properti Investasi (neto) sebesar **Rp13.626.464.000,00**; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar **Rp1.655.227.353,00**; dan Aset Lainnya (neto) sebesar **Rp99.765.196.247,00**.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar **Rp10.395.281.585,00** dan **Rp44.250.513.858.396,00**.

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal terdapat koreksi pencatatan sehingga posisi keuangan entitas mengenai asset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2024 *Audited* adalah sebagai berikut :

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar **Rp44.252.429.938.555,00** yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar **Rp21.352.456.055,00**; Aset Tetap (neto) sebesar **Rp44.112.004.248.730,00**; Properti Investasi (neto) sebesar **Rp17.652.810.170,00**; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar **Rp1.655.227.353,00**; dan Aset Lainnya (neto) sebesar **Rp99.765.196.247,00**.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar **Rp10.086.415.857,00** dan **Rp44.252.429.938.555,00**.



### III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp31.889.767.201,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp941.106.741.392,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-909.216.974.191,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp-17.754.829.453,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-891.462.144.738,00.

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal terdapat koreksi pencatatan sehingga nilai Laporan Operasional per 31 Desember 2024 *Audited* adalah sebagai berikut :

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp31.889.767.201,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp941.499.134.872,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-909.609.367.671,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp17.754.829.453,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-891.854.538.218,00.

### IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp45.034.208.920.591,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-891.462.144.738,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp-15.412.948.881,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp112.784.749.839,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp44.240.118.576.811,00.

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal terdapat koreksi pencatatan sehingga nilai Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2024 *Audited* adalah sebagai berikut :

Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp45.034.208.920.591,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-891.854.538.218,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp-13.079.845.801,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp113.068.986.126,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp44.242.343.522.698,00.

### V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 *Audited* disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 *Audited* disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

**BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023**

Uraian	Catatan	31 Desember 2024 <i>Unaudited</i>			31 Desember 2024 <i>Audited</i>		31 Desember 2023 <i>Audited</i>
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi
<b>PENDAPATAN</b>							
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	22.899.394.000	40.148.871.686	175,33	40.148.871.686	175,33	24.786.286.435
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>22.899.394.000</b>	<b>40.148.871.686</b>	<b>175,33</b>			<b>24.786.286.435</b>
<b>BELANJA</b>	B.2						
<b>Belanja Operasi</b>							
Belanja Pegawai	B.3	284.683.136.000	278.366.436.945	97,78	278.366.436.945	97,78	268.858.621.785
Belanja Barang	B.4	585.049.247.000	515.879.566.764	88,18	516.153.169.697	88,22	529.955.687.174
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>		<b>869.732.383.000</b>	<b>794.246.003.709</b>	<b>91,32</b>	<b>794.519.606.642</b>		<b>798.814.308.959</b>
<b>Belanja Modal</b>	B.5						
Belanja Modal Tanah	B.5.1						
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	B.5.2	30.022.626.000	28.316.782.803	94,32	28.316.782.803	94,32	13.547.620.497
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	B.5.3	11.450.208.000	5.707.904.544	49,85	5.707.904.544	49,85	24.789.624.227
Belanja Modal Jalan, Jembatan dan Irigasi	B.5.4	22.648.644.000	21.474.824.658	94,82	21.474.824.658	94,82	485.408.080
Belanja Modal Lainnya	B.5.5		-				
<b>Jumlah Belanja Modal</b>		<b>64.121.478.000</b>	<b>55.499.512.005</b>	<b>86,55</b>	<b>55.499.512.005</b>	<b>86,55</b>	<b>38.822.652.804</b>
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>933.853.861.000</b>	<b>849.745.515.714</b>	<b>90,99</b>	<b>850.019.118.647</b>		<b>837.636.961.763</b>



**BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023**

Uraian	Catatan	31 Desember 2024 Unaudited	31 Desember 2024 Audited	31 Desember 2023 Audited
<b>ASET</b>				
<b>Aset Lancar</b>				
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1			25.921.000
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	347.500	347.500	
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.4	3.846.019.586	3.609.809.653	2.126.798.729
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.5			47.510.700
Piutang Bukan Pajak	C.7	4.348.502.016	4.361.695.016	2.947.035.664
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.6	(1.436.451.936)	(1.436.451.936)	(1.666.178.084)
Bagian Lancar Tagihan TP / TGR	C.7	16.963.314	16.963.314	755.254.127
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lacar TP/TGR	C.8	(1.696.331)	(1.696.331)	(176.877.392)
Persediaan	C.9	14.801.788.839	14.801.788.839	12.199.218.675
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>21.575.472.988</b>	<b>21.352.456.055</b>	<b>16.258.683.419</b>
<b>Aset Tetap</b>				
Tanah	C.10	42.357.882.841.143	42.353.446.599.143	42.875.152.506.066
Peralatan dan Mesin	C.11	1.509.576.255.161	1.509.576.255.161	1.502.142.924.379
Gedung dan Bangunan	C.12	2.035.480.270.287	2.038.612.694.811	2.033.683.425.673
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.13	323.357.846.799	323.357.846.799	301.709.108.141
Aset Tetap Lainnya	C.14	11.346.628.479	11.346.628.479	11.283.239.779
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.15	2.370.184.532	2.370.184.532	4.332.570.451
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	C.15.1	(1.396.786.446.533)	(1.396.786.446.533)	(1.370.986.862.167)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	C.15.2	(568.278.996.621)	(569.313.763.631)	(496.076.442.022)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.15.3	(160.605.750.031)	(160.605.750.031)	(145.235.727.430)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>44.114.342.833.216</b>	<b>44.112.004.248.730</b>	<b>44.716.004.742.870</b>
<b>Properti Investasi</b>				
Properti Investasi	C.16	13.626.464.000	18.259.544.000	208.754.216.000
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.17	(451.335.408)	(606.733.830)	(323.181.613)
<b>Jumlah Properti Investasi</b>		<b>13.175.128.592</b>	<b>17.652.810.170</b>	<b>208.431.034.387</b>
<b>Piutang Jangka Panjang</b>				
Piutang Tagihan TP/TGR	C.18	842.155.657	842.155.657	81.046.376
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP / TGR	C.19	(104.126.864)	(104.126.864)	(405.232)
Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.20	3.275.989.901	3.275.989.901	3.347.221.263
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.21	(2.358.791.341)	(2.358.791.341)	(2.344.261.760)
<b>Jumlah Piutang Jangka Panjang</b>		<b>1.655.227.353</b>	<b>1.655.227.353</b>	<b>1.083.600.647</b>
<b>Aset Lainnya</b>				
Aset Tak Berwujud	C.22	29.940.204.831	29.940.204.831	29.948.319.831
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.23	7.480.811.324	7.480.811.324	3.860.308.590
Aset Lain-lain	C.24	116.495.016.660	116.495.016.660	111.088.009.886
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	C.25	(54.150.836.568)	(54.150.836.568)	(47.016.681.135)
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>99.765.196.247</b>	<b>99.765.196.247</b>	<b>97.879.957.172</b>
<b>Jumlah Aset</b>		<b>44.250.513.858.396</b>	<b>44.252.429.938.555</b>	<b>44.831.226.984.108</b>

*Laporan Keuangan Tahunan 2024 Audited*

Uraian	Catatan	31 Desember 2024 <i>Unaudited</i>	31 Desember 2024 <i>Audited</i>	31 Desember 2023 <i>Audited</i>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>				
Utang kepada Pihak Ketiga	C.26	8.335.882.482	8.311.253.041	4.129.901.942
Hibah Yang Belum Disahkan	C.27	284.236.287	-	
Pendapatan Diterima Dimuka	C.28	1.775.162.816	1.775.162.816	1.293.274.962
Uang Muka KPPN	C.29			25.921.000
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>10.395.281.585</b>	<b>10.086.415.857</b>	<b>5.449.097.904</b>
<b>Jumlah Kewajiban</b>		<b>10.395.281.585</b>	<b>10.086.415.857</b>	<b>5.449.097.904</b>
<b>Ekuitas</b>				
Ekuitas	C.29	44.240.118.576.811	42.242.343.522.698	45.034.208.920.591
<b>Jumlah Ekuitas</b>		<b>44.240.118.576.811</b>	<b>42.242.343.522.698</b>	<b>45.034.208.920.591</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>		<b>44.250.513.858.396</b>	<b>42.252.429.938.555</b>	<b>45.039.658.018.495</b>

**BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023**

Uraian	Catatan	31 Desember 2024 <i>Unaudited</i>	31 Desember 2024 <i>Audited</i>	31 Desember 2023 <i>Audited</i>
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	31.889.767.201	31.889.767.201	21.321.795.287
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>31.889.767.201</b>	<b>31.889.767.201</b>	<b>21.321.795.287</b>
Beban Pegawai	D.2	278.189.807.166	278.176.614.166	269.059.233.162
Beban Persediaan	D.3	40.542.300.690	40.542.300.690	57.138.591.503
Beban Barang dan Jasa	D.4	277.666.072.167	277.810.572.167	288.853.260.981
Beban Pemeliharaan	D.5	109.386.006.236	109.386.006.236	74.498.767.385
Beban Perjalanan Dinas	D.6	87.798.934.295	87.890.644.228	117.889.176.146
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	11.022.852.956	11.022.852.956	1.634.356.600
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	136.613.164.817	136.782.541.364	155.540.148.915
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	(112.396.935)	(112.396.935)	209.874.578
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>941.106.741.392</b>	<b>941.499.134.872</b>	<b>964.823.409.270</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(909.216.974.191)</b>	<b>(909.609.367.671)</b>	<b>(943.501.613.983)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.10	1.512.288.438	1.512.288.438	793.802.438
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.10	4.756.057.498	4.756.057.498	6.029.190.815
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10	22.968.097.973	22.968.097.973	16.991.083.439
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10	1.969.499.460	1.969.499.460	485.563.274
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>17.754.829.453</b>	<b>17.754.829.453</b>	<b>11.270.131.788</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>		<b>(891.462.144.738)</b>	<b>(891.854.538.218)</b>	<b>(932.231.482.195)</b>

**BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 dan 31 DESEMBER 2023**

Uraian	Catatan	31 Desember 2024 <i>Unaudited</i>	31 Desember 2024 <i>Audited</i>	31 Desember 2023 <i>Audited</i>
EKUITAS AWAL	E.1	45.034.208.920.591	45.034.208.920.591	45.269.723.693.095
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(891.462.144.738)	(891.854.538.218)	(932.231.482.195)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR				
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(15.412.948.881)	(13.079.845.801)	(20.348.814.731)
Penyesuaian Nilai Aset				
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1	1.402.101.698	1.402.101.698	1.347.601.350
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.2	278.101.002.922	278.101.002.922	(1.998.000)
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.3			
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.3.4	(295.362.208.886)	(293.053.735.247)	(21.896.107.588)
Lain –lain	E.3.5	446.155.385	470.784.826	201.689.507
Transaksi Antar Entitas	E.4	112.784.749.839	113.068.986.126	717.065.524.422
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(794.090.343.780)	(791.865.397.893)	(235.514.772.504)
EKUITAS AKHIR	E.5	44.240.118.576.811	44.242.343.522.698	45.034.208.920.591

## **A. PENJELASAN UMUM**

### **A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 maka tugas Badan Standardisasi Instrumen Pertanian adalah menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen di bidang pertanian. Dalam melaksanakan kegiatannya, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Pertanian diantaranya dijelaskan dalam 3 program Kementerian Pertanian yaitu

1. Program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas
2. Program nilai tambah dan daya saing industri, dan
3. Program dukungan manajemen.

Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian. Untuk melaksanakan tugasnya, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian menyelenggarakan berbagai fungsi, yaitu

- a. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian.
- b. Pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian.
- d. Pelaksanaan tugas administrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Susunan organisasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 pasal 212 terdiri atas :

1. Sekretariat Badan;  
Sekretariat Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut
  - a. Koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Standardisasi Instrumen Pertanian;
  - b. Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
  - c. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan dan pembinaan urusan kepegawaian lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
  - d. Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan kerjasama, hubungan masyarakat dan informasi publik lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan data, serta koordinasi pelaksanaan pengendalian intern lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian; dan
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

2. Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan;

Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen tanaman pangan, dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut

- a. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen tanaman pangan;
- b. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan perumusan, penerapan, pemeliharaan dan harmonisasi standar instrumen tanaman pangan;
- c. Penyelenggaraan sistem jaminan mutu di bidang tanaman pangan;
- d. Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi bidang tanaman pangan;
- e. Pengelolaan data dan informasi, serta penyebarluasan hasil standardisasi instrumen tanaman pangan;
- f. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang perumusan, penerapan, pemeliharaan dan harmonisasi standar instrumen, sistem jaminan mutu, pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi, dan penyebarluasan hasil standardisasi instrumen tanaman pangan; dan
- g. Pengelolaan urusan tata usaha Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan

3. Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura;

Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, hubungan masyarakat, dan penatausahaan barang milik negara Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen hortikultura;
- b. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan perumusan, penerapan, pemeliharaan dan harmonisasi standar instrumen hortikultura;
- c. Penyelenggaraan sistem jaminan mutu di bidang hortikultura;
- d. Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi bidang hortikultura;
- e. Pengelolaan data dan informasi, serta penyebarluasan hasil standardisasi instrumen hortikultura;
- f. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang perumusan, penerapan, pemeliharaan dan harmonisasi standar instrumen, sistem jaminan mutu, pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi, dan penyebarluasan hasil standardisasi instrumen hortikultura; dan
- g. Pengelolaan urusan tata usaha Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura.

4. Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan

Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen Perkebunan dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen perkebunan;



- b. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan perumusan, penerapan, pemeliharaan dan harmonisasi standar instrumen perkebunan;
- c. Penyelenggaraan sistem jaminan mutu di bidang perkebunan;
- d. Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi bidang perkebunan;
- e. Pengelolaan data dan informasi, serta penyebarluasan hasil standardisasi instrumen perkebunan;
- f. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang perumusan, penerapan, pemeliharaan dan harmonisasi standar instrumen, sistem jaminan mutu, pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi, dan penyebarluasaan hasil standardisasi instrumen perkebunan; dan
- g. Pengelolaan urusan tata usaha Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan.

5. Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen peternakan dan kesehatan hewan dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen peternakan dan kesehatan hewan;
- b. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan perumusan, penerapan, pemeliharaan dan harmonisasi standar instrumen peternakan dan kesehatan hewan;
- c. Penyelenggaraan sistem jaminan mutu di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- d. Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- e. Pengelolaan data dan informasi, serta penyebarluasan hasil standardisasi instrumen peternakan dan kesehatan hewan;
- f. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang perumusan, penerapan, pemeliharaan dan harmonisasi standar instrumen, sistem jaminan mutu, pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi, dan penyebarluasaan hasil standardisasi instrumen peternakan dan kesehatan hewan; dan
- g. Pengelolaan urusan tata usaha Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

6. Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian

Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengujian standar instrumen mekanisasi pertanian dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran pengujian standar instrumen mekanisasi pertanian;
- b. Pelaksanaan analisis, pengujian dan tindakan korektif pengujian standar instrumen mekanisasi pertanian;
- c. Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi mekanisasi pertanian;
- d. Pelaksanaan layanan pengujian, kalibrasi dan penilaian kesesuaian standar instrumen mekanisasi pertanian;
- e. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standar instrumen mekanisasi pertanian;
- f. Pelaksanaan modifikasi desain, model serta purwarupa instrumen mekanisasi pertanian;

- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen mekanisasi pertanian; dan
  - h. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBPSI Mektan.
7. Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian
- Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengujian standar instrumen sumber daya lahan dan perubahan iklim pertanian dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut
- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran pengujian standar instrumen sumber daya lahan dan perubahan iklim pertanian;
  - b. Pelaksanaan analisis, pengujian dan tindakan korektif pengujian standar instrumen sumber daya lahan dan perubahan iklim pertanian;
  - c. Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi sumber daya lahan dan perubahan iklim pertanian;
  - d. Pelaksanaan layanan pengujian, kalibrasi dan penilaian kesesuaian standar instrumen sumber daya lahan dan perubahan iklim pertanian;
  - e. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi geospasial tematik pertanian;
  - f. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standar instrumen sumber daya lahan dan perubahan iklim pertanian;
  - g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen sumber daya lahan dan perubahan iklim pertanian; dan h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBPSI SDLP.
8. Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian
- Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengujian standar instrumen bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut
- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran pengujian standar instrumen bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian;
  - b. Pelaksanaan analisis, pengujian dan tindakan korektif pengujian standar instrumen bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian;
  - c. Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian;
  - d. Pelaksanaan layanan pengujian, kalibrasi dan penilaian kesesuaian standar instrumen bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian;
  - e. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standar instrumen bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian;
  - f. Pelaksanaan pengelolaan plasma nutfah pertanian;
  - g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian; dan
  - h. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBPSI Biogen
9. Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian
- Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengujian standar instrumen pascapanen pertanian dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut
- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran pengujian standar instrumen pascapanen pertanian;

- b. Pelaksanaan analisis, pengujian dan tindakan korektif pengujian standar instrumen pascapanen pertanian;
- c. Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pascapanen pertanian;
- d. Pelaksanaan layanan pengujian, kalibrasi dan penilaian kesesuaian standar instrumen pascapanen pertanian;
- e. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standar instrumen pascapanen pertanian;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen pascapanen pertanian; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBPSI Pascapanen Pertanian.

10. Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi

Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi mempunyai tugas melaksanakan pengujian standar instrumen padi dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran pengujian standar instrumen padi;
- b. Pelaksanaan analisis, pengujian dan tindakan korektif pengujian standar instrumen padi;
- c. Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi padi;
- d. Pelaksanaan layanan pengujian, kalibrasi dan penilaian kesesuaian standar instrumen padi;
- e. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standar instrumen padi;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen padi; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBPSI Padi.

11. Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner

Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner mempunyai tugas melaksanakan pengujian standar instrumen kesehatan hewan dan masyarakat veteriner dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran pengujian standar instrumen kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
- b. Pelaksanaan analisis, pengujian dan tindakan korektif pengujian standar instrumen kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
- c. Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
- d. Pelaksanaan layanan pengujian, kalibrasi dan penilaian kesesuaian standar instrumen kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
- e. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standar instrumen kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen kesehatan hewan dan masyarakat veteriner; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBPSI Veteriner.

12. Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian

Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penerapan standar instrumen pertanian dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran penerapan standar instrumen pertanian;
- b. Pelaksanaan koordinasi penerapan standar instrumen pertanian;

- c. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan produk instrumen pertanian terstandar spesifik lokasi;
- d. Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian regional dan nasional;
- e. Pelaksanaan pengendalian efektivitas penerapan standar instrumen pertanian;
- f. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi penerapan standar instrumen pertanian;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan standar instrumen pertanian;
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBPSIP

Selain 12 Eselon 2, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian juga didukung oleh 52 Eselon 3 yang tersebar di seluruh Indonesia. Bagan organisasi dapat dilihat sebagai berikut :



## VISI BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

Menjadi lembaga standardisasi terkemuka bertaraf internasional yang akuntabel, kolaboratif, berintegritas, berorientasi pelayanan prima mendukung pertanian.

Visi dimaksud merupakan sasaran umum kebijakan BSIP mendukung Visi Kementerian Pertanian.

## MISI BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

1. Meningkatkan standar mutu proses dan produk pertanian berkelanjutan serta berdaya saing
2. Meningkatkan pemanfaatan instrumen pertanian terstandar
3. Meningkatkan transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas

Tiga misi BSIP tersebut merupakan strategi utama untuk mewujudkan Visi BSIP.

## Pengukuran Capaian Kinerja BSIP Tahun 2024

Pada periode Renstra 2023-2024, BSIP memiliki tugas dan fungsi yaitu: perumusan, penerapan dan pemeliharaan serta harmonisasi standardisasi instrumen pertanian. Berdasarkan tugas dan fungsi yang baru ini mengemban pencapaian indikator kinerja baru yaitu persentase penerapan standar instrumen pertanian dan tingkat kemanfaatan produk instrumen pertanian terstandar. Berdasarkan Kep MemPAN-RB Nomor 182 tahun 2024 dan Kep Kepala BSIP Nomor 1036/KPTS/RC.020/H/10/2024 Terdapat dua indikator kinerja yang mengalami perubahan dengan indikator kinerja BSIP Tahun 2024 yaitu Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

Pengukuran tingkat capaian kinerja BSIP tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan capaiannya. Perhitungan IKU mengacu pada draf manual IKU BSIP seperti pada Lampiran 5. Berdasarkan perjanjian kinerja BSIP mempunyai 4 (empat) sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja utama (IKU) dengan target dan capaian untuk tahun 2024 tersaji pada Tabel 7.

Tabel 1. Capaian Kinerja Indikator Sasaran BSIP Tahun 2024

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program					Capaian Maks	Kriteria
		Uraian	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria		
SP1	Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian	Persentase penerapan standar instrumen pertanian	75,00	63,16	84,21	Berhasil	84,21	Berhasil
SP2	Meningkatnya Pemanfaatan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Tingkat Kemanfaatan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	50,00	41,50	83,00	Berhasil	83,00	Berhasil
SP3	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Presentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	78,41	98,40	125,49	Sangat Berhasil	120,00	Sangat Berhasil
SP4	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	90,82	95,53	105,19	Sangat Berhasil	105,19	Sangat Berhasil
Nilai Rata-rata					99,47	Berhasil	98,10	Berhasil



Pada tahun 2024, BSIP telah menetapkan 4 indikator kinerja sasaran, dimana realisasi capaian kinerja BSIP sampai akhir tahun 2024 menunjukkan bahwa sasaran telah dapat dicapai dengan rata-rata capaian sebesar **98,10%** artinya ukuran keberhasilan BSIP pada tahun 2024 masuk dalam kategori “Berhasil”.

Keberhasilan pencapaian sasaran disebabkan oleh faktor pengawalan kegiatan melalui monitoring dan evaluasi kegiatan mendukung tugas dan fungsi BSIP, mulai dari tahap awal hingga tahap akhir kegiatan. Kegiatan pengawalan ini dilegalkan dalam Keputusan Kepala BSIP Nomor: 71/Kpts/OT.050/H/01/2024 tentang Tim Pengelola Kinerja Organisasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2024 seperti terlihat pada Lampiran 6. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut juga didorong oleh dukungan manajemen fasilitasi standardisasi instrumen pertanian, baik aspek pelayanan keuangan, pengolahan data, perpustakaan, publikasi, dan sarana prasarana.

Monitoring dan evaluasi realisasi capaian PK secara *online* telah difasilitasi oleh Setjen Kementan dan mulai dilaksanakan sejak tahun 2015. Tahun 2024 sejak awal BSIP melakukan monev rutin terhadap perkembangan capaian PK dengan nama Rencana Aksi AKIP yang diakomodir juga melalui aplikasi e-SAKIP. Pelaksanaan monev dilakukan untuk memastikan tercapainya target setiap IKU yang tercantum di dalam PK dan target kegiatan per komponen. Metode yang dilakukan adalah dengan memantau capaian kinerja setiap bulan ataupun triwulanan beserta kendala yang dihadapi. Sehingga dengan dilakukannya pemantauan secara periodik dan apabila terdapat indikator yang targetnya terindikasi tidak tercapai, dapat diantisipasi sejak awal. Matriks renaksi AKIP bulanan dapat dilihat pada Lampiran 7, SOP Pengumpulan Data dapat dilihat pada Lampiran 8. Capaian kinerja BSIP dibandingkan dengan target Renstra disajikan pada Tabel 8.

Tabel 2. Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target BSIP 2023-2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target/ Realisasi	Tahun	
					2023	2024
1	Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian	1. Persentase penerapan standar instrumen pertanian	%	Target	75,00	75,00
				Realisasi	80,00	63,16
				Capaian	106,67	84,21
2	Meningkatnya Pemanfaatan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	2. Persentase pemanfaatan produk terstandar	%	Target	85,00	85,50
				Realisasi	71,78	43,18
				Capaian	119,63	83,00
3	Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan Prima	3. Nilai PMPRB BSIP	Nilai	Target	31,30	NA
				Realisasi	31,93	NA
				Capaian	102,00	NA
		4. Persentase Capaian Nilai Birokrasi yang menjadi tanggungjawab BSIP	Nilai	Target	NA	78,41
				Realisasi	NA	98,40
				Capaian	NA	125,49
	Terwujudnya pengelolaan anggaran	5. Nilai Kinerja Anggaran BSIP	Nilai	Target	80,00	NA
				Realisasi	92,81	NA
				Capaian	116,01	NA



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target/ Realisasi	Tahun	
					2023	2024
	Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	6. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BSIP	Nilai	Target	NA	90,82
				Realisasi	NA	95,53
				Capaian	NA	105,19

Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa capaian kinerja 2024 apabila dibandingkan dengan target Renstra pada tahun 2023 maupun 2024 rata-rata memenuhi target.

### Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi kinerja dilakukan terhadap hasil pengukuran kinerja masing-masing indikator kinerja yang terdapat dalam sasaran strategis BSIP tahun 2024. Hasil evaluasi kinerja dari masing-masing indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**SP1**

**Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian**

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran “Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian” diperoleh melalui indikator kinerja Persentase Penerapan Standar Instrumen Pertanian. Pencapaian indikator kinerja diukur dengan melakukan identifikasi terhadap jumlah SNI yang diterapkan dan atau diadopsi oleh pengguna. Selanjutnya data jumlah SNI yang diterapkan dibandingkan dengan jumlah SNI yang ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$IKSP\ 1 = \left( \frac{\sum \text{SNI yang diterapkan oleh pengguna}}{\sum \text{SNI yang ditetapkan oleh BSN dari hasil penyusunan BSIP}} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

- Jumlah SNI yang diterapkan oleh pengguna adalah SNI yang telah diterapkan dan atau adopsi oleh pengguna pada tahun t (2024)
- Jumlah SNI yang ditetapkan oleh BSN dari hasil penyusunan BSIP merupakan SNI yang proses RSNI3 nya telah dilakukan pada t-1 (2023) dan telah ditetapkan menjadi SNI oleh BSN

Pencapaian indikator kinerja sasaran program 1 telah berhasil dilaksanakan melalui kompilasi data jumlah SNI yang diterapkan oleh pengguna serta kompilasi data jumlah SNI yang ditetapkan oleh BSN dari hasil penyusunan BSIP. Hasil kompilasi ini kemudian dibandingkan sehingga menghasilkan IKU “Persentase Penerapan Standar Instrumen Pertanian”

SP1.IKU1	
Persentase Penerapan Standar Instrumen Pertanian	
Target 75%	Realisasi 63,16%
Capaian 84,21% (Berhasil)	

### Perhitungan Realisasi

$$\text{IKSP 1} = \left( \frac{24}{38} \right) \times 100\% = 63,16$$

### Perhitungan Capaian

$$\text{IKSP 1} = \left( \frac{63,16}{75} \right) \times 100 = 84,21$$

Capaian indikator kinerja sasaran 1 berupa persentase penerapan standar instrumen pertanian sebesar 6%, atau sebesar 80,70% dari target yang ditetapkan (berhasil). Perhitungan data pada Indikator Kinerja sasaran 1 berasal dari jumlah SNI yang ditetapkan oleh BSN dari hasil penyusunan BSIP di tahun 2023 (Lampiran 9) dan SNI yang diterapkan oleh pengguna selama tahun 2024. Data ini diambil dari data Unit Kerja lingkup BSIP.

Data SNI yang sudah diterapkan oleh pengguna sampai dengan bulan Desember 2024 sudah terealisasi sebesar 23 SNI sehingga realisasi untuk IKSP 1 sebesar 60,53% dari target 75% sehingga capaiannya sebesar 80,70%. 24 SNI terdiri dari 10 SNI BBPSI Mekanisasi, 5 SNI PSI PKH, 1 SNI BBPSI SDLP, 2 SNI PSI Hortikultura, 1 SNI PSI Perkebunan, 1 SNI PSI TP, 3 SNI BBPSI Pascapanen, dan 1 SNI BBPSI Biogen. Judul SNI dan lembaga yang menerapkan SNI dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 3. Judul SNI dan Lembaga yang Menerapkan SNI

No.	Tahun Terbit berdasarkan Nomor SNI	Judul SNI	Instansi yang Menerapkan SNI
1.	SNI 7416:2023	1) Traktor pertanian roda empat-syarat mutu dan metode uji	Laboratorium Uji Pascapanen Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
2.	SNI 738:2023	Traktor pertanian roda dua-syarat mutu dan metode uji	
3.	SNI 141:2023	Pompa air sentrifugal untuk irigasi-syarat mutu dan metode uji	
4.	SNI 8485:2023	Alat pemeliharaan tanaman - Sprayer gendong elektrik - Syarat mutu dan metode uji	
5.	SNI 9198:2023	Mesin pencetak pelet pakan ternak - Syarat mutu dan metode uji	
6.	SNI 9196:2023	Alat pengering tenaga surya aktif tipe langsung - Syarat mutu dan metode uji	
7.	SNI 7601:2023	Mesin pengupas kulit buah kopi basah - Syarat mutu dan metode uji	
8.	SNI 7653:2023	Mesin penepung tipe piringan - Syarat mutu dan metode uji	
9.	SNI 9197:2023	Mesin Pemeras Kelapa Parut - Syarat Mutu dan Metode Uji,	
10.	SNI 9199:2023	Pesawat Udara Nirawak (Drone) Pertanian - Penyemprotan - Syarat Mutu dan Metode Uji	

No.	Tahun Terbit berdasarkan Nomor SNI	Judul SNI	Instansi yang Menerapkan SNI
11.	SNI 8405-2:2023	Bibit ayam umur sehari/kuri-Bagian 2: Ayam KUB Janaka Agrinak	Benih dan Bibit Ternak (BIBITER) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian
12.	SNI 8405-3:2023	Bibit ayam umur sehari/kuri-Bagian 3: Ayam KUB Narayana Agrinak	
13.	SNI 9190:2023	Itik petelur komersial Muri Master	
14.	SNI 7352-5:2023	Bibit kambing-Bagian 5: Boerka Galaksi Agrinak	
15.	SNI 7651-11:2023	Bibit sapi potong-Bagian 11: Pogasi Agrinak	
16.	SNI 9214:2023	Produksi Benih Sumber Jeruk ( <i>Citrus spp</i> )	Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "CITRUS" Tlekung, Batu, Jawa Timur
17.	SNI 9213:2023	Produksi Benih Durian ( <i>Durio spp</i> ) secara Sambung Dini	Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) BPSI Tanaman Buah Tropika
18.	SNI 9224-1:2023	Metode pengukuran emisi gas metana (CH <sub>4</sub> ) dan dinitrogen Oksida (N <sub>2</sub> O) di lahan padi sawah-bagian 1	Rize PTE.LTD dan Institut Pertanian Bogor (IPB)
19.	SNI 6234:2024	Benih Kedelai	Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) BPSI Tanaman Aneka Kacang
20.	SNI 9229:2023	Pedoman budidaya kelapa secara monokultur	Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan
21.	SNI 9228:2023	Daun Kelor ( <i>Moringa oleifera</i> ) kering	CV. Tri Utami Jaya (Industri Kelor-Exportir Komoditas)
22.	SNI 01 3389:2023	Cabai Kering	PT. Agro Zee Annur
23.	SNI 3924:2023	Karkas dan Daging Ayam Ras	PT. Ciomas Adisatwa
24.	SNI 9177:2023	Pengelolaan bank gen lapang	Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintahan Kota Yogyakarta dan Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman, Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

Perbandingan capaian kinerja antar tahun untuk indikator kinerja Persentase Penerapan Standar Instrumen Pertanian mengalami penurunan dikarenakan saat ini karena sifat SNI yang bersifat *voluntary*. Perbandingan capaian kinerja indikator Persentase Penerapan Standar Instrumen Pertanian dengan target Renstra telah memenuhi target Renstra pada tahun 2024 namun demikian tidak memenuhi target ini sampai dengan akhir tahun Renstra dapat menjadi *feedback* bagi perencanaan ke depan, terutama dalam hal penetapan target agar dapat dilakukan dengan lebih tepat lagi.

Realisasi capaian IKU Persentase Penerapan Standar Instrumen Pertanian belum maksimal dikarenakan terdapat permasalahan-permasalahan antara lain:

- a. Refocusing anggaran pada program Strategis Kementan yang pemenuhannya dari Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas. Pembukaan blokir anggaran kegiatan perumusan standar pada bulan Juni TA 2024.
- b. Pembukaan blokir pagu penggunaan PNBP pada bulan Juni TA 2024 sehingga menghambat kegiatan pengujian dalam rangka penerapan SNI instrumen pertanian. Hal ini dikarenakan biaya operasional untuk pengujian didapatkan dari pagu PNBP yang dapat digunakan oleh satker dari tarif yang dikenakan untuk pengujian.
- c. Penerapan SNI instrumen pertanian bersifat sukarela sehingga pencapaian target penerapan SNI perlu pendekatan/proses multiyears.

Upaya penyelesaian dan koordinasi untuk penerap standar, juga dilaksanakan antara lain sinkronisasi pengembangan dan penerapan standar, identifikasi kebutuhan standar menjadi salah satu input dalam merumuskan rancangan standar dan kawalan dalam skema penilaian kesesuaiannya.

SP2

### **Meningkatnya Pemanfaatan Produk Instrumen Pertanian Terstandar**

Penyediaan benih/bibit berstandar harus dilakukan secara sistematis melalui gerakan standardisasi instrumen perbenihan. Sebagai bagian dari Kementerian Pertanian, BSIP mendapat mandat bidang standardisasi perlu melakukan penerapan standar pengelolaan perbenihan agar menghasilkan benih sesuai Standar Nasional. Guna mendukung program kementerian dan BSIP, maka terdapat Unit Pengelola Benih ter-Standar (UPBS) Lingkup BSIP. UPBS BSIP diharapkan berperan penting dalam proses persiapan, produksi, hingga pendistribusian benih/bibit, didukung sarana dan prasarana yang memadai serta tenaga terampil Guna memenuhi kebutuhan benih/bibit di daerah dan stakeholder dan program nasional. Hal ini dilakukan agar ketersediaan benih/bibit dapat memenuhi prinsip 7 tepat (jenis, varietas, mutu, jumlah, waktu, lokasi, dan harga)

Suatu rangkaian proses pengelolaan benih sumber tanaman/bibit ternak, terdiri dari: (1) Produksi perbanyakan benih/bibit; (2) panen; (3) pasca panen, dan proses pengemasan, pelabelan, dan pengangkutan untuk benih/bibit; (4) distribusi.

Pemanfaatan benih dilakukan melalui penjualan (PNBP) dan hibah. Pemanfaatan benih melalui penjualan berdasarkan permintaan *stakeholders* kepada balai/UPBS dan benih yang diminta tersebut dikenakan harga/biaya sesuai PP Tarif (PNBP). Sedangkan pemanfaatan melalui hibah, benih dibagikan secara gratis kepada petani penangkar/kelompok tani/gabungan kelompok tani berdasarkan permintaan dan ditetapkan oleh balai. Benih/bibit yang dimanfaatkan adalah benih/bibit yang dihasilkan/stock opname tahun 2023 (t-1) dan yang dihasilkan dari 2024 (t) yang dimanfaatkan pada tahun 2024. Untuk benih/bibit yang dimanfaatkan, tidak termasuk benih konsumsi dan kadaluarsa (produk sampingan benih). Benih/bibit yang dimanfaatkan oleh pengguna sudah tersertifikasi oleh lembaga yang berwenang.

SP2.IKU2	
Tingkat Kemanfaatan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	
Target 50%	Realisasi 41,50%
Capaian 83,00% (Berhasil)	

Realisasi capaian indikator kinerja SP2 pada tahun 2024 sebesar 41,50% dari target 50% atau persentase capaian sebesar 83,00% (berhasil). Data capaian tersebut berasal dari jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang dimanfaatkan dibandingkan dengan jumlah produk pertanian terstandar yang dihasilkan selama tahun 2024. Produk pertanian terstandar yang dihasilkan dan dimanfaatkan meliputi benih tanaman pangan yaitu: Padi dan Jagung.

Cara perhitungan indikator SP2 sebagai berikut:

$$\left( \frac{\sum \text{Produk pertanian terstandar yang dihasilkan pada } (t - 1) + t \text{ dan dimanfaatkan pada } t}{\sum \text{Produk pertanian terstandar yang dihasilkan pada } t - 1 + t} \right) \times 100\%$$

Tabel 4. Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan dan dimanfaatkan pada tahun 2024

No	IKSP/IKa	Realisasi
1	Jumlah produk tanaman pangan terstandar yang dimanfaatkan	388,00
	Jumlah produk tanaman pangan terstandar yang dihasilkan	934,93
<b>Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang dimanfaatkan</b>		<b>388,00</b>
<b>Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan</b>		<b>934,93</b>
<b>Tingkat Kemanfaatan Produk Instrumen Pertanian Terstandar (persen)</b>		<b>41,50</b>

Rekapitulasi Produksi dan Distribusi Benih dan Bibit lingkup BSIP TA. 2024 dapat dilihat pada Lampiran 10. Capaian kinerja antar tahun untuk indikator kinerja Tingkat Kemanfaatan Produk Instrumen Pertanian Terstandar tidak dapat dilakukan karena tahun 2024 terdapat refocusing anggaran untuk Program Startegis Kementerian Pertanian dan Kebijakan Nasional berupa blokir *Automatic Adjustment*. Berdasarkan refocusing tersebut maka produk terstandar yang dihasilkan hanya fokus pada Padi dan Jagung. Kendala lain yaitu adanya blokir pada anggaran produk terstandar yang memerlukan Surat Perintah Menteri yang menyatakan bahwa BSIP mendapatkan mandat untuk melaksanakan kegiatan perbenihan serta sinkronisasi produk terstandar dalam hal ini benih dengan Direktorat Teknis terkait sehingga tidak terdapat tumpang tindih anggaran pada level Kementerian Pertanian. Surat perintah Menteri Pertanian Nomor: B-57/HK.160/M/04/2024 mengamanatkan diantaranya bahwa Kepala BSIP untuk melaksanakan kegiatan perbanyak dan produksi benih sumber komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta bibit ternak yang berlaku sejak tanggal 3 April 2024, namun proses buka blokir baru dilaksanakan di bulan Juni 2024 sehingga kegiatan yang baru dilakukan adalah penanaman benih atau bibit. Proses produksi benih atau panen baru bisa dilaksanakan di akhir tahun karena penanaman benih bergantung

pada musim. Terlambatnya proses pertanaman tentunya berimbas pada pemanfaatan/distribusi produk tersebut mengingat sebelum pemanfaatan produk terdapat beberapa prosedur yang harus dilakukan hingga produk siap dimanfaatkan.

Perbandingan capaian kinerja indikator Tingkat Kemanfaatan Produk Instrumen Pertanian Terstandar dengan target Renstra tidak dapat dibandingkan. Hal ini dikarenakan adanya perubahan manual IKU, dimana pada tahun 2023 pembagi hanya produk terstandar yang dihasilkan pada tahun  $t$ , sedangkan pada tahun 2024 pembaginya adalah produk terstandar yang dihasilkan pada  $t-1 + t$ . Selain itu, pada tahun 2023 produk terstandar terdiri dari keseluruhan produk komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dan pada tahun 2024 hanya produk komoditas tanaman pangan berupa padi dan jagung.

Capaian kinerja pada IKU ini menghadapi beberapa kendala utama. Kendala yang dihadapi dalam menghasilkan dan pemanfaatan produk instrumen pertanian terstandar diantaranya yaitu keterlambatan operasional akibat pemblokiran anggaran, perubahan jadwal tanam akibat kondisi cuaca ekstrem, serta serangan hama dan penyakit yang berdampak pada hasil panen. Beberapa wilayah juga menghadapi keterbatasan pasokan air, baik akibat kekeringan maupun banjir, yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Selain itu, proses sertifikasi benih di beberapa daerah masih menghadapi kendala administratif yang memperlambat distribusi benih bersertifikat ke petani.

Sebagai langkah mengatasi permasalahan ini, berbagai strategi telah diterapkan, seperti percepatan pelaksanaan kegiatan setelah blokir anggaran dibuka, koordinasi dengan instansi terkait untuk penyesuaian jadwal tanam, serta penerapan metode irigasi seperti pompanisasi untuk mengatasi masalah air. Untuk mengurangi dampak serangan hama dan penyakit, dilakukan pengendalian menggunakan pestisida, penyemprotan fungisida, serta penerapan sistem pemantauan intensif. Selain itu, beberapa daerah telah melakukan kerja sama dengan mitra dan pelaku usaha dalam proses sertifikasi benih untuk memastikan ketersediaan benih berkualitas.

Upaya tindak lanjut yang telah diterapkan menunjukkan hasil yang beragam. Di beberapa wilayah, percepatan pelaksanaan kegiatan berhasil meningkatkan realisasi produksi, meskipun keterlambatan awal tetap berdampak pada target produksi tahunan. Sistem pengendalian hama dan pompanisasi terbukti efektif dalam menjaga pertumbuhan tanaman, meskipun serangan hama tikus dan penyakit tertentu masih sulit dikendalikan di beberapa lokasi. Proses sertifikasi benih mengalami perbaikan setelah adanya koordinasi lebih intensif dengan pihak terkait. Namun, diperlukan monitoring lebih lanjut untuk memastikan bahwa standar produksi tetap terpenuhi dan daya saing produk instrumen pertanian dapat terus ditingkatkan.

**SP3**

**Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima**



Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) diharapkan tidak hanya mempercepat penyelesaian isu hulu, yaitu masalah-masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi, namun juga isu hilir yaitu masalah-masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas Pembangunan Nasional. Atas dasar hal tersebut, *Road Map* RB 2020– 2024 setelah penajaman mengarahkan pelaksanaan RB ke dalam dua fokus yang disebut dengan “*double track*”, yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan RB Tematik. Perubahan *road map* RB 2020-2024, mengakibatkan cara pengukuran keberhasilan pelaksanaannya baik di lingkungan Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah.

Pengukuran/evaluasi pelaksanaan RB mulai tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 9 Tahun 2023 tentang evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan surat Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian Nomor: S-3956/KP.340/A2/12/2023 tanggal 29 Desember 2023 hal pengelolaan kinerja pegawai, terdapat perubahan cara penilaian kegiatan Reformasi Birokrasi pada tahun 2023. Berdasarkan peraturan tersebut, terdapat Evaluasi internal dan eksternal. Evaluasi internal adalah evaluasi yang dilakukan oleh Evaluator Internal reformasi birokrasi kementerian/lembaga dalam rangka memastikan perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan dengan baik dan mampu menjawab permasalahan terkait tata kelola pada masing-masing kementerian/lembaga.

Sebagai bentuk implementasi reformasi birokrasi di lingkup Kementerian Pertanian, maka seluruh unit kerja juga turut mendukung pelaksanaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan dan akan dievaluasi secara berkala melalui indikator yang mendukung reformasi birokrasi.

Nilai RB Kementerian Pertanian tahun 2024, memiliki target sebesar 84,76. Kemudian berdasarkan Surat Kepala Biro Perencanaan No B-1477/OT.240/A.1/08/2024, tanggal 23 Agustus 2024 tentang Penyesuaian Indikator RB dan NKA lingkup Kementan tahun 2024, dilakukan pendelegasian (*cascading*) ke seluruh Eselon I lingkup Kementan. Di level BSIP, Indikator Nilai RB tersebut diturunkan menjadi indikator “Persentase Capaian Nilai RB yang menjadi tanggung jawab Badan Standardisasi Instrumen Pertanian” dengan target sebesar 81,14% menjadi indikator” Persentase Capaian Nilai RB tanggung jawab Biro Perencanaan dengan target 78,41%. Capaian indikator tersebut diperoleh melalui hasil evaluasi/pengukuran oleh K/L Meso. Adapun rencana aksi yang disusun oleh BSIP sebagaimana pada Lampiran 7 serta renaksi aksi Reformasi Birokrasi Tematik 2024 pada Lampiran 11. Berdasarkan hasil evaluasi internal Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2024, capaian nilai Kementerian Pertanian untuk kegiatan Reformasi Birokrasi diperoleh nilai 98,43% sehingga jika dikonversi terhadap target nilai PMPRB BSIP diperoleh nilai 35,28 atau sebesar 125,53% dari target yang ditetapkan (sangat berhasil).

SP3.IKU3	
Presentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	
Target 78,41	Realisasi 98,43

**125,53% Capaian  
(Sangat Berhasil)**

Perhitungan target capaian didasarkan pada target capaian unsur pembentuk indikator capaian nilai RB BSIP diantaranya: 1) Tingkat Maturitas SPIP, 2) Nilai SAKIP, 3) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, 4) Capaian IKU, 5) Tindak lanjut Rekomendasi, 6) Indeks BerAkhlak, 7) Survei Penilaian Integritas, 8) Survei Kepuasan Masyarakat, dan 9) Realisasi Investasi. Berikut tabel perhitungan Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

Tabel 5. Perhitungan Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

No.	Unker/ Indikator	Range Nilai	2024			Capaian 2024	Bobot Capaian	% CNRB
			Nilai Target	Nilai Bobot	Bobot Capaian			
1	2	3	6	4	5			7
D	BSIP			45	35,284		34,73	78,41%
	1	Tingkat Maturitas SPIP (Biro KBMN)	1 - 5	3	2,4	3,428	2,74	Cascade
	2	Nilai SAKIP (Biro Ren)	0 - 100	76	3,04	83,14	3,33	Cascade
	3	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Biro KBMN)	0 - 100	89,5	1,79	96,12	1,92	Cascade
	4	Capaian IKU	0 - 100	95	5,054	81,2	4,73	Cascade
	5	Tindak Lanjut Rekomendasi	0 - 100	85	3,4	100	4,00	Cascade
	6	Indeks BerAkhlak (Biro OK)	0 - 100	80	3,2	68,8	2,75	Cascade
	7	Survei Penilaian Integritas (Itjen)	0 - 100	78	7,8	66,5	6,65	Cascade
	8	Survei Kepuasan Masyarakat (Biro OK)	0 - 100	90	7,2	90,13	7,21	Cascade
	10	Realisasi Investasi		2	1,4	0	1,40	

Capaian IKSP 3 ini diperoleh dengan cara menghitung total bobot capaian (kolom 9) dibandingkan total bobot capaian (kolom 5) X 100, sehingga diperoleh realisasi sebesar 98,43%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 78,41% diperoleh capaian sebesar 125,53%. IKSP 3 merupakan indikator kinerja yang baru ada di tahun 2024 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja SP3 Tahun 2023-2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target/ Realisasi	Tahun	
					2023	2024
3	Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan Prima	1. Nilai PMPRB BSIP	Nilai	Target	31,30	NA
				Realisasi	31,93	NA
				Capaian		NA
		2. Persentase Capaian Nilai Birokrasi yang menjadi tanggung jawab BSIP	%	Target	NA	78,41
				Realisasi	NA	98,43
				Capaian	NA	125,53

**SP4**

**Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima**

Pada tahun 2024 telah diimplementasikan pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAKL secara online mengacu pada aturan KMK Nomor 466 tahun 2023. Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari kegiatan atau program, dan hasil dari program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi pada Eselon 1 dilakukan dengan mengukur 6 variabel, yaitu: (1) capaian sasaran program, (2) penyerapan anggaran, (3) konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, (4) capaian output, (5) efisiensi dan (6) nilai rata-rata satker.

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Capaian ini berupa keluaran dari kegiatan atau program, dan hasil dari program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran terdiri atas:

SP4.IKU4	
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	
Target 90.82	Realisasi 96,21
105,93% Capaian % (Sangat Berhasil)	

Target indikator kinerja SP4 dicapai dengan nilai 96,21 (data Per 21 Januari 2025 pada Aplikasi OM-SPAN) dari target nilai 90,82, atau sebesar 105,93% (sangat berhasil). *Screenshoot* dari aplikasi OM-SPAN yang mencantumkan nilai kinerja dan variabel-variabel yang mendukungnya terlihat pada Gambar 3 berikut.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

## INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sangat Baik : 90,000

No	Kode ESI	Nama ESI	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Komposisi Bobot	Dispersi/ SEM (Pengerfak)	Nilai Akhir (Nilai Total/Komposisi Bobot)
				Revisi DPA	Deviasi Holoran di DPA	Penyisipan Anggaran	Beban Komitmen	Pengalokasian Tagihan	Pengalokasian LP dan TSP	Capaian Output				
1	01800	BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN	Nilai	90,30	89,22	96,88	89,73	106,00	97,10	96,57	90,29	100%	0,75	89,32
			Bobot	10	15	80	10	50	40	25				
			Nilai Akhir	9,03	13,38	19,40	8,97	16,00	9,71	24,89				
			Nilai Rata-rata	90,26		98,06				99,57				

Gambar 1. Screenshoot Nilai IKPA BSIP pada aplikasi OM-SPAN dengan link website :

<https://spanint.kemenkeu.go.id>

Berdasarkan gambar di atas hasil Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) masuk dalam kategori sangat baik. Adapun rincian nilai per komponen sebagai berikut:

- 1) Kualitas Perencanaan Anggaran dengan nilai sebesar 94,26%;
- 2) Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan nilai sebesar 96,95%;
- 3) Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran dengan nilai sebesar 99,57%;

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BSIP ini diturunkan ke UK/UPT lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Nilai IKPA UK/UPT di tahun 2024 berkisar dari nilai 88,92 – 100,00. Nilai ini dapat dikategorikan sangat berhasil. Rincian dari nilai kinerja anggaran lingkup BSIP dapat dilihat di Tabel 13 berikut ini.

Tabel 7. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BSIP TA 2024 per tanggal 24 Januari 2025

No	Uraian Satker	Nilai IKPA
1	Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar	100
2	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Kacang	100
3	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur	99,97
4	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Buah Tropika	99,93
5	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali	99,41
6	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Jeruk Dan Buah Subtropika	98,97
7	Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil	98,88
8	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Sayuran	98,86
9	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh	98,83
10	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis Dan Serat	98,71
11	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi	98,67
12	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat	98,57
13	Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura	98,55
14	Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian	98,40
15	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri Dan Penyegar	98,34
16	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Serealia	98,15

No	Uraian Satker	Nilai IKPA
17	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten	98,13
18	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau	97,92
19	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner	97,72
20	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua	97,57
21	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah	97,50
22	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan	97,45
23	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat	97,42
24	Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan	97,27
25	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo	97,24
26	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian	97,18
27	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur	97,01
28	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku	96,93
29	Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat Dan Hidrologi Pertanian	96,88
30	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	94,68
31	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah Dan Pupuk	97,4
32	Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan	96,69
33	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian DKI Jakarta	96,61
34	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat	96,61
35	Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan Dan Kesehatan Hewan	96,16
36	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara	96,13
37	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan	96,10
38	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Selatan	96,05
39	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Hias	95,84
40	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara	95,63
41	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi Dan Sumber Daya Genetik Pertanian	95,48
42	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bengkulu	95,29
43	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Timur	94,89
44	Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian	94,84
45	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian	94,82
46	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah	94,79
47	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat	94,38
48	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat Dan Aromatik	94,23
49	Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas Dan Aneka Ternak	93,81
50	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Palma	93,62
51	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara	93,49
52	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Lampung	93,42
53	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara	93,25
54	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat	92,70
55	Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Lahan Rawa	91,92
56	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah	91,85
57	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian DI Yogyakarta	91,55
58	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi	91,35

No	Uraian Satker	Nilai IKPA
59	Loka Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Umbi	91,03
60	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Bangka Belitung	91,01
61	Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian	90,86
62	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau	90,85
63	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat	90,80
64	Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	88,92

Capaian indikator kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 95,53 atau sebesar 105,19% dari target yang ditetapkan (sangat berhasil). Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Perubahan indikator kinerja yang semula Nilai Kinerja Anggaran pada tahun 2023 menjadi Indikator Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2024 didasarkan pada surat Kepala Biro Perencanaan Nomor B-1477/OT.240/A.1/08/2024 tanggal 13 Agustus 2024 hal Penyesuaian Indikator Reformasi Birokrasi (RB) dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Kementan tahun 2024.

Tabel 8. Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2023 dan Nilai IKPA Tahun 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target/ Realisasi	Tahun	
					2023	2024
3	Terwujudnya pengelolaan anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	3. Nilai Kinerja Anggaran BSIP	Nilai	Target	80,00	NA
				Realisasi	92,81	NA
				Capaian	116,01	NA
		4. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BSIP	Nilai	Target	NA	90,82
				Realisasi	NA	95,53
				Capaian	NA	105,19

Capaian indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BSIP Tahun 2024 sangat baik. Namun dalam pencapaiannya tetap menghadapi permasalahan-permasalahan. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu:

1. Perubahan indikator nilai kinerja anggaran menjadi indikator kinerja pelaksanaan anggaran pada bulan Agustus 2024
2. Sering terjadinya perubahan anggaran baik realokasi di internal BSIP, realokasi antar unit Eselon 1 lingkup Kementan maupun pengalihan anggaran ke BA BUN tanpa diikuti penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) Hal III DIPA sehingga mempengaruhi konsistensi pada komponen nilai kinerja anggaran
3. Perubahan operator aplikasi SMART maupun SAKTI yang terlalu sering sehingga mengakibatkan kendala dalam pengoperasian aplikasi tersebut. Perubahan tersebut tanpa diikuti dengan adanya TOT dari operator sebelumnya.
4. Refocusing anggaran untuk dialokasikan pada program Strategis Kementan, sehingga adanya pemblokiran pada kegiatan teknis Pembukaan blokir anggaran kegiatan perumusan standar pada bulan Juni TA 2024

Beberapa langkah-langkah yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut yaitu :



1. Meningkatkan koordinasi dengan pihak Kementerian Keuangan sebagai pengelola aplikasi Monev Kemenkeu maupun SAKTI agar permasalahan-permasalahan yang dihadapi satker dapat dicarikan solusi dengan cepat
2. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan seluruh satker baik triwulan maupun bulanan.
3. Melakukan sosialisasi ke seluruh satker terkait perubahan-perubahan pada peraturan maupun aplikasi yang mendukungnya
4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap capaian kinerja anggaran seluruh satker.

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan *Audited* TA 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

## **A.3. Basis Akuntansi**

Badan Standardisasi Instrumen Pertanian menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

## **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

## **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan *Audited* TA 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian adalah sebagai berikut:

**(1) Pendapatan - LRA**

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

**(2) Pendapatan - LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

**(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### (4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### (5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

##### a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:  
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;  
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;  
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

**b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

## (6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek  
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.  
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - b. Kewajiban Jangka Panjang  
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

## (7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Selama periode berjalan, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

## Rincian Estimasi Pendapatan

Akun	Uraian	Estimasi/Target Awal	Estimasi/Target Setelah Revisi	Naik/ (Turun)
	<b>Pendapatan</b>			
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	11.262.927.000	11.582.453.000	319.526.000
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	50.000.000	50.000.000	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	951.125.000	951.125.000	0
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	667.450.000	863.600.000	196.150.000
425252	Pendapatan Perizinan Pertanian	0	30.000.000	30.000.000
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	3.091.500.000	4.935.321.000	1.843.821.000
425429	Pendapatan Pengembangan Sumberdaya Manusia Lainnya	500.000	65.482.000	64.982.000
425431	Pendapatan Layanan Penelitian/Riset dan Pengembangan Iptek	14.500.000	14.500.000	0
425435	Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan	56.000.000	56.000.000	0
425436	Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual	100.000.000	2.582.033.000	2.482.033.000
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	638.800.000	0	-638.800.000
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	1.778.880.000	1.768.880.000	-10.000.000
<b>Jumlah Estimasi/Target Pendapatan</b>		<b>18.611.682.000</b>	<b>22.899.394.000</b>	<b>4.287.712.000</b>

**B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp40.148.871.686,00** atau mencapai 175,33% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp22.899.394.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan  
per Kelompok Akun Pendapatan



Akun	Uraian	Nilai Estimasi	Pendapatan Bruto	Pengemb alian	Pendapatan Netto	%
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha	13.447.178.000	21.764.326.824	0	21.764.326.824	161,85
4252	Pendapatan Administrasi dan Penegakkan Hukum	4.965.321.000	7.232.841.000	0	7.232.841.000	145,67
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	2.718.015.000	3.180.428.300	0	3.180.428.300	117,01
4256	Pendapatan Jasa Lainnya	1.768.880.000	2.314.317.227	0	2.314.317.227	130,84
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan	0	762.084.719	0	762.084.719	0,00
4258	Pendapatan Denda	0	48.691.059	0	48.691.059	0,00
4259	Pendapatan Lain-lain	0	4.846.182.557	0	4.846.182.557	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>22.899.394.000</b>	<b>40.148.871.686</b>	<b>0</b>	<b>40.148.871.686</b>	<b>175,33</b>

Capaian realisasi sebesar 175,33% dari target disebabkan:

1. Penyusunan target dilakukan pada bulan Januari 2023 (T-1) dimana belum ditetapkan SOTK UPT lingkup BSIP, sehingga Satker mengusulkan target dengan besaran yang tidak optimal karena belum adanya ketetapan tugas dan fungsi Satker.
2. Terbitnya surat persetujuan penggunaan dana PNBPN pada bulan Januari 2024 sehingga kegiatan-kegiatan yang menghasilkan PNBPN dapat dilaksanakan secara optimal, oleh sebab itu realisasi penerimaan PNBPN dapat meningkat dari tahun sebelumnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan  
per Akun Pendapatan

Akun	Uraian	Nilai Estimasi	Pendapatan Bruto	Pengemb alian	Pendapatan Netto	%
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	11.582.453.000	15.260.582.513	0	15.260.582.513	131,76
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	50.000.000	459.529.548	0	459.529.548	919,06
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	123.196.432	0	123.196.432	0,00
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	882.397.231	0	882.397.231	0,00
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	506.694.775	0	506.694.775	0,00
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	951.125.000	3.552.200.439	0	3.552.200.439	373,47
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	0	9.800.886	0	9.800.886	0,00
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	863.600.000	969.925.000	0	969.925.000	112,31
425252	Pendapatan Perizinan Pertanian	30.000.000	128.300.000	0	128.300.000	427,67
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	4.935.321.000	7.104.541.000	0	7.104.541.000	143,95
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	3.000.000	0	3.000.000	0,00
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	65.482.000	125.411.000	0	125.411.000	191,52
425431	Pendapatan Layanan Penelitian/Riset dan Pengembangan Iptek	14.500.000	0	0	0	0,00
425432	Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan	0	222.984.000	0	222.984.000	0,00
425435	Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan	56.000.000	0	0	0	0,00
425436	Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual	2.582.033.000	2.829.033.300	0	2.829.033.300	109,57
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	0	6.610.000	0	6.610.000	0,00
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	1.768.880.000	2.307.707.227	0	2.307.707.227	130,46
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	6.772.794	0	6.772.794	0,00
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	427.428.357	0	427.428.357	0,00
425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	0	180.639.737	0	180.639.737	0,00
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	0	147.243.831	0	147.243.831	0,00
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	48.691.059	0	48.691.059	0,00
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	3.500.458.276	0	3.500.458.276	0,00
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1.166.561.988	0	1.166.561.988	0,00
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	174.948.748	0	174.948.748	0,00
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	4.213.545	0	4.213.545	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>22.899.394.000</b>	<b>40.148.871.686</b>	<b>0</b>	<b>40.148.871.686</b>	<b>175,33</b>

Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Badan Standardisasi Instrumen Pertanian adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan  
per 30 September 2024 dan 30 September 2023

Laporan Keuangan Tahunan 2024 Audited

Akun	Uraian	Realisasi 2024 Bruto	Pengemb balian	Realisasi 2024 Netto	Realisasi 2023 Bruto	Pengemb balian	Realisasi 2023 Netto	Naik/ (Turun)
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	15.260.582.513	0	15.260.582.513	8.070.078.456	0	8.070.078.456	7.190.504.057
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	459.529.548	0	459.529.548	132.701.925	0	132.701.925	326.827.623
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	123.196.432	0	123.196.432	0	0	0	123.196.432
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	882.397.231	0	882.397.231	657.157.944	0	657.157.944	225.239.287
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	506.694.775	0	506.694.775	136.644.494	0	136.644.494	370.050.281
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3.552.200.439	0	3.552.200.439	3.363.259.303	0	3.363.259.303	188.941.136
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	9.800.886	0	9.800.886	0	0	0	9.800.886
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	969.925.000	0	969.925.000	843.085.000	0	843.085.000	126.840.000
425252	Pendapatan Perizinan Pertanian	128.300.000	0	128.300.000	0	0	0	128.300.000
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	7.104.541.000	0	7.104.541.000	3.722.452.400	0	3.722.452.400	3.382.088.600
425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000	- 2.500.000
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	125.411.000	0	125.411.000	45.152.000	0	45.152.000	80.259.000
425431	Pendapatan Layanan Penelitian/Riset dan Pengembangan Iptek	0	0	0	70.110.000	0	70.110.000	- 70.110.000
425432	Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan	222.984.000	0	222.984.000	107.288.000	0	107.288.000	115.696.000
425434	Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	0	0	0	3.756.727.000	0	3.756.727.000	- 3.756.727.000
425435	Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan	0	0	0	91.217.000	0	91.217.000	- 91.217.000
425436	Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual	2.829.033.300	0	2.829.033.300	1.667.985.123	0	1.667.985.123	1.161.048.177
425439	Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan	0	0	0	4.833.160	0	4.833.160	- 4.833.160
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	6.610.000	0	6.610.000	45.750.000	0	45.750.000	- 39.140.000
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	2.307.707.227	0	2.307.707.227	225.859.000	0	225.859.000	2.081.848.227
425761	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan	0	0	0	262.608	0	262.608	- 262.608
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	6.772.794	0	6.772.794	452.896	0	452.896	6.319.898
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	427.428.357	0	427.428.357	192.813.012	0	192.813.012	234.615.345
425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	180.639.737	0	180.639.737	63.461.000	0	63.461.000	117.178.737
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	147.243.831	0	147.243.831	625.738.895	0	625.738.895	- 478.495.064
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	48.691.059	0	48.691.059	102.387.539	0	102.387.539	- 53.696.480
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	3.500.458.276	0	3.500.458.276	600.675.277	3245000	597.430.277	2.903.027.999
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	1.166.561.988	0	1.166.561.988	182.867.188	0	182.867.188	983.694.800
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	174.948.748	0	174.948.748	39.296.506	0	39.296.506	135.652.242
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	4.213.545	0	4.213.545	38.775.709	0	38.775.709	- 34.562.164
	<b>Jumlah</b>	<b>40.148.871.686</b>	<b>0</b>	<b>40.148.871.686</b>	<b>24.789.531.435</b>	<b>3.245.000</b>	<b>24.786.286.435</b>	<b>15.362.585.251</b>

Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2024 mengalami peningkatan senilai Rp15.362.585.251,00 atau 61,98% dibandingkan per 31 Desember 2023. Secara umum Peningkatan PNPB disebabkan sebagai berikut:

1. Berlakunya regulasi tentang jenis dan tarif PNBP yang baru, yaitu PP 28, PMK 85 dan Permentan 36 Tahun 2023 yang mengakomodir jenis-jenis tarif PNBP baru terutama dari hasil pertanian.
2. Telah terbitnya persetujuan penggunaan dana PNBP pada Satker lingkup BSIP dari Menteri Keuangan.

Rincian realisasi PNBP periode 31 Desember 2024 per jenis penerimaan sebagaimana **terlampir** dalam Laporan PNBP MonSAKTI.

Dalam Tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat nilai yang signifikan pada akun antara lain:

1. Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya senilai Rp15.260.582.513,00, merupakan penerimaan yang berasal dari Perolehan hasil Pertanian, diantaranya penjualan benih tanaman, bibit hewan ternak dan hasil sampingnya (benih tanaman afkir, ternak afkir, telur, susu, daging, dll).
2. Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi Lainnya senilai Rp7.104.541.000,00, merupakan penerimaan yang bersumber dari layanan Jasa layanan pengujian dan analisis, diantaranya:
  - a. Pengujian Mutu Pestisida
  - b. Pengujian Pupuk
  - c. Pengujian Hama dan Penyakit
  - d. Pengujian Laboratorium Virologi
  - e. Analisis Pakan Ternak dan Produk Pangan
  - f. Diagnosis Penyakit Hewan
  - g. Pengujian Mutu Pakan
  - h. Jasa Analisis Laboratorium Kimia, Biologi, Fisika, dan Mineral
  - i. Pengujian Alat Mesin Pertanian
  - j. Pengujian Laboratorium Fisiologi Hasil
  - k. Pengujian Mutu Gabah dan Mutu Beras
  - l. Analisis Gas Rumah Kaca
  - m. Analisis Pangan Olahan dan Bahan Pertanian
  - n. Pengujian Laboratorium Biomolekuler/ Bioteknologi
  - o. Pengujian Bakteriologi
  - p. Pengujian Virologi
  - q. Pengujian Patologi
  - r. Pengujian Toksikologi dan Mikologi
  - s. Pengujian Parasitologi
  - t. Jasa layanan pengujian dan analisis bagi pelajar dan mahasiswa (relaksasi tarif)
3. Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual senilai Rp2.829.033.300,00 yang berasal dari pembayaran royalti dari lisensor pada Satker BISIP.
4. Pendapatan Jasa Lainnya senilai Rp2.307.707.227,00 yang berasal dari setoran biaya perjalanan dinas dalam rangka layanan pengujian yang dibebankan kepada pengguna jasa.

Selain itu untuk realisasi pendapatan per 31 Desember 2024, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian masih terdapat pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) senilai Rp6.772.794,00 pada 6 Satker antara lain sebagai berikut:

- a) BBPSI Biogen senilai (Rp3.940.799,00) merupakan jasa giro dari rekening hibah yang belum menerapkan TNP pada perlakuan jasa gironya. Saat pembukaan rekening ke KPPN Hibah sudah diajukan agar menerapkan TNP, namun Bank Mandiri tidak otomatis menerapkan TNP. Pihak KPPN Hibah menindaklanjuti ke Dit PKN untuk menerapkan TNP ke Bank Mandiri. Pada bulan November 2024 Jasa Giro sudah tidak muncul lagi di rekening hibah. Jasa Giro yang sudah diterima dari bulan Juli sampai dengan Oktober sudah disetorkan ke Kas Negara (NTPN: 1EA6B7QLUPNTEOSH).
- b) BBPSI SDLP senilai (Rp975.332,00) merupakan rekening hibah yang belum menerapkan TNP pada perlakuan jasa gironya. Saat pembukaan kami sudah mengajukan agar rekeningnya menerapkan TNP, sudah mengajukan permohonan perubahan.
- c) BPSI Lingkungan senilai (Rp40.779,00) merupakan jasa giro dikarenakan adanya kesalahan dalam pembutan rekening RPL, yang seharusnya rekening rpl hibah luar negeri tanpa adanya jasa giro (jenis Giro Tres.NotP), namun dari pihak bank ada kesalahan pemilihan jenis rekening (GiroRek Pemerintah), sehingga pada bulan Februari Rekening RLP memperoleh jasa giro, dan disetorkan ke kas negara pada 25 Maret 2024 (NTPN:19EA47QLUOTMN4BE) setelah ditindak lanjuti jasa giro tersebut sudah tidak muncul kembali.
- d) BPSI Tan. Serealia senilai (Rp18.937,00) merupakan jasa pendapatan jasa giro yang disebabkan karena kurang telitinya dari pihak Bank pada saat pembukaan rekening kerjasama pemerintah dengan tidak memperhatikan bahwa rekening tersebut adalah rekening pemerintah (RPL). Persoalan ini sudah disurati ke pihak bank dan sejak Juli sudah tidak ada bunga lagi di rekening koran.
- e) Sekretariat BSIP senilai (Rp1.630.963,00) adalah jasa giro Pengembalian Bunga Bank Dana Hibah Rekening RPL 139 KS BSIP Untuk Kegiatan Analis. Rekening tersebut sudah ditutup.
- f) BPSIP Kalimantan Tengah senilai (Rp2.877,00) adalah jasa giro berasal dari bunga bank dan sudah disetorkan kembali ke Kas Negara dengan NTPN CBED048VVEH7JN24 pada tanggal 27 Februari 2024. Persoalan ini sudah di konfirmasi ke Bank dan sudah tidak ada bunga bank bulan berikutnya.
- g) LPSI Tanaman Umbi senilai (Rp163.087,00) adalah jasa giro berasal dari bunga bank rekening RPL

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal tidak terdapat koreksi, sehingga saldo Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Unaudited dan Audited per 31 Desember 2024 adalah tetap

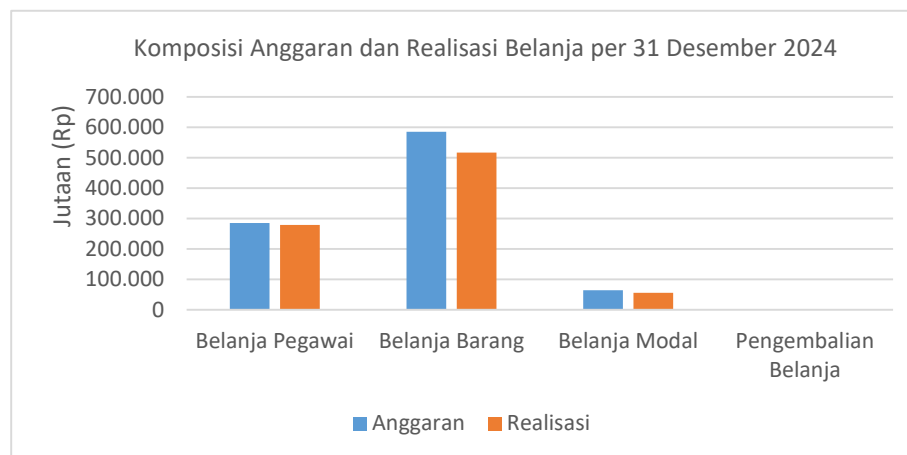
## **B.2 BELANJA**

Realisasi Belanja pada TA 2024 adalah sebesar Rp849.745.515.714,00 atau 91,06% dari anggaran belanja sebesar Rp933.853.861.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per  
31 Desember 2024

Uraian	Per 31 Desember 2024				%
	Anggaran (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	
Belanja Pegawai	284.683.136.000	278.841.208.072	474.771.127	278.366.436.945	97,95
Belanja Barang	585.049.247.000	516.005.366.650	125.799.886	515.879.566.764	88,20
Belanja Modal	64.121.478.000	55.499.512.005	0	55.499.512.005	86,55
<b>Total Belanja</b>	<b>933.853.861.000</b>	<b>850.346.086.727</b>	<b>600.571.013</b>	<b>849.745.515.714</b>	<b>91,06</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Gambar berikut:



Sedangkan realisasi belanja kotor (*bruto*) berdasarkan program per 31 Desember 2024 ditunjukkan pada Tabel berikut:

Uraian Program Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	Anggaran (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)
Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	152.270.437.000	147.378.693.086	17.302.000	147.361.391.086
Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	25.000.000.000	21.957.961.704	-	21.957.961.704
Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian	756.583.424.000	681.009.431.937	583.269.013	680.426.162.924
<b>Jumlah</b>	<b>933.853.861.000</b>	<b>850.346.086.727</b>	<b>600.571.013</b>	<b>849.745.515.714</b>

Dibandingkan dengan Tahun 2023, Realisasi Belanja TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 1,45% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan pelaksanaan kegiatan pada TA 2024 telah berjalan dari awal tahun anggaran (Januari). Sedangkan pada awal TA 2023 masih proses transisi dari Balitbangtan ke

BSIP sehingga anggaran di luar kegiatan rutin masih terblokir sampai bulan April 2023. Hal ini menjadikan realisasi tahun ini lebih besar dari tahun lalu.

Perbandingan Realisasi Belanja  
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

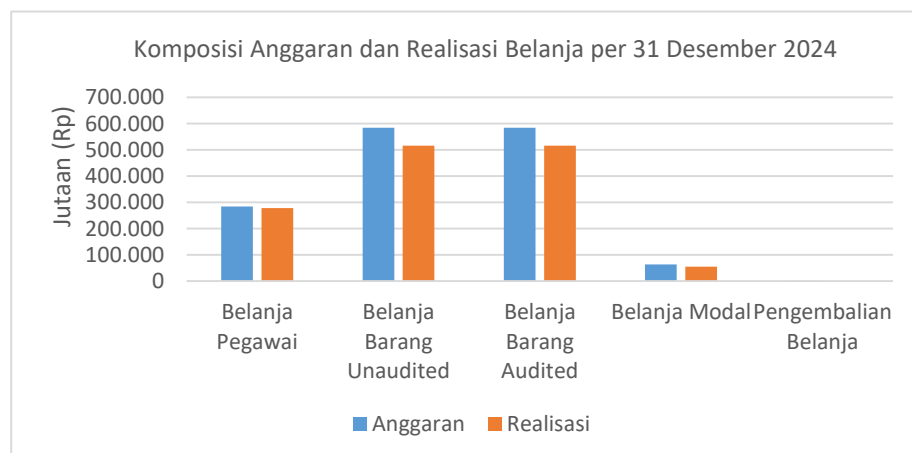
Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 31 Desember 2024	Anggaran 2023	Realisasi 31 Desember 2023	.%
	(Rp)		(Rp)		
Belanja Pegawai	284.683.136.000	278.366.436.945	271.940.635.000	268.858.621.785	3,54
Belanja Barang	585.049.247.000	515.879.566.764	561.745.647.000	529.955.687.174	-2,66
Belanja Modal	64.121.478.000	55.499.512.005	39.171.522.000	38.822.652.804	42,96
<b>Total Belanja</b>	<b>933.853.861.000</b>	<b>849.745.515.714</b>	<b>872.857.804.000</b>	<b>837.636.961.763</b>	<b>1,45</b>

Setelah Audit BPK RI dan koreksi internal terdapat koreksi pencatatan bertambah senilai **Rp273.602.933,00** sehingga nilai Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2024 *Audited* yakni sebesar **Rp516.153.169.697,00**. yang disebabkan adanya pengesahan hibah langsung pada satker BPSI Tanaman Sayuran

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per  
31 Desember 2024

Per 31 Desember 2024						
Anggaran (Rp)	Realisasi Bruto Unaudited (Rp)	Realisasi Bruto Audited (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto Unaudited (Rp)	Realisasi Netto Audited (Rp)	%
284.683.136.000	278.841.208.072	278.841.208.072	474.771.127	278.366.436.945	278.366.436.945	97,95
585.049.247.000	516.005.366.650	516.278.969.583	125.799.886	515.879.566.764	516.153.169.697	88,20
64.121.478.000	55.499.512.005	55.499.512.005	0	55.499.512.005	55.499.512.005	86,55
<b>933.853.861.000</b>	<b>850.346.086.727</b>	<b>850.619.689.660</b>	<b>600.571.013</b>	<b>849.745.515.714</b>	<b>850.019.118.647</b>	<b>91,06</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Gambar berikut:



Sedangkan realisasi belanja kotor (*bruto*) berdasarkan program per 31 Desember 2024 ditunjukkan pada Tabel berikut:



Uraian Program Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	Anggaran	Realisasi Bruto Unaudited	Realisasi Bruto Audited	Pengembalian
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	152.270.437.000	147.378.693.086	147.652.296.019	17.302.000
Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	25.000.000.000	21.957.961.704	21.957.961.704	-
Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian	756.583.424.000	681.009.431.937	681.009.431.937	583.269.013
<b>Jumlah</b>	<b>933.853.861.000</b>	<b>850.346.086.727</b>	<b>850.619.689.660</b>	<b>600.571.013</b>

Dibandingkan dengan Tahun 2023, Realisasi Belanja TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 1,45% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan pelaksanaan kegiatan pada TA 2024 telah berjalan dari awal tahun anggaran (Januari). Sedangkan pada awal TA 2023 masih proses transisi dari Balitbangtan ke BSIP sehingga anggaran di luar kegiatan rutin masih terblokir sampai bulan April 2023. Hal ini menjadikan realisasi tahun ini lebih besar dari tahun lalu.

Perbandingan Realisasi Belanja  
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2024	Anggaran 2023	Realisasi 31 Desember 2023
	(Rp)	Unaudited	Audited	(Rp)	
Belanja Pegawai	284.683.136.000	278.366.436.945	278.366.436.945	271.940.635.000	268.858.621.785
Belanja Barang	585.049.247.000	515.879.566.764	516.153.169.697	561.745.647.000	529.955.687.174
Belanja Modal	64.121.478.000	55.499.512.005	55.499.512.005	39.171.522.000	38.822.652.804
<b>Total Belanja</b>	<b>933.853.861.000</b>	<b>849.745.515.714</b>	<b>850.019.118.647</b>	<b>872.857.804.000</b>	<b>837.636.961.763</b>

### B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp278.366.436.945,00 dan Rp268.858.621.785,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja pegawai TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 3,54% dari TA 2023. Hal ini disebabkan oleh adanya penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja lingkup BSIP sebanyak 83 pegawai yang tersebar di berbagai satker pusat maupun daerah. Selain itu, terdapat pegawai mutasi dari eks Badan Karantina Pertanian sebanyak 72 pegawai ke satker lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

Perbandingan Belanja Pegawai  
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian Belanja Pegawai	Realisasi 31 Desember 2024 (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	Realisasi 31 Desember 2023 (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	268.021.858.006	470.778.030	267.551.079.976	263.883.241.029	486.143.768	263.397.097.261	1,58
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	5.081.024.066	3.993.097	5.077.030.969	798.863.174	-	798.863.174	100,00
Belanja Lembur	5.738.326.000	-	5.738.326.000	4.664.612.650	1.951.300	4.662.661.350	23,07
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>278.841.208.072</b>	<b>474.771.127</b>	<b>278.366.436.945</b>	<b>269.346.716.853</b>	<b>488.095.068</b>	<b>268.858.621.785</b>	<b>3,54</b>

Sampai dengan 31 Desember 2024 jumlah pegawai Badan Standardisasi Instrumen Pertanian adalah 3555 pegawai yang terdiri dari 122 orang pegawai struktural dari eselon II dsampai dengan eselon IV; 1.785 orang pejabat fungsional tertentu yang terdiri dari penyuluh, perekayasa, Analis Standardisasi dan fungsional Tertentu lainnya; 1.648 orang fungsional umum.

Jumlah Pegawai Badan Standardisasi Instrumen Pertanian  
per 31 Desember 2024

Eselon I:	Struktural	Fungsional Khusus	Fungsional Umum	Jumlah
Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	122	1785	1648	3555

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal tidak terdapat koreksi, sehingga saldo Belanja Pegawai Unaudited dan Audited per 31 Desember 2024 adalah tetap

#### B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp515.879.566.764,00 dan Rp529.955.687.174,00. Realisasi belanja barang TA 2024 mengalami penurunan dari TA 2023 meski anggaran TA 2024 mengalami kenaikan dari Rp561.745.647.000,00 menjadi Rp585.049.247.000,00. Hal tersebut disebabkan oleh adanya blokir *Automatic Adjustment* pada Revisi DIPA ke-2 tanggal 22 Januari 2024.

Perbandingan Belanja Barang  
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian Belanja Barang	Realisasi 31 Desember 2024	Pengembalian	Realisasi Netto	Realisasi 31 Desember 2023	Pengembalian	Realisasi Netto	Naik (Turun) %
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Belanja Barang Operasional	128.540.833.061	1.121.500	128.539.711.561	117.867.126.372	25.001.697	117.842.124.675	9,06
Belanja Barang Non Operasional	84.209.717.470	100.000	84.209.617.470	91.873.950.984	4.923.085	91.869.027.899	(8,34)
Belanja Kontribusi dan Kompensasi	746.304.000	0	746.304.000	661.512.000	0	661.512.000	12,82
Belanja Barang Persediaan	41.300.840.211	0	41.300.840.211	48.395.250.765	0	48.395.250.765	(14,66)
Belanja Jasa	64.210.572.292	63.013.188	64.147.559.104	78.264.907.532	80.199.853	78.184.707.679	(17,96)
Belanja Pemeliharaan	108.980.469.441	0	108.980.469.441	75.247.426.456	122.298.446	75.125.128.010	44,83
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	87.071.302.084	54.761.970	87.016.540.114	116.403.294.199	41.078.546	116.362.215.653	(25,20)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	945.328.091	6.803.228	938.524.863	1.515.720.493	0	1.515.720.493	(37,63)
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>516.005.366.650</b>	<b>125.799.886</b>	<b>515.879.566.764</b>	<b>530.229.188.801</b>	<b>273.501.627</b>	<b>529.955.687.174</b>	<b>(2,68)</b>

Dalam Tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat nilai yang signifikan pada akun antara lain:

1. Belanja Barang Operasional senilai Rp128.539.711.561,00

Belanja Barang Operasional tersebut digunakan untuk mencatat pembiayaan keperluan sehari hari perkantoran yang secara langsung menunjang kegiatan operasional Badan Standardisasi Instrumen Pertanian namun tidak menghasilkan barang persediaan yang terdiri antara lain:

- Honor Pelaksana Teknis, Satpam, Cleaning Service, Pengadministrasi Umum; pengiriman surat, paket dan dokumen lainnya; uang lembur pelaksana kegiatan/pegawai non asn; uang lembur pelaksana kegiatan satpam, cleaning service, pengemudi, pramubakti; uang makan lembur pembantu pelaksana kegiatan/pegawai non ASN; uang makan lembur pelaksana teknis, satpam, cleaning service, pengemudi dan pramubakti; barang cetakan dan keperluan rumah tangga kantor; operasional satpam/pengamanan; langganan interne dan zoom (video conference)
- Langganan Surat kabar dan majalah, Pencetakan, penerbitan, penggandaan, laminasi, foto copy, Langganan Internet dan Bonet, Biaya komunikasi/kuota internet, Biaya keanggotaan publikasi internasional, Keperluan Sehari-hari Perkantoran, Pembelian Materai, Bahan Pendukung keperluan perkantoran habis pakai, Jamuan/delegasi/misi/tamu
- Pembelian Bahan Pengamanan dan Perawatan Kebun, Pakaian Dinas Pegawai/Perawat (D.K.I. Jakarta), Blanko cetakan/server/langganan surat kabar/internet, keperluan petugas; Biaya tenaga kontraktual; Keperluan operasional pengembangan Web/LAN;

2. Belanja Pemeliharaan senilai Rp108.980.469.441,00

Belanja Pemeliharaan digunakan untuk pemeliharaan/perbaikan yang dilaksanakan sesuai dengan Standar Biaya Umum dalam rangka mempertahankan Aset Tetap dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sampai

dengan 2 % serta pengeluaran untuk pemeliharaan/perawatan agar berada dalam kondisi normal meliputi:

- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan: Pemeliharaan gedung, Laboratorium dan Cleaning Service (Out Sourcing); Pemeliharaan Halaman Gedung/Bangunan Kantor (Jawa Barat); Pemeliharaan padang rumput pakan ternak; Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Tidak Bertingkat (Jawa Barat); Pemeliharaan dan perbaikan Landscape External
  - Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Permanen, Saluran Sekunder Pembuangan, Halaman Gedung Kantor, Bangunan Terbuka Lainnya, Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen, Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen, Bangunan Tempat Parkir, Bangunan Penerangan Jalan, Bangunan Penerangan Taman, Jalan Khusus Pejalan Kaki (Trotoar), Jalan Lainnya
  - Pemeliharaan peralatan Lab Zoonosis dan BSL3; Eksploitasi incenerator; Kalibrasi Alat Laboratorium; Pemeliharaan Printer; Pemeliharaan Alat Laboratorium; Pemeliharaan peralatan sistem security elektronik; Biaya pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 (Jawa Barat); Biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan roda 4 (Esselon II); Biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan roda 3; Biaya Pemeliharaan Operasional kendaraan Roda 2 (Jawa Barat); Pemeliharaan Personal Computer/Notebook; Alat Kantor dan Rumah Tangga; Pemeliharaan AC Split; Pemeliharaan Tanki/bak air; Pemeliharaan Tabung Pemadam api; Pemeliharaan Genset lebih kecil dari 50 KVA; Pemeliharaan Genset 250 KVA; Pemeliharaan Genset 275 KVA
3. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri senilai Rp87.016.540.114,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri digunakan untuk mencatat perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat Negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap meliputi:
- Perjalanan Dinas dalam rangka pelatihan dan pelantikan ASN, pemberkasan, monitoring, konsultasi, dan koordinasi urusan kepegawaian, Dalam rangka pelaksanaan kegiatan kelembagaan, akreditasi, dan penugasan khusus non kelti
  - Perjalanan Dinas dalam rangka pelaksanaan tusi, koordinasi, konsultasi, dan sosialisasi, Dalam rangka pelaksanaan Bimtek Petani, Dalam rangka pelaksanaan tusi, koordinasi, sosialisasi, dan peninjauan lapang, Dalam rangka pelaksanaan kegiatan SPI dan, penyelesaian TLHA, Dalam rangka pelaksanaan tusi keuangan
  - Perjalanan Dinas dalam rangka Keperluan konsultasi/pertemuan/RAKER/penyampaian laporan keuangan/RAPIM/seminar; Keperluan pertemuan dalam rangka pengembangan Web/LAN; Keperluan konsultasi/survey lapang dalam kegiatan panitia pengadaan barang dan jasa; Keperluan pertemuan laboratorium untuk pemeliharaan gedung khusus; Perjalanan dalam rangka konsultasi/ pertemuan/ survey lapang/ koordinasi/ studi banding; Keperluan konsultasi/pertemuan/akreditasi Lab./konsinyasi; Keperluan konsultasi/pertemuan, pengumpulan data, pelaporan pelaksanaan

kegiatan di Jawa dan luar Jawa; Keperluan konsultasi/pertemuan, pengumpulan data, pelaporan pelaksanaan kegiatan di Jawa dan luar Jawa

4. Belanja Barang Non Operasional senilai Rp84.209.617.470,00

Belanja Barang Non Operasional digunakan untuk mencatat pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan yang habis dipakai dan diperlakukan dalam pelaksanaan kegiatan non operasional seperti pameran, seminar, sosialisasi rapat, diseminasi yang terkait langsung dengan output suatu kegiatan dan tidak menghasilkan barang persediaan meliputi:

- Fotocopy, Penjilidan, Penggandaan Laporan, Konsumsi Rapat Persiapan, Koordinasi, Penyusunan Bahan dan Finalisasi Laporan
- Bahan Pengecatan Gedung Administrasi, Bahan Pengecatan Kandang UPBS, Bahan Perbaikan Ground Listrik/Penangkal Petir, Bahan Perbaikan Toilet dan Akses Disabilitas, Bahan Perbaikan Atap Gedung/ Pagar Lingkungan Kantor, Bahan Perbaikan Pos Security, Bahan Perbaikan Kandang Domba, Perlengkapan Habis Pakai, Gasolek untuk pemanas DOC (2.000 ekor DOC, Perlengkapan dan Peralatan Kandang, Bahan perlengkapan kandang/perbaikankandang/sarana penunjang produksi bibit, Keranjang buah untuk pengiriman ternak, Perlengkapan Kandang/Lapang/Lab/Bahan Habis Pakai, Bahan perlengkapan kandang/perbaikan kandang/sarana penunjang produksi bibit, Material perlengkapan kandang/ Perbaikan kandang/ sarana penunjang produksi/ Kantor

Setelah audit BPK RI dan Koreksi Internal terdapat koreksi pencatatan bertambah senilai **Rp273.602.933,00** sehingga realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2024 *Audited* adalah **Rp516.153.169.697,00**. Koreksi transaksi tersebut terdapat pada satuan kerja BPSI Tanaman Sayuran yang disebabkan telah terbitnya Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) Nomor 00214T/237217/2024 dengan proyek *The Establishmnet and Sustainable Development of the Biopellet Industry in Indonesia* dari Onions New Zealand.

Perbandingan Belanja Barang  
per 31 Desember 2024 *Audited* dan 31 Desember 2023

Uraian Belanja Barang	Realisasi 31 Desember 2024	Pengembalian	Realisasi Netto	Realisasi 31 Desember 2023	Pengembalian	Realisasi Netto	Naik (Turun) %
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Belanja Barang Operasional	128.540.833.061	1.121.500	128.539.711.561	117.867.126.372	25.001.697	117.842.124.675	9,06
Belanja Barang Non Operasional	84.335.717.470	100.000	84.335.617.470	91.873.950.984	4.923.085	91.869.027.899	(8,20)
Belanja Kontribusi dan Kompensasi	746.304.000	0	746.304.000	661.512.000	0	661.512.000	12,82
Belanja Barang Persediaan	41.338.233.211	0	41.338.233.211	48.395.250.765	0	48.395.250.765	(14,58)
Belanja Jasa	64.229.072.292	63.013.188	64.166.059.104	78.264.907.532	80.199.853	78.184.707.679	(17,93)
Belanja Pemeliharaan	108.980.469.441	0	108.980.469.441	75.247.426.456	122.298.446	75.125.128.010	44,83
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	87.163.012.017	54.761.970	87.108.250.047	116.403.294.199	41.078.546	116.362.215.653	(25,12)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	945.328.091	6.803.228	938.524.863	1.515.720.493	0	1.515.720.493	(37,63)
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>516.278.969.583</b>	<b>125.799.886</b>	<b>516.153.169.697</b>	<b>530.229.188.801</b>	<b>273.501.627</b>	<b>529.955.687.174</b>	<b>(2,63)</b>

## B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp55.499.512.005,00 dan Rp38.822.652.804,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 42,96% dibandingkan TA 2023. Hal ini disebabkan oleh kenaikan pagu anggaran belanja modal, sebelumnya pada TA 2023 senilai Rp39.171.522.000,00 pada TA 2024 menjadi Rp64.121.478.000,00

### Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Pengembalian	Realisasi Netto	Realisasi 31 Desember 2023	Pengembalian	Realisasi Netto	Naik (Turun) (Rp)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.316.782.803	0	28.316.782.803	13.547.620.497	0	13.547.620.497	100,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.707.904.544	0	5.707.904.544	24.789.624.227	0	24.789.624.227	-76,97
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	21.474.824.658	0	21.474.824.658	485.408.080	0	485.408.080	100,00
Belanja Modal Jalan dan Jembatan							
<b>Jumlah</b>	<b>55.499.512.005</b>	<b>0</b>	<b>55.499.512.005</b>	<b>38.822.652.804</b>	<b>0</b>	<b>38.822.652.804</b>	<b>42,96</b>

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal tidak terdapat koreksi, sehingga saldo Belanja Modal Unaudited dan Audited per 31 Desember 2024 adalah tetap

### B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp28.316.782.803,00 dan Rp13.547.620.497,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024

mengalami kenaikan dibandingkan TA 2023. Hal ini disebabkan oleh kenaikan pagu anggaran belanja modal peralatan dan mesin, sebelumnya pada TA 2023 senilai Rp13.597.382.000,00 pada TA 2024 menjadi Rp30.022.626.000,00.

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin  
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024 (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	Realisasi 31 Desember 2023 (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	Naik (Turun) (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.176.635.899	0	28.176.635.899	13.096.948.056	0	13.096.948.056	115,14
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	0	0	0	79.535.000	0	79.535.000	-100,00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	65.400.000	0	65.400.000	0	0	0	100,00
Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	74.746.904	0	74.746.904	48.737.441	0	48.737.441	53,37
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	0	0	322.400.000	0	322.400.000	-100,00
<b>Jumlah</b>	<b>28.316.782.803</b>	<b>0</b>	<b>28.316.782.803</b>	<b>13.547.620.497</b>	<b>0</b>	<b>13.547.620.497</b>	<b>109,02</b>

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal tidak terdapat koreksi, sehingga saldo Belanja Modal Peralatan dan Mesin Unaudited dan Audited per 31 Desember 2024 adalah tetap

## B.5.2. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5.707.904.544,00 dan Rp24.789.624.227,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 mengalami penurunan dibandingkan TA 2023 yang disebabkan oleh adanya blokir *Automatic Adjustment* pada Revisi DIPA ke-2 tanggal 22 Januari 2024.

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan  
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023



Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Pengembalian	Realisasi Netto	Realisasi 31 Desember 2023	Pengembalian	Realisasi Netto	Naik (Turun)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1753.831.895	0	1753.831.895	9.398.384.366	0	9.398.384.366	-81,34
Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan	0	0	0	7.416.950	0	7.416.950	100,00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis	0	0	0	13.910.000	0	13.910.000	-100,00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	22.534.000	0	22.534.000	888.394.045	0	888.394.045	-97,46
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	0	0	0	36.733.000	0	36.733.000	-100,00
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	3.931.538.649	0	3.931.538.649	14.444.785.866	0	14.444.785.866	-72,78
<b>Jumlah</b>	<b>5.707.904.544</b>	<b>0</b>	<b>5.707.904.544</b>	<b>24.789.624.227</b>	<b>0</b>	<b>24.789.624.227</b>	<b>-76,97</b>

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal tidak terdapat koreksi, sehingga saldo Belanja Modal Gedung dan Bangunan Unaudited dan Audited per 31 Desember 2024 adalah tetap

### B.5.3. BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp21.474.824.658,00 dan Rp485.408.080,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 mengalami kenaikan dibandingkan TA 2023. Hal ini disebabkan oleh kenaikan anggaran belanja modal jalan, irigasi dan jaringan (JIJ) di TA 2023 adalah Rp485.953.000,00 menjadi Rp22.648.644.000,00 di TA 2024.

#### Perbandingan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Pengembalian	Realisasi Netto	Realisasi 31 Desember 2023	Pengembalian	Realisasi Netto	Naik (Turun)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Belanja Modal Jalan dan Jembatan			0	199.701.720		199.701.720	-100,00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan			0	38.790.060		38.790.060	-100,00
Belanja Modal Irigasi	19.644.973.058		19.644.973.058			0	#DIV/0!
Belanja Modal Jaringan	1.829.851.600		1.829.851.600			0	#DIV/0!
Belanja Penambahan Nilai Jaringan			0	246.916.300		246.916.300	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>21.474.824.658</b>	<b>0</b>	<b>21.474.824.658</b>	<b>485.408.080</b>	<b>0</b>	<b>485.408.080</b>	<b>4324,08</b>

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal tidak terdapat koreksi, sehingga saldo Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Unaudited dan Audited per 31 Desember 2024 adalah tetap

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp21.575.472.988,00 dan Rp16.258.683.419,00. Saldo Aset per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp789.144.160.099,00 atau 1,75%, apabila dibandingkan dengan saldo Aset per 31 Desember 2023. Rincian saldo Aset per 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.

Rincian Saldo Aset Per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024 (Unaudited)	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Aset Lancar	21.575.472.988	21.352.456.055	16.258.683.419
Aset Tetap	44.114.342.833.216	44.112.004.248.730	44.716.004.742.870
Properti Investasi	13.175.128.592	17.652.810.170	208.431.034.487
Piutang Jangka Panjang	1.655.227.353	1.655.227.353	1.083.600.647
Aset Lainnya	99.765.196.247	99.765.196.247	97.879.957.172
<b>Jumlah</b>	<b>44.250.513.858.396</b>	<b>44.252.429.938.555</b>	<b>45.039.658.018.595</b>

Setelah audit BPK dan koreksi internal terdapat koreksi pencatatan terhadap saldo aset lancar dengan mutasi tambah senilai Rp23.892.319,00 dan mutasi kurang senilai Rp246.909.252,00 sehingga nilai Aset Lancar per 31 Desember 2024 yakni sebesar Rp21.352.456.055,00. Sedangkan untuk saldo Aset setelah audit BPK RI juga mengalami koreksi pencatatan dengan mutasi tambah senilai Rp8.141.633.265,00 dan mutasi kurang senilai Rp6.225.553.106,00 sehingga saldo Aset laporan keuangan audited sebesar Rp44.252.429.938.555,00.

### C.1. ASET LANCAR

#### C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Badan Standardisasi Instrumen Pertanian per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp25.921.000,00. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp25.921.000,00 atau 100%, apabila dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023. Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.

*Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran  
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

Keterangan	31-Des-24	31-Des-23
Kas UP	-	25.921.000
Kas TUP	-	
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>25.921.000</b>

*Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per Satker  
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

Satker	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan (Penurunan)
Sekretariat BSIP	-	25.921.000	(25.921.000)
	-		
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>25.921.000</b>	<b>(25.921.000)</b>

Setelah Audit BPK RI dan koreksi internal tidak terdapat koreksi, sehingga Kas di Bendahara Pengeluaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian per 31 Desember 2023 *Unaudited* dan *Audited* adalah tetap.

Monitoring daftar saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dan Daftar rekening Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dapat disajikan pada **Lampiran**

### C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan adalah uang tunai dan saldo rekening di Bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar masing-masing senilai Rp347.500,00 dan Rp0,00. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp347.500,00 atau 0,00%, apabila dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023. Rincian saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.

**Perbandingan Rincian Kas Di Bendahara Penerimaan  
per 31 Desember 2024 dan 2023**

No	Satker	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	BBPSI Pasca Panen	347.500	0	347.500
	<b>Jumlah</b>	<b>347.500</b>	<b>0</b>	<b>347.500</b>

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan tersebut terdapat pada satker BBPSI Pasca Panen adalah pendapatan PNPB yang berasal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) atas kerjasama BBPSI Pascapanen Pertanian sebagai lembaga pemeriksa/pengujian kehalalan dengan BPJPH. Pendapatan tersebut belum dilakukan penyetoran sampai dengan periode pelaporan 31 Desember 2024 dikarenakan masuk di Rekening Bendahara Penerimaan BNI Cabang Bogor 0217835093 pada tanggal 31 Desember 2024 jam 16.17 WIB. Namun saat ini atau setelah periode pelaporan keuangan telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara pada tanggal 10 Januari 2025 dengan NTPN AEC7A48VVNNNOA60 (Bukti Penerimaan Negara terlampir).

Setelah Audit BPK RI dan koreksi internal tidak terdapat koreksi, sehingga Kas di Bendahara Penerimaan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian per 31 Desember 2023 *Unaudited* dan *Audited* adalah tetap

Daftar rekening Bendahara Penerimaan dapat disajikan pada **Lampiran**

### C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing senilai Rp3.846.019.586,00 dan Rp2.126.798.729,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas  
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

Jenis	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/Penurunan	%
Kas Lainnya di K/L dari Hibah	3.599.121.102	2.118.638.729	1.480.482.373	69,88
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	55.197	8.160.000	(8.104.803)	- 99,32
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-	-	
Kas Lainnya di K/L dari Hibah Yg Belum Disahkan	246.843.287	-	246.843.287	
<b>Jumlah</b>	<b>3.846.019.586</b>	<b>2.126.798.729</b>	<b>1.719.220.857</b>	<b>80,84</b>

Berdasarkan tabel diatas, Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas sampai dengan periode 31 Desember 2024 terdiri dari 2 jenis akun yaitu:

1. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran senilai Rp55.197.00.  
Nilai Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran tersebut merupakan jasa giro hibah, LS Bendahara Pengeluaran berupa honor pegawai dan perjalanan dinas yang belum dibayarkan serta dana kerjasama. Nilai kas tersebut terdapat pada satker

BBPSI Mekanisasi Pertanian merupakan saldo jasa giro dari rekening pengeluaran lainnya (RPL) yang belum dilakukan penyetoran sampai dengan periode pelaporan 31 Desember 2024 direkening BRI KCP Pasar Modern BSD Nomor 217101000540304. Namun setelah periode pelaporan nilai Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran tersebut telah disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan NTPN 523A41JNG842F4SV pada tanggal 26 Februari 2025 melalui Bank BRI.

2. Kas Lainnya di K/L dari hibah senilai Rp3.599.121.102,00.  
Nilai Kas Lainnya tersebut merupakan sisa dana hibah luar negeri yang terdapat di 11 satker Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang disajikan pada sebagai berikut:
  - a. BPSI Tanaman Rempah dan Obat Aromatik merupakan hibah dari HIRATA CORPORATION dengan nomo register 2SMP97TA digunakan untuk membiayai proyek Bioprospecting of Indonesian Medicinal Plants for Functional Foods, Cosmetics, Toiletries and Pharmaceuticals Uses dengan periode September 2021 sampai dengan Desember 2026. Dana hibah tersebut ditampung direkening nomor 001201004151305 pada Bank BRI KC Bogor dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp237.225.000,00 Saldo ini merupakan pembayaran termin ke II yang rencananya akan digunakan kembali pada tahun 2025.
  - b. BBPSIP merupakan hibah dari AFACI dengan nomor register 28CQ4JVA digunakan untuk membiayai proyek Penumbuhan dan Pengembangan Posluhdes melalui capacity buliding dan partnership dengan periode Januari 2023 sampai dengan Desember 2025. Dana hibah tersebut ditampung direkening nomor 1610900705 pada Bank BNI kc Bogor dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp451.612.180,00
  - c. BBPSIP Mekanisasi Pertanian merupakan Hibah dari United Nation Economic & Social Commission For Asia Pacific (UNESCAP) dengan nomor register 24PMKT7A digunakan untuk membiayai proyek Strengthening Mechanization-based solutions for climate-smart crop residue management in Cambodia, Indonesia and Nepal dengan periode September 2024 sampai dengan Januari 2025. Dana hibah tersebut akan digunakan kembali pada tahun 2025 dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp260.505,00
  - d. BBPSI SDLP yang terdiri dari 3 Pendonor dan 3 Kegiatan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp 868.088.184,00 antara lain :
    - Hibah dari ACIAR dengan nomor register 2W2H8PDA Sisa dana kegiatan Crop Health and Nutrient Management of Shallot-Chilli-Rice Cropping System In Coastal Indonesia dengan nominal senilai Rp1.634,00 dengan periode Desember 2020 sampai dengan Januari 2026. Dana hibah tersebut ditampung direkening nomor 001201004016301 pada Bank BRI KC Bogor
    - Hibah dari Korean Agriculture Technology Promotion Agency (KOAT) dengan nomor register 2JL7VCNA digunakan untuk membiayai proyek Indonesia Testbed Project dengan periode Agustus 2024 sampai dengan Desember 2025. Dana hibah tersebut ditampung direkening nomor '001201004887304

- pada Bank BRI KC Bogor dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp530.856.300,00
- Hibah dari AFACI dengan nomor register 2227WN8A digunakan untuk membiayai National Soil Information Systems to Support The Transformation of Agrifood Systems dengan periode September 2023 – September 2026. Dana Hibah tersebut ditampung direkening nomor 001201004790303 pada Bank BRI KC Bogor dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp337.230.250,00
- e. BPSI Tanaman Hias yang terdiri dari 2 Pendorong dan 2 Kegiatan senilai Rp468.987.842,00 antara lain :
- Hibah dari SAKATA dengan nomor register 2RG22RNA digunakan untuk membiayai kegiatan Cooperation Expedition Evaluation and Breeding Program for New Ornamental Plants dengan periode Maret 2020 sampai dengan Desember 2029. Dana Hibah tersebut ditampung direkening nomor 946300929 pada Bank BNI KC Cipanas dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp340.221.842,00
  - Hibah dari HIRATA CORPORATION dengan nomor register 2TBZWZ2A digunakan untuk membiayai Plant Extracts and Their Essential Oils as Potential Antimicrobial Agents for Food Coloring, Cosmetics & Toiletry, and Pharmaceutical Uses dengan periode September 2021 sampai dengan Desember 2026. Dana Hibah tersebut ditampung direkening nomor 1371403691 pada Bank BNI KC Cipanas dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp128.766.000,00
- f. BPSI Tanaman Jeruk Sub Tropika merupakan Hibah dari HIRATA CORPORATION senilai Rp173.992.243,00 dengan nomor register 2QX5LUAA digunakan untuk membiayai proyek Development of Potent Food Supplement from Citrus and Its Wild Relative.dengan periode April 2020 sampai dengan Desember 2026. Dana Hibah tersebut ditampung direkening nomor 1440022403213 pada Bank Mandiri KC Batu dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp129.500.243,00 sehingga terdapat selisih senilai Rp44.492.000,00 yang disebabkan adanya belanja perjalanan dinas yang sudah dilakukan pada TA 2024 namun pertanggungjawabannya masuk pada DIPA TA.2025 sesuai Surat Keterangan Selisih Saldo Nomor B-1565/KU.070/H.3.4/12/2024 Tanggal 31 Desember 2024.
- g. BBPSI Pascapanen merupakan Hibah dari AFACI dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp270.319.604,00 antara lain dengan nomor registers 2EGMQPNA senilai Rp1.114.016,00 merupakan sisa dana Hibah yang digunakan untuk membiayai proyek Establishment of Asian Food Composition Database (AFCD) dengan periode Agustus 2021 sampai dengan 31 Desember 2024 yang telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 19 Januari 2025 dengan NTPN 121796QTC973TUIE; dengan nomor register 272GNQ2A digunakan untuk membiayai proyek Quality Improvement of Asian Food Composition Database dengan periode Agustus 2024 sampai dengan 31 Agustus 2027 yang dananya ditampung pada nomor rekening 1885097246 pada Bank BNI KC Merdeka Bogor senilai Rp255.157.244,00 dan senilai Rp14.048.344,00 merupakan sisa dana hibah yang masih



digunakan untuk kegiatan TA.2025 yang tercatat pada kas tunai di Bendahara Pengeluaran.

- h. BPSI Tanaman Sayuran yang terdiri dari 2 Pendonor dengan 2 Kegiatan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp732.754.290,00 antara lain :
  - Hibah dari AFACI dengan nomor register 2EJ26YRA digunakan untuk membiayai proyek Development of Vegetable Varieties in Asia Region dengan periode Oktober 2019 sampai dengan Oktober 2025. Dana Hibah tersebut ditampung direkening nomor 088701000063301 pada Bank BRI KC Lembang dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp459.080.656,00
  - Hibah dari ONIONS NZ dengan nomor register 2WM1TC7A digunakan untuk membiayai proyek Agriculture standardization toward sustainable shallot production in Indonesia dengan periode Juni 2023 sampai dengan Juni 2025. Dana Hibah tersebut ditampung direkening nomor '088701000087305 pada Bank BRI KC Lembang dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp273.673.634,00 seharusnya adalah senilai Rp284.236.287,00 dikarenakan adanya Void SPHL yang menyebabkan adanya Hibah Langsung yang belum disahkan.
- i. BPSI Tanaman Kacang yang terdiri dari 2 Pendonor dengan 2 Kegiatan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp159.917/807,00 antara lain :
  - Hibah dari AVDRC dengan nomor register 272ZYD9A digunakan untuk membiayai proyek International Mungbean Improvement Network dengan periode Januari 2021 sampai dengan Desember 2025. Dana Hibah tersebut ditampung direkening nomor 000134312654000 pada Bank Mandiri KC Malang dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp25.738.338,00
  - Hibah dari HIRATA CORPORATION dengan nomor register 2G9MNV1A digunakan untuk membiayai proyek Exploration and Mass Production Technology for Maximizing Beneficial Compounds of Indigenous Under Utilized Legume and Tuber Crops as Natural Colorant, Pharmacy, Functional Food and Food Industries. Dana Hibah tersebut ditampung direkening nomor 005101003613302 pada Bank BRI KC Malang dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp134.179.469,00
- j. BPSI Tanaman Pemanis dan Serat merupakan Hibah dari HIRATA CORPORATION dengan nomor register 29KPWDNA digunakan untuk membiayai proyek Bio-Prospective of Indonesian Undomesticated -Nicotiana, Hibiscus, Ceiba, Ricinus and Sesame Plants as New Resources of Novel Bioactive Compounds for Pharmaceuticals, Toiletry and Cosmetic Products dengan periode September 2021 sampai dengan Desember 2026. Dana Hibah tersebut ditampung direkening nomor 1327421375 pada Bank BNI KC ITN2 Tasikmadu dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp218.686.560,00
- k. BBPSI Biogen merupakan Hibah dari FAO dengan nomor register 2LY44N2A digunakan untuk membiayai proyek Crop Diversity Conservation for Sustainable Use in Indonesia dengan periode Oktober 2022 sampai dengan September 2027. Dana Hibah tersebut ditampung direkening nomor 1330028384139 pada Bank Mandiri KC Bogor dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp17.276.887,00

3. Kas Lainnya di K/L dari Hibah Yang Belum Disahkan senilai Rp246.843.287,00  
 Nilai Kas Lainnya tersebut merupakan saldo hibah luar negeri dari New Zealand Onions New Zealand yang terdapat pada satuan kerja Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Sayuran (BPSIT Sayuran). Timbulnya Kas Lainnya yang Belum Disahkan pada satker BPSIT Sayuran tersebut dikarenakan adanya penolakan dari Kantor Pinjaman dan Hibah terkait Pengajuan SP2HL Onion NZ dan pihak Kantor dan Pinjaman Hibah Jakarta telah melakukan pembatalan sementara serta memberikan arahan untuk dapat diajukan kembali saat periode Laporan Keuangan *Audited* (Periode 14). Hibah tersebut digunakan untuk membiayai proyek Agriculture standardization toward sustainable shallot production in Indonesia periode 2023 sampai dengan 2025. Dana hibah ditampung di rekening nomor 088701000087305 pada Bank Rakyat Indonesia.

Setelah Audit BPK RI dan koreksi internal terdapat koreksi pencatatan terhadap saldo Kas Lainnya dan Setara Kas dengan mutasi tambah senilai Rp10.633.354,00 dan mutasi kurang senilai Rp246.843.287,00, sehingga nilai akun Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 *Audited* yakni sebesar Rp3.609.809.653,00. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas *Audited* yakni sebagai berikut:

Jenis	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/Penurunan	%
Kas Lainnya di K/L dari Hibah	3.609.754.456	2.118.638.729	1.491.115.727	70,38
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	55.197	8.160.000	(8.104.803)	- 99,32
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-	-	
Kas Lainnya di K/L dari Hibah Yg Belum Disahkan	-	-	-	
<b>Jumlah</b>	<b>3.609.809.653</b>	<b>2.126.798.729</b>	<b>1.483.010.924</b>	<b>69,73</b>

Koreksi nilai ini merupakan tindak lanjut pencatatan akun kas Lainnya dari Kementerian/Lembaga dari Hibah yang Belum Disahkan sebesar Rp246.843.287,00 pada satker Balai Pengujian Standar Instrumen (BPSI) Tanaman Sayuran saat Laporan Keuangan per 31 Desember TA. 2024 *Unaudited*, dimana saldo Kas hibah yang belum disahkan pada satker BPSI Tanaman Sayuran ini telah Nihil karena telah dilakukan pengesahan pada seluruh pendapatan hibah dan belanja hibah (Belanja Bahan, Belanja Barang Non Operasional Lainnya, Belanja Perjalanan Biasa, dan Belanja Jasa Lainnya) oleh Kantor pinjaman dan hibah Kementerian Keuangan sesuai dengan dokumen SPHL nomor: 00214T/237217/2024 tanggal 31 Desember 2024. Berdasarkan dokumen SPHL tersebut juga terdapat penambahan saldo senilai Rp10.633.354,00 yang merupakan saldo dana hibah berasal ONIONS NZ dengan pendapatan sebesar Rp284.236.287,00 ditambah dengan saldo awal senilai Rp273.673.634,00 dan telah dibelanjakan sebesar Rp273.602.933,00 sehingga sisa saldo senilai Rp284.306.988,00. Sisa dana hibah dari ONIONS NZ senilai Rp284.306.988,00 ditambah dengan saldo dana hibah dari AVACI senilai Rp 459.080.656,00 merupakan sisa dana yang masuk pada neraca laporan keuangan *Audited* BPSI Tanaman Sayuran di akun Kas Lainnya di Kementerian/Lembaga dari hibah senilai Rp743.387.644,00.

Rincian daftar saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 Badan Standardisasi Instrumen Pertanian disajikan pada **Lampiran**

#### C.1.4. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima adalah pendapatan PNPB yang berdasarkan perhitungan secara akuntansi sudah menjadi hak pemerintah tetapi belum ada hak tagihnya karena belum waktunya untuk dibayar/ditagih.

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing nilainya sebesar Rp0,00 dan Rp47.510.700,00. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 100%, apabila dibandingkan dengan saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2023. Rincian saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel Rincian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima**

Jenis Pendapatan	Eselon I	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	BSIP	0	47.510.700	(47.510.700)
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>131.249.200</b>	<b>(109.277.985)</b>

Saat periode pelaporan keuangan per 31 Desember 2024 saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima BSIP sebesar Rp0,00 yang berasal dari pendapatan sewa Tanah, Gedung dan Bangunan, terdapat di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat. Pendapatan ini sudah dilakukan penyetoran di tahun 2024 dari penerimaan Rumah Dinas type 36, type 60, type 70, type 200 sebesar Rp3.710.700,00 dan sewa lahan Intalasi Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian (IP2TP) Sukarami sebesar Rp34.140.000,00, sehingga masih ada sisa yang belum disetor di tahun 2024 atas sewa lahan sebesar Rp9.660.000,00, namun nilai tersebut telah dilakukan reklasifikasi ke akun Piutang Bukan Pajak.

Setelah Audit BPK dan koreksi internal tidak terdapat koreksi, sehingga saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Badan Standardisasi Instrumen Pertanian *Unaudited* dan *Audited* per 31 Desember 2024 adalah tetap.

#### C.1.5. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan Negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Saldo Piutang Bukan Pajak 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4.348.502.016,00 dan Rp2.947.035.664,00. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Mutasi Penambahan dan Pengurangan Piutang Bukan Pajak

per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Uraian Eselon I	Uraian Akun	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	Piutang PNB	1.239.706.036,00	24.537.000,00	615.659.536,00	648.673.500,00
2	Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	Piutang Lainnya	1.707.329.628,00	3.796.525.106,00	1.804.026.218,00	3.699.828.516,00
	Total		2.947.035.664,00	3.821.062.106,00	2.419.595.754,00	4.348.502.016,00

Saldo Piutang Bukan Pajak berdasarkan tabel diatas berasal dari Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak senilai Rp648.673.500,00 dan Piutang Lainnya senilai Rp3.699.828.516,00. Adapun satker lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang memiliki saldo Piutang per 31 Desember 2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Rincian Satker Piutang PNB dan Piutang Lainnya dan jenis piutangnya antara lain:

Rincian Satker dan Sumber Piutang PNB  
Per 31 Desember 2024

No.	Kode SATKER	Nama Satker	Nilai Piutang (Rp)	Jenis Sumber Piutang
1	237263	BPSI UAT	106.964.310	Pendapatan hasil samping ternak unggas
2	237238	Balitsereal	192.925.875	Pendapatan hasil kerja sama Uji Adaptasi Calon Varietas Jagung Hibrida antara Balitsereal dan PT. Java Seed Indonesia
3	237263	BPSIP Riau	265.378.115	Piutang Pendapatan berupa denda keterlambatan pekerjaan pembangunan KP Siak
4	567673	BPSIP Sulawesi Tengah	14.877.000	Piutang kepada PT Socio Komunikasi Indonesia
5	238080	BPSIP Sulawesi Utara	58.868.200	Piutang Pendapatan berupa kekurangan penyetoran PNB benih kedelai dan benih padi ES.
6	567449	BPSIP Sumatera Barat	9.660.000	Piutang sewa lahan IP2TP
		Total	648.673.500	

Rincian Satker dan Sumber Piutang Lainnya  
Per 31 Desember 2024

No.	KDSATKER	Nama Satker	Nilai Piutang (Rp)	Jenis Sumber Piutang
1	025227	PSI HORTIKULTURA	59.840.000,	Kelebihan Tun. Fungsional
2	237217	BPSIP TANAMAN SAYURAN	109.840.000,	Kelebihan Tun. Fungsional

No.	KDSATKER	Nama Satker	Nilai Piutang (Rp)	Jenis Sumber Piutang
3	237242	BBPSI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN	33.380.000,	Kelebihan Tun. Fungsional
4	237291	PSI PERKEBUNAN	13.750.000,	Kelebihan Tun. Fungsional
5	237380	BPSI LINGKUNGAN PERTANIAN	57.950.000,	Kelebihan Tun. Fungsional
6	237931	BPSI PERTANIAN LAHAN RAWA	55.790.000,	Kelebihan Tun. Fungsional
7	238027	BPSI TANAMAN PALMA	108.240.000,	Kelebihan Tun. Fungsional
8	411971	SEKRETARIAT BSIP	92.772.880,	PNBP Denda Keterlambatan
9	.411993	BPSI TANAMAN ANEKA KACANG	50.580.000,	Kelebihan Tun. Fungsional
10	450840	BPSIP KEPULAUAN BANGKA	63.758.375,	Kelebihan Tun. Fungsional
11	450856	BPSIP GORONTALO	33.545.000,	Kelebihan Tun. Fungsional
12	500941	BISIP	1.541.305.460,	PNBP Royalti
13	500957	BPSIP SULAWESI BARAT	44.400.000,	Kelebihan Tun. Fungsional
14	567296	BPSIP JAWA BARAT	20.850.000,	Kelebihan Tun. Fungsional
15	567318	BPSIP JAWA TENGAH	7.280.000,	Kelebihan Tun. Fungsional
16	567392	BPSIP ACEH	74.750.000,	Kelebihan Tun. Fungsional
17	567428	BPSIP SUMATERA UTARA	81.325.000,	Kelebihan Tun. Fungsional
18	567460	BPSIP RIAU	46.315.000,	Kelebihan Tun. Fungsional
19	567495	BPSIP SUMATERA SELATAN	35.127.093,	Kelebihan Tun. Fungsional
20	567627	BPSIP KALIMANTAN TIMUR	39.645.000,	Kelebihan Tun. Fungsional
21	567673	BPSIP SULAWESI TENGAH	92.150.000,	Kelebihan Tun. Fungsional
22	567702	BPSIP SULAWESI TENGGARA	88.810.000,	Kelebihan Tun. Fungsional
23	567830	BPSIP PAPUA	1.680.000,	Kelebihan Tun. Fungsional
24	633961	BPSIP DKI JAKARTA	77.022.920,	Kelebihan Tun. Fungsional
25	633975	BPSIP DI YOGYAKARTA	74.140.000,	Kelebihan Tun. Fungsional
26	633982	BPSIP BALI	146.540.000,	Kelebihan Tun. Fungsional
27	633996	BPSIP BENGKULU	21.600.000,	Kelebihan Tun. Fungsional
28	634015	BPSIP KALIMANTAN SELATAN	18.905.000,	Kelebihan Tun. Fungsional
29	634022	BPSIP SULAWESI UTARA	28.890.000,	Kelebihan Tun. Fungsional
30	634040	BPSIP NTB	74.801.288,	Kelebihan Tun. Fungsional dan Denda Keterlambatan
31	648669	BBPSI PASCAPANEN PERTANIAN	108.882.500,	Kelebihan Tun. Fungsional
32	648673	BBPSIP	5.273.000,	Kelebihan Tun. Fungsional
33	648680	BPSI TANAH DAN PUPUK	121.310.000,	Kelebihan Tun. Fungsional
34	648694	BPSI AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI PERTANIAN	109.335.000,	Kelebihan Tun. Fungsional
35	648720	LPSI RUMINANSIA BESAR	29.805.000,	Kelebihan Tun. Fungsional
36	648737	LPSI RUMINANSIA KECIL	130.240.000,	Kelebihan Tun. Fungsional
<b>TOTAL</b>			<b>3.699.828.516,</b>	

Setelah Audit BPK RI dan koreksi internal terdapat koreksi pencatatan terhadap saldo akun Piutang Bukan Pajak dengan mutasi tambah senilai Rp13.193.000,00, sehingga nilai Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 Audited yakni sebesar Rp4.361.695.016,00 terdiri dari Piutang Bukan Pajak senilai Rp648.673.500; dan Piutang Lainnya senilai Rp3.713.021.516,00. Perubahan koreksi nilai ini merupakan tindak lanjut terhadap catatan pemeriksaan BPK sebagai berikut:

1. Catatan Pemeriksaan BPK pada satker BPSIP Yogyakarta terdapat kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional oleh Petugas Belajar senilai Rp1.003.000.
2. Catatan Pemeriksaan BPK pada Satker BBPSi Tanaman Padi terdapat kelebihan Pembayaran Tunjangan Umum oleh Petugas Belajar senilai Rp185.000.
3. Catatan Pemeriksaaan BPK pada Satker BBPSI Pasca Panen terdapat Kelebihan Pembayaran Tunjangan Umum oleh Petugas Belajar senilai Rp555.000,
4. Catatan Pemeriksaan BPK pada Satker BPSIP Aceh terdapat Kelebihan Pembayaran Tunjangan Umum oleh Petugas Belajar senilai Rp925.000;
5. Catatan Pemeriksaan BPK pada Satker BPSIP Sumatera Barat terdapat Kelebihan Pembayaran Tunjangan Umum oleh Petugas Belajar senilai Rp2.220.000;
6. Catatan Pemeriksaan BPK pada Satker BPSIP Sulawesi Tengah terdapat Kelebihan Pembayaran Tunjangan Umum oleh Petugas Belajar senilai Rp1.665.000;
7. Catatan Pemeriksaan BPK pada Satker BPSIP Maluku Utara terdapat Kelebihan Pembayaran Tunjangan Umum oleh Petugas Belajar senilai Rp2.660.000;
8. Catatan Pemeriksaan BPK pada Satker BPSIP Papua Barat terdapat Kelebihan Pembayaran Tunjangan Umum oleh Petugas Belajar senilai Rp370.000;
9. Catatan Pemeriksaan BPK pada Satker BBPSIP terdapat Kelebihan Pembayaran tunjangan Umum senilai Rp185.000 dan Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional senilai Rp3.240.000 oleh Petugas Belajar;
10. Catatan pemeriksaan BPK pada satker BPSI Agroklimat dan Hidrologi Pertanian terdapat kelebihan pembayaran tunjangan umum oleh petugas belajar senilai Rp185.000;

Mutasi Penambahan dan Pengurangan Piutang Bukan Pajak setelah Audit BPK  
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Uraian Eselon I	Uraian Akun	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	Piutang PNB	1.239.706.036,00	24.537.000,00	615.569.536	648.673.500,00
2	Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	Piutang Lainnya	1.707.329.628,00	3.809.718.106,00	1.804.026.218,00	3.713.021.516,00
	Total		2.947.035.664,00	3.834.255.106,00	2.419.595.754,00	4.361.695.016,00

Saldo Piutang Bukan Pajak Audited mengalami kenaikan sebesar Rp1.414.659.352,00 atau 48,%, apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023. Rincian saldo Piutang Bukan Pajak disajikan pada beberapa table sebagai berikut:

Kode Akun	Jenis PNB	Satker	31-Dec-24 (Rp)	31-Dec-23 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
	PNBP Lainnya				



Kode Akun	Jenis PNBP	Satker	31-Dec-24 (Rp)	31-Dec-23 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	SEKRETARIAT BSIP	92.772.880	92.772.880	-
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	BPSI UAT	106.964.310	332.085.366	(225.121.056)
425436	Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual	Balitsereal	192.925.875	527.625.875	(334.700.000)
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	BPSIP SULUT	58.868.200	63.068.200	(4.200.000)
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	BPSIP JAWA TIMUR	-	51.548.480	(51.548.480)
425436	Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual	BISIP	1.541.305.460	1.541.305.460	-
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	BPSIP Riau	265.378.115	265.378.115	-
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	BPSIP NTB	73.251.288	73.251.288	-
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	BPSIP SULTENG	14.877.000		14.877.000
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	BPSIP SUMBAR	9.660.000		9.660.000
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	PSI HORTIKULTURA	59.840.000	-	59.840.000
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BPSIP TANAMAN SAYURAN	109.840.000	-	109.840.000
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BBPSI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN	33.380.000	-	33.380.000
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	PSI PERKEBUNAN	13.750.000	-	13.750.000
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BPSI LINGKUNGAN PERTANIAN	57.950.000	-	57.950.000
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BPSI PERTANIAN LAHAN RAWA	55.790.000	-	55.790.000
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BPSI TANAMAN PALMA	108.240.000	-	108.240.000
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BPSI TANAMAN ANEKA KACANG	50.580.000	-	50.580.000
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BPSIP KEPULAUAN BANGKA	63.758.375	-	63.758.375
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BPSIP GORONTALO	33.545.000	-	33.545.000
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BPSIP SULAWESI BARAT	44.400.000	-	44.400.000



Kode Akun	Jenis PNBP	Satker	31-Dec-24 (Rp)	31-Dec-23 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BPSIP JAWA BARAT	20.850.000	-	20.850.000
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BPSIP JAWA TENGAH	7.280.000	-	7.280.000
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BPSIP ACEH	75.675.000	-	75.675.000
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BPSIP SUMATERA UTARA	81.325.000	-	81.325.000
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BPSIP RIAU	46.315.000	-	46.315.000
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BPSIP SUMATERA SELATAN	35.127.093	-	35.127.093
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BPSIP KALIMANTAN TIMUR	39.645.000	-	39.645.000
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BPSIP SULAWESI TENGAH	93.815.000	-	93.815.000
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BPSIP SULAWESI TENGGARA	88.810.000	-	88.810.000
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BPSIP PAPUA	1.680.000	-	1.680.000
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BPSIP DKI JAKARTA	77.022.920	-	77.022.920
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BPSIP DI YOGYAKARTA	75.143.000	-	75.143.000
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BPSIP BALI	146.540.000	-	146.540.000
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BPSIP BENGKULU	21.600.000	-	21.600.000
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BPSIP KALIMANTAN SELATAN	18.905.000	-	18.905.000
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BPSIP SULAWESI UTARA	28.890.000	-	28.890.000
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BPSIP NTB	1.550.000	-	1.550.000
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BBPSI PASCAPANEN PERTANIAN	109.437.500	-	109.437.500
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BBPSIP	8.698.000	-	8.698.000
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BPSI TANAH DAN PUPUK	121.310.000	-	121.310.000
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BPSI AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI PERTANIAN	109.520.000	-	109.520.000
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	LPSI RUMINANSIA BESAR	29.805.000	-	29.805.000
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	LPSI RUMINANSIA KECIL	130.240.000	-	130.240.000
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BBPSI Tanaman Padi	185.000	-	185.000
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BPSIP Sumatera Barat	2.220.000	-	2.220.000
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BPSIP Maluku Utara	2.660.000	-	2.660.000
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BPSIP Papua Barat	370.000	-	370.000
			4.361.695.016	2.947.035.664	1.414.659.352

Rincian Satker dan Sumber Piutang PNBP  
Per 31 Desember 2024

No.	Kode SATKER	Nama Satker	Nilai Piutang (Rp)	Jenis Sumber Piutang
1	237263	BPSI UAT	106.964.310	Pendapatan hasil samping ternak unggas
2	237238	Balitsereal	192.925.875	Pendapatan hasil kerja sama Uji Adaptasi Calon Varietas Jagung Hibrida antara Balitsereal dan PT. Java Seed Indonesia
3	237263	BPSIP Riau	265.378.115	Piutang Pendapatan berupa denda keterlambatan pekerjaan pembangunan KP Siak
4	567673	BPSIP Sulawesi Tengah	14.877.000	Piutang kepada PT Socio Komunikasi Indonesia
5	238080	BPSIP Sulawesi Utara	58.868.200	Piutang Pendapatan berupa kekurangan penyeteroran PNBP benih kedelai dan benih padi ES.
6	567449	BPSIP Sumatera Barat	9.660.000	Piutang sewa lahan IP2TP
	Total		648.673.500	

Rincian Satker dan Sumber Piutang Lainnya  
Per 31 Desember 2024

No.	KDSATKER	Nama Satker	Nilai Piutang (Rp)	Jenis Sumber Piutang
1	25227	PSI Hortikultura	59.840.000,00	Kelebihan Tun. Fungsional
2	237217	BPSI Tanaman Sayuran	109.840.000,00	Kelebihan Tun. Fungsional
3	237242	BBPSI Sumber Daya Lahan Pertanian	33.380.000,00	Kelebihan Tun. Fungsional
4	237291	PSI Perkebunan	13.750.000,00	Kelebihan Tun. Fungsional
5	237380	BPSI Lingkungan Pertanian	57.950.000,00	Kelebihan Tun. Fungsional
6	237931	BPSI Lahan Rawa	55.790.000,00	Kelebihan Tun. Fungsional
7	238027	BPSI Tanaman Palma	108.240.000,00	Kelebihan Tun. Fungsional
8	411971	Sekretariat BSIP	92.772.880,00	PNBP Denda Keterlambatan
9	.411993	BPSI Tanaman Aneka Kacang	50.580.000,00	Kelebihan Tun. Fungsional
10	450840	BPSIP Kepulauan Bangka	63.758.375,00	Kelebihan Tun. Fungsional
11	450856	BPSIP Gorontalo	33.545.000,00	Kelebihan Tun. Fungsional
12	500941	BISIP	1.541.305.460,00	PNBP Royalti
13	500957	BPSIP Sulawesi Barat	44.400.000,00	Kelebihan Tun. Fungsional
14	567296	BPSIP Jawa Barat	20.850.000,00	Kelebihan Tun. Fungsional
15	567318	BPSIP Jawa Tengah	7.280.000,00	Kelebihan Tun. Fungsional
16	567392	BPSIP Aceh	74.750.000,00	Kelebihan Tun. Fungsional
			925.000,00	Kelebihan Tun. Umum
17	567428	BPSIP Sumatera Utara	81.325.000,00	Kelebihan Tun. Fungsional
18	567460	BPSIP Riau	46.315.000,00	Kelebihan Tun. Fungsional

No.	KDSATKER	Nama Satker	Nilai Piutang (Rp)	Jenis Sumber Piutang
19	567495	BPSIP Sumatera Selatan	35.127.093,00	Kelebihan Tun. Fungsional
20	567627	BPSIP Kalimantan Timur	39.645.000,00	Kelebihan Tun. Fungsional
21	567673	BPSIP Sulawesi Tengah	92.150.000,00	Kelebihan Tun. Fungsional
			1.665.000,00	Kelebihan Tun. Umum
22	567702	BPSIP Sulawesi Tenggara	88.810.000,00	Kelebihan Tun. Fungsional
23	567830	BPSIP Papua	1.680.000,00	Kelebihan Tun. Fungsional
24	633961	BPSIP DKI Jakarta	77.022.920,00	Kelebihan Tun. Fungsional
25	633975	BPSIP DI Yogyakarta	74.140.000,00	Kelebihan Tun. Fungsional
			1.003.000,00	Kelebihan Tun. Fungsional
26	633982	BPSIP Bali	146.540.000,00	Kelebihan Tun. Fungsional
27	633996	BPSIP Bengkulu	21.600.000,00	Kelebihan Tun. Fungsional
28	634015	BPSIP Kalimantan Selatan	18.905.000,00	Kelebihan Tun. Fungsional
29	634022	BPSIP Sulawesi Utara	28.890.000,00	Kelebihan Tun. Fungsional
30	634040	BPSIP Nusa Tenggara Barat	74.801.288,00	Kelebihan Tun. Fungsional dan Denda Keterlambatan
31	648669	BBPSI Pascapanen Pertanian	108.882.500,00	Kelebihan Tun. Fungsional
			555.000,00	Kelebihan Tun. Umum
32	648673	BBPSIP	5.273.000,00	Kelebihan Tun. Fungsional
			3.425.000,00	Kelebihan Tun. Fungsional dan Kelebihan Tun. Umum
33	648680	BPSI Tanah dan Pupuk	121.310.000,00	Kelebihan Tun. Fungsional
34	648694	BPSI Agroklimat dan Hidrologi Pertanian	109.335.000,00	Kelebihan Tun. Fungsional
			185.000,00	Kelebihan Tun. Umum
35	648720	LPSI Ruminasia Besar	29.805.000,00	Kelebihan Tun. Fungsional
36	648737	LPSI Ruminasia Kecil	130.240.000,00	Kelebihan Tun. Fungsional
37	237238	BBPSI Tanaman Padi	185.000,00	Kelebihan Tun. Umum
38	567449	BPSIP Sumatera Barat	2.220.000,00	Kelebihan Tun. Umum
39	450862	BPSIP Maluku Utara	2.660.000,00	Kelebihan Tun. Umum
40	450871	BPSIP Papua Barat	370.000,00	Kelebihan Tun. Umum
TOTAL			3.713.021.516,00	

Rincian atas piutang bukan pajak per debitur disajikan dalam lampiran

#### C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah merupakan reklasifikasi dari Tagihan TP/TGR sebesar nilai Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp16.963.314,00 dan Rp755.254.127,00.

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

**Mutasi Penambahan dan Pengurangan Bagian Lancar TP/TGR  
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024**

No	Uraian Eselon I	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	755.254.127,00		738.290.813	16.963.314
	<b>Total</b>	<b>755.254.127,00</b>		<b>738.290.813</b>	<b>16.963.314</b>

**Perbandingan Rincian Bagian Lancar TP/TGR  
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023**

No	Nama	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Bagian Lancar TP	-	-
2	Bagian Lancar TGR	16.963.314	755.254.127
<b>Jumlah</b>		<b>16.963.314</b>	<b>755.254.127</b>

**Rincian Bagian Lancar TP/TGR per Satker  
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023**

No	Nama	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ Penurunan
1	BPSI Tan. Sayuran	16.963.314	21.463.314	-4.500.000
2	BPSI UAT	0	639.390.813	-639.390.813
3	BBPSI Mektan	0	94.400.000	-94.400.000
<b>Jumlah</b>		<b>16.963.314</b>	<b>755.254.127</b>	<b>-738.290.813</b>

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR berdasarkan rincian tabel diatas dari periode pelaporan Semester II Tahun 2023 s.d periode pelaporan Semester II Tahun 2024 mengalami penurunan nilai sebesar Rp738.290.813,00 atau 97,75% yang disebabkan karena hal –hal sebagai berikut:

1. Satker BPSI Tan. Sayuran telah melakukan pembayaran Piutang Bagian Lancar Tagihan TGR sebesar Rp4.500.000,00 terhadap jenis piutang yang bersumber dari kelebihan tunjangan jabatan fungsional dan kelebihan pembayaran Tukin.

- Adanya pengurangan nilai sebesar Rp733.790.813,00 pada 2 satker yaitu BBPSI Mektan senilai Rp94.400.000,00 dan BPSI UAT senilai Rp639.390.813,00 yang semula dicatat pada akun Bagian Lancar TP/TGR pindah menjadi akun Piutang Tagihan TP/TGR. Hal ini disebabkan karena satker menggunakan akun setoran 425791 (Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain) yang secara otomatis saat dilakukan settlement akan mengurangi transaksi Piutang TP/TGR.

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/  
Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024

No	Nama Debitur	31-Des-24
1	Eti Eni Christiani - Balitsa	7.750.000
2	Eti Eni Christiani - Balitsa	9.213.314
<b>Jumlah</b>		<b>16.963.314</b>

Setelah Audit BPK RI dan koreksi internal tidak terdapat koreksi, sehingga saldo Kas Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Badan Standardisasi Instrumen Pertanian per 31 Desember 2023 *Unaudited* dan *Audited* adalah tetap

Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR untuk per satuan kerja disajikan pada lampiran.

#### C.1.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lancar

Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lancar adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing minus sebesar Rp1.438.148.267,00 dan Rp1.843.055.476,00. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp404.907.209,00 atau 21,97% apabila dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2023. Adapun rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023 yakni sebagai berikut.

Tabel Rincian Penyisihan Piutang Lancar

No	Uraian Eselon I	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
	Piutang Bukan Pajak			
	Badan Standar Instrumen Pertanian	- 1.436.451.936	- 1.666.178.084	229.726.148
	Bagian Lancar TP/TGR			
	Badan Standar Instrumen Pertanian	- 1.696.331	- 176.877.392	175.181.061
	<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	<b>- 1.438.148.267</b>	<b>- 1.843.055.476</b>	<b>404.907.209</b>

Rincian penyisihan piutang tidak tertagih - piutang bukan pajak dan Bagian Lancar TP/TGR sesuai dengan kategori piutangnya disajikan pada lampiran.

Tabel Analisa Kualitas Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Piutang Bukan Pajak</b>			
Non Kualitas	13.193.000,00	0,00	0,00
Lancar	2.002.158.888	0.005	10.010.796,00
Kurang Lancar	165.832.510,00	0.10	16.583.251,00
Diragukan	1.541.305.460,00	0.50	770.652.730,00
Macet	639.205.158,00	1.00	639.205.158,00
<b>Jumlah (A)</b>	<b>4.361.695.016,00</b>		<b>1.436.451.936,00</b>
<b>Bagian Lancar TP/TGR</b>			
Lancar	0,00	0.005	0,00
Kurang Lancar	16.963.314,00	0.10	1.696.331,00
Diragukan	,00	0.50	0,00
Macet	0.00	1.00	
<b>Jumlah (B)</b>	<b>16.963.314,00</b>		<b>1.696.331,00</b>
<b>TOTAL (A+B)</b>	<b>4.378.658.330,00</b>		<b>1.438.148.267,00</b>

Setelah audit BPK dan Koreksi Internal tidak terdapat koreksi, sehingga saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar Badan Standardisasi Instrumen Pertanian per 31 Desember 2023 Unaudited dan Audited adalah tetap.

Rincian penyisihan piutang tidak tertagih - piutang bukan pajak dan Bagian Lancar TP/TGR sesuai dengan kategori piutangnya disajikan pada lampiran.

### C.1.8. Persediaan

Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp14.801.788.839,00** dan **Rp12.199.218.675,00**. Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp2.602.570.164,00 atau 21,33% apabila dibandingkan dengan saldo Persediaan per 31 Desember 2023

Berikut ini disajikan perbandingan rincian persediaan per tanggal 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 pada tabel di bawah ini sebagai berikut:

Rincian Jenis Persediaan per  
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian Persediaan	31 Desember 2023 Audited (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Barang Konsumsi	1.036.854.003,00	27.604.422.461	27.680.362.971	960.913.493
Bahan untuk Pemeliharaan	32.500.370,00	1.441.070.386	1.412.623.304	60.947.452
Suku Cadang	40.428.250,00	329.675.193	355.968.443	14.135.000
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	8.917.376.976,00	16.260.991.818	13.015.661.649	12.162.707.145
Bahan Baku	503.819.426,00	13.299.773.112	12.496.622.498	1.306.970.040
Persediaan Lainnya	1.668.239.650,00	2.763.182.581	4.135.306.522	296.115.709
<b>Jumlah</b>	<b>12.199.218.675,00</b>	<b>61.699.115.551,00</b>	<b>59.096.545.387,00</b>	<b>14.801.788.839</b>

Adapun rincian mutasi/perubahan nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

#### Rincian Mutasi Persediaan Berdasarkan Jenis Transaksi



<b>Mutasi Persediaan</b>	
<b>Saldo akhir 2023</b>	<b>12.199.218.675</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Koreksi Nilai Tambah	1.209.977.448
Pembelian	42.219.160.999
Perolehan Lainnya	14.356.855.517
Reklas Masuk	1.680.629.722
Saldo Awal	585.382.991
Koreksi Kuantitas Tambah	258.610.650
Transfer Masuk	1.240.080.300
Hasil Opname Fisik	508.465.702
Reklasifikasi Dari Aset	72.365.822
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>62.131.529.151</b>
<b>Mutasi Kurang</b>	
Barang Rusak	125.452.575
Barang Usang	565.568.124
Reklasifikasi Keluar	1.677.394.722
Pemakaian	52.920.163.407
Keluar Lainnya	518.388.625
Koreksi Kuantitas Kurang	1.254.224.534
Hasil Opname Fisik	473.459.300
Koreksi Nilai Kurang	226.779.500
Transfer Keluar	1.254.660.300
Reklasifikasi ke Aset	512.867.900
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>59.528.958.987</b>
<b>Saldo akhir 31 Desember 2024</b>	<b>14.801.788.839</b>

Penjelasan atas Mutasi Tambah nilai Persediaan dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Koreksi Nilai Tambah senilai Rp1.209.977.448,00 merupakan adanya Perubahan nilai benih karena adanya penyesuaian harga mengikuti tarif SK Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang sebelumnya harga benih sesuai dengan PP Tarif No 36 tahun 2026 kemudian dilakukan perubahan harga pada 8 satker lingkup BSIP antara lain BPSI Tanaman Serat, BPSIT Serealia, BPSIP Sumatera Barat, BPSIP Kalimantan Tengah, BPSIP Kalimantan Timur, BPSIP Sulawesi Tengah, BPSIP Maluku dan BPSIP Yogyakarta.
2. Pembelian senilai Rp42.219.160.999,00 merupakan adanya Pembelian barang persediaan yang dilakukan selama periode berjalan mencakup berbagai kategori untuk mendukung kelancaran operasional kantor, termasuk alat tulis kantor (ATK), barang konsumsi, bahan pemeliharaan, bahan kimia, dan bahan baku pertanian. Jenis-jenis barang yang dibeli antara lain alat tulis seperti pena, pensil, penghapus, penjepit kertas, map, ordner, kertas HVS, kertas cover, dan perlengkapan cetak seperti tinta printer, toner, serta USB/flashdisk. Selain itu, terdapat pembelian untuk kebutuhan operasional lainnya seperti perlengkapan kebersihan (sapu, pel, lap, ember, tempat sampah), alat listrik (kabel, lampu, stop kontak), serta barang konsumsi seperti kopi, gula, dan air mineral. Bahan-bahan penunjang laboratorium dan kegiatan teknis juga dibeli, termasuk bahan kimia padat, cair, dan gas, dengan berbagai senyawa seperti ammonium fluoride, nitric acid, potassium chloride, dan lainnya. Pengadaan juga mencakup suku cadang

- alat pertanian, alat laboratorium, serta bahan bangunan dan konstruksi seperti semen, pasir, cat, kawat, kayu, dan baja ringan. Selain itu, pembelian dilakukan untuk mendukung kegiatan pemeliharaan tanaman dan ternak, berupa pakan, obat hewan, vaksin, serta benih tanaman (padi, jagung, tomat, terong, dll).
3. Perolehan Lainnya senilai Rp14.356.855.517,00 merupakan adanya pencatatan persediaan Tahun Anggaran Berjalan untuk melakukan koreksi transaksi tertentu yang tidak tersedia menunya di Persediaan Masuk. Perolehan lainnya atas persediaan pada tahun 2024 mencakup berbagai jenis barang dan aset biologis, yang sebagian besar merupakan hasil koreksi pencatatan, hasil panen, produksi, atau hibah internal. Barang-barang tersebut meliputi alat tulis kantor, pakan ternak, hewan ternak (seperti sapi, ayam, itik, kelinci, rusa), tanaman, dan benih pertanian (padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan kopi). Sebagian benih merupakan hasil perbanyakan UPBS dan baru dimasukkan ke persediaan setelah proses sertifikasi selesai. Di samping itu, terdapat pula pencatatan ulang akibat koreksi stock opname serta penyesuaian akibat kesalahan akun pada modul persediaan. Nilai perolehan mencakup transaksi signifikan, seperti benih padi varietas Inpari, Ciherang, Mekongga, dan Cakrabuana, ayam DOC dan indukan, serta vaksin dan obat-obatan hewan. Seluruh transaksi ini merupakan bagian dari optimalisasi pencatatan aset dan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan unit pelaksana teknis di lapangan.
  4. Reklas Masuk senilai Rp1.680.629.722,00 merupakan transaksi untuk mengubah klasifikasi barang yang sebelumnya sudah terlanjur diklasifikasikan (diditilkan) sebagai barang persediaan tertentu diubah menjadi klasifikasi barang persediaan yang lain. Reklasifikasi masuk atas persediaan dilakukan untuk menyesuaikan pencatatan barang agar sesuai dengan kondisi fisik dan klasifikasi yang tepat di aplikasi SAKTI. Reklasifikasi ini mencakup koreksi atas kesalahan kodefikasi barang konsumsi seperti kertas HVS dan tinta printer, serta perpindahan barang dari kelompok persediaan lainnya ke kelompok hewan dan tanaman yang dijual atau diserahkan kepada masyarakat, termasuk reklasifikasi kambing, kerbau, dan sapi dengan identifikasi individu yang lengkap. Selain itu, reklasifikasi juga mencakup benih tanaman pangan seperti padi, kedelai, kacang tanah, dan jagung yang sebelumnya salah klasifikasi. Proses reklas dilakukan baik karena perpindahan varietas, koreksi stock opname, maupun penyempurnaan pencatatan atas barang seperti bahan kimia cair dan padat.
  5. Saldo awal senilai Rp585.382.991,00 merupakan adanya transaksi persediaan yang diperoleh sebelum Tahun Anggaran Berjalan, yang belum sempat dibukukan pada Tahun Anggaran Yang Lalu dikarenakan alasan tertentu yang terdiri dari berbagai jenis barang konsumsi, bahan pemeliharaan, bahan baku, serta hewan dan tanaman. Barang konsumsi didominasi oleh alat tulis kantor (ATK), kertas, tinta/toner printer, bahan komputer, serta perlengkapan kebersihan dan pengharum ruangan. Bahan pemeliharaan meliputi sapu, alat pel, ember, dan bahan kimia pembersih. Bahan baku terdiri dari pakan ternak, pupuk, dan perlengkapan produksi seperti benih padi, kedelai, kacang tanah, dan jagung. Terdapat juga saldo awal berupa hewan dan tanaman untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat, seperti ayam KUB, sapi, kambing, domba, serta benih tanaman unggul dari UPBS.
  6. Koreksi Kuantitas Tambah senilai Rp258.610.650,00 merupakan adanya koreksi terhadap pencatatan barang persediaan. Koreksi kuantitas tambah atas persediaan dilakukan sebagai penyesuaian terhadap kesalahan pencatatan transaksi sebelumnya, baik karena kelebihan pengeluaran maupun pengakuan yang belum sesuai pada periode lalu. Beberapa koreksi meliputi penambahan kembali benih padi Inpari 32 HDB yang sebelumnya tercatat sebagai penjualan

berlebih di Juli 2023, serta Inpago 13 Fortiz yang dikoreksi akibat kesalahan pencatatan keluar. Koreksi lainnya mencakup hewan dan tanaman seperti ayam, itik, dan kelinci, serta koreksi kuantitas atas pakan ayam (layer dan starter) dan obat lainnya seperti Ivomex dan Vitakur.

7. Transfer masuk seniali Rp1.240.080.300,00 merupakan adanya penerimaan kiriman barang persediaan dari satker lainnya lingkup BSIP. Transfer masuk persediaan pada tahun 2024 terutama berasal dari BBPSI Padi dan BPSI Unggas dan Aneka Ternak, mencakup benih padi berbagai varietas seperti Inpago 13 Fortiz, Inpari 43 Agritan GSR, Inpari 24 Gabusan, Inpari 33, Inpari 47 WBC, dan lainnya, baik kelas FS maupun SS. Transfer ini ditujukan untuk mendukung kegiatan strategis Kementerian Pertanian, seperti penanganan krisis pangan dan diseminasi benih kepada masyarakat di berbagai wilayah, dengan dokumen BAST sebagai dasar pencatatan. Selain itu, terdapat pula transfer masuk hewan dan tanaman dari BPSI terkait, yang mencakup sapi berbagai jenis (FH, BBxFH, Limousin), kerbau (Murrah, Silangan, Rawa), serta ayam dan itik. Transfer tersebut diperuntukkan bagi kegiatan pembibitan, display, dan distribusi kepada masyarakat dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional dan penguatan sumber daya genetik.
8. Hasil Opname Fisik senilai Rp508.465.702,00 merupakan transaksi terkait adanya perbedaan jumlah barang persediaan antara hasil pemeriksaan fisik dengan pencatatan persediaan. Hasil opname fisik persediaan per 31 Desember 2024 mencerminkan evaluasi atas keberadaan barang yang masih tersedia maupun koreksi atas pencatatan sebelumnya. Ditemukan persediaan barang konsumsi seperti alat tulis, ordner, cutter, tinta/toner printer, USB, mouse, hingga meterai, serta bahan laboratorium dan pertanian. Koreksi dilakukan atas kesalahan input jumlah, serta peralatan laboratorium yang perlu direklasifikasikan sebagai aset.
9. Reklasifikasi Dari Aset senilai Rp72.365.822,00 merupakan adanya perekaman perolehan barang persediaan yang sebelumnya dikodefikasikan sebagai aset/BMN lalu diubah menjadi kode barang persediaan pada satker BPSIT Sayuran.

Penjelasan atas Mutasi Kurang nilai Persediaan dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Barang Rusak senilai Rp125.452.575,00 merupakan adanya penghapusan barang persediaan yang rusak dan barang-barang persediaan yang rusak tersebut sudah pernah dicatat melalui transaksi persediaan keluar rusak. Barang persediaan yang mengalami kerusakan sepanjang tahun 2024 terdiri dari berbagai kategori, termasuk suku cadang alat laboratorium umum dan alat laboratorium lainnya. Pada kategori hewan dan tanaman, kerusakan terutama disebabkan oleh kematian ternak akibat sakit. Selain itu, ditemukan benih padi kadaluarsa. Semua barang rusak tersebut telah diproses untuk dihapuskan dari pembukuan
2. Barang Usang senilai Rp565.568.124,00 merupakan adanya penghapusan barang persediaan yang usang dan barang-barang persediaan yang usang tersebut sudah pernah dicatat melalui transaksi persediaan keluar usang. Barang usang dalam persediaan tahun 2024 terdiri dari benih tanaman dan hewan ternak yang tidak lagi dapat dimanfaatkan akibat usia simpan yang telah melampaui masa guna atau kondisi fisik yang tidak layak. Beberapa benih padi dinyatakan usang karena tidak lulus uji laboratorium, label sertifikasi tidak diperpanjang, dan stok telah terlalu lama disimpan. Selain itu, terdapat benih padi varietas Mekongga (SS) dalam kondisi mati label. Pada kelompok aset biologis, hewan yang tercatat sebagai barang usang mencakup ayam, itik, dan kelinci yang mengalami kematian dan tidak dapat dialihkan atau dimanfaatkan lebih lanjut. Seluruh barang ini dicatat

sebagai barang usang untuk keperluan penghapusan dan penyesuaian dalam laporan persediaan.

3. Reklasifikasi keluar senilai Rp1.677.394.722,00 merupakan transaksi untuk mencatat pengeluaran persediaan karena jenis atau kode barang persediaan diubah menjadi jenis atau kode barang persediaan lainnya. Reklasifikasi keluar atas persediaan dilakukan untuk menyesuaikan klasifikasi barang agar sesuai dengan kondisi fisik dan fungsinya di lapangan, terutama atas kesalahan penginputan kodefikasi dalam aplikasi SAKTI. Barang yang direklasifikasi keluar mencakup barang konsumsi seperti buku tulis, kertas HVS, serta bahan kimia cair dan padat yang semula salah klasifikasi. Tindakan reklas juga diterapkan pada benih tanaman seperti kedelai, kacang tanah, kacang hijau, serta benih padi varietas Inpari dan Ciherang. Pada aset biologis, dilakukan reklas keluar terhadap hewan ternak yang semula dicatat sebagai persediaan lainnya, termasuk kambing dan berbagai jenis sapi serta kerbau. Reklas ini juga mencakup perpindahan varietas ayam KUB dan benih UPBS yang direklasifikasi keluar terlebih dahulu sebelum dimasukkan kembali dengan kode barang baru yang sesuai untuk pencatatan sebagai hewan/tanaman yang dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
4. Pemakaian senilai Rp52.920.163.407,00 merupakan pemakaian barang persediaan selama tahun 2024 mencakup berbagai kategori barang habis pakai dan bahan baku yang digunakan untuk mendukung operasional kantor, kegiatan teknis, hingga program diseminasi dan penyaluran bantuan kepada masyarakat. Barang-barang tersebut meliputi alat tulis kantor (ATK), bahan kimia padat dan cair, pupuk, obat-obatan, alat laboratorium, bahan bangunan, perlengkapan kebersihan, serta perlengkapan pertanian dan peternakan. Pemakaian juga mencakup suku cadang kendaraan dan alat pertanian, perlengkapan laboratorium, serta hewan dan tanaman seperti ayam KUB, sapi, domba, dan berbagai jenis benih padi, jagung, dan rempah-rempah. Sebagian besar persediaan ini digunakan untuk kegiatan internal, pengujian laboratorium, pemeliharaan fasilitas. Seluruh transaksi pemakaian telah dibukukan sebagai beban tahun berjalan dan mencerminkan realisasi penggunaan barang secara efisien dan sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja.
5. Keluar Lainnya senilai Rp518.388.625,00 merupakan adanya Transaksi pengeluaran berbagai hewan dan tanaman, baik karena diserahkan kepada masyarakat maupun akibat kematian. Hewan yang keluar antara lain ayam, itik, kelinci, serta sapi berbagai jenis seperti Sapi Madura, PO, Bali, dan FH, termasuk sapi hasil persilangan (BBxFH), serta kerbau betina Murrah. Selain itu, terdapat pemakaian pakan ternak untuk ayam, itik, dan kelinci sebagai bagian dari operasional pembibitan. Beberapa hewan juga tercatat sebagai mati, seperti kambing, sapi, dan domba. Transaksi ini merupakan bagian dari pemakaian barang biologis yang telah mencapai tujuannya dalam mendukung tugas dan fungsi teknis satuan kerja, serta penyaluran kepada penerima manfaat.
6. Koreksi Kuantitas Kurang senilai Rp1.254.224.534,00 merupakan Koreksi atas persediaan untuk menyesuaikan data pencatatan dengan kondisi fisik yang sebenarnya, yang sebagian besar disebabkan oleh kesalahan input dan ketidaksesuaian varietas dalam pencatatan. Koreksi mencakup berbagai barang, mulai dari alat tulis kantor seperti buku tulis, pembolong kertas, toner, dan kertas HVS, hingga aset biologis berupa hewan dan tanaman seperti DOC, DOD, kambing, ayam, itik, dan kelinci. Koreksi juga diterapkan atas benih varietas Inpara yang salah dicatat dalam transfer masuk online, serta bahan kimia cair dan gas, pakan, obat, vaksin, dan perlengkapan medis seperti spuit dan NaCl.

7. Hasil Opname Fisik senilai Rp473.459.300,00 yang merupakan koreksi atas pencatatan sebelumnya. Ditemukan persediaan barang konsumsi seperti alat tulis, ordner, cutter, tinta/toner printer, USB, mouse, hingga meterai. Opname juga mencatat koreksi terhadap benih padi Inpago 13 Fortiz dan Inpari 45 Dirgahayu,. Selain itu, dilakukan pencatatan fisik terhadap ayam KUB dan kopi Arabika.
8. Koreksi Nilai Kurang senilai Rp226.779.500,00 merupakan dilakukan sebagai penyesuaian terhadap perubahan nilai wajar barang akibat perpindahan kelas, kadaluarsa, maupun status afkir. Penyesuaian ini mencakup ayam KUB dan benih padi UPBS yang berpindah dari varietas bernilai tinggi ke varietas dengan nilai jual lebih rendah, serta sapi jantan dan betina pesisir selatan yang dinyatakan afkir sehingga nilainya disesuaikan berdasarkan tarif PNBPN sebagaimana ditetapkan dalam SK. Selain itu, penyesuaian juga dilakukan terhadap nilai domba berdasarkan timbangan aktual pada bulan Juni dan Desember 2024. Benih yang masa berlaku labelnya telah habis dikoreksi nilainya menjadi setara dengan komoditas konsumsi, dan beberapa benih UPBS kadaluarsa mengalami perubahan harga sesuai standar harga jual gabah.
9. Transfer Keluar senilai Rp1.254.660.300,00 merupakan transaksi atas distribusi benih padi dan hewan ternak ke berbagai satuan kerja lingkup Kementerian Pertanian sebagai bagian dari program diseminasi. Penyaluran benih dilakukan ke satker lingkup BSIP.
10. Reklasifikasi ke Aset Tetap senilai Rp512.867.900,00 merupakan transaksi yang dilakukan sebagai bentuk penyesuaian atas kesalahan pencatatan yang sebelumnya dimasukkan dalam akun persediaan. Transaksi reklasifikasi ini mencakup perubahan status 1 unit kursi roda. Selain itu, reklasifikasi juga dilakukan terhadap beberapa hewan ternak seperti sapi FH jantan, sapi FH betina, serta anak sapi betina dengan berbagai usia, yang dinyatakan sebagai aset tetap sesuai hasil rekomendasi Inspektorat Jenderal (Itjen) dalam Catatan Hasil Reviu (CHR) atas Laporan Keuangan dan BMN Semester I Tahun Anggaran 2024. Reklasifikasi ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian klasifikasi dan keandalan penyajian laporan keuangan instansi. Selain itu, reklasifikasi juga dilakukan atas hewan dan tanaman yang seharusnya dicatat sebagai aset tetap, seperti sapi FH jantan dan betina, serta anak sapi betina usia 10 hingga 17 bulan, yang sebelumnya salah klasifikasi sebagai persediaan.

Rincian jenis persediaan atas mutasi penambahan dan pengurangan dapat dijelaskan pada lampiran

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal tidak terdapat koreksi, sehingga saldo Persediaan *Unaudited* dan *Audited* per 31 Desember 2024 adalah tetap.

### Informasi Lainnya atas Persediaan 526

Persediaan MAK 526 dapat dilakukan penelusuran terhadap mutasi penambahan dan pengurangan terhadap neraca persediaan. Rincian mutasi persediaan MAK 526 atas pencatatan persediaan sampai dengan per 31 Desember 2024 dapat disajikan pada tabel dibawah ini.



NO	SATKER	31 Desember 2023 Audited	MUTASI		31 Desember 2024
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
1	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	8.917.376.976	16.260.991.818	13.015.661.649	12.162.707.145
	<b>Total</b>	<b>8.917.376.976</b>	<b>16.260.991.818</b>	<b>13.015.661.649</b>	<b>12.162.707.145</b>

Untuk Hewan dan Tanaman untuk Dijual/ Diserahkan Ke Masyarakat senilai Rp12.162.707.145,00 yang terdapat pada 44 satker lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang berasal dari adanya Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Kementerian Pertanian No. 14.a/LHP/XVII/05/2023 tanggal 23 Mei 2023, atas temuan terkait Pengelolaan/penatausahaan barang persediaan dan Beban persediaan pada Pengelolaan Perbenihan, terkait permasalahan tersebut Badan Standardisasi Instrumen Pertanian melalui surat dari Sekretaris No B-3023/PW.030/H.1/12/2023 tanggal 14 Desember 2023 telah menerbitkan Langkah langkah Penatausahaan BMN pada Hewan Ternak/Tanaman dan Turunannya untuk dilakukan penatausahaan Benih/Bibit Hewan/Tanaman pada Aplikasi SAKTI Modul Persediaan menjadi akun persediaan Hewan/Tanaman untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (1.01.05.01.003)

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal tidak terdapat koreksi, sehingga saldo Persediaan – Hewan dan Tanaman untuk Dijual/Diserahkan Ke Masyarakat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian *Unaudited* dan *Audited* per 31 Desember 2024 adalah tetap.

## C.2. ASET TETAP

### C.2.1. Tanah

Aset Tetap Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Badan Standardisasi Instrumen Pertanian per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp42.357.882.841.143,00 dan Rp42.875.152.506.066,00 Terdapat penurunan nilai aset tanah pada 31 Desember 2023 TA 2023 sebesar (Rp517.269.664.923,00) atau 1.21 % (persen).

Badan Standardisasi Instrumen Pertanian memiliki Tanah seluas 59.363.337 m2 sebanyak 370 NUP yang tersebar di 60 satuan kerja lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Adapun penjelasan atas status kepemilikan Tanah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga seluas 49.145.058 m2 sebanyak 277 NUP dengan nilai perolehan sebesar Rp26.272.369.487.110,00
2. Bersertifikat (Tidak Sesuai Ketentuan) atas nama Kementerian/Lembaga seluas 7.687.291 m2 sebanyak 54 NUP dengan nilai perolehan sebesar Rp14.881.357.183.453,00

3. Bersertifikat atas nama Pihak Ketiga seluas 388.766 sebanyak 2 NUP dengan nilai perolehan sebesar Rp102.223.104.000,00
4. Belum Bersertifikat seluas 2.142.222 m2 sebanyak 37 NUP sebesar Rp1.101.933.066.580,00

Adapun rincian mutasi/perubahan nilai Tanah per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2023 Audited</b>	<b>42.875.152.506.066</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Saldo Awal	582.191.878.753
Transfer Masuk	463.947.359.000
Hibah Masuk	44.218.946.980
Reklasifikasi Masuk	278.365.829.000
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	7.996.000
Perubahan PI ke BMN	195.699.105.000
Perolehan Lainnya	585.000.000
<b>Total</b>	<b>1.565.016.114.733,</b>
<b>Mutasi Kurang</b>	
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(582.191.878.753,)
Transfer Keluar	(1.208.746.773.753,)
Reklasifikasi Keluar	(278.420.568.150,)
Koreksi Pencatatan	(12.352.804.000,)
Hibah Keluar	(573.725.000,)
<b>Total</b>	<b>(2.082.285.749.656,)</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>42.357.882.871.143,</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	0,
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2024</b>	<b>42.357.882.871.143,</b>

Penjelasan atas Mutasi Tambah nilai aset tanah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Saldo awal senilai Rp582.191.878.753,00 merupakan adanya pencatatan Tanah sawah irigasi dan Tanah Bangunan Kantor BBPSI Tanaman Padi yang telah diserahkan kepada BPSIP Jawa Barat senilai Rp351.340.525.000,00 sesuai Berita Acara Serah Terima Pemindahtanganan BMN Nomor B-439/PL.130/H.2.1/04/2024 Tanggal 18 April 2024 dan adanya penyerahan Tanah Kebun Percobaan BPSI Tanaman Buah senilai Rp230.851.353.753,00 kepada Balai Inseminasi Buatan Lembang Ditjen PKH sesuai Berita Acara Serah Terima Alih Pencatatan Barang Milik Negara Nomor B-1981/PL.130/H/12/2024 Tanggal 2 Desember 2024. Pencatatan pada saldo awal dimaksudkan sebagai persiapan/penyesuaian terhadap aset yang akan dilakukan Transfer keluar dan pemecahan sertifikatnya.
2. Transfer Masuk senilai Rp463.974.359.000,00 merupakan adanya Transfer masuk Tanah Bangunan Rumah Negara dari Kementerian PUPR senilai Rp12.352.804.000,00 kepada Sekretariat BSIP sesuai BAST Nomor PS 0201-SB/474 Tanggal 29 April 2024.; Tanah Kebun Percobaan dari Ditjen Perkebunan Kementan senilai Rp100.254.000.000,00 kepada BPSI Tanaman Industri sesuai BAST Nomor B-436/PL.130/E/05/2024 Tanggal 20 Mei 2024; BBPSI Tanaman Padi senilai Rp351.340.525.000,00 kepada BPSIP Jawa Barat sesuai BAST nomor B-439/PL.130/H.2.1/04/2024 Tanggal 18 April 2024.
3. Hibah Masuk senilai Rp44.218.946.980,00 merupakan adanya hibah masuk dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara senilai Rp244.198.060,00, Pemerintah



Provinsi Nusa Tenggara Barat senilai Rp11.675.300.400,00 dan Pemerintah Provinsi Riau senilai Rp32.299.448.520,00.

4. Reklasifikasi Masuk senilai Rp278.365.829.000,00 yang merupakan adanya perbaikan kesalahan pencatatan nilai barang yang tercatat sebagai Bangunan Gedung Kantor Permanen yang seharusnya adalah Tanah Bangunan Kantor Pemerintah pada satker Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan.
5. Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah senilai Rp7.996.000,00 pada satker BPSIP Gorontalo merupakan adanya penilaian ulang KPKNL menindaklanjuti Temuan BPK RI.
6. Perubahan PI ke BMN senilai Rp195.699.105.000,00 pada satker BBPSI Padi merupakan adanya Tanah Sawah Irigasi yang telah berakhir masa kontraknya.
7. Perolehan Lainnya senilai Rp585.000.000,00 merupakan adanya kesalahan kodefikasi barang yang seharusnya berupa Bangunan Rumah Negara Golongan II tetapi dicatat sebagai Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II pada satker BPSIP Riau.

Penjelasan atas Mutasi kurang nilai aset tanah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang senilai Rp582.191.878.753,00 , senilai Rp351.340.525.000,00 pada satker BBPSI Tanaman Padi terjadi karena adanya pencatatan tanah yang akan dilakukan pemecahan sertifikat akibat penyerahan sebagian lahan ke Kemenhub dan ke BPSIP Jawa Barat; senilai Rp230.851.353.753,00 pada satker BPSI Tanaman Buah karena adanya pencatatan penyerahan tanah kepada Balai Inseminasi Buatan Lembang Ditjen PKH.
2. Transfer Keluar senilai Rp1.208.746.773.753,00 merupakan adanya penyerahan tanah antara lain :
  - BBPSI Tanaman Padi ke BPSIP Jawa Barat seluas 421.740 m2 senilai Rp351.340.525.000,00
  - BBPSI Tanaman Padi ke Kementerian Perhubungan seluas 55.060 m2 senilai Rp46.064/975.000,00
  - BBPSI Unggas Aneka Ternak kepada Ditjen PKH Kementan seluas 380.300 m2 senilai Rp580.489.920.000,00
  - BPSI Tanaman Buah kepada Ditjen PKH Kementan seluas 419.700m2 senilai Rp230.851.353.753,00
3. Hibah Keluar senilai Rp573.725.753,00 merupakan Hibah keluar pada satker BPSIP Sulteng (567673) ke Pemprov Sulawesi Tengah seluas 99 M2 senilai Rp573.725.753,00
4. Reklasifikasi Keluar pada satker PSI Tanaman Pangan (412007) seluas 25.488 M2 senilai Rp278.420.568.150.000 merupakan perbaikan kesalahan pencatatan sesuai surat keterangan Kepala Pusat
5. Koreksi Pencatatan pada satker Sekretariat BSIP (411971) seluas 971 M2 senilai Rp12.352.804.000,00 merupakan kesalahan pencatatan ganda serta menindaklanjuti CHR Itjen atas LK/LBMN Semester I TA 2024

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal terdapat koreksi pencatatan berkurang senilai **Rp4.436.242.000,00** sehingga nilai saldo Aset Tanah per 31

Desember 2024 Audited adalah senilai Rp42.353.446.629.143,00. Koreksi transaksi tersebut terdapat pada satuan kerja BPSIP Jawa Timur koreksi yang belum menyajikan saldo properti investasi terhadap lahan seluas 14,071 ha yang terletak di kecamatan Mojosari yang perjanjian dengan pihak penyewa telah dibuat pada tanggal 30 Agustus 2025 senilai Rp4.436.242.000,00

Adapun rincian mutasi/perubahan nilai Tanah audited per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2023 Audited</b>	<b>42.875.152.506.066</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Saldo Awal	582.191.878.753
Transfer Masuk	463.947.359.000
Hibah Masuk	44.218.946.980
Reklasifikasi Masuk	278.365.829.000
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	7.996.000
Perubahan PI ke BMN	195.699.105.000
Perolehan Lainnya	585.000.000
<b>Total</b>	<b>1.565.016.114.733,</b>
<b>Mutasi Kurang</b>	
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(582.191.878.753,)
Transfer Keluar	(1.208.746.773.753,)
Reklasifikasi Keluar	(278.420.568.150,)
Koreksi Pencatatan	(12.352.804.000,)
Hibah Keluar	(573.725.000,)
Perubahan BMN Ke PI	(4.436.242.000,)
<b>Total</b>	<b>(2.086.721.991.656,)</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>42.353.446.629.143,</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	0,
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2024</b>	<b>42.353.446.629.143,</b>

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan akun Tanah persatker disajikan dalam lampiran.

### C.2.2. Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Badan Standardisasi Instrumen Pertanian per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.509.576.255.161,00 dan Rp1.502.142.924.379,00. Terdapat kenaikan nilai aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.433.330.782,00 atau 0,49 % persen.

Adapun rincian mutasi/perubahan nilai Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023</b>	<b>1.502.142.924.379</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Pembelian	28.176.635.899
Transfer Masuk	4.924.952.341
Hibah Masuk	415.000.000
Pengembangan Melalui KDP	140.146.904
Reklasifikasi Masuk	482.685.750
Perolehan Lainnya	136.078.422
Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	175.676.000
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggu	1.017.023.500
Saldo Awal	3.096.846.000
<b>Total</b>	<b>38.565.044.816</b>
<b>Mutasi Kurang</b>	
Penghapusan	(127.177.500,)
Transfer Keluar	(4.924.952.341,)
Hibah Keluar	(661.453.200,)
Reklasifikasi Keluar	(482.685.750,)
Koreksi Pencatatan	(233.320.000,)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(24.702.125.243,)
<b>Total</b>	<b>(31.131.714.034,)</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>1.509.576.255.161,</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	(1.396.786.446.533,)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>112.789.808.628,</b>

Penjelasan atas Mutasi Tambah nilai aset Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pembelian senilai Rp28.176.635.899,00 pada 22 Satker lingkup BSIP

Pembelian Peralatan dan Mesin TA 2024

No	Nama Barang	Nilai
1	Alat Angkutan	1.142.590.000
2	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	570.815.000
3	Alat Besar	1.399.470.600
4	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	3.686.446.239
5	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	244.825.550
6	Alat Keselamatan Kerja	5.000.000
7	Alat Laboratorium	16.944.207.795
8	Alat Persenjataan	13.750.000
9	Alat Pertanian	2.128.414.735
10	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	659.841.370
11	Komputer	1.243.774.610
12	Peralatan Proses Produksi	137.500.000
	<b>Total</b>	<b>28.176.635.899</b>

2. Transfer masuk senilai Rp4.924.952.341,00 merupakan Transfer masuk antara lain :

Nama Satker Penerima	Uraian Barang	Jml	Satuan	Nilai	Nama Satker Pengirim
BPSIP DKI JAKARTA	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	1	Unit	307.000.000	KANTOR PUSAT BSIP
SEKRETARIAT BSIP	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	1	Unit	235.330.000	BALAI BESAR PENERAPAN
BBPSI BIOGEN	Telephone Mobile	1	Buah	6.132.500	BPSIP JATENG
BBPSI BIOGEN	Lap Top	1	Buah	19.500.000	BPSIP JATENG
PSI PERKEBUNAN	P.C Unit	3	Buah	53.662.584	KANTOR PUSAT BSIP
B I S I P	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	1	Unit	89.250.000	KANTOR PUSAT BSIP
BPSIP JAWA BARAT	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	1	Unit	75.332.000	BBPSI PADI SUKAMANDI
BPSIP JAWA BARAT	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Lainnya	2	dummy	43.595.000	BBPSI PADI SUKAMANDI
BPSIP JAWA BARAT	Tractor Tangan Dengan Perlengkapannya	2	Buah	59.570.000	BBPSI PADI SUKAMANDI
BPSIP JAWA BARAT	Alat Perontokan Mesin (Power Thresher)	2	Buah	29.170.000	BBPSI PADI SUKAMANDI
BPSIP JAWA BARAT	Alat Panen Lainnya	1	dummy	129.360.000	BBPSI PADI SUKAMANDI
BPSIP JAWA BARAT	Lemari Besi/Metal	1	Buah	595.000	BBPSI PADI SUKAMANDI
BPSIP JAWA BARAT	Lemari Kayu	6	Buah	13.431.000	BBPSI PADI SUKAMANDI
BPSIP JAWA BARAT	Kardex Besi	3	Buah	6.000.000	BBPSI PADI SUKAMANDI
BPSIP JAWA BARAT	Mesin Absensi	2	Buah	6.286.000	BBPSI PADI SUKAMANDI
BPSIP JAWA BARAT	LCD Projector/Infocus	1	Buah	19.600.000	BBPSI PADI SUKAMANDI
BPSIP JAWA BARAT	Meja Kerja Kayu	17	Buah	16.575.000	BBPSI PADI SUKAMANDI
BPSIP JAWA BARAT	Kursi Besi/Metal	88	Buah	35.216.000	BBPSI PADI SUKAMANDI
BPSIP JAWA BARAT	Meja Rapat	13	Buah	9.958.000	BBPSI PADI SUKAMANDI
BPSIP JAWA BARAT	Meja Komputer	1	Buah	5.590.680	BBPSI PADI SUKAMANDI
BPSIP JAWA BARAT	Mesin Pemotong Rumput	2	Buah	10.000.000	BBPSI PADI SUKAMANDI
BPSIP JAWA BARAT	A.C. Split	14	Buah	67.190.000	BBPSI PADI SUKAMANDI
BPSIP JAWA BARAT	Timbangan Barang	1	Buah	2.530.000	BBPSI PADI SUKAMANDI
BPSIP JAWA BARAT	Mimbar/Podium	1	Buah	2.000.000	BBPSI PADI SUKAMANDI
BPSIP JAWA BARAT	Layar Film/Projector	1	Buah	2.300.000	BBPSI PADI SUKAMANDI
BPSIP JAWA BARAT	Wireless Amplifier	1	Buah	7.530.000	BBPSI PADI SUKAMANDI
BPSIP JAWA BARAT	Timbangan Elektronik	1	Buah	1.200.000	BBPSI PADI SUKAMANDI
BPSIP JAWA BARAT	Thermohigrograph (Alat Laboratorium Klimatologi)	1	Buah	5.112.000	BBPSI PADI SUKAMANDI
BPSIP JAWA BARAT	P.C Unit	3	Buah	33.330.000	BBPSI PADI SUKAMANDI
BBPSI PASCAPANEN	Rice (Alat Pengolah Beras)	1	Buah	2.059.550.000	BBPSI SDLP
BB PENERAPAN	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	1	Unit	235.330.000	KANTOR PUSAT BSIP
BB PENERAPAN	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	1	Unit	374.000.000	KANTOR PUSAT BSIP
LPSP RUMINANSIA BESAR	Sepeda Motor	1	Unit	30.821.577	PSI PKH
BPSIP SULAWESI SELATAN	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	1	Unit	614.625.000	KANTOR PUSAT BSIP
BPSIP SULAWESI SELATAN	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	1	Unit	318.280.000	PSI PERKEBUNAN
				<b>4.924.952.341</b>	

- Hibah masuk senilai Rp415.000.000,00 merupakan hibah masuk dari Pemerintah Kabupaten Dharma Raya Sumatera Barat berupa peralatan dan Mesin lainnya yang digunakan untuk menunjang operasional Kantor Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat sesuai dengan BAST Nomor 030/389.a/BKD/V-2024 serta kendaraan roda empat sesuai BAST Nomor 030/1390/BKD/XII-2023.
- Pengembangan melalui KDP senilai Rp140.146.904,00 merupakan Pengembangan melalui KDP pada satker BBPSI Tanaman Padi yang bersumber dari dana SBSN berupa Unit Alat Laboratorium senilai Rp88.061.930,00 dan Alat Besar darat senilai Rp52.084.974,00
- Reklasifikasi Masuk senilai Rp482.685.750,00 merupakan adanya koreksi pencatatan sebagai tindak lanjut kesalahan kodefikasi detail barang pada modul komitmen pembayaran BAST Kontraktual pada 4 satker lingkup BBPSIP, antara lain BBPSIP senilai Rp96.700.000,00; BPSIP Jambi senilai Rp127.496.250,00; BPSIP Papua senilai Rp141.100.000,00 dan BPSIP Kepulauan Riau senilai Rp117.389.500,00
- Perolehan lainnya senilai Rp136.078.422,00 yang merupakan pencatatan BMN dari Belanja Barang menjadi Aset Tetap antara lain pada satker BPSI Tanaman Aneka Kacang senilai Rp 96.000.000; BPSIP Papua senilai Rp22.066.000,00 dan pada satker BPSI Tanaman Aneka Kacang; BPSIP Aceh senilai Rp18.012.422,00
- Reklasifikasi Masuk dari Persediaan senilai Rp176.676.000,00 yang merupakan adanya koreksi pencatatan sebagai tindak lanjut kesalahan kodefikasi detail barang pada satker BPSIP Kalimantan Timur senilai Rp173.766.000,00 dan BPSIP Papua senilai Rp1.900.000,00.
- Penggunaan Kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaannya senilai Rp1.017.023.500,00 yang merupakan adanya perubahan kondisi BMN yang dilakukan karena kondisi barang tersebut sudah dalam kondisi baik.

- Saldo Awal senilai Rp3.096.846.000,00 yang merupakan BMN hasil inventarisasi yang belum dilakukan pencatatan pada aplikasi SAKTI antara lain BBPSI Mekanisasi Pertanian senilai Rp2.500.000.000 berupa Dynamometer Car perolehan tahun 1985 dan alat angkutan darat bermotor senilai Rp345.000.000,00; BBPSI Pascapanen senilai Rp107.500.000,00 berupa alat angkutan darat bermotor; BBPSI SDLP senilai Rp108.996.000,00 berupa alat rumah tangga dan computer unit; BPSIP Sumatera Barat senilai Rp22.350.000,00 berupa alat rumah tangga dan PSI Peternakan dan Kesehatan Hewan senilai Rp13.000.000,00 berupa alat rumah tangga.

Penjelasan atas Mutasi Kurang nilai aset Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Penghapusan senilai Rp127.177.500,00 yang merupakan adanya penghapusan barang rusak berat pada satker BPSI Agroklimat dan Hidrologi sesuai SK Penghapusan No.246/KPTS/PL.320/A/04/2024, tanggal 04 April 2024 dan Surat Pernyataan Penghapusan No. B-455.1/PL.320/H.8.3/05/2024 tanggal.13 Mei 2024.
- Transfer keluar senilai Rp4.924.952.341,00 antara lain

Nama Satker Pengirim	Uraian Barang	Jml	Satuan	Nilai	Nama Satker Penerima
KANTOR PUSAT BSIP	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	1	Unit	307.000.000	BPSIP DKI JAKARTA
BALAI BESAR PENERAPAN	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	1	Unit	235.330.000	SEKRETARIAT BSIP
BPSIP JATENG	Telephone Mobile	1	Buah	6.132.500	BBPSI BIOGEN
BPSIP JATENG	Lap Top	1	Buah	19.500.000	BBPSI BIOGEN
KANTOR PUSAT BSIP	P.C Unit	3	Buah	53.662.584	PSI PERKEBUNAN
KANTOR PUSAT BSIP	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	1	Unit	89.250.000	B I S I P
BBPSI PADI SUKAMANDI	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	1	Unit	75.332.000	BPSIP JAWA BARAT
BBPSI PADI SUKAMANDI	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Lainnya	2	dummy	43.595.000	BPSIP JAWA BARAT
BBPSI PADI SUKAMANDI	Tractor Tangan Dengan Perlengkapannya	2	Buah	59.570.000	BPSIP JAWA BARAT
BBPSI PADI SUKAMANDI	Alat Perontokan Mesin (Power Thresher)	2	Buah	29.170.000	BPSIP JAWA BARAT
BBPSI PADI SUKAMANDI	Alat Panen Lainnya	1	dummy	129.360.000	BPSIP JAWA BARAT
BBPSI PADI SUKAMANDI	Lemari Besi/Metal	1	Buah	595.000	BPSIP JAWA BARAT
BBPSI PADI SUKAMANDI	Lemari Kayu	6	Buah	13.431.000	BPSIP JAWA BARAT
BBPSI PADI SUKAMANDI	Kardex Besi	3	Buah	6.000.000	BPSIP JAWA BARAT
BBPSI PADI SUKAMANDI	Mesin Absensi	2	Buah	6.286.000	BPSIP JAWA BARAT
BBPSI PADI SUKAMANDI	LCD Projector/Infocus	1	Buah	19.600.000	BPSIP JAWA BARAT
BBPSI PADI SUKAMANDI	Meja Kerja Kayu	17	Buah	16.575.000	BPSIP JAWA BARAT
BBPSI PADI SUKAMANDI	Kursi Besi/Metal	88	Buah	35.216.000	BPSIP JAWA BARAT
BBPSI PADI SUKAMANDI	Meja Rapat	13	Buah	9.958.000	BPSIP JAWA BARAT
BBPSI PADI SUKAMANDI	Meja Komputer	1	Buah	5.590.680	BPSIP JAWA BARAT
BBPSI PADI SUKAMANDI	Mesin Pemotong Rumput	2	Buah	10.000.000	BPSIP JAWA BARAT
BBPSI PADI SUKAMANDI	A.C. Split	14	Buah	67.190.000	BPSIP JAWA BARAT
BBPSI PADI SUKAMANDI	Timbangan Barang	1	Buah	2.530.000	BPSIP JAWA BARAT
BBPSI PADI SUKAMANDI	Mimbar/Podium	1	Buah	2.000.000	BPSIP JAWA BARAT
BBPSI PADI SUKAMANDI	Layar Film/Projector	1	Buah	2.300.000	BPSIP JAWA BARAT
BBPSI PADI SUKAMANDI	Wireless Amplifier	1	Buah	7.530.000	BPSIP JAWA BARAT
BBPSI PADI SUKAMANDI	Timbangan Elektronik	1	Buah	1.200.000	BPSIP JAWA BARAT
BBPSI PADI SUKAMANDI	Thermohigrograph (Alat Laboratorium Klimatologi)	1	Buah	5.112.000	BPSIP JAWA BARAT
BBPSI PADI SUKAMANDI	P.C Unit	3	Buah	33.330.000	BPSIP JAWA BARAT
BBPSI SDLP	Rice (Alat Pengolah Beras)	1	Buah	2.059.550.000	BBPSI PASCAPANEN
KANTOR PUSAT BSIP	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	1	Unit	235.330.000	BB PENERAPAN
KANTOR PUSAT BSIP	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	1	Unit	374.000.000	BB PENERAPAN
PSI PKH	Sepeda Motor	1	Unit	30.821.577	LPSI RUMINANSIA BESAR
KANTOR PUSAT BSIP	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	1	Unit	614.625.000	BPSIP SULAWESI SELATAN
PSI PERKEBUNAN	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	1	Unit	318.280.000	BPSIP SULAWESI SELATAN
				<b>4.924.952.341</b>	

- Hibah Keluar senilai Rp661.453.200,00 merupakan Hibah keluar satker BPSIP Lampung merupakan hibah keluar ke Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura hasil dari kegiatan Kostratani pada tahun 2029 sesuai Permentan No.49 Tahun 2026 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian (KOSTRATANI) antara lain:

No	BAST	PENERIMA	NILAI
1	B-756/PL.140/H.12.9/10/2024	Dinas TPH Kab Lampung Selatan	185.061.300
2	B-736/PL.140/H.12.9/10/2024	Dinas TPH Kab Mesuji	94.495.800
3	B-757/PL.140/H.12.9/10/2024	Dinas TPH Lampung Tengah	184.096.550
4	B-758/PL.140/H.12.9/10/2024	Dinas TPH Lampung Timur	197.799.550
			661.453.200

- Reklasifikasi Keluar senilai Rp482.685.750,00 merupakan adanya koreksi pencatatan sebagai tindak lanjut kesalahan kodifikasi detail barang pada modul komitmen pembayaran BAST Kontraktual pada 4 satker lingkup BBPSIP, antara lain BBPSIP senilai Rp96.700.000,00; BPSIP Jambi senilai Rp127.496.250,00; BPSIP Papua senilai Rp141.100.000,00 dan BPSIP Kepulauan Riau senilai Rp117.389.500,00
- Koreksi Pencatatan senilai Rp233.320.000,00 merupakan Alat Angkutan Darat Bermotor dikarenakan adanya penghapusan aset akibat adanya dobel pencatatan berupa 5 NUP alat angkutan bermotor berdasarkan Surat Keterangan Penghapusan BMN karena Koreksi Pencatatan Nomor B-1000/PL.220/H.3.4/09/2024 yang dilengkapi dengan Berita Acara Inventarisasi aset berupa alat kendaraan bermotor nomor B-999/PL.220/H.3.4/09/2024
- Penghentian Aset dari Penggunaan senilai Rp24.702.125.243,00 sedang dalam proses penghapusan (Rusak Berat) pada 23 satker lingkup BSIP dengan transaksi kode 401 yang menunjukkan bahwa aset-aset tersebut sudah tidak digunakan lagi dalam operasional sebelum dilakukan penghapusan secara definitif atau pelepasan aset lebih lanjut

NAMA SATKER	NILAI
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN	(3.272.329.990)
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN	(1.223.802.203)
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN MEKANISASI PERTANIAN	(2.500.000.000)
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BALI	(30.500.000)
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BANTEN	(132.836.400)
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BENGKULU	(1.547.276.512)
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN DKI JAKARTA	(487.743.904)
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO	(31.500.000)
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT	(499.541.000)
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TIMUR	(913.384.814)
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KEPULAUAN RIAU	(120.720.000)
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN LAMPUNG	(30.907.800)
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN NUSA TENGGARA BARAT	(621.418.100)
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA BARAT	(200.000.000)
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN RIAU	(249.874.000)
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI BARAT	(276.247.000)
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN LAHAN RAWA	(3.076.592.801)
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN HIAS	(2.626.045.069)
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR	(141.700.000)
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PALMA	(4.626.920.637)
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK	(1.260.688.113)
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN SEREALIA	(828.796.900)
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	(3.300.000)
Grand Total	(24.702.125.243)



Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal tidak terdapat koreksi, sehingga saldo Peralatan dan Mesin *Unaudited* dan *Audited* per 31 Desember 2024 adalah tetap

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan akun Peralatan dan Mesin per satker disajikan dalam lampiran.

### C.2.3. Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Badan Standardisasi Instrumen Pertanian per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp2.035.480.270.287,00** dan Rp2.033.683.425.673,00. Terdapat Kenaikan nilai aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.796.844.614,00 atau 0,09 persen.

Adapun rincian mutasi/perubahan nilai Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023</b>	<b>2.033.683.425.673</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Saldo Aw al	260.736.000
Reklasifikasi Masuk	282.995.455.305
Pengembangan Melalui KDP	433.839.000
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	1.026.859.569
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	3.144.603.548
Perolehan Lainnya	134.310.000
Transfer Masuk	6.834.488.000
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	518.525.525
Pembelian	189.675.895
Penyelesaian Pembangunan Langsung	179.500.000
Hibah Masuk	1.437.142.445
Total	297.155.135.287
<b>Mutasi Kurang</b>	
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(102.730.550,)
Transfer Keluar	(6.307.920.000,)
Koreksi Susulan	
Hibah Keluar	(1.840.425.000,)
Perubahan BMN Ke PI	(571.353.000,)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(3.343.346.000,)
Koreksi Pencatatan	(321.729.018,)
Reklasifikasi Keluar	(282.870.787.105,)
Total	(295.358.290.673,)
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>2.035.480.270.287,</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	(568.278.996.621,)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2024</b>	<b>1.467.201.273.666</b>

Penjelasan atas Mutasi Tambah nilai aset Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Saldo awal senilai Rp260.736.000,00 merupakan Bangunan kantin tahun perolehan 2022 pada satker BPSIP Sulawesi Selatan senilai Rp131.712.000,00 yang baru dilakukan pencatatan dalam modul SAKTI aset tetap dikarenakan nilai NJOP baru terbit di Tahun 2024; BPSIP Bengkulu senilai Rp129.024.000,00



merupakan hasil inventarisasi berdasarkan penilaian dari KPKNL yang belum tercatat dalam aset tetap.

2. Reklasifikasi Masuk senilai Rp282.995.455.305,00 yang terdapat 5 satker lingkup BSIP merupakan Kesalahan pencatatan kode barang Aset Tetap Tanah Bangunan Kantor Pemerintah sebanyak 1 unit yang tercatat sebagai Tanah Bangunan Kantor Pemerintah yang seharusnya adalah Bangunan Gedung Kantor Permanen senilai Rp278.420.568.150,00 pada satker PSI Tanaman Pangan; BBPSI SDLP senilai Rp1.029.009.000,00 yang seharusnya Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen tapi tercatat Bangunan Gedung Kantor Permanen; BPSI Lingtan senilai Rp542.106.000,00 yang merupakan Kesalahan pencatatan kode barang Aset Tetap Rumah Negara Golongan II; BPSI Lahan Rawa senilai Rp2.871.153.105,00 merupakan Reklasifikasi asset Gedung dan bangunan untuk kesesuaian Standar Barang dan Standar Kebutuhan(SBSK) selama periode pelaporan berjalan dan BPSIP Gorontalo merupakan Kesalahan pencatatan kode barang Aset Tetap senilai Rp132.619.050,00
3. Pengembangan melalui KDP senilai Rp433.839.000,00 merupakan adanya penambahan nilai pagar permanen dan semi permanen yang pembayarannya dilakukan secara bertahap dalam satu Tahun Anggaran pada satker BPSIP Jawa Timur senilai Rp160.060.000,00; BPSIP Bengkulu senilai Rp123.796.000,00 dan BPSIP Gorontalo senilai Rp149.983.000,00.
4. Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah senilai Rp1.026.859.569,00 yang merupakan adanya Pekerjaan Pemeliharaan pada satker antara lain:

Nama UAKPB	Nama Barang	Nilai
PSI NAK DAN KESWAN	Bangunan Gedung Kantor Permanen	189.109.968
BPSI TAN. HIAS	Bangunan Oceanarium/Observatorium Semi Permanen	22.397.000
BPSI TAS MALANG	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	197.987.000
BPSI TAS MALANG	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	168.165.000
BPSIP ACEH	Bangunan Gedung Kantor Permanen	125.760.000
BPSIP RIAU	Pagar Permanen	162.880.000
BPSIP RIAU	Pagar Permanen	4.650.000
BPSIP SUMSEL	Bangunan Gedung Kantor Permanen	117.929.001
BPSIP BENGKULU	Pagar Permanen	21.882.500
BPSIP BABEL	Pagar Permanen	16.099.100
		1.026.859.569

5. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP senilai Rp3.144.603.548,00 merupakan pencatatan asset terkait pembangunan bangunan gedung kantor dan pagar permanen yang dilakukan secara bertahap pada satker antara lain :

Nama UAKPB	Nama Barang	Nilai
BBPSI PADI	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	426.305.000
PSI TAN. PANGAN	Bangunan Gedung Kantor Permanen	586.008.798
BPSIP ACEH	Pagar Permanen	150.000.000
BPSIP SULTENG	Pagar Permanen	1.632.369.750
BPSIP N T T	Pagar Permanen	169.950.000
BPSIP PAPUA BARAT	Pagar Permanen	179.970.000
		<b>3.144.603.548</b>

6. Perolehan Lainnya senilai Rp134.310.000,00 merupakan adanya perekaman data kontrak dengan akun belanja barang yang menghasilkan penambahan nilai asset berupa pembuatan Gazebo pada satker PSI Tanaman Pangan.
7. Transfer masuk senilai Rp6.834.488.000,00 merupakan Transfer masuk seluruh asset yang berada di IP2SIP Pusakanegara (BBPSI Tanaman Padi) yang diserahkan kepada BPSIP Jawa Barat senilai Rp6.171.077.000,00; Transfer masuk dari PSI Kesehatan dan Hewan ke BPSI Unggas Aneka Ternak senilai Rp136.843.000,00 yang merupakan Pengalihan asset berupa bangunan rumah terkait adanya rencana optimalisasi dan pemanfaatan asset untuk memudahkan proses optimalisasi dan transfer masuk 1 unit bangunan dari kementerian PUPR ke Sekretariat BSIP senilai Rp526.568.000,00
8. Pengembangan Nilai Aset (Langsung) senilai Rp518.525.525,00 yang merupakan adanya pembangunan pagar lingkungan kantor IP2SIP Selakau pada BPSIP Kalimantan Barat
9. Pembelian senilai Rp189.675.895,00 merupakan pembelian pagar permanen senilai Rp149.752.000,00 pada satker BPSIP Sumatera Barat dan senilai Rp39.923.895,00 yang merupakan pembelian Bangunan lantai jemur permanen pada satker BPSIP Riau.
10. Hibah Masuk senilai Rp1.437.142.445,00 merupakan hibah dari Pemerintah Daerah Provinsi Riau untuk kepentingan penyelenggaraan BPSIP Riau

Penjelasan atas Mutasi Kurang nilai aset Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang senilai Rp102.730.550,00 merupakan koreksi perubahan nilai pada aplikasi SAKTI di BPSI Unggas Aneka Ternak senilai Rp68.505.100,00 terkait adanya pengembalian belanja modal bangunan gedung lab permanen; BBPSI Veteriner senilai Rp9.050.500,00 terkait adanya pengembalian belanja modal pagar permanen pada satker BBPSI Veteriner senilai Rp9.050.500,00, BPSIP Riau senilai Rp18.000.000,00, BPSIP Jawa Tengah senilai Rp7.120.950,00.
2. Transfer keluar senilai Rp6.307.920.000,00 merupakan Transfer keluar seluruh asset yang berada di IP2SIP Pusakanegara (BBPSI Tanaman Padi) yang diserahkan kepada BPSIP Jawa Barat senilai Rp6.171.077.000,00; Pengalihan asset berupa bangunan rumah terkait adanya rencana optimalisasi dan pemanfaatan asset untuk memudahkan proses optimalisasi dari BPSI Unggas Aneka Ternak senilai Rp136.843.000,00 kepada PSI Kesehatan dan Hewan

3. Hibah Keluar senilai Rp1.840.425.000,00 merupakan Hibah keluar ke Pemerintah Provinsi Riau untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Riau.
4. Perubahan BMN ke PI senilai Rp571.353.000,00 yang merupakan pencatatan transaksi Properti Investasi pada BPSIP Yogyakarta senilai Rp118.108.000,00 dan BPSI Tanaman Pemanis senilai Rp453.245.000,00.
7. Penghentian Aset dari Penggunaan senilai Rp3.343.346.000,00 sedang dalam proses penghapusan pada 4 satker lingkup BSIP yang menunjukkan bahwa aset-aset tersebut sudah tidak digunakan lagi dalam operasional sebelum dilakukan penghapusan secara definitif atau pelepasan aset lebih lanjut

Nama UAKPB	Nama Barang	Nilai
BPSI TAKA MALANG	Bangunan Lantai Jemur Permanen	-84.974.000
BPSI TAKA MALANG	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	-77.885.000
BPSI TAKA MALANG	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	-28.521.000
BPSI TAKA MALANG	Pagar Lainnya	-912.968.000
BPSI TAKA MALANG	Bangunan Untuk Kandang	-138.739.000
BPSI TAKA MALANG	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	-740.473.000
BPSI TAKA MALANG	Gedung Pos Jaga Permanen	-6.396.000
BPSIP LAMPUNG	Rumah Negara Golongan II Tipe C Darurat	-152.775.000
BPSIP LAMPUNG	Rumah Negara Golongan II Tipe D Semi Permanen	-82.096.000
BPSIP LAMPUNG	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	-61.726.000
BPSIP LAMPUNG	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	-139.100.000
BPSI TAN. PALMA	Rumah Negara Golongan I Tipe E Semi Permanen	-18.960.000
BPSIP SULSEL	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	-559.740.000
BPSIP SULSEL	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	-260.065.000
BPSIP SULSEL	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	-78.928.000
		<b>-3.343.346.000</b>

8. Koreksi Pencatatan senilai Rp321.729.018,00 merupakan adanya koreksi terkait Ketidakesesuaian kode akun dengan kode BMN berupa Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan namun digunakan untuk Renovasi Pagar Keliling IP2SIP Gorontalo TA.2024 sebanyak 1 unit senilai Rp132.619.050,00 pada satker BPSIP Gorontalo dan PSI Kesehatan dan Hewan senilai Rp189.109.968,00 pada Bangunan Gedung Kantor Permanen merupakan koreksi pencatatan dan penambahan nilai pada aplikasi SAKTI semula NUP 9 menjadi NUP 8.
9. Reklasifikasi Keluar senilai Rp282.870.787.105,00 yang terdapat 4 satker lingkup BSIP merupakan Kesalahan pencatatan kode barang Aset Tetap Tanah Bangunan Kantor Pemerintah sebanyak 1 unit yang tercatat sebagai Tanah Bangunan Kantor Pemerintah yang seharusnya adalah Bangunan Gedung Kantor Permanen senilai Rp278.420.568.150,00 pada satker PSI Tanaman Pangan; BBPSI SDLP senilai Rp1.029.009.000,00 yang seharusnya Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen tapi tercatat Bangunan Gedung Kantor Permanen; BPSI Lintan senilai Rp542.106.000,00 yang merupakan Kesalahan pencatatan kode barang Aset Tetap Rumah Negara Golongan II; BPSI Lahan Rawa senilai Rp2.933.843.105,00 merupakan Reklasifikasi asset Gedung dan bangunan untuk kesesuaian Standar Barang dan Standar Kebutuhan(SBSK) selama periode pelaporan berjalan

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal terdapat koreksi pencatatan bertambah senilai Rp3.329.262.524,00 dan koreksi pencatatan berkurang senilai Rp196.838.000,00 sehingga nilai saldo Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 *Audited* adalah senilai **Rp2.038.612.694.811,00** antara lain pada satuan kerja :

1. Sekretariat BSIP, Terdapat renovasi (pengembangan nilai aset) GB terhadap 2 NUP senilai total Rp3.329.262.524,00 (NUP 10 – Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen – 4010204001 senilai Rp1.651.714.603,00 dan NUP 26 – Bangunan gedung kantor permanen – 4010101001 senilai Rp1.677.547.921,00) belum tercatat sebagai Gedung Bangunan.
2. BPSIT Sereal, dalam rangka menindaklanjuti Hasil Data Identifikasi BMN berupa Properti Investasi sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementan Nomor 3813/KPTS/PL.330/A/11/2024 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi BMN yang Memenuhi Karakteristik Properti Investasi lingkup Kementan akan melakukan pencatatan Properti Investasi pada Bangunan Gudang Tertutup Permanen NUP 7 senilai Rp196.838.000,00 seluas 99 m2 yang disewa oleh Koperasi Lestari Mandiri Agrisereal

Adapun rincian mutasi/perubahan nilai Gedung dan Bangunan *Audited* per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023</b>	<b>2.033.683.425.673</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Saldo Awal	260.736.000
Reklasifikasi Masuk	282.995.455.305
Pengembangan Melalui KDP	433.839.000
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	4.356.122.093
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	3.144.603.548
Perolehan Lainnya	134.310.000
Transfer Masuk	6.834.488.000
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	518.525.525
Pembelian	189.675.895
Penyelesaian Pembangunan Langsung	179.500.000
Hibah Masuk	1.437.142.445
Total	300.484.397.811
<b>Mutasi Kurang</b>	
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(102.730.550,)
Transfer Keluar	(6.307.920.000,)
Koreksi Susulan	
Hibah Keluar	(1.840.425.000,)
Perubahan BMN Ke PI	(768.191.000,)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(3.343.346.000,)
Koreksi Pencatatan	(321.729.018,)
Reklasifikasi Keluar	(282.870.787.105,)
Total	(295.555.128.673,)
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>2.038.612.694.811,</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	(569.313.763.631,)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2024</b>	<b>1.469.298.931.180</b>

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan persatker disajikan dalam lampiran

#### C.2.4. JALAN, IIRIGASI DAN JARINGAN

Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Badan Standardisasi Instrumen Pertanian per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp323.357.846.799,00** dan Rp301.709.108.141,00. Terdapat Kenaikan nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada 31 Desember 2024 sebesar Rp21.648.738.658,00 atau naik 7,18% (persen).

Rincian mutasi/perubahan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023</b>	<b>301.709.108.141</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Reklasifikasi Masuk	62.690.000,
Transfer Masuk	1.068.725.500,
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	117.105.000,
Pengembangan Melalui KDP	12.280.794.766,
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	9.194.029.892,
Pembelian	
<b>Total</b>	<b>22.723.345.158,</b>
<b>Mutasi Kurang</b>	
Penghentian Nilai Aset dari Penggunaan	(5.881.000,)
Transfer Keluar	(1.068.725.500,)
<b>Total</b>	<b>(1.074.606.500,)</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>323.357.846.799,</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	(160.605.750.031,)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2024</b>	<b>162.752.096.768,</b>

Penjelasan atas Mutasi Tambah nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Reklasifikasi Masuk senilai Rp62.690.000,00 merupakan adanya perubahan kode barang, nama barang dan NUP pada satker BPSI Lahan Rawa.
2. Transfer Masuk senilai Rp1.068.725.500,00 merupakan transfer masuk Bangunan Air Irigasi yang berada di IP2SIP Pusakanegara (BBPSI Tanaman Padi) yang diserahkan kepada BPSIP Jawa Barat.
3. Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah senilai Rp117.105.000,00 merupakan Belanja Pemeliharaan Jalan aspal sesuai dengan BAST No. 012/BAST-AM/Xii/2024 tanggal 5 Desember 2024.
4. Pengembangan melalui KDP senilai Rp12.280.794.766,00 merupakan pengembangan KDP dari Saluran Irigasi Tersier pada satker BBPSI Tanaman Padi.
5. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP senilai Rp9.194.029.892,00 pada satker BBPSI Tanaman Padi merupakan Pembangunan Embung Penampung Air Senilai Rp7.364.178.292,00 dan Pembangunan Sistem Daya Listrik Dehumidifier sebesar Rp1.829.851.600,00

Penjelasan atas Mutasi Kurang nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penghentian Aset dari penggunaan senilai Rp5.881.000,00 merupakan Penghentian Aset Irigasi Dari Penggunaan berupa Bak Penyimpanan/Tower Air Baku 1 unit tahun perolehan 2010 sebesar Rp1.881.000,00 dan Penghentian Aset Jaringan Dari Penggunaan berupa Sumur Gali (SGL) 1 unit tahun perolehan 2010 sebesar Rp4.000.000,00
2. Transfer Keluar senilai Rp1.068.725.500,00 transfer keluar Bangunan Air Irigasi yang berada di IP2SIP Pusakanegara (BBPSI Tanaman Padi) yang diserahkan kepada BPSIP Jawa Barat.

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal tidak terdapat koreksi, sehingga saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Unaudited dan Audited per 31 Desember 2024 adalah tetap

### C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp11.346.628.479,00** dan Rp11,283,239,779,00. Terdapat kenaikan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp63.388.700,00 atau 0,56 persen. Adapun rincian Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel C.43. Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024

Akun	31-Des-24	31 Desember 2023 (Audited)
Aset Tetap Renovasi	24.733.200,00	24.733.200,00
Aset Tetap Lainnya	11321895279	11.258.506.579
Total	11.346.628.479,00	11.283.239.779,00

Adapun mutasi/perubahan Aset Tetap Lainnya pada 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023</b>	<b>11.283.239.779,00</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Pembelian	132.619.050,00
Saldo Awal	96.255.000,00
Total	228.874.050,
<b>Mutasi Kurang</b>	
Reklasifikasi Keluar	(132.619.050,)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(32.866.300,)
Total	(165.485.350,)
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>11.346.628.479,</b>

Penjelasan atas Mutasi Tambah nilai Aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pembelian senilai Rp132.619.050,00 berupa renovasi pagar keliling IP2SP pada satker BPSIP gorontalo.
2. Saldo awal senilai Rp96.255.000,00 merupakan penambahan saldo awal pada satker BBPSI SDLP berdasarkan Laporan Penilaian yang dilakukan Tim KPKNL



Bogor  
Tanggal 15 Januari 2024

Nomor:

LAP-0005/PRO-01/KNL.0803/01.01.00/2024

Penjelasan atas Mutasi Kurang nilai Aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Reklasifikasi Keluar senilai Rp132.619.050,00 merupakan tindak lanjut kesalahan kode akun yang sebelumnya dicatat sebagai pagar permanen (pagar keliling IP2SP) menjadi gedung bangunan dalam renovasi pada satker BPSIP Gorontalo.
2. Penghentian aset dari penggunaan senilai Rp32.866.300,00 merupakan monografi yang sedang dalam proses usulan penghapusan pada satker BPSI Tanaman Hias.

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal tidak terdapat koreksi, sehingga saldo Aset Tetap Lainnya Unaudited dan Audited per 31 Desember 2024 adalah tetap

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya persatker disajikan dalam lampiran.

#### **C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset- aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai

Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Badan Standardisasi Instrumen Pertanian per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp2.370.184.532,00** dan Rp4.332.570.451,00 KDP merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Rincian lebih lanjut dari Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran. Terdapat penurunan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.962.385.919,00) atau (45,29) % persen. Mutasi/perubahan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel C.46. Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024



<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023</b>	<b>4.332.570.451</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Perolehan/Penambahan KDP	4.600.879.436,
Pengembangan KDP	22.529.569.829,
Koreksi Nilai KDP Bertambah	150.481.600,
Perolehan Lainnya KDP	139.619.050,
Total	27.420.549.915,
<b>Mutasi Kurang</b>	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	(12.345.283.440,)
Pengembangan Melalui KDP	(12.854.780.670,)
Penghapusan/Penghentian KDP	(657.631.500,)
Koreksi Pencatatan KDP	(3.518.240.224,)
Koreksi Nilai KDP Berkurang	(7.000.000,)
Total	(29.382.935.834,)
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>2.370.184.532</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	0,
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2024</b>	<b>2.370.184.532,</b>

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal tidak terdapat koreksi, sehingga saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Unaudited dan Audited per 31 Desember 2024 adalah tetap

Rincian lebih lanjut terkait Kontruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran

#### C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Badan Standardisasi Instrumen Pertanian per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp(2.125.671.193.185,00) dan Rp(2.012.299.031.619,00).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

##### Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	1.509.576.255.161,00	-1.396.786.446.533,00	112.789.808.628,00
2	Gedung dan Bangunan	2.035.480.270.287,00	-568.278.996.621,00	1.467.201.273.666,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	323.357.846.799,00	-160.605.750.031,00	162.752.096.768,00
4	Aset Tetap Lainnya	11.346.628.479,00	0	11.346.628.479,00
<b>Akumulasi</b>		<b>3.879.761.000.726,00</b>	<b>-2.125.671.193.185,00</b>	<b>1.754.089.807.541,00</b>

Setelah Audit BPK RI dan koreksi internal terdapat koreksi pencatatan terhadap saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan mutasi tambah senilai Rp155.398.422,00 dan mutasi kurang senilai Rp1.190.165.432,00, sehingga nilai

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 *Audited* yakni sebesar (Rp2.126.705.960.195,00) Mutasi tambah dan mutasi kurang nilai Akumulasi Penyusutan tersebut disebabkan karena adanya Usulan Jurnal koreksi pada pos Aset Tetap berupa akun Gedung dan Bangunan.

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	1.509.576.255.161,00	-1.396.786.446.533,00	112.789.808.628,00
2	Gedung dan Bangunan	2.038.612.694.811,00	-569.313.763.631,00	1.469.298.931.180,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	323.357.846.799,00	-160.605.750.031,00	162.752.096.768,00
4	Aset Tetap Lainnya	11.346.628.479,00	0	11.346.628.479,00
<b>Akumulasi</b>		<b>3.882.893.425.250,00</b>	<b>-2.126.705.960.195,00</b>	<b>1.756.187.465.055,00</b>

Rincian koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan sebagai berikut dalam lampiran

#### C.2.8. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai saldo properti invertasi yang dimiliki Badan Standardisasi Instrumen Pertanian per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp13.626.464.000,00 dan Rp208.754.216.000,00

#### Rincian Aset Properti Investasi Tahun Anggaran 2024

No	Satker	Nama Aset	Peruntukan	Sesuai Pencatatan		Pemanfaatan Oleh Pihak Lain		
				Vol. (m2)	Nilai Perolehan	Volume	Jenis Pemanfaatan	% Pemanfaatan
1	BPSIT Serealia	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Lahan Pertanian Oleh Koperasi	10.000	1.584.000.000	10.000	Sewa	100
2	BPSI TRI	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Pemanfaatan Sewa oleh Koperasi	235	621.509.000	235	Sewa	100
3	BBPSI Veteriner	Tanah Persil Lainnya	Pekarangan Rumah	5.348	9.413.303.000	5.348	Sewa	100
4	BPSIT Jestro	Mess/Wisma/Bungalow/	Sewa Koperasi (Penginapan)	417	1.043.631.000	417	Sewa	100
5	BBPSI Padi	Tanah Sawah Irigasi	Sewa (Gudang RMU) Sukamandi	192	392.668.000	192	Sewa	100,00
	BPSIT Pemanis	Bangunan Gedung Laboratorium Lainnya	Pemanfaatan Sewa oleh Koperasi	175	453.245.000	175	Sewa	100
	BPSIP Yogyakarta	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Pemanfaatan Sewa oleh Koperasi	140	118.108.000	140	Sewa	100
Jumlah				16.507	13.626.464.000	16.507		100,00

Setelah Audit BPK RI dan koreksi internal terdapat koreksi pencatatan terhadap saldo Properti Investasi dengan mutasi tambah senilai **Rp4.633.080.000,00**, sehingga nilai Properti Investasi per 31 Desember 2024 Audited yakni sebesar **Rp18.259.544.000,00**. Koreksi transaksi tersebut terdapat pada satuan kerja BPSIP Jawa Timur yang belum menyajikan saldo properti investasi terhadap lahan seluas 14,071 ha yang terletak di kecamatan Mojosari yang perjanjian dengan pihak penyewa telah dibuat pada tanggal 30 Agustus 2025 senilai Rp4.436.242.000,00

Adapun rincian Properti Investasi *Audited* per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Satker	Nama Aset	Peruntukan	Sesuai Pencatatan		Pemanfaatan Oleh Pihak Lain		
				Vol. (m2)	Nilai Perolehan	Volume	Jenis Pemanfaatan	% Pemanfaatan
1	BPSIT Serealia	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Lahan Pertanian Oleh Koperasi	10.000	1.584.000.000	10.000	Sewa	100
		Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Pemanfaatan Sewa oleh Koperasi	99	196.838.000	99	Sewa	100
2	BPSIT TRI	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Pemanfaatan Sewa oleh Koperasi	235	621.509.000	235	Sewa	100
3	BBPSI Veteriner	Tanah Persil Lainnya	Pekarangan Rumah	5.348	9.413.303.000	5.348	Sewa	100
4	BPSIT Jestro	Mess/Wisma/Bungalow/	Sewa Koperasi (Penginapan)	417	1.043.631.000	417	Sewa	100
5	BBPSI Padi	Tanah Sawah Irigasi	Sewa (Gudang RMU) Sukamandi	192	392.668.000	192	Sewa	100,00
6	BPSIT Pemanis	Bangunan Gedung Laboratorium Lainnya	Pemanfaatan Sewa oleh Koperasi	175	453.245.000	175	Sewa	100
7	BPSIP Yogyakarta	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Pemanfaatan Sewa oleh Koperasi	140	118.108.000	140	Sewa	100
8	BPSIP Jawa Timur	Tanah Kebun Percobaan	Pemanfaatan Sewa oleh Petani	5.710	4.436.242.000	5.710	Sewa	100
Jumlah				22.316	18.259.544.000	22.316		100,00

### C.2.9. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Badan Standardisasi Instrumen Pertanian per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp(0,00) dan Rp Rp323.181.613,00

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi merupakan kontra akun Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap yang diinvestasikan selain untuk Aset Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Properti Investasi 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Per 31 Desember 2024

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Nilai Perolehan	13.626.464.000	208.754.216.000
Akm. Penyusutan	-451335408	- 323.181.613
Nilai Buku	13.175.128.592	208.431.034.387

Setelah Audit BPK RI dan koreksi internal terdapat koreksi pencatatan terhadap saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi dengan koreksi pencatatan bertambah senilai Rp155.398.422,00 sehingga nilai Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2024 Audited yakni sebesar (Rp606.733.830,00) Mutasi tambah dan mutasi kurang nilai Akumulasi Penyusutan tersebut disebabkan karena adanya Usulan Jurnal koreksi pada pos Aset Tetap berupa akun Gedung dan Bangunan.

	31 Desember 2024 <i>Unaudited</i>	31 Desember 2024 <i>Audited</i>	31 Desember 2023 <i>Audited</i>
Nilai Perolehan	13.626.464.000	18.259.544.000	208.754.216.000
Akm. Penyusutan	- 451.335.408	- 606.733.830	- 323.181.613
Nilai Buku	13.175.128.592	17.652.810.170	208.431.034.387

### C.3. PIUTANG JANGKA PANJANG

#### C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp842.155.657,00 dan Rp81.046.376,00. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Piutang Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan yang akan datang. Rincian Piutang Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

Perbandingan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi  
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No.	Eselon I	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	842.155.657,00	81.046.376,00	761.109.281,00	939,10
	<b>Jumlah</b>	842.155.657,00	81.046.376,00	761.109.281,00	939,10

Nilai Piutang Tagihan TP/TGR senilai Rp842.155.657,00 merupakan kategori piutang tagihan tuntutan ganti rugi, dimana piutang ini terdapat pada 5 satker di Badan Standardisasi Instrumen Pertanian antara lain sebagai berikut:

1. Satker Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bogor memiliki Piutang Tagihan TGR senilai Rp45.026.504,00 merupakan piutang yang dikarenakan adanya temuan Itjen sesuai dengan LHP Nomor: R.234/PW.130/G.4/10/2020, dimana piutang ini berasal dari biaya kelebihan pembayaran tugas belajar atas nama Sabilal Fahri, M.Si.

2. Satker Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan memiliki Piutang Tagihan TGR senilai Rp268.367.381,00 merupakan piutang dikarenakan adanya temuan Itjen sesuai dengan LHP Nomor: R.401/PW.180/G.5/12/2023, dimana piutang ini merupakan piutang yang berasal pengeluaran belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan debitur atas nama Nurya Yuniyati, SP.
3. Satker Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pertanian Mekanisasi Pertanian Piutang Tagihan TGR senilai Rp58.400.000,00, dimana piutang ini merupakan piutang yang berasal dari biaya kelebihan pembayaran tugas belajar atas nama Firman Satya.
4. Satker Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur memiliki Piutang Tagihan TGR senilai Rp51.876.659,00 merupakan piutang disebabkan karena adanya temuan Itjen sesuai dengan LHP Nomor: R.174/PW.130/G.5/07/2024, dimana nilai tersebut merupakan temuan piutang terkait beberapa permasalahan sebagai berikut yakni:
  - Piutang atas kelebihan pembayaran Produk Tan. Pangan terstandar senilai Rp13.048.000,00.
  - Piutang atas Kemahalan Harga pada Keg. Produk Instrumen Tan. Pangan terstandar senilai Rp5.292.000,00
  - Piutang atas Kelebihan Pembayaran pada Keg. Layanan Perkantoran senilai Rp23.235.300,00.
  - Piutang atas Kemahalan Harga pada Keg. Layanan Perkantoran senilai Rp8.681.360,00.
  - Piutang atas Kelebihan Pembayaran pada Keg. Layanan Perencanaan dan penganggaran senilai Rp1.620.000,00.
5. Satker Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak dengan nilai Piutang sebesar Rp418.485.113,00 merupakan piutang dikarenakan adanya temuan Itjen sesuai dengan LHP Itjen, dimana nilai tersebut adalah piutang atas kemahalan harga pakan dan selisih penjualan ternak domba, DOC, dan telur ayam UPBS.

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal tidak terdapat koreksi, sehingga sehingga saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Unaudited dan Audited per 31 Desember 2024 adalah tetap

### **C.3.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi**

Saldo Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp-104.126.864.00 dan Rp-405.232.00.

Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka panjang yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR  
31 Desember 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Nilai Penyisihan
<b>Tagihan TP/TGR</b>		
Lancar	423.670.545	2.118.353
Kurang Lancar	268.085.113	26.808.511
Diragukan	150.400.000	75.200.000
Macet	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>842.155.658</b>	<b>104.126.864</b>

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal tidak terdapat koreksi, sehingga saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Unaudited dan Audited per 31 Desember 2024 adalah tetap

Rincian penyisihan piutang tagihan TP/TGR sesuai dengan kategori piutangnya disajikan pada lampiran

### C.3.3. Piutang Jangka Panjang Lainnya

Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing senilai Rp3.275.989.901,00 dan Rp3.347.221.263,00.

Piutang jangka Panjang Lainnya diakui saat timbulnya hak pemerintah untuk menagih kepada pihak lain dan dicatat sebesar nilai nominal transaksi yang berakibat pada timbulnya hak tagih pemerintah. Rincian Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah sebagai berikut:

#### Perbandingan Piutang Jangka Panjang Lainnya 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No.	Eselon I	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	3.275.989.901,00	3.347.221.263,00	71.231.362,00	2,13
	<b>Jumlah</b>	3.275.989.901,00	3.347.221.263,00	71.231.362,00	2,13

#### Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya Per Debitur Per 31 Desember 2024



No	Nama Debitur	31-Dec-24
1	Bastian, SE (BPSIP Bengkulu)	60.290.945
2	Simon Senjaya (Sekretariat BSIP)	660.336.436
3	Dr. Ir. Budi Hartoyo (BPTP Jateng)	88.310.677
4	Azwar, SP (BPTP Sumbar)	566.026.014
5	Ir.Prisdiminggo (BPTP NTB)	264.075.333
6	Rivi Syafri (Direktur CV. Dagang Penyalur Riau)	52.352.675
7	Fahmi Aprianto (PPK - Balitsa)	1.322.885.600
7	BPSIP Jawa Timur	52.954.038
8	BPSIP Sumatera Utara	208.758.183
<b>Jumlah</b>		<b>3.275.989.901</b>

Piutang Jangka Panjang Lainnya Per 31 Desember 2024 diatas telah mengalami pergerakan nilai jika dibandingkan dengan periode pelaporan keuangan 31 Desember 2023, dimana saat ini nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya mengalami penurunan nilai yakni sebesar Rp71.231.362,00. Pergerakan nilai tersebut disebabkan karena adanya pembayaran angsuran piutang oleh beberapa debitur serta penambahan piutang dari beberapa satker lingkup BSIP. Untuk pembayaran angsuran piutang terdapat pada 6 satker antara lain meliputi satker BPSIP Jawa Tengah sebesar Rp4.500.000,00, BPSIP Riau senilai Rp2.000.000,00, BPSI Tanaman Sayuran sebesar Rp60.000.000,00, BPSIP Jawa Timur sebesar Rp10.185.400,00, BPSIP Sumatera Utara sebesar Rp50.000.000,00 serta pelunasan nilai piutang dari satker BPSI Palma sebesar Rp5.043.852, sehingga total angsuran piutang jangka panjang lainnya lingkup BSIP sampai dengan periode pelaporan 31 Desember 2024 senilai Rp131.729.252,00. Sedangkan untuk penambahan nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya terdapat pada 2 satker lingkup BSIP yaitu BPSIP Jawa Timur sebesar Rp55.454.037,00 dan satker BPSI Tanaman Palma sebesar Rp5.043.852,00.

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal tidak terdapat koreksi, sehingga saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya Unaudited dan Audited per 31 Desember 2024 adalah tetap

#### C.3.4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya

Saldo penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing senilai Rp-2.358.791.341,00 dan Rp-2.344.261.760,00.

Penyisihan Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka panjang lainnya yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Jangka Panjang Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR  
31 Desember 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Tagihan TP/TGR</b>			
Lancar	212.663.740	0,005	1.063.319
Kurang Lancar	-	0,10	-
Diragukan	1.411.196.278	0,50	705.598.139
Macet	1.652.129.883	1,00	1.652.129.883
<b>Jumlah</b>	<b>3.275.989.901</b>		<b>2.358.791.341</b>

Saldo penyisihan Piutang Jangka Panjang Lainnya senilai Rp2.358.791.341,00 terdapat pada beberapa satuan kerja lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian sebagai berikut:

1. Sekretariat BSIP dengan nilai penyisihan sebesar Rp-660.442.800,00 dengan kategori kualitas piutang macet.
2. BPSI Tanaman Sayur dengan nilai penyisihan sebesar Rp-661.442.800,00 dengan kategori kualitas piutang diragukan.
3. BPSIP Jawa Tengah dengan nilai penyisihan sebesar Rp-44.155.339,00 dengan kategori kualitas piutang diragukan.
4. BPSIP Jawa Timur dengan nilai penyisihan sebesar Rp-52.954.038,00 yang terdiri dari penyisihan piutang kualitas lancar senilai Rp19.528 dan penyisihan kualitas piutang dengan kategori macet sebesar Rp49.048.480,00.
5. BPSIP Sumatera Utara dengan nilai penyisihan sebesar Rp-1.043.791,00 dengan kategori kualitas piutang lancar.
6. BPSIP Sumatera Barat dengan nilai penyisihan sebesar Rp-566.026.014,00 dengan kategori kualitas piutang macet.
7. BPSIP Riau dengan nilai penyisihan sebesar Rp-52.352.675,00 dengan kategori kualitas piutang macet.
8. BPSIP Bengkulu dengan nilai penyisihan sebesar Rp-60.290.945,00 dengan kategori kualitas piutang macet.
9. BPSIP NTB dengan nilai penyisihan sebesar Rp-264.075.333,00 dengan kategori kualitas piutang macet.

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal tidak terdapat koreksi, sehingga saldo Penyisihan Piutang Jangka Panjang Lainnya Unaudited dan Audited per 31 Desember 2024 adalah tetap

#### C.4. ASET LAINNYA

##### C.4.1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. (sesuai SAP)

Saldo Aset Tak Berwujud per per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing senilai **Rp29.948.319.831,00** dan Rp29.966.108.404,00. Terjadi penurunan aset tak berwujud sebesar Rp17.788.573,00 atau 0,06 %. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Perbandingan Aset Tak Berwujud  
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Akun	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
Hak Cipta	28.025.000,	28.025.000,	0,	0,00
Paten	512.872.250,	512.872.250,	0,	0,00
Software	4.212.716.717,	4.220.831.717,	-8.115.000,	0,19
Hasil Kajian/Penelitian	24.710.591.864,	24.710.591.864,	0,	0,00
Aset Tak Berwujud Lainnya	475.999.000,	475.999.000,	0,	0,00
<b>JUMLAH</b>	<b>29.940.204.831,</b>	<b>30.004.827.154,</b>	<b>-8.115.000,</b>	<b>0,216</b>

Rincian mutasi Aset Tetap Berwujud per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel C.50. Mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023</b>	<b>29.948.319.831,00</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	2.216.395,00
Total	2.216.395,00
<b>Mutasi Kurang</b>	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(10.331.395,)
Total	(10.331.395,)
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>29.940.204.831</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	(4.683.708.073,)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>25.256.496.758,00</b>

Rincian mutasi Aset Tetap Berwujud dari Belanja Modal pada per 31 Desember 2024 tidak terdapat realisasi.

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal tidak terdapat koreksi, sehingga saldo Aset Tak Berwujud Unaudited dan Audited per 31 Desember 2024 adalah tetap.

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Aset Tak Berwujud persatker disajikan dalam lampiran.

#### C.4.2. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya yang dimiliki Badan Standardisasi Instrumen Pertanian per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing masing sebesar **Rp7.480.811.324,00** dan **Rp3.860.308.590,00**. Nilai tersebut masuk

dalam dalam rekening penampungan akhir tahun anggaran (RPATA) pada periode pelaporan 31 Desember 2024.

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan Uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/ keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya

Pada Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Dana Yang Dibatasi Penggunaannya masuk dalam rekening penampungan akhir tahun anggaran (RPATA) antara lain:

- a. Sekretariat BSIP senilai Rp2.400.718.474,00 merupakan pekerjaan perbaikan mess, aula dinas dan rapat senilai Rp1.489.982.750,00; Pembayaran Kontrak Jasa Cleaning Service dan Internet senilai Rp 812.235.724,00; Pengembangan Website ICARE senilai Rp98.500.000,00
- b. BBSI Tanaman Padi senilai Rp4.718.800.700,00 merupakan Pekerjaan Embung Penampung air dan saluran irigasi.
- c. BPSIP Bangka Belitung senilai Rp200.000.000,00 merupakan Pengerjaan Rehabilitasi Gedung Tehnisi
- d. BPSIP Sulawesi Selatan senilai Rp57.365.200,00 merupakan kontrak Pengadaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service), Keamanan dan Layanan Internet
- e. BPSI Tanaman Sayuran senilai Rp93.975.000,00 merupakan kontrak Pengadaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service)
- f. BPSIP Jawa Barat senilai Rp9.951.950,00 merupakan Pekerjaan Pemeliharaan Rumah Dinas

Rincian RPATA per 31 Desember 2024

NAMA SATKER	RPATA	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya (BAST di input tahun 2024)	SP2D Pembayaran RPATA Tahun 2025	Total SP2D Pembayaran RPATA
SEKRETARIAT BSIP	69.647.270	69.647.270	69.647.270	61.490.382	61.490.382
SEKRETARIAT BSIP	139.639.080	139.639.080	139.639.080	123.284.954	123.284.954
SEKRETARIAT BSIP	345.951.900	345.951.900	345.951.900	305.435.010	305.435.010
SEKRETARIAT BSIP	291.200.000	291.200.000	291.200.000	257.095.495	257.095.495
SEKRETARIAT BSIP	99.484.000	99.484.000	99.484.000	87.832.720	87.832.720
SEKRETARIAT BSIP	235.000.000	235.000.000	235.000.000	207.477.478	207.477.478
SEKRETARIAT BSIP	463.235.724	463.235.724	463.235.724	445.071.709	445.071.709
SEKRETARIAT BSIP	171.000.000	171.000.000	171.000.000	150.972.973	150.972.973
SEKRETARIAT BSIP	178.000.000	178.000.000	178.000.000	157.153.153	157.153.153
SEKRETARIAT BSIP	98.500.000	98.500.000	98.500.000	86.963.964	86.963.964
SEKRETARIAT BSIP	69.636.000	69.636.000	69.636.000	61.480.432	61.480.432
SEKRETARIAT BSIP	113.750.000	113.750.000	113.750.000	100.427.927	100.427.927
SEKRETARIAT BSIP	125.674.500	125.674.500	125.674.500	110.955.864	110.955.864
BBPSI TANAMAN PADI	3.765.636.000	3.765.636.000	3.765.636.000	3.333.096.730	3.333.096.730
BBPSI TANAMAN PADI	348.084.000	348.084.000	348.084.000	308.101.378	308.101.378
BBPSI TANAMAN PADI	5.455.650	5.455.650	5.455.650	4.742.975	4.742.975
BBPSI TANAMAN PADI	592.175.050	592.175.050	592.175.050	592.175.050	592.175.050
BBPSI TANAMAN PADI	7.450.000	7.450.000	7.450.000	6.476.802	6.476.802
BPSIP BABEL	200.000.000	200.000.000	200.000.000	176.576.560	176.576.560
BPSIP SULAWESI SELATAN	23.521.200	23.521.200	23.521.200	20.284.697	20.284.697
BPSIP SULAWESI SELATAN	15.844.000	15.844.000	15.844.000	13.663.866	13.663.866
BPSIP SULAWESI SELATAN	18.000.000	18.000.000	18.000.000	15.891.892	15.891.892
BPSITANAMAN SAYURAN	93.975.000	93.975.000	93.975.000	82.969.919	82.969.919
BPSIP JAWA BARAT	9.951.950	9.951.950	9.951.950	9.951.950	9.951.950
	<b>7.480.811.324</b>	<b>7.480.811.324</b>	<b>7.480.811.324</b>	<b>6.719.573.880</b>	<b>6.719.573.880</b>

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal tidak terdapat koreksi, sehingga saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Unaudited dan Audited per 31 Desember 2024 adalah tetap

#### C.4.3. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Badan Standardisasi Instrumen Pertanian per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp116.495.016.660,00** dan Rp111.088.009.886,00. Terjadi kenaikan aset lain-lain sebesar Rp5.407.006.774,00 atau 4,87 %. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Badan Standardisasi Instrumen Pertanian serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Mutasi nilai Aset Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023</b>	<b>111.088.009.886</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	28.094.549.938,
Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	1.631.823.107,
Total	29.726.373.045,
<b>Mutasi Kurang</b>	
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	(1.019.239.895,)
Penghapusan	(76.119.028,)
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(23.224.007.348,)
Total	(24.319.366.271,)
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>116.495.016.660,</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	(49.381.194.631,)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2024</b>	<b>67.113.822.029,</b>

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal tidak terdapat koreksi, sehingga saldo Aset Lain-lain Unaudited dan Audited per 31 Desember 2024 adalah tetap

#### C.4.4. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Badan Standardisasi Instrumen Pertanian per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar (Rp49.381.194.631,00) dan Rp(47.016.681.135,00).

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

##### Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tak Berwujud	29.940.204.831,00	-4.683.708.079,00	25.256.496.752,00
2	Aset Lain-lain	116.495.016.660,00	-49.381.194.631,00	67.113.822.029,00
<b>Total</b>		<b>146.435.221.491,00</b>	<b>-54.064.902.710,00</b>	<b>92.370.318.781,00</b>

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal tidak terdapat koreksi, sehingga saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Unaudited dan Audited per 31 Desember 2024 adalah tetap

## C5. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji sebesar Rp10.395.281.585,00 dan Rp5.449.097.904,00. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 4.946.183.681,00 atau 90,77% apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan pada tabel di bawah ini.

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ Penurunan	%
Utang Pihak Ketiga	8.335.882.482	4.129.901.942	- 4.205.980.540	- 101,84
Pendapatan Diterima Dimuka	1.775.162.816	1.293.274.962	- 481.887.854	- 37,26
Hibah Yang Belum Disahkan	284.236.287	-	- 284.236.287	
Uang Muka KPPN	-	25.921.000	25.921.000	
<b>Jumlah</b>	<b>10.395.281.585</b>	<b>5.449.097.904</b>	<b>- 4.946.183.681</b>	<b>- 90,77</b>

Setelah Audit BPK RI dan koreksi internal terdapat koreksi pencatatan terhadap saldo Kewajiban Jangka Pendek dengan mutasi kurang senilai Rp308.865.728,00, sehingga nilai pos Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 *Audited* yakni sebesar (Rp10.086.415.857,00). Mutasi kurang nilai kewajiban jangka pendek disebabkan karena adanya Usulan Jurnal koreksi Utang Kepada Pihak Ketiga pada akun Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar dan Hibah Langsung yang Belum Disahkan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Kementerian Pertanian per 31 Desember 2024 *Audited* dan 31 Desember 2023 disajikan pada tabel di bawah ini.

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ Penurunan	%
Utang Pihak Ketiga	8.311.253.041	4.129.901.942	- 4.181.351.099	- 101,25
Pendapatan Diterima Dimuka	1.775.162.816	1.293.274.962	- 481.887.854	- 37,26
Hibah Yang Belum Disahkan	-	-	-	
Uang Muka KPPN	-	25.921.000	25.921.000	
<b>Jumlah</b>	<b>10.086.415.857</b>	<b>5.449.097.904</b>	<b>- 4.637.317.953</b>	<b>- 85,10</b>

### C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp8.335.882.482,00 dan Rp4.126.901.942,00. Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar



Rp4.205.980.540,00 atau 101,84% apabila dibandingkan dengan saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Badan Standardisasi Instrumen Pertanian memiliki utang kepada pihak ketiga meliputi belanja pegawai yang masih harus dibayar, belanja barang yang masih harus dibayar, dan utang kepada pihak ketiga lainnya. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Badan Standardisasi Instrumen Pertanian per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga  
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	59.552.918	240.072.697	- 180.519.779
2	Belanja barang yang masih harus dibayar	3.557.473.667	849.254.284	2.708.219.383
3	Belanja modal yang masih harus dibayar	-	2.800.646.141	- 2.800.646.141
4	Pengeluaran Transito yang masih harus dibayar	-	239.928.820	- 239.928.820
5	Utang kepada Pihak ketiga lainnya	4.718.855.897		4.718.855.897
<b>Total</b>		<b>8.335.882.482</b>	<b>4.129.901.942</b>	<b>4.205.980.540</b>

Berdasarkan tabel diatas rincian Utang Kepada Pihak Ketiga pada periode pelaporan keuangan per 31 Desember 2024 Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dapat diungkapkan sebagai berikut:

1. Akun belanja pegawai yang masih harus dibayar merupakan gaji induk pegawai yang baru akan dibayarkan melewati periode pelaporan 31 Desember 2024,
2. Belanja barang yang masih harus dibayar adalah honor PPNPN/UHL, beban tagihan listrik, Telepon, air, dan langganan daya dan jasa lainnya.
3. Sedangkan Akun Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya merupakan beban tagihan biaya pengawasan dan pemeliharaan saluran irigasi, serta pemeliharaan pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan embung penampungan air.

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal terdapat koreksi pencatatan berkurang senilai **Rp24.629.441,00** sehingga nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 *Audited* adalah senilai **Rp8.311.253.041,00**. Koreksi transaksi tersebut terdapat pada satuan kerja BPSIP Riau karena adanya kesalahan pencatatan akrual tagihan listrik, telepon dan internet TA 2024 yang sudah dilakukan penyetoran pada Desember 2023.

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga di Badan Standardisasi Instrumen Pertanian disajikan pada lampiran **C.18**.

### C.5.2. Hibah Yang Belum Disahkan

Saldo Hibah yang Belum Disahkan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp284.236.287,00 dan Rp0,00. Hibah langsung yang Belum Disahkan merupakan Hibah yang diterima namun proses pengajuan belum selesai sampai dengan tanggal periode pelaporan. Saat periode pelaporan keuangan 31 Desember 2024 Hibah yang Belum Disahkan di Badan Standardisasi Instrumen Pertanian ada pada satuan kerja Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Tanaman Sayuran. Hibah tersebut adalah Hibah Langsung Uang dari Onions New Zealand untuk kegiatan Agriculture Standardization toward sustainable shallot production in indonesia sesuai Nomor Register yang dikeluarkan oleh Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Settlement – Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko -Kementerian Keuangan Nomor 2WM1TC7A tanggal 31 Juli 2023 (Terlampir) dan *Technical Cooperation Partnership Agreement* antara Badan Standarisasi Instrumen Pertanian melalui Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Tanaman Sayuran dengan Onions New Zealand (Terlampir) sebesar 30.000 \$NZ atau senilai Rp284.236.287,00 (Rekening Koran Terlampir) Belum disahkannya nilai hibah sebesar Rp284.236.287,00 dikarenakan adanya Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) yang di hold sementara oleh KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah (KPH) terkait adanya kekurangan dokumen Surat Keterangan Selisih Saldo (SKKS) dan Persetujuan Pembukaan Rekening Koran yang pada saat itu segera ditindaklanjuti dengan mengirimkan Kembali di waktu yang bersamaan pada tanggal 6 Februari 2025 dateline penyelesaian administrasi administrasi sesuai Surat DJPB Nomor S-31/PB/2025 Tanggal 23 Januari 2025. namun keesokan harinya setelah hari terakhir pengajuan baru difollow up oleh KPPN KPH yang menyarankan untuk diusulkan kembali pada Laporan Keuangan Audited periode 14.

Hibah yang belum disahkan memiliki lawan akun dari akun Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan, namun terdapat perbedaan nilai dimana berdasarkan neraca percobaan untuk akun Kas Lainnya di K /L dari Hibah yang Belum Disahkan senilai Rp246.843.387,00 dan Hibah yang Belum Disahkan senilai Rp284.236.287 sehingga selisih senilai Rp37.393.000,00. Selisih tersebut merupakan BAST belanja hibah berupa belanja barang persediaan yang tidak dilakukan penghapusan terkait SP2HL yang telah dibatalkan oleh Kantor dan Pinjaman Hibah sampai dengan batas akhir penutupan periode 13.

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal terdapat koreksi pencatatan bertambah senilai Rp284.236.287,00 sehingga nilai saldo Hibah Yang Belum Disahkan per 31 Desember 2024 *Audited* adalah senilai Rp0,00. Koreksi transaksi tersebut terdapat pada satuan kerja BPSI Tanaman Sayuran yang telah menindaklanjuti SE DJPB Nomor S-95/PB/2025 Tanggal 21 Maret 2025 untuk melakukan pengesahan transaksi hibah langsung yang pada saat periode pelaporan Unaudited di *hold* oleh KPPN KPH, terkait hal tersebut telah diterbitkan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) Nomor 00214T/237217/2024 dengan proyek *The Establishmnet and Sustainable Development of the Biopellet Industry in Indonesia* dari Onions New Zealand.

### C.5.3. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah. Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah pada akhir periode pelaporan keuangan. (Bultek no.22 pendapatan diterima dimuka)

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.775.162.816,00 dan Rp1.293.274.962,00. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.775.162.816,00 apabila dibandingkan dengan saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

#### Perbandingan Pendapatan Diterima Dimuka 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	1.775.162.816	1.293.274.962	481.887.854
<b>Jumlah</b>	<b>1.775.162.816</b>	<b>1.293.274.962</b>	481.887.854

Pendapatan sewa diterima dimuka tersebut terdapat pada 4 (empat) satker lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Nama Satker	31-Des-24	Penjelasan
1	BBPSI Veteriner	11.805.833,	Sewa Lahan Balitvet untuk ATM/Koperasi yang berlokasi di Cimanggis
2	BBPSI Biogen	10.628.625,	Penerimaan pendapatan berasal dari sewa tanah oleh Koperasi TAMPAN
2	BPSI Serealia	276.921.875,	1. Sewa lahan 64ha Rp245.783.000,00 2. Sewa ATN BRI senilai Rp12.188.000,00 3. Sewa Lahan Sawah 1ha senilai Rp7.480.000,00 4. Sewa Kantor Koperasi senilai Rp11.470.875,00
3	BPSIP Yogyakarta	22.877.750,	Pendapatan dari sewa gedung bangunan kantor lainnya.
4	BBPSI Padi	1.452.928.733,	Pendapatan berasal dari sewa koperasi, kantin, lahan pertanian, dan untuk ATM Bank BRI
<b>Total</b>		<b>1.775.162.816</b>	-

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal tidak terdapat koreksi, sehingga saldo Pendapatan Sewa Diterima dimuka Unaudited dan Audited per 31 Desember 2024 adalah tetap

Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga di Badan Standardisasi Instrumen Pertanian disajikan pada lampiran.

#### **C.5.4. Uang Muka dari KPPN**

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp25.921.000,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal tidak terdapat koreksi, sehingga saldo Uang Muka dari KPPN Unaudited dan Audited per 31 Desember 2024 adalah tetap.

### **C.6. EKUITAS**

#### **C.6. Ekuitas**

Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. (Sesuai SAP).

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp44.240.118.576.811,00 dan Rp45.034.208.920.591,00. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp794.090.343.780 atau 1,76% apabila dibandingkan dengan saldo Ekuitas per 31 Desember 2023.

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal terdapat koreksi pencatatan bertambah senilai Rp1.020.722.920,00 dan koreksi pencatatan berkurang senilai [Rp3.245.668.807,00](#) sehingga nilai Ekuitas per 31 Desember 2024 *Audited* adalah senilai [Rp44.242.343.522.698,00](#).

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### KEGIATAN OPERASIONAL

Kegiatan Operasional adalah transaksi dan aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban. Dalam konteks pemerintah, kegiatan operasional ini lebih berfokus pada pelayanan publik dan pelaksanaan anggaran. Kegiatan Operasional ini dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya dapat disajikan sebagai berikut.

**Tabel D.1 Perbandingan Kegiatan Operasioanal Laporan Operasional (LO)  
periode 31 Desember 2024 dan 2023**

Uraian	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	Naik (Turun) Rp	Naik (Turun) %
Jumlah Pendapatan	31.889.767.201	21.321.795.287	10.567.971.914	49,56
Jumlah Beban	941.106.741.392	964.823.409.270	-23.716.667.878	-2,46
<b>Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional</b>	<b>-909.216.974.191</b>	<b>-943.501.613.983</b>	<b>34.284.639.792</b>	<b>-3,63</b>

Setelah dilaksanakan Audit BPK terdapat koreksi pencatatan, sehingga saldo Kegiatan Operasional *Audited* sebagai berikut.

Uraian	31 DESEMBER 2024 UNAUDITED	31 DESEMBER 2024 AUDITED	Koreksi (Rp)
Jumlah Pendapatan	31.889.767.201	31.889.767.201	0
Jumlah Beban	941.106.741.392	941.499.134.872	-392.393.480
<b>Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional</b>	<b>-909.216.974.191</b>	<b>-909.609.367.671</b>	<b>392.393.480</b>

### PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan operasional adalah pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Pendapatan ini tidak termasuk penerimaan yang bersifat non-operasional, seperti pendapatan hibah atau pendapatan dari penjualan aset.

Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar **Rp31.889.767.201,00** dan Rp21.321.795.287,00. Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2024 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp10.567.971.914,00 atau 49,56% apabila dibandingkan dengan Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2023.

Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2024 yang disajikan seluruhnya berasal dai Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya (PNBP Lainnya).

#### D.1 PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari sumber-sumber selain pajak, seperti penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan pemerintah, hasil pengelolaan kekayaan negara, dan sumber-sumber lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Saldo Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp31.889.767.201,00** dan **Rp21.321.795.287,00**, mengalami kenaikan/penurunan sebesar **Rp10.567.971.914,00** atau **49,56%**.

**Tabel D.1.1 Perbandingan Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya pada Laporan Operasional (LO) periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023**

AKUN	URAIAN	31 DESEMBER 2024 (Rp)	31 DESEMBER 2023 (Rp)	Naik (Turun) Rp	Naik (Turun) %
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	14.865.063.113	8.377.897.856	6.487.165.257	77,43
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	459.527.892	123.004.706	336.523.186	273,59
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	3.032.461.885	2.197.561.706	834.900.179	37,99
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	24.677.886	-	24.677.886	-
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	969.925.000	843.085.000	126.840.000	15,04
425252	Pendapatan Perizinan Pertanian	128.300.000	-	128.300.000	#DIV/0!
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi	7.104.888.500	3.722.452.400	3.382.436.100	90,87
425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	-	2.500.000	(2.500.000)	-
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	3.000.000	-	3.000.000	-
425429	Pendapatan Pengembangan SDM Lainnya	125.411.000	45.152.000	80.259.000	177,75
425431	Pendapatan Layanan Penelitian/Riset dan Pengembangan IPTEK	-	70.110.000	(70.110.000)	(100,00)
425432	Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan	222.984.000	107.288.000	115.696.000	107,84
425434	Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Pengembangan IPTEK	-	3.756.727.000	(3.756.727.000)	(100,00)
425435	Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan	-	91.217.000	(91.217.000)	(100,00)
425436	Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual	2.582.033.300	1.656.698.414	925.334.886	55,85
425439	Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek Lainnya	-	4.833.160	(4.833.160)	(100,00)
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan dan Informasi	6.610.000	45.750.000	(39.140.000)	(85,55)
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	2.307.707.227	225.859.000	2.081.848.227	921,75
425761	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan	-	262.608	(262.608)	(100,00)
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	6.772.794	452.896	6.319.898	1.395,44
425811	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	46.191.059	12.167.832	34.023.227	279,62
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	4.213.545	38.775.709	(34.562.164)	(89,13)
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>31.889.767.201</b>	<b>21.321.795.287</b>	<b>10.567.971.914</b>	<b>49,56</b>

Perbandingan realisasi PNBP Lainnya di LRA dengan nilai PNBP Lainnya di LO beserta penjelasan selisihnya disajikan dalam lampiran.

Setelah dilaksanakan Audit BPK tidak terdapat koreksi pencatatan, sehingga saldo PNBP Lainnya LO adalah tetap.

## BEBAN

Semua pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintah. Beban ini mencerminkan penggunaan sumber daya ekonomi (seperti uang, barang, atau jasa) yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan publik, melaksanakan program, atau mendukung aktivitas operasional lainnya.

Nilai Beban Tahun 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar **Rp941.106.741.392,00** dan **Rp964.823.409.270,00**. Nilai Beban Tahun 2024 mengalami kenaikan/penurunan sebesar **(Rp23.716.667.878,00)** atau **(2,46%)** apabila dibandingkan dengan Nilai Beban Tahun 2023. Rincian nilai Beban Tahun 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.

Uraian	31 DESEMBER 2024 (Rp)	31 DESEMBER 2023 (Rp)	Naik (Turun) Rp	Naik (Turun) %
Beban Pegawai	-278.189.807.166	-269.059.233.162	-9.130.574.004	3,39
Beban Persediaan	-40.542.300.690	-57.138.591.503	16.596.290.813	-29,05
Beban Barang dan Jasa	-277.666.072.167	-288.853.260.981	11.187.188.814	-3,87
Beban Pemeliharaan	-109.386.006.236	-74.498.767.385	-34.887.238.851	46,83
Beban Perjalanan Dinas	-87.798.934.295	-117.889.176.146	30.090.241.851	-25,52
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	-11.022.852.956	-1.634.356.600	-9.388.496.356	574,45
Beban Penyusutan dan Amortisasi	-136.613.164.817	-155.540.148.915	18.926.984.098	-12,17
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	112.396.935	-209.874.578	322.271.513	-153,55
<b>Jumlah Beban</b>	<b>-941.106.741.392</b>	<b>-964.823.409.270</b>	<b>23.716.667.878</b>	<b>-2,46</b>

Setelah dilaksanakan Audit BPK terdapat koreksi pencatatan sebagai berikut:

Uraian	31 DESEMBER 2024 UNAUDITED (Rp)	31 DESEMBER 2024 AUDITED (Rp)	Koreksi (Rp)
Beban Pegawai	-278.189.807.166	-278.176.614.166	13.193.000
Beban Persediaan	-40.542.300.690	-40.542.300.690	0
Beban Barang dan Jasa	-277.666.072.167	-277.810.572.167	-144.500.000
Beban Pemeliharaan	-109.386.006.236	-109.386.006.236	0
Beban Perjalanan Dinas	-87.798.934.295	-87.890.644.228	-91.709.933
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	-11.022.852.956	-11.022.852.956	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	-136.613.164.817	-136.782.541.364	-169.376.547
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	112.396.935	112.396.935	0
<b>Jumlah Beban</b>	<b>-941.106.741.392</b>	<b>-941.499.134.872</b>	<b>-392.393.480</b>

## D.2 BEBAN PEGAWAI

Beban Pegawai adalah biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah terkait dengan pemberian imbalan kepada pegawai, baik pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), maupun tenaga honorer, sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan merupakan salah satu komponen utama dalam pengeluaran pemerintah.



Saldo Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp278.189.807.166,00** dan **Rp269.059.233.162,00**. Nilai Beban Pegawai Tahun 2024 mengalami kenaikan/penurunan sebesar **Rp9.019.498.004,00** atau **3,39%** Rincian Beban Pegawai disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel D.2.1 Perbandingan Beban Pegawai periode yang berakhir  
31 Desember 2024 dan 2023**

Akun	Uraian	31 DESEMBER 2024 (Rp)	31 DESEMBER 2023 (Rp)	Naik (Turun) Rp	Naik (Turun) %
511111	Beban Gaji Pokok PNS	189.868.081.565	183.099.337.338	6.768.744.227	3,70
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	2.732.542	2.688.996	43.546	1,62
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	13.847.181.257	13.361.742.370	485.438.887	3,63
511122	Beban Tunj. Anak PNS	3.930.375.315	3.786.201.146	144.174.169	3,81
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	1.821.039.772	1.598.014.444	223.025.328	13,96
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	15.410.286.550	17.767.191.000	(2.356.904.450)	-13,27
511125	Beban Tunj. PPh PNS	1.781.961.798	747.348.649	1.034.613.149	138,44
511126	Beban Tunj. Beras PNS	10.015.169.150	10.514.151.970	(498.982.820)	-4,75
511129	Beban Uang Makan PNS	25.826.482.600	27.049.409.700	(1.222.927.100)	-4,52
511135	Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	2.700.000	2.700.000	-	0,00
511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	356.500.000	383.815.000	(27.315.000)	-7,12
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	4.514.816.664	5.277.532.009	(762.715.345)	-14,45
511611	Beban Gaji Pokok PPPK	3.577.774.987	544.930.000	3.032.844.987	556,56
511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	67.728	10.200	57.528	564,00
511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	170.360.940	22.436.240	147.924.700	659,31
511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	34.845.438	4.678.010	30.167.428	644,88
511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	541.450.000	84.100.000	457.350.000	543,82
511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	165.334.860	24.767.640	140.567.220	567,54
511628	Beban Uang Makan PPPK	579.220.000	123.817.100	455.402.900	367,80
511632	Beban Tunjangan Khusus Papua PPPK	5.100.000	1.700.000	3.400.000	200,00
512111	Beban Uang Honor Tetap	-	-	-	0,00
512211	Beban Uang Lembur	5.625.175.000	4.660.586.350	964.588.650	20,70
512212	Beban Uang Lembur PPPK	113.151.000	2.075.000	111.076.000	5353,06
	<b>Jumlah</b>	<b>278.189.807.166</b>	<b>269.059.233.162</b>	<b>9.019.498.004</b>	<b>3,39</b>

Setelah dilaksanakan Audit BPK terdapat koreksi pencatatan, sehingga saldo Beban Pegawai *Audited* menjadi senilai **Rp278.176.614.166,00**.

Akun	Uraian	31 DESEMBER 2024 (Rp) UNAUDITED	31 DESEMBER 2024 (Rp) AUDITED	Koreksi (Rp)
511111	Beban Gaji Pokok PNS	189.868.081.565	189.868.081.565	-
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	2.732.542	2.732.542	-
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	13.847.181.257	13.847.181.257	-
511122	Beban Tunj. Anak PNS	3.930.375.315	3.930.375.315	-
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	1.821.039.772	1.821.039.772	-
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	15.410.286.550	15.409.283.550	(1.003.000)
511125	Beban Tunj. PPh PNS	1.781.961.798	1.781.961.798	-
511126	Beban Tunj. Beras PNS	10.015.169.150	10.015.169.150	-
511129	Beban Uang Makan PNS	25.826.482.600	25.826.482.600	-
511135	Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	2.700.000	2.700.000	-
511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	356.500.000	356.500.000	-
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	4.514.816.664	4.502.626.664	(12.190.000)
511611	Beban Gaji Pokok PPPK	3.577.774.987	3.577.774.987	-
511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	67.728	67.728	-
511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	170.360.940	170.360.940	-
511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	34.845.438	34.845.438	-
511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	541.450.000	541.450.000	-
511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	165.334.860	165.334.860	-
511628	Beban Uang Makan PPPK	579.220.000	579.220.000	-
511632	Beban Tunjangan Khusus Papua PPPK	5.100.000	5.100.000	-
512111	Beban Uang Honor Tetap	-	-	-
512211	Beban Uang Lembur	5.625.175.000	5.625.175.000	-
512212	Beban Uang Lembur PPPK	113.151.000	113.151.000	-
	<b>Jumlah</b>	<b>278.189.807.166</b>	<b>278.176.614.166</b>	<b>(13.193.000)</b>

- Koreksi pada akun 511124 senilai Rp1.003.000,00 terdapat pada Satker BPSIP Yogyakarta, merupakan Penyesuaian Beban akibat adanya koreksi atas kelebihan pembayaran tunjangan Petugas Belajar
- Koreksi pada akun 511151 senilai Rp12.190.000,00, merupakan Penyesuaian Beban akibat adanya koreksi atas kelebihan pembayaran tunjangan Petugas Belajar terdapat pada Satker:
  - BBPSI Padi senilai Rp185.000,00
  - BBPSIP Pascapanen senilai Rp555.000,00
  - BPSIP Aceh senilai Rp925.000,00
  - BPSIP Sumatera Barat senilai Rp2.220.000,00
  - BPSIP Maluku Utara senilai Rp2.660.000,00
  - BPSIP Papua Barat senilai Rp370.000,00
  - BBPSIP senilai Rp3.425.000,00
  - BPSIP Sulawesi Tengah senilai Rp1.665.000,00
  - BPSI Agroklimate senilai Rp185.000,00

Perbandingan realisasi Beban Gaji di LRA dengan nilai Beban Gaji di LO beserta penjelasan selisihnya disajikan dalam lampiran.

### D.3 BEBAN PERSEDIAAN

Beban Persediaan adalah pengeluaran atau biaya yang diakui ketika persediaan digunakan atau dikeluarkan untuk mendukung aktivitas operasional pemerintah. Beban ini mencerminkan nilai persediaan yang telah dikonsumsi atau dialihkan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Saldo Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp40.542.300.690,00** dan Rp57.138.591.503,00. Nilai Beban Persediaan Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar (Rp16.596.290.813,00) atau (29,05%) apabila dibandingkan dengan nilai Beban Persediaan Tahun 2023.

Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut.

**Tabel D.3.1 Perbandingan Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023**

Akun	Uraian	31 DESEMBER 2024 (Rp)	31 DESEMBER 2023 (Rp)	Naik (Turun) Rp	Naik (Turun) %
593111	Beban Persediaan konsumsi	27.343.405.964	35.595.170.899	-8.251.764.935	-23,18
593121	Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	0	0	0	#DIV/0!
593131	Beban Persediaan bahan baku	11.684.639.514	16.780.034.236	-5.095.394.722	-30,37
593141	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	0	0	0	#DIV/0!
593149	Beban persediaan lainnya	1.514.255.212	4.763.386.368	-3.249.131.156	-68,21
	<b>Jumlah</b>	<b>40.542.300.690</b>	<b>57.138.591.503</b>	<b>-16.596.290.813</b>	<b>-29,05</b>

Rincian perbedaan antara Beban Persediaan (akrual) dengan Belanja Pegawai (kas) sebagai berikut:

AKUN	URAIAN	BEBAN PERSEDIAAN (LO)	BELANJA PERSEDIAAN (LRA)	SELISIH
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	24.895.405.937	(24.895.405.937)
521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	0	926.652.220	(926.652.220)
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	0	15.516.175.054	(15.516.175.054)
593111	Beban Persediaan konsumsi	27.343.405.964	0	27.343.405.964
593121	Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	0	0	0
593131	Beban Persediaan bahan baku	11.684.639.514	0	11.684.639.514
593141	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	0	0	0
593149	Beban persediaan lainnya	1.514.255.212	0	1.514.255.212
	<b>Jumlah</b>	<b>40.542.300.690</b>	<b>41.338.233.211</b>	<b>(795.932.521)</b>

Nilai Beban Persediaan sebesar Rp40.542.300.690,00 di LO dengan Realisasi Belanja Barang Persediaan sebesar Rp41.338.233.211,00 terdapat selisih sebesar (Rp795.932.521,00) dengan penjelasan sebagai selisih sebagai berikut.

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	312.977.104
Transfer Keluar	-1.254.660.300
Transfer Masuk	1.240.080.300
Koreksi Nilai Persediaan	1.402.101.698
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	-440.502.078
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	14.487.403.617
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	303.558.150
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-1.267.104.368
Beban Kerugian Pelepasan Aset	-523.246.025
Beban Persediaan Rusak/Usang	-691.624.124
Beban 526 / Persediaan 526	-11.022.852.956
Dari Belanja Dalam Proses	0
Masih Tercatat	0
Jurnal Balik Transaksi Resiprokal	0
Di Catat sebagai Beban Persediaan Pemeliharaan	-1.750.198.497
<b>Total</b>	<b>795.932.521</b>

Setelah dilaksanakan Audit BPK tidak terdapat koreksi pencatatan, sehingga saldo Beban Persediaan LO adalah tetap.

#### D.4 BEBAN BARANG DAN JASA

Beban Barang dan Jasa adalah biaya yang timbul akibat pengadaan atau penggunaan barang dan jasa oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Barang dan jasa ini dapat berupa bahan habis pakai, peralatan, atau jasa konsultasi, konstruksi, dan layanan lainnya yang diperlukan untuk mendukung operasional pemerintah.

Saldo Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp277.666.072.167,00** dan Rp288.853.260.981,00. Nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 mengalami kenaikan/penurunan sebesar (Rp15.132.548.196,00) atau (5,45%) apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2023.

Rincian Beban Barang dan Jasa periode 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut.

**Tabel D.4.1 Perbandingan Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023**

Akun	Uraian	31 DESEMBER 2024 (Rp)	31 DESEMBER 2023 (Rp)	Naik (Turun) Rp	Naik (Turun) %
521111	Beban Keperluan Perkantoran	105.465.316.261	95.363.504.355	10.101.811.906	9,58
521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	1.638.807.219	2.137.656.056	-498.848.837	-30,44
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	192.529.668	144.673.533	47.856.135	24,86
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	7.393.483.714	10.485.441.280	-3.091.957.566	-41,82
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	13.751.664.985	9.368.364.892	4.383.300.093	31,87
521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	356.090.303	-356.090.303	#DIV/0!
521211	Beban Bahan	42.416.236.208	54.589.104.192	-12.172.867.984	-28,70
521213	Beban Honor Output Kegiatan	2.917.458.000	2.198.825.050	718.632.950	24,63
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	39.012.881.117			
521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomtabel	12.292.840	0	12.292.840	100,00
521711	Beban Kontribusi pada Organisasi Internasional dan Trust Fund	744.142.000	667.661.000	76.481.000	10,28
522111	Beban Langganan Listrik	28.633.105.291	28.209.013.429	424.091.862	1,48
522112	Beban Langganan Telepon	1.499.049.121	1.411.595.021	87.454.100	5,83
522113	Beban Langganan Air	1.979.148.431	1.946.269.645	32.878.786	1,66
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	6.762.614.492	5.616.856.809	1.145.757.683	16,94
522121	Beban Jasa Pos dan Giro	11.358.725	8.470.834	2.887.891	25,42
522131	Beban Jasa Konsultan	806.612.580	756.850.203	49.762.377	6,17
522141	Beban Sewa	3.074.425.382	5.141.061.100	-2.066.635.718	-67,22
522151	Beban Jasa Profesi	5.238.383.500	6.794.302.349	-1.555.918.849	-29,70
522191	Beban Jasa Lainnya	16.115.162.633	28.428.006.670	-12.312.844.037	-76,41
522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	1.640.000	-1.640.000	#DIV/0!
595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	1.400.000	3.366.175	-1.966.175	-140,44
595114	Beban Aset Ekstrakomtabel Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	17.504.700	-17.504.700	#DIV/0!
595115	Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	0	139.481.650	-139.481.650	#DIV/0!
	<b>Jumlah</b>	<b>277.666.072.167</b>	<b>253.785.739.246</b>	<b>-15.132.548.196</b>	<b>-5,45</b>

Perbandingan realisasi Beban Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO beserta penjelasan selisihnya disajikan dalam lampiran.

Setelah dilaksanakan Audit BPK terdapat koreksi pencatatan, sehingga saldo Beban Barang dan Jasa *Audited* menjadi senilai **Rp277.810.572.167,00**.

Akun	Uraian	31 DESEMBER 2024 UNAUDITED (Rp)	31 DESEMBER 2024 AUDITED (Rp)	Koreksi (Rp)
521111	Beban Keperluan Perkantoran	105.465.316.261	105.465.316.261	0
521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	1.638.807.219	1.638.807.219	0
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	192.529.668	192.529.668	0
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	7.393.483.714	7.393.483.714	0
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	13.751.664.985	13.751.664.985	0
521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0		0
521211	Beban Bahan	42.416.236.208	42.435.036.208	-18.800.000
521213	Beban Honor Output Kegiatan	2.917.458.000	2.917.458.000	0
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	39.012.881.117	39.120.081.117	-107.200.000
521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomtabel	12.292.840	12.292.840	0
521711	Beban Kontribusi pada Organisasi Internasional dan Trust Fund	744.142.000	744.142.000	0
522111	Beban Langganan Listrik	28.633.105.291	28.633.105.291	0
522112	Beban Langganan Telepon	1.499.049.121	1.499.049.121	0
522113	Beban Langganan Air	1.979.148.431	1.979.148.431	0
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	6.762.614.492	6.762.614.492	0
522121	Beban Jasa Pos dan Giro	11.358.725	11.358.725	0
522131	Beban Jasa Konsultan	806.612.580	806.612.580	0
522141	Beban Sewa	3.074.425.382	3.074.425.382	0
522151	Beban Jasa Profesi	5.238.383.500	5.238.383.500	0
522191	Beban Jasa Lainnya	16.115.162.633	16.133.662.633	-18.500.000
522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0
595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	1.400.000	1.400.000	0
595114	Beban Aset Ekstrakomtabel Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
595115	Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>277.666.072.167</b>	<b>277.810.572.167</b>	<b>-144.500.000</b>

1. Koreksi pada akun 521211 senilai Rp18.800.000,00 terdapat pada Satker BPSI Sayuran merupakan Koreksi Internal adanya Hibah yang belum disahkan
2. Koreksi pada akun 521219 senilai Rp107.200.000,00 terdapat pada Satker BPSI Sayuran merupakan Koreksi Internal adanya Hibah yang belum disahkan
3. Koreksi pada akun 522191 senilai Rp18.500.000,00 terdapat pada Satker BPSI Sayuran merupakan Koreksi Internal adanya Hibah yang belum disahkan

## D.5 BEBAN PEMELIHARAAN

Beban Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dilakukan untuk menjaga kondisi aset tetap atau aset lainnya agar tetap berfungsi dengan baik dan tidak mengalami penurunan kinerja. Pemeliharaan ini bersifat rutin atau berkala dan bertujuan untuk mencegah kerusakan atau memperbaiki kerusakan kecil sebelum menjadi lebih parah. Beban pemeliharaan tidak meningkatkan kapasitas atau masa manfaat aset, tetapi hanya mempertahankan kondisi aset yang ada.

Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Saldo Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp109.386.006.236,00** dan **Rp74.498.767.385,00**. Nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2024

mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp34.887.238.851,00 atau 46,83% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2023.

Rincian Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut.

**Tabel D.5.1 Perbandingan Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023**

Akun	Uraian	31 DESEMBER 2024 (Rp)	31 DESEMBER 2023 (Rp)	Naik (Turun) Rp	Naik (Turun) %
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	59.096.748.817	35.082.003.653	24.014.745.164	68,45
523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	2.058.996.492	1.665.865.340	393.131.152	23,60
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	42.182.790.259	34.029.938.026	8.152.852.233	23,96
523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	387.871.870	302.377.000	85.494.870	28,27
523131	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	216.657.000	59.940.000	156.717.000	261,46
523132	Beban Pemeliharaan Irigasi	398.185.000	372.919.000	25.266.000	6,78
523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	1.600.474.027	789.782.466	810.691.561	102,65
523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	1.687.434.274	1.113.933.396	573.500.878	51,48
593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	1.412.623.304	904.483.258	508.140.046	56,18
593114	Beban Persediaan suku cadang	337.575.193	177.525.246	160.049.947	90,16
595113	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	6.650.000	0	6.650.000	#DIV/0!
	<b>Jumlah</b>	<b>109.386.006.236</b>	<b>74.498.767.385</b>	<b>34.887.238.851</b>	<b>46,83</b>

Perbandingan realisasi Beban Pemeliharaan di LRA dengan nilai Beban Pemeliharaan di LO beserta penjelasannya disajikan dalam lampiran.

Setelah dilaksanakan Audit BPK tidak terdapat koreksi pencatatan, sehingga saldo Beban Pemeliharaan LO adalah tetap.

## D.6 BEBAN PERJALANAN DINAS

Beban Perjalanan Dinas adalah biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjalanan dinas, yang mencakup transportasi, akomodasi, konsumsi, dan biaya lain yang terkait dengan perjalanan tersebut. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Saldo Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp87.798.934.295,00** dan Rp117.889.176.146,00. Nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar (Rp30.090.241.851,00) atau (25,52%) apabila dibandingkan dengan nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut.

**Tabel D.6.1 Perbandingan Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 (dalam Rupiah)**



Akun	Uraian	31 DESEMBER 2024 (Rp)	31 DESEMBER 2023 (Rp)	Naik (Turun) Rp	Naik (Turun) %
524111	Beban Perjalanan Biasa	67.931.714.341	92.002.968.043	-24.071.253.702	-26,16
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.810.269.000	3.988.279.160	3.821.989.840	95,83
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.605.977.174	1.416.998.274	1.188.978.900	83,91
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	8.512.448.917	18.965.210.176	-10.452.761.259	-55,12
524211	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	333.131.484	74.439.000	258.692.484	347,52
524212	Beban Perjalanan Tetap - Luar Negeri	0	29.607.019	-29.607.019	-100,00
524219	Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	605.393.379	1.411.674.474	-806.281.095	-57,12
	<b>Jumlah</b>	<b>87.798.934.295</b>	<b>117.889.176.146</b>	<b>-30.090.241.851</b>	<b>-25,52</b>

Perbandingan realisasi Beban Perjalanan Dinas di LRA dengan nilai Beban Perjalanan Dinas di LO beserta penjelasan selisihnya disajikan dalam lampiran.

Setelah dilaksanakan Audit BPK terdapat koreksi pencatatan, sehingga saldo Beban Perjalanan Dinas *Audited* menjadi senilai **Rp87.890.644.228,00**.

Akun	Uraian	31 DESEMBER 2024 UNAUDITED (Rp)	31 DESEMBER 2024 AUDITED (Rp)	Koreksi (Rp)
524111	Beban Perjalanan Biasa	67.931.714.341	68.023.424.274	-91.709.933
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.810.269.000	7.810.269.000	0
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.605.977.174	2.605.977.174	0
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	8.512.448.917	8.512.448.917	0
524211	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	333.131.484	333.131.484	0
524212	Beban Perjalanan Tetap - Luar Negeri	0	0	0
524219	Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	605.393.379	605.393.379	0
	<b>Jumlah</b>	<b>87.798.934.295</b>	<b>87.890.644.228</b>	<b>-91.709.933</b>

Koreksi pada akun 524111 senilai Rp91.709.933,00 terdapat pada Satker BPSI Sayuran, merupakan Koreksi Internal adanya Hibah yang Belum Disahkan.

## D.7 BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat adalah biaya yang timbul akibat pengadaan barang-barang yang akan diberikan secara cuma-cuma atau bersubsidi kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan program pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan uang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar

Rp11.022.852.956,00 dan Rp1.634.356.600,00. Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp9.388.496.356,00 atau 574,45% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2023.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat (bantuan pemerintah) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut.

**Tabel D.7.1 Perbandingan Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023**

Akun	Uraian	31 DESEMBER 2024 (Rp)	31 DESEMBER 2023 (Rp)	Naik (Turun) Rp	Naik (Turun) %
593123	Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	10.464.223.656	1.631.956.600	8.832.267.056	541,21
593127	Beban Persediaan Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	432.413.600	-	432.413.600	#DIV/0!
593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	126.215.700	2.400.000	123.815.700	5.158,99
	<b>Jumlah</b>	<b>11.022.852.956</b>	<b>1.634.356.600</b>	<b>9.388.496.356</b>	<b>574,45</b>

Nilai Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda sebesar Rp11.022.852.956,00 di LO dengan Realisasi Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda sebesar Rp0,00 terdapat selisih sebesar Rp11.022.852.956,00 dengan penjelasan sebagai selisih sebagai berikut.

Uraian	Nilai (Rp)
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	-9.995.303.656
Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	-432.413.600
Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	-126.215.700
Koreksi Lainnya	-468.920.000
<b>JUMLAH</b>	<b>-11.022.852.956</b>

Setelah dilaksanakan Audit BPK tidak terdapat koreksi pencatatan, sehingga saldo Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda adalah tetap.

## D.9 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp136.613.164.817,00 dan Rp155.540.148.915,00. Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar (Rp18.926.984.098) atau (12,17%)

apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023. Rincian nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan 2023 disajikan pada table berikut.

**Tabel D.9.1 Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 (dalam Rupiah)**

Akun	Uraian	31 DESEMBER 2024 (Rp)	31 DESEMBER 2023 (Rp)	Naik (Turun) Rp	Naik (Turun) %
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	47.064.213.363	64.715.029.312	-17.650.815.949	-27,27
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	73.441.282.110	73.481.620.178	-40.338.068	-0,05
591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	7.093.390.875	8.654.816.492	-1.561.425.617	-18,04
591312	Beban Penyusutan Irigasi	7.026.750.830	6.700.951.491	325.799.339	4,86
591313	Beban Penyusutan Jaringan	1.165.823.354	1.293.577.993	-127.754.639	-9,88
591611	Beban Penyusutan Properti Investasi	60.634.644	0	60.634.644	#DIV/0!
592112	Beban Amortisasi Hak Cipta	400.362	400.362	0	0,00
592114	Beban Amortisasi Paten	23.052.449	36.313.321	-13.260.872	-36,52
592115	Beban Amortisasi Software	3.112.500	44.350.000	-41.237.500	-92,98
592117	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	13.470.613	13.606.613	-136.000	-1,00
592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional	721.033.717	599.483.153	121.550.564	20,28
	<b>Jumlah</b>	<b>136.613.164.817</b>	<b>155.540.148.915</b>	<b>-18.926.984.098</b>	<b>-12,17</b>

Setelah dilaksanakan Audit BPK terdapat koreksi pencatatan, sehingga saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi *Audited* menjadi senilai **Rp136.782.541.364,00**.

Akun	Uraian	31 DESEMBER 2024 UNAUDITED (Rp)	31 DESEMBER 2024 AUDITED (Rp)	Koreksi (Rp)
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	47.064.213.363	47.064.213.363	0
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	73.441.282.110	73.610.658.657	169.376.547
591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	7.093.390.875	7.093.390.875	0
591312	Beban Penyusutan Irigasi	7.026.750.830	7.026.750.830	0
591313	Beban Penyusutan Jaringan	1.165.823.354	1.165.823.354	0
591611	Beban Penyusutan Properti Investasi	60.634.644	60.634.644	0
592112	Beban Amortisasi Hak Cipta	400.362	400.362	0
592114	Beban Amortisasi Paten	23.052.449	23.052.449	0
592115	Beban Amortisasi Software	3.112.500	3.112.500	0
592117	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	13.470.613	13.470.613	0
592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	721.033.717	721.033.717	0
	<b>Jumlah</b>	<b>136.613.164.817</b>	<b>136.782.541.364</b>	<b>169.376.547</b>

Koreksi pada akun 591211 senilai Rp169.376.547,00 terdapat pada Satker Sekretariat BSIP, merupakan Penyesuaian penyusutan akibat koreksi Penambahan nilai gedung bangunan yang belum dicatat.

Perbandingan perubahan saldo Penyusutan dan Amortisasi di Neraca dengan nilai Beban Penyusutan di LO beserta penjelasan selisihnya disajikan pada tabel berikut.

Uraian	Laporan Operasional	Neraca	Selisih
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	47.064.213.363	1.396.786.446.533	1.349.722.233.170
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	73.610.658.657	569.313.763.631	495.703.104.974
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	7.093.390.875	88.293.967.894	81.200.577.019
Beban Penyusutan Irigasi	7.026.750.830	56.014.040.880	48.987.290.050
Beban Penyusutan Jaringan	1.165.823.354	16.297.741.257	15.131.917.903
Beban Penyusutan Properti Investasi	60.634.644	606.733.830	546.099.186
Beban Amortisasi Hak Cipta	400.362	4.491.450	4.091.088
Beban Amortisasi Paten	23.052.449	440.528.665	417.476.216
Beban Amortisasi Software	3.112.500	4.212.716.717	4.209.604.217
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	13.470.613	111.905.105	98.434.492
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	25.971.241	25.971.241
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	721.033.717	49.355.223.390	48.634.189.673
<b>Jumlah</b>	<b>136.782.541.364</b>	<b>2.181.463.530.593</b>	<b>2.044.680.989.229</b>

Selisih di atas disebabkan sebagai berikut.

Akun	Penjelasan Selisih	Nilai (Rp)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Hibah Keluar	508.457.680
	Hibah Masuk	-54.592.858
	Koreksi Pencatatan	233.320.000
	Pembelian	- 4.413.750
	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	- 1.017.023.500
	Penghapusan	127.177.500
	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	24.573.158.798
	Perolehan Lainnya	- 1.827.500
	Reklasifikasi Keluar	277.857.170
	Reklasifikasi Masuk	- 373.236.080
	Saldo Awal	-373.991.110.630
<b>Total</b>		<b>-349.722.233.170</b>
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Hibah Keluar	529.598.876
	Hibah Masuk	- 86.228.544
	Koreksi Pencatatan	3.782.200
	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	5.006.889
	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	- 1.615.401.366
	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	1.252.472.963
	Perubahan BMN Ke PI	222.917.573

Akun	Penjelasan Selisih	Nilai (Rp)
	Reklasifikasi Keluar	279.609.435.306
	Reklasifikasi Masuk	- 279.598.729.450
	Saldo Awal	- 495.946.613.561
	Transfer Keluar	2.851.964.784
	Transfer Masuk	- 2.931.310.644
<b>Total</b>		<b>- 495.703.104.974</b>
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	- 70.879.343
	Saldo Awal	- 81.129.697.676
<b>Total</b>		<b>- 81.200.577.019</b>
Beban Penyusutan Irigasi	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	399.000
	Reklasifikasi Masuk	- 20.580.050
	Saldo Awal	- 48.967.109.000
<b>Total</b>		<b>- 48.987.290.050</b>
Beban Penyusutan Jaringan	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	1.866.667
	Saldo Awal	- 15.133.784.570
<b>Total</b>		<b>- 15.131.917.903</b>
Beban Penyusutan Properti Investasi	Saldo Awal	- 546.099.186
<b>Total</b>		<b>- 546.099.186</b>
Beban Amortisasi Hak Cipta	Saldo Awal	- 4.091.088
<b>Total</b>		<b>- 4.091.088</b>
Beban Amortisasi Paten	Saldo Awal	- 417.476.216
<b>Total</b>		<b>- 417.476.216</b>
Beban Amortisasi Software	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	- 2.216.395
	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	10.331.395
	Saldo Awal	- 4.217.719.217
<b>Total</b>		<b>- 4.209.604.217</b>
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	Saldo Awal	- 98.434.492
<b>Total</b>		<b>- 98.434.492</b>
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	189.172.240
	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	2.216.395
	Penghapusan	6.115.000
	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	- 10.331.395
	Saldo Awal	- 213.143.481
<b>Total</b>		<b>- 25.971.241</b>
	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	19.748.611.683

Akun	Penjelasan Selisih	Nilai (Rp)
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	- 1.506.275.787
	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	1.017.023.500
	Penghapusan	165.000
	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	- 25.827.897.428
	Saldo Awal	- 42.065.816.641
<b>Total</b>		<b>- 48.634.189.673</b>
<b>Total</b>		<b>-2.044.676.898.141</b>

## D.10 BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

pengeluaran atau biaya yang diakui oleh entitas pemerintah sebagai cadangan untuk menutupi potensi kerugian akibat piutang yang tidak dapat ditagih (piutang tak tertagih). Piutang tak tertagih adalah piutang yang diperkirakan tidak akan dapat diterima pembayarannya, baik sebagian maupun seluruhnya, karena berbagai alasan seperti debitur tidak mampu membayar atau telah terjadi wanprestasi.

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar (Rp112.396.935,00) dan Rp209.874.578,00. Nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2024 mengalami kenaikan/penurunan sebesar (Rp322.271.513,00) atau (153,55%) apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2023.

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut.

**Tabel D.10.1 Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 (dalam Rupiah)**

Akun	Uraian	31 DESEMBER 2024 (Rp)	31 DESEMBER 2023 (Rp)	Naik (Turun) Rp	Naik (Turun) %
594211	Beban Penyisihan Piutang PNPB	-190.640.165	129.064.590	-319.704.755	-247,71
594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	9.962.497	-15.643.355	25.605.852	-163,69
594411	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan	-450.000	-300.000	-150.000	50,00
594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	51.951.152	122.324.663	-70.373.511	-57,53
594991	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Piutang Jangka Panjang Lainnya	16.779.581	-25.571.320	42.350.901	-165,62
	<b>Jumlah</b>	<b>-112.396.935</b>	<b>209.874.578</b>	<b>-322.271.513</b>	<b>-153,55</b>

Setelah dilaksanakan Audit BPK tidak terdapat koreksi pencatatan, sehingga saldo Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah tetap.

## KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional adalah aktivitas atau transaksi yang tidak terkait langsung dengan kegiatan utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik atau menjalankan program-program rutin. Kegiatan non-operasional biasanya bersifat insidental, tidak rutin, atau tidak termasuk dalam aktivitas inti pemerintah. Kegiatan ini dicatat dalam Laporan Operasional untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang kinerja keuangan pemerintah, meskipun tidak berkaitan langsung dengan operasional sehari-hari.

Rincian Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	(3,243,769,060)	(5,235,388,377)
Pendapatan Pelepasan Aset	1,512,288,438	793,802,438
Beban Pelepasan Aset	4,756,057,498	6,029,190,815

### D.10. Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset

Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar periode sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 Masing-masing sebesar (Rp3.243.769.060,00) dan (Rp5.235.388.377,00) Nilai Defisit Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2024 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp1.991.619.317,00 atau (00,00%) apabila dibandingkan dengan Defisit Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2023.

### D.11. Pendapatan Pelepasan Aset

Nilai Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp1.512.288.438,00 dan Rp793.802.438,00. Nilai Pendapatan Pelepasan Aset Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp718.486.000,00 atau 90,51% apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2023.

Akun	Uraian	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	Naik (Turun) Rp	Naik (Turun) %
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	123.196.432	0	123.196.432	#DIV/0!
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	882.397.231	657.157.944	225.239.287	34,27
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	506.694.775	136.644.494	370.050.281	270,81
	<b>Jumlah</b>	<b>1.512.288.438</b>	<b>793.802.438</b>	<b>718.486.000</b>	<b>90,51</b>

Rincian pendapatan per Satuan Kerja sebagai berikut:

1. Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan

NO	KODE	NMSATKER	RPHREAL
1	018.09.238080	BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN SEREA	(121.730.432,)
2	018.09.412050	BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN BUAH	(1.466.000,)
<b>TOTAL</b>			<b>(123.196.432,)</b>



## 2. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin

NO	KODE	SATKER	RPHREAL
1	018.09.237238	BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PADI	(63.421.000,)
2	018.09.237242	BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN SUMBER DAYA LAH	(6.601.577,)
3	018.09.237263	BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN UNGGAS DAN ANEKA TER	(49.479.000,)
4	018.09.237306	BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN REMPAH, OBAT	(28.210.400,)
5	018.09.237931	BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN LAHAN RAWA	(65.011.000,)
6	018.09.238080	BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN SEREALIA	(98.988.013,)
7	018.09.320091	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KEPULAUAN F	(1.000.000,)
8	018.09.411971	SEKRETARIAT BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN	(103.146.000,)
9	018.09.411987	BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN HIAS	(25.608.000,)
10	018.09.412007	PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN TANAMAN PANGAN	(12.421.800,)
11	018.09.412050	BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN BUAH TROPIKA	(2.133.000,)
12	018.09.450831	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BANTEN	(6.851.000,)
13	018.09.450856	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO	(15.555.341,)
14	018.09.450871	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA BARA	(39.822.000,)
15	018.09.500957	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI BA	(14.019.000,)
16	018.09.567296	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT	(73.030.000,)
17	018.09.567392	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN ACEH	(23.000.000,)
18	018.09.567570	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN	(58.999.000,)
19	018.09.634036	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI SE	(5.500.100,)
20	018.09.634040	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN NUSA TENGG	(167.496.000,)
21	018.09.648680	BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAH DAN PUPUK	(16.600.000,)
22	018.09.648720	LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA BESAR	(5.505.000,)
<b>TOTAL</b>			<b>(882.397.231,)</b>

## 3. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya

NO	KODE	SATKER	RPHREAL
1	018.09.025227	PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN HORTIKULTURA	(4.566.200,)
2	018.09.237306	BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN REMPAH, OBAT	(24.400.000,)
3	018.09.411993	BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN ANEKA KACANG	(2.443.000,)
4	018.09.450862	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN MALUKU UTAR	(1.815.000,)
5	018.09.537628	BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN MEKANISASI PERTA	(216.271.000,)
6	018.09.567364	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TIMUR	(108.575.000,)
7	018.09.567449	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA B	(31.113.000,)
8	018.09.567495	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA S	(2.835.000,)
9	018.09.567783	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN NUSA TENGG	(1.426.575,)
10	018.09.648680	BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAH DAN PUPUK	(113.250.000,)
<b>TOTAL</b>			<b>(506.694.775,)</b>

**D.13. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya**

Pada Tahun 2024, Kegiatan Non Operasional Lainnya mengalami surplus/defisit sebesar **Rp20.998.598.513,00**. Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024 mengalami penurunan signifikan apabila dibandingkan dengan Tahun 2023 yang mengalami surplus sebesar Rp16.505.520.165,00. Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp4.493.078.348,00 atau (00,00%).

Rincian Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

No.	Uraian			Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya						
1	Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan. dan Pengelolaan Keuangan	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	486.102.576	45.875.588	440.226.988
			Terhadap Bendahara	145.083.987	63.461.000	81.622.987
			Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	28.963.988	843.582.478	(814.618.490)
2	Pendapatan Lain-Lain	Penerimaan Kembali Belanja TAYL	Belanja Pegawai	5.581.047.164	597.430.277	4.983.616.887
			Belanja Barang	1.166.561.988	182.867.188	983.694.800
			Belanja Modal	156.777.298	39.296.506	117.480.792
3	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	820.881	6.158.752	(5.337.871)
4	Pendapatan Pelepasan dan Perolehan Aset/Jasa	Pendapatan Perolehan Aset/Jasa	Aset Lainnya	15.099.181.941	14.683.118.170	416.063.771
5	Pendapatan Penyesuaian Nilai Aset	Pendapatan Penyesuaian Nilai Aset	Penyesuaian Nilai Persediaan	303.558.150	529.293.480	(225.735.330)
Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				22.968.097.973	16.991.083.439	5.977.014.534
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya						
1	Beban Penyesuaian Nilai Aset	Beban Penyesuaian Nilai Aset	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	1.267.104.368	183.437.000	1.083.667.368
2	Beban Pelepasan Aset	Beban Pelepasan Aset	Beban Persediaan Rusak/Usang	691.624.124	296.599.600	395.024.524
3	Kerugian Belum Terealisasi	Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	10.770.968	5.526.674	5.244.296
Jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				1.969.499.460	5.526.674	1.483.936.186
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				20.998.598.513	16.505.520.165	4.493.078.348

#### D.14 POS LUAR BIASA

Pendapatan atau beban yang timbul dari kejadian atau transaksi yang bersifat tidak biasa (*unusual*) dan jarang terjadi (*infrequent*), serta berada di luar kegiatan operasional normal pemerintah. Pos luar biasa ini dilaporkan secara terpisah dalam Laporan Operasional untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai kejadian atau transaksi yang memiliki dampak signifikan terhadap keuangan pemerintah.

Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Pendapatan Luar Biasa	0	0
Beban Luar Biasa	0	0
Pos Luar Biasa	0	0

#### SURPLUS/DEFISIT - LO

Laporan Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 mengalami defisit masing-masing sebesar (Rp891.462.144.738,00) dan (Rp932.231.482.195,00). Nilai Defisit LO Tahun 2024 mengalami peningkatan/penurunan sebesar Rp40.769.337.457,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan Defisit Tahun 2023.

Perhitungan nilai Surplus/Defisit – LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada table berikut.

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional	- 909.216.974.191	- 943.501.613.983	34.284.639.792
Surplus (Defisit) dari Kegiatan NonOperasional	17.754.829.453	11.270.131.788	6.484.697.665
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	- 891.462.144.738	- 932.231.482.195	40.769.337.457
Pos Luar Biasa	-	-	-
<b>Surplus/Defisit - LO</b>	<b>- 891.462.144.738</b>	<b>- 932.231.482.195</b>	<b>40.769.337.457</b>

Setelah dilaksanakan Audit BPK terdapat koreksi pencatatan, sehingga saldo Surplus/Defisit LO *Audited* menjadi senilai (Rp891.854.538.218,00).

Uraian	Tahun 2024 UNAUDITED (Rp)	Tahun 2024 AUDITED (Rp)	Koreksi (Rp)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional	- 909.216.974.191	- 909.609.367.671	392.393.480
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	17.754.829.453	17.754.829.453	-
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	- 891.462.144.738	- 891.854.538.218	392.393.480
Pos Luar Biasa	-	-	-
<b>Surplus/Defisit - LO</b>	<b>- 891.462.144.738</b>	<b>- 891.854.538.218</b>	<b>392.393.480</b>

## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### E.1 EKUITAS AWAL

Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar **Rp45.034.208.920.591,00** dan Rp45.269.723.693.095,00. Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami kenaikan/penurunan sebesar (Rp235.514.772.504,00) atau (0,52%) apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023.

### E.2 SURPLUS/DEFISIT-LO

Saldo Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) adalah sebesar **(Rp891.462.144.738,00)** dan (Rp932.231.482.195,00). Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Nilai Surplus/Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp40.769.337.457,00 atau (4,37%) apabila dibandingkan dengan nilai Surplus/Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023.

Setelah dilaksanakan Audit BPK terdapat koreksi pencatatan, sehingga saldo Surplus/Defisit LO *Audited* menjadi senilai **(Rp891.854.538.218,00)**.

### E.3.1 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang disebabkan oleh kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 yang disajikan sebesar **Rp1.402.101.698,00** terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp1.645.668.873,00 dan koreksi kurang sebesar Rp243.567.175,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel E.3.1. Perbandingan Koreksi Nilai Persediaan  
periode yang berakhir 31 Desember 2024 (dalam Rupiah)**

Uraian	Satker	Nilai (Rp)
<b>MUTASI TAMBAH</b>		
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	BPSI TAS	1.120.619.873
	BPSIP Banten	39.931.500
	BPSIP Sumbar	421.479.500
	BPSIP Kalteng	47.647.500
	BPSIP Kaltim	1.158.000
	BPSIP Sulteng	5.400.000
	BPSIP Yogyakarta	9.432.500
<b>TOTAL MUTASI TAMBAH</b>		<b>1.645.668.873</b>
<b>MUTASI KURANG</b>		
Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	BPSI UAT	54.000.000
	BPSIP Banten	4.856.675
	BPSIP Sumbar	160.907.000
	BPSIP Sulteng	540.000
	BPSIP Papua	8.721.000
	BPSIP Yogyakarta	1.577.500
	BPSIP Bengkulu	8.850.000
	BPSIP Kalsel	4.115.000
<b>TOTAL MUTASI KURANG</b>		<b>243.567.175</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.402.101.698</b>

Setelah dilaksanakan Audit BPK tidak terdapat koreksi pencatatan, sehingga saldo Koreksi Nilai Persediaan adalah tetap.

### E.3.2 KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI

Koreksi atas Reklasifikasi merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai reklasifikasi yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian reklasifikasi yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 yang disajikan sebesar [Rp278.101.002.922,00](#) terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp278.509.133.972,00 dan koreksi kurang sebesar Rp408.131.050,00 dengan rincian sebagai berikut.

Saldo Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang didapat dari Transaksi Sebagai Berikut

Uraian	Satker	Nilai (Rp)
<b>MUTASI TAMBAH</b>		
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	BPSIP Lampung	16.200.000
Bahan Baku	BPSI Sayuran	72.123.822
Persediaan Lainnya	BPSI Sayuran	242.000
Gedung dan Bangunan	PSI Tanaman Pangan	54.739.150
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	PSI Tanaman Pangan	278.365.829.000
<b>TOTAL MUTASI TAMBAH</b>		<b>278.509.133.972</b>
<b>MUTASI KURANG</b>		
Barang Konsumsi	BPSIP Kaltim	119.000.000
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	BPSI TROA	198.400.000
	BPSIP Lampung	11.700.000
Bahan Baku	BBPSI Padi	8.091.900
Persediaan Lainnya	BPSIP Lampung	16.200.000
Tanah	PSI Tanaman Pangan	54.739.150
<b>TOTAL MUTASI KURANG</b>		<b>408.131.050</b>
<b>TOTAL</b>		<b>278.101.002.922</b>

Setelah dilaksanakan Audit BPK tidak terdapat koreksi pencatatan, sehingga saldo Koreksi atas Reklasifikasi adalah tetap.

### E.3.3 KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI

Saldo Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar (Rp295.362.208.886,00). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Setelah dilaksanakan Audit BPK terdapat koreksi pencatatan, sehingga saldo Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Audited menjadi senilai (Rp293.053.735.247,00).

**Tabel E.3.3. Perbandingan Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 (dalam Rupiah)**

Uraian	Satker	Nilai (Rp)
<b>MUTASI TAMBAH</b>		
Tanah	BPSIP Gorontalo	7.996.000
Peralatan dan Mesin	BBPSI SDLP	108.996.000
	PSI PKH	13.000.000
	BPSIP Sumbar	22.350.000
Gedung dan Bangunan	BPSI TAS	366.152.000
	Sekretariat BSIP	3.329.262.524
	BPSI Hias	22.397.000
	PSI PKH	189.109.968
	BPSIP Aceh	125.760.000
	BPSIP Riau	167.530.000
	BPSIP Sumsel	117.929.001
	BPSIP Bengkulu	150.906.500
	BPSIP Sulsel	131.712.000
Jalan dan Jembatan	BPSI TAS	117.105.000

Uraian	Satker	Nilai (Rp)
Aset Tetap Lainnya	BBPSI SDLP	96.255.000
Konstruksi Dalam pengerjaan	BPSIP Gorontalo	144.981.600
	BPSIP Aceh	5.500.000
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	BPSI Lahan Rawa	3.073.409.884
	BPSIP Kepri	120.720.000
	BPSI Hias	2.614.163.540
	PSI PKH	3.300.000
	BPSIP Gorontalo	31.500.000
	BPSIP Jatim	910.092.459
	BPSIP Riau	249.874.000
	BPSIP Bengkulu	1.546.580.514
	BPSI Jestro	231.032.858
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	BPSI UAT	2.283.503
	PSI PKH	1.891.100
	BPSIP Jateng	208.312
	BPSIP Riau	508.487.276
	BPSIP Sumsel	20.058
	BPSIP Sulsel	307.923.906
Akumulasi Penyusutan Irigasi	BPSIP Bengkulu	399.000
Akumulasi Penyusutan Jaringan	BPSIP Bengkulu	1.866.667
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	BPSI Lahan Rawa	3.076.592.801
	BPSIP Kepri	120.720.000
	Sekretariat BSIP	1.608.434.107
	BPSI Hias	2.658.911.369
	PSI Tanaman Pangan	661.692.855
	PSI PKH	3.300.000
	BPSIP Gorontalo	31.500.000
	BPSIP Jatim	913.384.814
	BPSIP Riau	249.874.000
	BPSIP Bengkulu	1.553.157.512
	BPSIP Sulsel	898.733.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	BPSIP Gorontalo	508.200.000
	BPSIP Jatim	369.459.145
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	BPSIP Jatim	6.115.000
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	BPSIP Jateng	7.120.950
<b>TOTAL MUTASI TAMBAH</b>		<b>27.387.891.223</b>
<b>MUTASI KURANG</b>		
Tanah	Sekretariat BSIP	12.352.804.000
	BPSIP Sulteng	573.725.000



Uraian	Satker	Nilai (Rp)
Peralatan dan Mesin	BPSI Lahan Rawa	3.076.592.801
	BPSI Hias	2.626.045.069
	BPSIP Kepri	120.720.000
	PSI PKH	3.300.000
	BPSIP Gorontalo	31.500.000
	BPSIP Jatim	913.384.814
	BPSIP Riau	249.874.000
	BPSIP Bengkulu	1.547.276.512
	BPSI Jestro	233.320.000
Gedung dan Bangunan	BPSI UAT	68.505.100
	PSI PKH	189.109.968
	BPSIP Gorontalo	132.619.050
	BPSIP Jateng	7.120.950
	BPSIP Riau	1.752.867.000
	BPSIP Sumsel	54.000
	BPSIP Sulsel	898.733.000
Irigasi	BPSIP Bengkulu	1.881.000
Jaringan	BPSIP Bengkulu	4.000.000
Aset Tetap Lainnya	BPSI Hias	32.866.300
Konstruksi Dalam pengerjaan	Sekretariat BSIP	3.329.262.524
	BPSI Hias	22.397.000
	BPSIP Gorontalo	151.981.600
	BPSIP Aceh	5.500.000
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	BBPSI SDLP	79.424.000
	BPSIP Kepri	9.318.975
	PSI PKH	6.600.000
	BPSIP Sumbar	24.271.429
	BPSIP Jambi	86.059.935
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	BPSI TAS	155.515.697
	Sekretariat BSIP	1.020.788.885
	BPSI Hias	5.400.804
	PSI Tanaman Pangan	278.366.923.784
	PSI PKH	189.109.968
	BPSIP Aceh	27.612.959
	BPSIP Riau	71.857.120
	BPSIP Sumsel	43.802.201
	BPSIP Bengkulu	49.923.729
	BPSIP Sulsel	3.951.360
Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	BPSI TAS	65.743.159
Akumulasi Penyusutan Irigasi	BPSI Lahan Rawa	8.232.020
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	PSI Tanaman Pangan	662.007.855
	PSI PKH	3.300.000
	BPSIP Gorontalo	508.200.000
	BPSIP Jatim	382.611.145

Uraian	Satker	Nilai (Rp)
Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	BPSIP Jatim	6.115.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	BPSI Lahan Rawa	3.073.409.884
	BPSIP Kepri	120.720.000
	Sekretariat BSIP	1.482.886.787
	BPSI Hias	2.614.163.540
	BPSIP Gorontalo	31.500.000
	BPSIP Jatim	910.092.459
	BPSIP Riau	249.874.000
	BPSIP Bengkulu	1.548.846.181
	BPSIP Sulsel	307.923.906
<b>TOTAL MUTASI KURANG</b>		<b>320.441.626.470</b>
<b>TOTAL</b>		<b>(293.053.735.247)</b>

### E.3.4 KOREKSI LAIN-LAIN

Merupakan transaksi penyesuaian atau koreksi yang dilakukan terhadap ekuitas dana pemerintah akibat kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, atau penyesuaian lain yang tidak termasuk dalam kategori operasional atau non-operasional biasa. Koreksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan posisi ekuitas yang akurat dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

Saldo Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar **Rp446.155.385,00** dengan rincian sebagai berikut.

NO	SATKER	NILAI KOREKSI	KETERANGAN
1	BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK	(169.259.061)	Penyesuaian Penyisihan Piutang Bagian Lancar Menjadi Piutang TPTGR
2	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT	190.087.050	- Koreksi Akun BDD akibat tidak dapatnya pembatalan ADK Kontrak RPATA yang dbayarkan melalui LS Kontraktual senilai 189.087.050 - Penyesuaian nilai piutang double pencatatan yang dilakukan settlement pada bulan Mei 2024 dan dilakukan penghapusan by sistem November 2024 Piutang Lainnya senilai Rp1.000.000
3	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA UTARA	(468.920.000)	Penyesuaian saldo tidak normal pada Beban Persediaan berupa Hewan Ternak atau Tanaman yg diserahkan pada masyarakat
4	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN	1.936.626	Koreksi Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah berupa nilai Hibah ACIAR yang sudah disetorkan di Thn 2022
	<b>Jumlah</b>	<b>(446.155.385)</b>	

Setelah dilaksanakan Audit BPK terdapat koreksi pencatatan, sehingga saldo Koreksi Lain-Lain *Audited* menjadi senilai **Rp470.784.826,00**.

**Tabel E.3.4. Penjelasan Koreksi Lain-lain**  
periode yang berakhir 31 Desember 2024 (dalam Rupiah)

Uraian	Satker	Nilai (Rp)
<b>MUTASI TAMBAH</b>		
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	BPSI UAT	174.259.061
Belanja barang yang masih harus dibayar	BPSIP Riau	24.629.441
Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	BPSIP Sumut	468.920.000
<b>TOTAL MUTASI TAMBAH</b>		<b>667.808.502</b>
<b>MUTASI KURANG</b>		
Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	BPSIP Kalsel	1.936.626
Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	BPSIP Jabar	189.087.050
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	BPSI UAT	5.000.000
Piutang Lainnya	BPSIP Jabar	1.000.000
<b>TOTAL MUTASI KURANG</b>		<b>197.023.676</b>
<b>TOTAL</b>		<b>470.784.826</b>

#### E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi Antar Entitas merupakan transaksi atau aliran sumber daya ekonomi (seperti dana, barang, atau jasa) yang terjadi antara dua atau lebih entitas di dalam lingkup pemerintah. Transaksi ini dapat melibatkan entitas pelaporan, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau unit-unit kerja di bawahnya. Transaksi antar entitas ini perlu dilaporkan secara terpisah dalam Laporan Perubahan Ekuitas untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan tentang aliran sumber daya tersebut.

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar [Rp112.784.749.839,00](#) dan Rp717.065.524.422,00. Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami kenaikan/penurunan sebesar (Rp604.280.774.583,00) atau (84,27%) apabila dibandingkan dengan nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023.

**Tabel E.4 Transaksi Antar Entitas periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023**  
(dalam Rupiah)

Akun	Uraian	31 DES 2024	31 DES 2023	Naik/ Turun %
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	839.108.443.593	829.701.092.971	1,13
313121	Diterima dari Entitas Lain	-40.148.871.686	-24.786.286.435	61,98
313211	Transfer Keluar	-1.214.228.980.456	-473.573.334.768	156,40
313221	Transfer Masuk	469.862.177.843	371.402.671.084	26,51
391131	Pengesahan Hibah Langsung	23.800.276.336	9.774.886.263	143,48
391132	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-24.816	-17.783.693	-99,86
391133	Pengesahan Hibah Langsung TAYL	34.391.729.025	4.564.279.000	653,50
	<b>Jumlah</b>	<b>112.784.749.839</b>	<b>717.065.524.422</b>	<b>-84,27</b>

Setelah dilaksanakan Audit BPK terdapat koreksi pencatatan, sehingga saldo Transaksi Antar Entitas Audited menjadi senilai **Rp113.068.986.126,00**.

Akun	Uraian	31 DES 2024 UNAUDITED	31 DES 2024 AUDITED	Koreksi
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	839.108.443.593	839.108.443.593	0
313121	Diterima dari Entitas Lain	-40.148.871.686	-40.148.871.686	0
313211	Transfer Keluar	-1.214.228.980.456	-1.214.228.980.456	0
313221	Transfer Masuk	469.862.177.843	469.862.177.843	0
391131	Pengesahan Hibah Langsung	23.800.276.336	24.084.512.623	284.236.287
391132	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-24.816	-24.816	0
391133	Pengesahan Hibah Langsung TAYL	34.391.729.025	34.391.729.025	0
	<b>Jumlah</b>	<b>112.784.749.839</b>	<b>113.068.986.126</b>	<b>284.236.287</b>

Koreksi pada akun 391131 senilai Rp284.236.287,00 terdapat pada Satker BPSI Sayuran, merupakan Koreksi Internal adanya Pengesahan Hibah

#### E.4.1 DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN/DITERIMA DARI ENTITAS LAIN

Ditagihkan ke Entitas Lain/Diterima dari Entitas Lain (DKEL/DDEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai DKEL untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar **Rp839.108.443.593,00** dan Rp829.701.092.971,00. Nilai DDEL untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar (**Rp40.148.871.686,00**) dan (Rp24.786.286.435,00).

#### E.4.2 TRANSFER KELUAR/TRANSFER MASUK

Saldo transfer keluar dan transfer masuk yang tercatat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 adalah transfer keluar sebesar **Rp1.214.228.980.456,00** dan transfer masuk sebesar (**Rp469.862.177.843,00**). Transfer Keluar/Transfer Masuk merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L. antar K/L dan antara K/L dengan BA-BUN. Transfer Keluar dan Transfer Masuk terdapat selisih Rp744.366.802.613,00.

Selisih tersebut di sebabkan adanya Transfer Masuk:

1. Ditjen Perkebunan Kementan ke BPSI TRI berupa Tanah senilai Rp100.254.000.000,00.
2. Dit. Bina Penataan Bangunan ke Sekretariat BSIP berupa Tanah senilai Rp12.352.804.000,00.
3. Dit. Bina Penataan Bangunan ke Sekretariat BSIP berupa Gedung dan Bangunan senilai Rp526.568.000,00, dengan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan senilai (Rp79.345.860,00).

Transfer Keluar:

1. BBPSI Padi ke Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karawang Jabar berupa Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat senilai Rp960.000,00.

2. BBPSI Padi ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Patimban berupa Tanah senilai Rp46.064.975.000,00.
3. BPSI UAT ke Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian berupa Persediaan Lainnya senilai Rp1.620.000,00.
4. BPSI UAT ke Balai Inseminasi Buatan Lembang berupa Tanah senilai Rp580.489.920.000,00.
5. BPSI Buah Tropika ke Balai Inseminasi Buatan Lembang berupa Tanah senilai Rp230.851.353.753,00.
6. LPSI Ruminansia Besar ke Pusat Veteriner Farma Surabaya berupa Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat senilai Rp12.000.000,00.

Uraian	Satker	Nilai (Rp)
<b>TRANSFER KELUAR</b>		
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	BBPSI Padi	(43.326.000)
	BPSI UAT	(10.134.300)
	LPSI Rumbes	(12.000.000)
Persediaan Lainnya	BPSI UAT	(1.189.200.000)
Tanah	BBPSI Padi	(397.405.500.000)
	BPSI UAT	(580.489.920.000)
	BPSI Buah Tropika	(230.851.353.753)
Peralatan dan Mesin	BBPSI Padi	(581.470.680)
	PSI Perkebunan	(318.280.000)
	PSI PKH	(30.821.577)
	BPSIP Jateng	(25.632.500)
Gedung dan Bangunan	BBPSI Padi	(6.171.077.000)
	BPSI UAT	(136.843.000)
Irigasi	BBPSI Padi	(510.275.500)
Jaringan	BBPSI Padi	(558.450.000)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	BBPSI Padi	581.470.680
	PSI Perkebunan	250.077.144
	PSI PKH	26.418.494
	BPSIP Jateng	18.917.750
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	BBPSI Padi	2.774.618.739
	BPSI UAT	77.346.045
Akumulasi Penyusutan Irigasi	BBPSI Padi	162.382.502

Uraian	Satker	Nilai (Rp)
Akumulasi Penyusutan Jaringan	BBPSI Padi	214.072.500
<b>TOTAL TRANSFER KELUAR</b>		<b>(1.214.228.980.456)</b>
<b>TRANSFER MASUK</b>		
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	BBPSI Veteriner	300.000
	PSI Perkebunan	238.000
	BPSI TROA	350.000
	BPSI Serealia	1.340.000
	BPSI Taka	1.500.000
	PSI Tanaman Pangan	316.000
	BPSIP Banten	1.867.500
	BPSIP Babel	24.000.000
	BPSIP Maluku	480.000
	BPSIP Jatim	5.154.300
	BPSIP Lampung	360.000
	BPSIP Sulteng	600.000
	BPSIP NTT	3.112.500
	BPSIP Papua	11.370.000
	BPSI Tapuk	300.000
	LPSI Umbi	612.000
	LPSI Rumbes	600.000
Persediaan Lainnya	BPSIP Banten	8.100.000
	BPSIP Lampung	16.200.000
	LPSI Rumbes	678.900.000
	LPSI Rumcil	484.380.000
Tanah	Sekretariat BSIP	12.352.804.000
	BPSI TRI	100.254.000.000
	BPSIP Jabar	351.340.525.000
Peralatan dan Mesin	BBPSI Biogen	25.632.500
	PSI Perkebunan	53.662.584
	Sekretariat BSIP	235.330.000
	BPSIP Jabar	581.470.680
	BPSIP Sulsel	932.905.000
	LPSI Rumbes	30.821.577
Gedung dan Bangunan	Sekretariat BSIP	526.568.000
	PSI PKH	136.843.000
	BPSIP Jabar	6.171.077.000
Irigasi	BPSIP Jabar	510.275.500

Uraian	Satker	Nilai (Rp)
Jaringan	BPSIP Jabar	558.450.000
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	BBPSI Biogen	(18.917.750)
	PSI Perkebunan	(53.662.584)
	Sekreatriat BSIP	(235.330.000)
	BPSIP Jabar	(581.470.680)
	BPSIP Sulsel	(864.702.144)
	LPSI Rumbes	(26.418.494)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Sekreatriat BSIP	(79.345.860)
	PSI PKH	(77.346.045)
	BPSIP Jabar	(2.774.618.739)
Akumulasi Penyusutan Irigasi	BPSIP Jabar	(162.382.502)
Akumulasi Penyusutan Jaringan	BPSIP Jabar	(214.072.500)
<b>TRANSFER MASUK</b>		<b>469.862.177.843</b>
<b>SELISIH</b>		<b>(744.366.802.613)</b>

#### E.4.3 PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG DAN PENGEMBALIAN HIBAH LANGSUNG

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan proses pengakuan dan pelaporan pengembalian hibah yang telah diterima oleh entitas pemerintah, tetapi harus dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan atau ketentuan yang telah ditetapkan. Pengembalian hibah ini mempengaruhi ekuitas dana pemerintah dan harus dilaporkan secara transparan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Nilai Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar **Rp23.800.276.336,00** dan **Rp9.774.886.263,00**. Nilai Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar **Rp24.816,00** dan **Rp17.783.693,00**.

Setelah dilaksanakan Audit BPK terdapat koreksi pencatatan, sehingga saldo Pengesahan Hibah Langsung *Audited* menjadi senilai **Rp24.084.512.623,00**.

Penjelasan terkait Pengesahan Hibah Langsung dan Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.



Kode	Nama Satker	Nilai (Rp)	Pemberi Hibah	Nomor Register	Project
018.09.237217	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Sayuran	732.330.000	AFACI	2EJ26YRA	Development of Vegetable Varieties in Asia Region
		284.236.287	ONION NZ	2WM1TC7A	Agriculture standardization toward sustainable shallot production in Indonesia
018.09.237221	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi Dan Sumber Daya	1.516.484.250	FAO	2LY44N2A	Crop Diversity Conservation for Sustainable Use in Indonesia
018.09.237238	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi	698.895.000	AFACI	2UERPT5A	Asia Regional FAW and BPH Diagnostics and Monitoring and Surveillance Program
			IFPRI	2CV12XNA	Standardization OF High Zinc Rice Biofortificationfor Indonesia
018.09.237242	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian	1.940.696.634	ACIAR	2W2H8PDA	Crop Health and Nutrient Management of Shallot-Chili-Rice Cropping System in Coastal Indonesia
			AFACI	2227WN8A	National Soil Information Systems to Support the Transformation of Agrifood Systems in AFACI Countries
			KOAT	2JL7VCNA	Indonesia Testbed Project
018.09.237306	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah Obat Dan Aromatik	237.225.000	Hirata Corporation	2SMP97TA	Bioprospecting of Indonesian Medicinal Plants for Functional Foods Cosmetics Toiletries and Pharmaceuticals Uses
018.09.237380	Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian	154.639.686	JIRCAS	24254VMA	Implementation of the second and third field experiments for MACS project in Indonesia
018.09.237572	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis Dan Serat	237.445.825	Hirata Corporation	29KPWDNA	Bio-Prospective of Indonesian Undomesticated-Nicotiana Hibiscus Ceiba Ricinus and Sesame Plants as New Resources of Novel Bioactive Compounds for Pharmaceuticals Toiletry and Cosmetic Products
018.09.411987	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Hias	1.409.596.274	Sakata Seed Cooperation	2RG22RNA	Cooperation Expedition Evaluation and Breeding Program for New Ornamental Plants CEEBP
			Hirata Corporation	2TBZWZ2A	Plant Extracts and Their Essential Oils as Potential Antimicrobial Agents for Food Coloring Cosmetics & Toiletry and Pharmaceutical Uses
018.09.411993	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Kacang	471.321.480	AVRDC-World Veg Center	272ZYD9A	International Mungbean Improvement Network IMIN2
			Hirata Corporation	2G9MNV1A	Exploration and Mass Production Technology for Maximizing Beneficial Compounds of Indigenous Under

Kode	Nama Satker	Nilai (Rp)	Pemberi Hibah	Nomor Register	Project
					Utilized Legume and Tuber Crops as Natural Colorant Pharmacy Functional Food and Food Industries
018.09.537628	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian	279.815.505	UNESCAP	24PMKT7A	Strengthening Mechanization-based solutions for climate-smart crop residue management in Cambodia Indonesia and Nepal
018.09.567449	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat	110.900.000	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat	2SK3VQ3A	Hibah Barang Milik Daerah Berupa Peralatan Dan Mesin Lainnya Milik Kabupaten Dharmasraya Kepada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat
018.09.634040	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat	11.675.300.400	Pemerintah Provinsi Ntb	22M9EYDA	Hibah Barang Berupa Tanah Bangunan Kantor Di Jl Peninjauan Narmada Dari Pemprov Nusa Tenggara Barat Kepada BPSIP NTB Untuk Mendukung Tusi Satker
018.09.648669	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	454.644.900	AFACI	272GNQ2A	Quality Improvement of Asian Food Composition Database
018.09.648673	Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian	450.150.000	AFACI	28CQ4JVA	Improvement of Rural Agricultural Technology Extension System in Asia
018.09.648680	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah Dan Pupuk	3.194.956.382	ICRAF	2ULPSRBA	Improving the Management of Peatlands and the Capacities of Stakeholders in Indonesia Peat-IMPACTS Indonesia
018.09.648716	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Jeruk Dan Buah Subtropika	235.875.000	Hirata Corporation	2QX5LUAA	Development of Potent Food Supplement from Citrus and Its Wild Relative
		<b>24.084.512.623</b>			

## E.5 EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar **Rp44.240.118.576.811,00** dan Rp45.034.208.920.591,00. Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami kenaikan/penurunan sebesar (Rp794.090.343.780,00 atau (1,76%) apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023.

Perhitungan Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada table berikut.

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
Ekuitas Awal	45.034.208.920.591	45.269.723.693.095	- 235.514.772.504	(0.52)
Surplus/Defisit-Lo	- 891.462.144.738	- 932.231.482.195	40.769.337.457	(4.37)
Koreksi Yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas	- 15.412.948.881	- 20.348.814.731	4.935.865.850	(24.26)
Transaksi Antar Entitas	112.784.749.839	717.065.524.422	- 604.280.774.583	(84.27)
<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>44.240.118.576.811</b>	<b>45.034.208.920.591</b>	<b>- 794.090.343.780</b>	<b>(1.76)</b>

Setelah dilaksanakan Audit BPK terdapat koreksi pencatatan, sehingga saldo Ekuitas Akhir *Audited* menjadi senilai **Rp44.242.343.522.698,00**.

Uraian	31 Desember 2024 UNAUDITED (Rp)	31 Desember 2024 AUDITED (Rp)	Koreksi
Ekuitas Awal	45.034.208.920.591	45.034.208.920.591	-
Surplus/Defisit-Lo	- 891.462.144.738	- 891.854.538.218	- 392.393.480
Koreksi Yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas	- 15.412.948.881	- 13.079.845.801	2.333.103.080
Transaksi Antar Entitas	112.784.749.839	113.068.986.126	284.236.287
<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>44.240.118.576.811</b>	<b>44.242.343.522.698</b>	<b>2.224.945.887</b>

## F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

### F.1. PERUBAHAN PEJABAT PERBENDAHARAAN

Sesuai keputusan Menteri Pertanian Nomor 485//KPTS/KU.010/A/8/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian terdapat beberapa poin penting yaitu:

- Apabila terjadi pergantian Kepala Satuan Kerja definitif, setelah dilakukan serah terima jabatan, Kepala Satuan Kerja yang baru secara otomatis menjadi KPA pada Satuan Kerja tersebut. Apabila terjadi kekosongan maka Eselon I mengusulkan pejabat KPA melalui Sekretariat Jenderal.
- Kuasa Pengguna Anggaran dapat menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar.
- Kepala Satker diberi kewenangan untuk mengangkat bendahara pengeluaran dan penerimaan.

Pada tahun 2023 terdapat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 325.1/KPTS/KU.010/A/04/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 485/KPTS/KU.010/A/8/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian. Dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 325.1 tahun 2023 terdapat beberapa poin yaitu jika satuan kerja tidak memiliki Kepala Satker maka penunjukan Bendahara Pengeluaran dapat ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Sampai dengan 31 Desember 2024, terdapat 4 kali perubahan Surat Keputusan Menteri Pertanian tentang penunjukkan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, dengan rincian sebagai berikut:

NO	SK	TANGGAL	HAL	PERUBAHAN
1	05/KPTS/KU.010/A/01/2024	10 Januari 2024	Penunjukan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	BB Biogen
2	284/KPTS/KU.010/A/07/2024	09 Juli 2024	Penunjukan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja BBPSI Mekanisasi Pertanian	BB Mektan
3	358/KPTS/KU.010/A/08/2024	1 Agustus 2024	Penunjukan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja BPSI Jawa Timur	BPSIP Jatim
4	664/KPTS/KU.010/A/11/2024	26 November 2024	Penunjukan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja PSI Tanaman Pangan	PSI Tanaman Pangan

### F.2. REKENING PEMERINTAH

Pada Semester II TA 2024 terdapat 151 rekening Satker lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang terdiri dari:

- Rekening Pengeluaran 64
- Rekening Penerimaan 14
- Rekening Lainnya 73

Pada tahun 2024, seluruh rekening Bendahara Pengeluaran satker lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian telah menggunakan rekening *Virtual Account*.

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI terdapat saldo atau dana di Rekening Pemerintahan lainnya (RPL) yang belum dicatat dalam neraca laporan keuangan pada akun Kas Lainnya dan Setara Kas senilai Rp374.453.332,00 karena Dana tersebut tidak masuk dalam DIPA di 3 satuan kerja lingkup BSIP sebagai berikut:

No	Satker	Saldo Per 31 Des 2024	Penjelasan
1	BPSI Tanah dan Pupuk	317.435.766	Saldo kerjasamadengan PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Krakatau Posco, dan Office Cherifien des Phosphates (OCP S.A)
2	BPSIP Jawa Tengah	18.364.889	Saldo kerjasama dengan PT . Petrokimia Gresik
3	BPSI Tanaman Aneka Kacang	38.652.677	Saldo kerjasama dengan PT Wilmar
	Jumlah	374.453.332	-

Rincian rekening Satker lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian disajikan dalam lampiran.

### F.3. HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI

Pada periode penyusunan Laporan Keuangan per 31 Desember 2024, terdapat 25 proyek hibah langsung luar negeri berbentuk uang pada 14 satker lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Saldo awal senilai Rp2.116.699.103,00. Total pendapatan senilai Rp12.119.515.936,00, belanja senilai Rp10.637.072.121,00, saldo bruto senilai Rp3.599.142.918,00, saldo yang telah disetor ke Kas Negara senilai Rp21.816,00, dan saldo netto senilai Rp3.599.121.102,00. Sedangkan terdapat 1 (satu) hibah barang yang telah disahkan senilai Rp3.293.946.000,00 yaitu proyek The Establishment and Sustainable Development of the Biopellet Industry in Indonesia dari satker Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian. Terdapat hibah yang belum disahkan senilai Rp246.843.287 dari hibah Agriculture Standardization Towards Sustainable Shallot Production in Indonesia dari donor Onions NZ. Nilai seharusnya dari hibah tersebut adalah Rp284.236.287,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp37.393.000,00 yang merupakan BAST Belanja Hibah berupa belanja barang persediaan yang tidak dilakukan penghapusan terkait SP2HL yang telah dibatalkan oleh KPPN Pinjaman dan Hibah sampai dengan batas akhir penutupan periode.

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI terdapat koreksi bertambah senilai Rp273.602.933,00 pada saldo belanja hibah sehingga nilai belanja hibah per 31 Desember 2024 Audited menjadi Rp10.910.675.057, hal tersebut sebagai tindaklanjut satuan kerja BPSI Tanaman Sayuran untuk melaksanakan penyelesaian administrasi dan pengesahan hibah langsung sesuai Surat Edaran Ditjen Perbendaharaan Nomor S-95/PB/2025 Tanggal 21 Maret 2025.

Rincian hibah Satker lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian disajikan dalam lampiran

### F.4. CATATAN PENTING LAINNYA TERKAIT PIUTANG

Saldo temuan hasil pemeriksaan APIP pada Satker lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian per 31 Desember 2023 senilai Rp6.746.476.683,09. Temuan Itjen Kementan yang mempunyai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) senilai Rp4.623.944.741,96. Temuan BPK SKTJM Rp1.063.415.978,15 dan Non SKTJM Rp1.059.115.962,98. Total temuan APIP tidak ber-SKTJM senilai Rp1.059.115.962,98 seluruhnya adalah temuan BPK-RI pada satker BISIP senilai Rp751.294.906,98, BPSI UAT senilai Rp220.121.056,00, serta BPSIT Serealialia senilai Rp87.700.000,00.

Berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Sekretaris Jenderal Kementan, dan Itjen Kementan per 31 Desember 2024 total temuan hasil pemeriksaan APIP pada Satker lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian senilai Rp8.088.993.140,14 dengan rincian:

1. Temuan Itjen Kementan totalnya Rp6.326.782.255,01 dengan rincian temuan Itjen regular yang senilai Rp4.180.322.366,81 memiliki SKTJM dan Rp14.000.000,00 tidak memiliki SKTJM, serta temuan Itjen Investigasi totalnya senilai Rp2.132.459.888,20 memiliki SKTJM.
2. Temuan BPK totalnya Rp1.762.210.885,13 dengan rincian senilai Rp1.010.915.978,15 memiliki SKTJM dan Rp751.294.906,98 tidak memiliki SKTJM. Semua temuan BPK ini tercatat pada Neraca Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

Berdasarkan Neraca Laporan Keuangan per 31 Desember 2024 total Piutang Badan Standardisasi Instrumen Pertanian senilai Rp8.483.610.888,00 dengan rincian:

1. Piutang bukan pajak senilai Rp4.348.502.016,00.
2. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR senilai Rp16.963.314,00.
3. Piutang jangka panjang TP/TGR senilai Rp842.155.657,00.
4. Piutang Jangka Panjang Lainnya senilai Rp3.275.989.901,00

Secara nominal, apabila dibandingkan Total temuan APIP senilai Rp8.088.993.140,14 dengan total Piutang Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang tercatat di neraca senilai Rp8.483.610.888,00 ada perbedaan senilai Rp394.617.747,86 yang disebabkan oleh piutang bukan pajak bukan temuan APIP yang tercatat di Neraca pada satker BISIP senilai Rp384.080.745,00, pada satker BPSIP Sulawesi Tengah senilai Rp14.877.000,00, dan pada satker BPSIP Sumatera Barat senilai Rp9.660.000.

Dari Total Piutang Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang tercatat di neraca senilai Rp8.483.610.888,00 terdapat temuan yang ber Kategori Macet senilai Rp2.291.335.042,00.

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal terdapat koreksi pencatatan bertambah senilai **Rp13.193.000,00** sehingga Total Piutang per 31 Desember 2024 *Audited* adalah senilai **Rp8.496.803.888,00**. Koreksi transaksi tersebut merupakan tindak lanjut atas konsep hasil pemeriksaan BPK pada beberapa satker lingkup BSIP terkait kelebihan pembayaran tunjangan umum pada pegawai yang melaksanakan tugas belajar.

Rincian Daftar Piutang per satker lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian disajikan pada lampiran

## F.5. PENYELESAIAN TLHP BPK

Pada TA 2024 terdapat 1 LHP yang diterima oleh Kementerian Pertanian dan memuat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yaitu:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan pada Laporan Keuangan Kementerian Pertanian TA 2024 Nomor 21b/LHP/XVII/05/2024 tanggal 21 Mei 2024 atas Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan Kementerian Pertanian Tahun 2024. Dalam LHP ini terdapat 7 temuan yang harus ditindaklanjuti oleh Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yaitu:
  - a. Pengelolaan PNPB pada Setjen, BPSIP Sulawesi Selatan, dan BPSI UAT Ciawi Belum Memadai
  - b. Pelaksanaan Belanja Barang Selain MAK 526 Tidak Sesuai Ketentuan
  - c. Kelebihan Pembayaran dan/atau Kekurangan Volume Belanja Barang Selain MAK 526 Sebesar Rp1.906.125.398,00
  - d. Pengelolaan Kas pada Kementerian Pertanian Belum Dilaksanakan Secara Tertib dan Memadai
  - e. Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Persediaan dan Beban Persediaan pada Satuan Kerja BSIP Belum Memadai
  - f. Pengelolaan Aset Tetap dan Aset Lainnya pada Kementerian Pertanian Belum Optimal
  - g. Kementerian Pertanian Belum Melaporkan Semua Aset Tetap yang Memenuhi Kriteria Properti Investasi dalam Neraca Per 31 Desember 2024

Atas seluruh rekomendasi atas temuan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Berdasarkan hasil telaah BPK pada Semester 2 Tahun 2024 terdapat 5 rekomendasi yang statusnya telah sesuai. Terhadap 5 rekomendasi yang statusnya belum sesuai terdapat 3 rekomendasi yang masih perlu tindak lanjut berikutnya oleh BSIP dan 2 rekomendasi menunggu tindak lanjut dari Eselon 1 lain karena temuan gabungan.

2. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Program *Agriculture Value Chain Development Project* (ICARE) *Loan Agreement* IBRD Nomor 9341-ID pada Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2023 Nomor 46.b/LHP/XVII/06/2024 tanggal 26 Juni 2024. Dalam LHP ini terdapat 3 temuan (9 rekomendasi) yang harus ditindaklanjuti oleh BSIP yaitu:
  - a. Proses Penganggaran dan Penyusunan Laporan Keuangan Program ICARE Tahun 2023 Belum Memadai
  - b. Realisasi Belanja Kategori Komponen A, B, dan C pada Project Implementation Unit (PIU) serta Project Management Unit (PMU) Tidak Sesuai Ketentuan
  - c. Luas Kawasan Pertanian Program ICARE Kurang dari Target Sebesar 1.099,34 Ha serta PMU/PIU Belum Merancang Penggunaan Peta Polygon dan Kesesuaian Tanah dalam Sistem Informasi Manajemen Kementerian Pertanian

Atas seluruh rekomendasi atas temuan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Berdasarkan hasil telaah BPK pada Semester 2 Tahun 2024 terdapat 5 rekomendasi yang statusnya telah sesuai dan masih terdapat 4 rekomendasi yang perlu tindak lanjut berikutnya

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI, terdapat beberapa Konsep Hasil Pemeriksaan (KHP) yang dapat kami jelaskan antara lain :



- **Penerimaan Hasil Pelaksanaan Kerjasama Satker BPSI Tanah dan Pupuk pada BSIP dengan Pihak Ketiga Tidak Dianggarkan dan Tidak Dilaporkan dalam Laporan Keuangan**

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat penerimaan yang berasal dari pelaksanaan kerjasama antara satker lingkup BSIP dengan pihak ketiga yang belum dianggarkan dan dilaporkan. Pelaksanaan kerjasama di beberapa satker lingkup BSIP dengan pihak ketiga tidak dianggarkan dan dilaporkan ke dalam Laporan Keuangan disebabkan tidak adanya tusi kerjasama di satker. Selain itu juknis yang mengatur tentang pelaporan atas penerimaan dan penggunaan dana yang berasal dari kerjasama dengan pihak ketiga belum diperbaharui. Berikut terlampir satker yang memiliki kerjasama dengan pihak ketiga:

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	NILAI PENERIMAAN	NILAI PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	237238	BBPSI Padi	2.190.320.000,00	2.190.320.000,00	Kerjasama dengan pihak ketiga senilai Rp884.148.000,00 sedangkan sisanya Rp1.306.172.000,00 adalah Hibah Langsung Luar Negeri yang telah disahkan dan telah tercatat dalam Laporan Keuangan
2	237259	BBPSI Veteriner	100.000.000,00	99.859.392,00	Nilai tersebut adalah Kegiatan Kerjasama Kemitraan yang berasal dari DIPA Sekretariat BSIP, nilai pendapatan dan belanja tersebut telah tercatat dalam Laporan Keuangan
3	238027	BPSI Tanaman Palma	139.813.989,00	139.813.989,00	Kegiatan Kerjasama Swakelola Pelepasan Kelapa Magelang dengan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang
4	412050	BPSI Tanaman Buah Tropika	1.258.400.000,00	1.258.400.000,00	Kerjasama dengan PT. Pupuk Kalimantan Timur
5	567318	BPSIP Jawa Tengah	122.446.273,00	104.081.384,00	Nilai penerimaan/pendapatan dari kegiatan kerjasama dengan pihak ketiga adalah Rp61.223.146,00. Terjadi double penerimaan dalam temuan BPK karena total penerimaan tahun 2024 dalam excel terhitung sebagai penerimaan
6	648716	BPSI Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika	532.725.000,00	358.732.757,00	Nilai tersebut adalah Dana Hibah Langsung Luar Negeri yang telah tercatat dalam Laporan keuangan
7	411993	BPSI Tanaman Aneka Kacang	646.563.480,00	607.910.803,00	Kegiatan Kerjasama dengan PT. Wilmar
8		BPSI Tanah dan Pupuk	4.376.580.050,00	4.059.144.284,00	Kegiatan Kerjasama dengan PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Krakatau Posco, dan Office Cherifien des Phosphates (OCP S.A)
<b>JUMLAH</b>			<b>9.336.848.792,00</b>	<b>8.818.262.609,00</b>	

Dari jumlah penerimaan yang belum tercatat dalam Laporan Keuangan sesuai temuan BPK senilai Rp9.336.848.792,00, senilai Rp1.838.897.000 merupakan hibah langsung luar negeri dan senilai Rp100.000.000,00 merupakan kegiatan kemitraan yang telah tercatat dalam Laporan Keuangan. Terdapat nilai pendapatan yang dihitung dua kali oleh BPK dalam Konsep Temuan Pemeriksaan pada satker BPSIP Jawa Tengah senilai Rp61.223.146,00, sehingga nilai Pendapatan yang belum tercatat dalam Laporan Keuangan adalah senilai Rp7.366.728.646,00.

- **Pengelolaan PNPB Tahun 2024 pada Setjen, BPSIP Jatim, dan BPSITAS Jatim Belum Memadai**

Hasil pengujian pada satker BPSIP Jawa Timur menunjukkan bahwa terdapat enam laporan hasil pengujian yang tidak ditemukan di data SPA dan laporan rekap PNPB. Atas kondisi tersebut enam laporan hasil pengujian telah tercantum dalam SPA dan telah disetor ke Kas Negara senilai Rp2.007.000 dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA	NILAI	KETERANGAN
1	Adi Santoso	342.000	Simponi tanggal 15 April 2025 senilai Rp342,000 dengan NTPN 3FD5A0NA0DN93IU0
2	Dr. Gunawan	270.000	Simponi tanggal 15 April 2025 senilai Rp270,000 dengan NTPN 1326448VVO0QNALC
3	Erwin	369.000	Simponi tanggal 15 April 2025 senilai Rp369,000 dengan NTPN D22A13CIFTEEACC6
4	Kejaksaan	396.000	Simponi tanggal 15 April 2025 senilai Rp396,000 dengan NTPN 576F26U8F7NVUKC7
5	Susilo Aji	630.000	Simponi tanggal 15 April 2025 senilai Rp630,000 dengan NTPN AD3F00NA0DN93LLS

Hasil pengujian pada satker BPSI Tanaman Pemanis dan Serat terdapat kekurangan perhitungan tagihan sebesar Rp2.865.000,00 yaitu atas nama pemohon Nur Wahyudi dengan formulir penerimaan sampel nomor 50/PPS/LB/X/2024. Sesuai formulir, jumlah sampel yang diuji adalah sebanyak 23 sampel, namun dalam perhitungan besaran PNPB yang harus disetor hanya dihitung untuk 20 sampel. Atas kondisi tersebut telah disetor ke Kas Negara senilai Rp2.865.000,00 pada tanggal 14 April 2025 dengan NTPN1C5E03CIFTEE7P0V.

- **Terdapat Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai – Gaji dan Tunjangan PNS Pegawai Kementerian Pertanian Minimal Sebesar Rp Rp93.383.000,00**

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban Belanja Pegawai – Gaji dan Tunjangan PNS menunjukkan terdapat pembayaran tunjangan umum dan tunjangan fungsional kepada 11 pegawai BSIP yang sedang melaksanakan tugas belajar sebesar Rp19.348.000,00. Hasil Penelusuran terkait KHP tersebut

- Dariin Firda, S.Si telah aktif kembali per Februari 2024 sesuai SK Kepala BPSI Agroklimat dan Hidrologi Pertanian Nomor B 56.1/OT 050/H.8.3/02/2024 tanggal 7 Februari 2024. Temuan Awal yang tercatat dalam KHP senilai Rp2.220.000,00 menjadi Rp185.000,00.

Sehingga nilai Kelebihan Pembayaran tunjangan umum dan tunjangan fungsional kepada 11 pegawai BSIP senilai Rp19.348.000,00 menjadi Rp17.313.000,00. Atas kondisi tersebut telah dicatat ke dalam Neraca sebagai Piutang Lainnya dan 11 pegawai BSIP tersebut telah melakukan penyetoran ke Kas Negara dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA	TOTAL (Rp)	KETERANGAN
1	Prasasti Wahyu Haryati, S.Si	1.003.000	Simponi tanggal 30 Januari 2025 senilai Rp1,003,000 dengan NTPN 7245C0NA0DEQLPIP
2	Sri Ayu La Aji, S.Si	185.000	Simponi tanggal 14 April 2025 senilai Rp1,665,000 dengan NTPN 648236U8F7NVUHGB (seharusnya Rp185.000)
3	Kendri Wahyuningsih, S.Si., M.Sc	555.000	Simponi tanggal 15 April 2025 senilai Rp555,000 dengan NTPN 211650NA0DNA6KOR
4	drh. Firda Farida Rahmah	925.000	Simponi tanggal 14 April 2025 senilai Rp925,000 dengan NTPN BB17F55DFU73ICH
5	Shinta Mutia Sari, S.P	2.220.000	Simponi Tanggal 14 April 2025 senilai Rp2,220,000 dengan NTPN 3910C6U8F7NVUIF3
6	Redy Adiyta Permadi, S.P.	2.500.000	Simponi 9 September 2024 senilai Rp500,000 dengan NTPN 68D7C6QT9JESV5EM
			Simponi 9 September 2024 senilai Rp500,000 dengan NTPN CF33145KQ3NNO5C6
			Simponi 9 September 2024 senilai Rp500,000 dengan NTPN 37D1B5229UA455FR
			Simponi 9 September 2024 senilai Rp500,000 dengan NTPN 699D81GCAK0IH5I1
			Simponi 9 September 2024 senilai Rp500,000 dengan NTPN F1F8C5UFPOSGI5IR
7	Naufal Mahdi Ramedia, S.S.T.	1.620.000	Simponi tanggal 16 Oktober 2024 senilai Rp2,160,000 dengan NTPN BBE6861QV4DH3VM9
	Naufal Mahdi Ramedia, S.S.T.	1.665.000	Simponi tanggal 14 April 2025 senilai Rp1,125,000 dengan NTPN 3456361QVD5JGP34
			Simponi tanggal 15 April 2025 senilai Rp540,000 dengan NTPN 75B097QLV2ADF57H
8	Chris Sugihono, S.TP., M.P.	2.660.000	Simponi tanggal 14 April 2025 senilai Rp2,660,000 dengan NTPN 9D6A10NA0DN940OT
9	Mimin Yulita Kusumaningrum, S.TP, N	370.000	Simponi Tanggal 14 April 2025 senilai Rp370,000 dengan NTPN 201D73CIFTEEA0OS
10	Tika Tresnawati, S.Si., M.Si	185.000	Simponi Tanggal 14 April 2025 senilai Rp3,425,000 dengan NTPN E4F2755DFU733KK (Merupakan setoran gabungan Rp185,000 dan Rp3,240,000)
	Tika Tresnawati, S.Si., M.Si	3.240.000	
11	Dariin Firda, S.Si	185.000	Temuan Awal Rp2,220,000 berubah menjadi Rp185,000 karena yang bersangkutan telah aktif kembali per Februari 2024. Telah disetor ke Kas Negara pada tanggal 16 April 2025 senilai Rp185.000 dengan NTPN C4F552G502S42UBC
		17.313.000	

- **Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Sedang Dalam Masa Tugas Belajar pada BSIP Belum Tertib Sehingga Terdapat Kelebihan Pembayaran Minimal Sebesar Rp111.311.095,00**

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas data rekapitulasi dan perhitungan daftar tunjangan kinerja satker Sekretariat BSIP diketahui terdapat pembayaran pembayaran tunjangan kinerja pegawai yang sedang dalam masa tugas belajar sebesar 100%. Ketentuan yang berlaku mengatur bahwa atas pegawai tersebut, tunjangan kinerjanya seharusnya dibayarkan hanya sebesar 80%.

Terhadap 5 (lima) orang petugas belajar sebesar Rp15.632.020,00 terdapat kelebihan pemberian/pembayaran tunjangan kinerja sehingga akan dilakukan pengembalian kelebihan pemberian/pembayaran tunjangan kinerja ke kas negara pegawai atas nama: Ratri, Mimin, Komarudin, Redy, Kendri.

Namun demikian perlu adanya penyesuaian besaran pengembalian pemberian/pembayaran tunjangan kinerja terhadap 8 (delapan) orang pegawai yang melakukan perpanjangan pada masa transisi Permentan 32 Tahun 2021 sesuai surat Biro OK pegawai atas nama: Aida, Septian, Astrid, Winda, Gokma, Abi, Ristanti, Yanuar.

Setelah pembahasan ulang antara BPK (Bu Indri) dengan Kepegawaian pada tanggal 29 April 2025, atas kelebihan bayar tunjangan kinerja pada 13 petubel yang semula senilai Rp111.311.095,00 menjadi Rp27.358.545

Rincian temuan dan update tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut disajikan dalam lampiran.

## F.6. REVISI DIPA

DIPA awal Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) terbit tanggal 24 November 2024 dengan total alokasi anggaran sebesar Rp975.431.462.000,00. Revisi DIPA/RKA-KL sampai dengan Triwulan IV TA 2024 telah dilakukan sebanyak 14 kali, meliputi:

- a. **Revisi DIPA ke-1 pada tanggal 05 Januari 2024 tentang Revisi Refocusing/Realokasi Anggaran Kementerian Pertanian TA. 2024.** Revisi tersebut berdasarkan Surat Menteri Pertanian Nomor B-01/RC.110/M/01/2024 tanggal 02 Januari 2024 Hal Penyampaian Usulan Refocusing/Realokasi Anggaran TA. 2024. Revisi meliputi (1) pergeseran anggaran antar Eselon I pada Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp52.000.000.000,00 yang dialihkan ke Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dan (2) pergeseran anggaran antar satker lingkup BSIP pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri sebesar Rp25.000.000.000,00 untuk kegiatan penguatan kapasitas penerap standar pertanian dalam rangka upsus peningkatan produksi padi dan jagung. Secara keseluruhan revisi ini mengakibatkan (1) perubahan pagu BSIP dari semula sebesar Rp975.431.462.000,00 menjadi sebesar Rp923.431.462.000,00 dan (2) perubahan anggaran blokir dari semula sebesar Rp210.589.532.000,00 menjadi sebesar Rp158.589.532.000,00.
- b. **Revisi DIPA ke-2 pada tanggal 22 Januari 2024 tentang pencantuman blokir *Automatic Adjustment* BSIP** sebesar Rp65.315.616.000,00. Pemblokiran berupa *Automatic Adjustment* tersebut berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor: S-1082/MK.02/2024 tanggal 29 Desember 2024 hal *Automatic Adjustment* (AA) Belanja K/L TA 2024 dan Surat Menteri Pertanian Nomor: B-11/RC.110/M/01/2024 tanggal 17 Januari 2024 hal Penyampaian *Automatic Adjustment* Kementerian Pertanian TA 2024.  
  
Selain itu, BSIP juga mengusulkan **revisi penghapusan blokir pada proyek SBSN *Seed Center Padi*** sebesar Rp21.242.907.000,00 setelah dipenuhinya dokumen perhitungan dinas PUPR setempat. Secara keseluruhan revisi ini tidak mengakibatkan perubahan total pagu BSIP namun mengakibatkan perubahan blokir BSIP dari semula sebesar Rp Rp158.589.532.000,00 menjadi sebesar Rp158.219.686.000,00.
- c. **Revisi DIPA ke-3 pada tanggal 10 Februari 2024 tentang penghapusan blokir pada proyek *Integrated Corporation of Agriculture Resources Empowerment (ICARE)*** sebesar Rp25.000.000.000,00 setelah dipenuhinya *No Objection Letter (NoL)* dari *Annual Working Project (AWP)* ICARE TA 2024. Secara keseluruhan revisi ini

tidak mengakibatkan perubahan pagu BSIP, namun mengakibatkan perubahan total blokir dari semula sebesar Rp158.219.686.000,00 menjadi sebesar Rp133.219.686.000,00.

- d. **Revisi DIPA ke-4 pada tanggal 15 Februari 2024 ke Direktorat Pelaksanaan Pelaksanaan Anggaran** terkait pergeseran anggaran antar satker pada Program Dukungan Manajemen untuk pemenuhan gaji THL, kekurangan biaya pakan ternak, gaji PPNPN, kenaikan gaji *outsourcing*, dan pemeliharaan kendaraan roda 4 yang telah dilakukan serah terima. Selain itu revisi juga dilaksanakan pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri berupa pergeseran anggaran antar satker untuk memenuhi kekurangan anggaran kegiatan penguatan kapasitas penerap standar pertanian mendukung UPSUS Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung di Aceh yang semula melibatkan 400 orang menjadi 10.000 orang. Secara keseluruhan revisi ini tidak mengakibatkan perubahan pagu total BSIP, hanya mengakibatkan perubahan pagu per satker.
- e. **Revisi DIPA ke-5 pada tanggal 04 April 2024 ke Direktorat Pelaksanaan Anggaran** terkait pergeseran anggaran antar satker pada Program Dukungan Manajemen untuk monitoring dan pelaporan kegiatan strategis Kementerian Pertanian, yaitu kegiatan optimasi lahan, pompanisasi dan penambahan areal tanaman untuk peningkatan produksi padi dalam rangkaantisipasi darurat pangan. Secara keseluruhan revisi ini tidak mengakibatkan perubahan total pagu BSIP, hanya mengakibatkan perubahan pagu per satker.
- f. **Revisi DIPA ke-6 pada tanggal 06 Juni 2024 tentang penambahan pagu dan pembukaan blokir PNPB, penghapusan blokir ketidaksesuaian anggaran per program dengan Surat Menkeu No. S-773/MK.02/2024 tanggal 25 September 2024 terkait Alokasi Pagu Anggaran (SPAA) dan belum adanya dasar hukum BSIP melaksanakan fungsi perbenihan, serta revisi realokasi internal antar satker lingkup BSIP.** Dasar kebijakannya yaitu, 1) Surat Direktur Jenderal Anggaran an. Menteri Keuangan Nomor S-22/MK.2/2024 tanggal 31 Januari 2024 hal Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Pertanian; 2) Surat Persetujuan Menteri Pertanian Nomor B-87/RC.110/M.05/2024 tanggal 28 Mei 2024; 3) Surat Perintah Menteri Pertanian Nomor B-57/HK.160/M/04/2024 tanggal 3 April 2024; dan 4) Persetujuan RKA-K/L Kementerian Pertanian T.A. 2024 oleh Komisi IV DPR RI. Secara keseluruhan revisi ini mengakibatkan perubahan total Pagu BSIP dari semula sebesar Rp923.431.462.000,00 menjadi sebesar Rp924.171.799.000,00 dan perubahan blokir dari semula sebesar Rp133.219.686.000,00 menjadi sebesar Rp71.822.241.000,00.
- g. **Revisi DIPA ke-7 pada tanggal 26 Juli 2024 ke Direktorat Pelaksanaan Anggaran** terkait pergeseran anggaran antar satker pada Program Dukungan Manajemen untuk pemeliharaan halaman kantor/ gedung/ kebun percobaan/ jalan/ sumur bor/ pagar/ kendaraan/ peralatan dan mesin/ jaringan listrik/ CCTV, langganan Listrik dan paket zoom, pembiayaan UHL, perpindahan gaji tenaga PPNPN serta pemenuhan pakan ternak. Revisi ini tidak mengakibatkan perubahan pagu total BSIP, hanya mengakibatkan perubahan pagu per satker.
- h. **Revisi DIPA ke-8 pada tanggal 17 September 2024 tentang revisi optimalisasi belanja pegawai.** Revisi ini berdasarkan Surat Menteri Pertanian Nomor: B-155/RC.110/M/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024 Hal Usulan Revisi Optimalisasi Anggaran TA 2024. BSIP mengusulkan optimalisasi belanja pegawai sebesar Rp11.000.000.000,00 untuk kegiatan penguatan kapasitas penerap standar dan



kegiatan dukungan manajemen. Berdasarkan hasil penelaahan, usulan revisi dapat diakomodir sebagian, yaitu sebesar Rp10.122.628.000,00 dengan catatan sebesar Rp530.776.000,00 masih diblokir sehubungan dengan belum terpenuhinya data dukung.

Selain revisi tersebut, BSIP juga mengajukan usulan revisi administrasi perubahan Catatan Hal III DIPA berupa perubahan akun penerimaan PNPB sebagai tindak lanjut Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-47/AG/AG.7/2024 tanggal 26 Juli 2024 Hal Penegasan akun PNPB yang dapat digunakan pada satuan kerja lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan perubahan Catatan Hal IV DIPA berupa pembukaan blokir renovasi Gedung sebesar Rp3.385.137.000,00 setelah dipenuhinya dokumen PUPR.

Revisi ini tidak mengakibatkan perubahan pagu total BSIP, namun mengakibatkan perubahan pagu per program, per jenis belanja, per satker, serta jumlah blokir BSIP dari semula sebesar Rp71.822.241.000,00 menjadi sebesar Rp68.967.880.000,00.

- i. **Revisi DIPA ke-9 pada tanggal 22 Oktober 2024 ke Direktorat Pelaksanaan Anggaran terkait pergeseran anggaran antar satker** pada Program Dukungan Manajemen untuk pemeliharaan gedung/bangunan, pengamanan aset dan identifikasi survey tanah IP2TP Gratitunon, Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar, serta sertifikasi lahan kantor BPSIP NTB yang semula merupakan tanah milik pemda Provinsi NTB dengan izin hak guna pakai menjadi hak milik Kementerian Pertanian. Revisi ini tidak mengakibatkan perubahan pagu total BSIP, hanya mengakibatkan perubahan pagu per satker.
- j. **Revisi DIPA ke-10 pada tanggal 7 November 2024 tentang revisi PNPB** (penambahan/pengurangan target dan pagu PNPB, pengurangan pagu blokir PNPB selisih dari ijin penggunaan) **dan pembukaan blokir** (pengamanan aset BPSIP Kaltim dan pengadaan pengolah data di BBPSIP). Revisi ini mengakibatkan perubahan pagu total BSIP dari semula sebesar Rp924.171.799.000,00 menjadi sebesar Rp921.144.216.000,00 dan perubahan total blokir dari semula sebesar Rp68.967.880.000,00 menjadi sebesar Rp65.754.497.000,00.
- k. **Revisi DIPA ke-11 berupa Self Blocking Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas.** Dasar kebijakan penghematan tersebut adalah: 1) Surat Menteri Keuangan Nomor: S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 Hal Langkah – Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas K/L TA 2024 dan 2) Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor: S-446/PB.2/2024 tanggal 10 November 2024 Hal Penyampaian Rincian Target Penghematan Belanja Perjalanan Dinas K/L TA 2024. BSIP mendapat target penghematan belanja perjalanan dinas sebesar Rp2.220.719.000,00. Revisi dilakukan secara mandiri oleh satker di Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Revisi ini tidak mengakibatkan perubahan pagu total BSIP, namun mengakibatkan perubahan total blokir BSIP dari semula sebesar Rp65.754.497.000,00 menjadi sebesar Rp67.975.216.000,00.
- l. **Revisi DIPA ke-12 pada tanggal 26 November 2024 ke Direktorat Pelaksanaan Anggaran terkait pergeseran anggaran belanja pegawai operasional (001)** dari satker BPSI Buah Tropika dialihkan ke satker PSI Tanaman Pangan untuk memenuhi kekurangan belanja pegawai operasional (001). Revisi ini tidak mengakibatkan perubahan pagu total BSIP, hanya mengakibatkan perubahan pagu per satker.

- m. Revisi DIPA ke-13 pada tanggal 28 November 2024 ke Direktorat Pelaksanaan Anggaran berupa pergeseran anggaran antar satker** terkait 1) Pemenuhan kekurangan belanja operasional dan pemeliharaan gedung/ kantor/ rumah dinas /guest house /halaman/ pagar/ jalan/ kebun percobaan /instalasi panel genset/ listrik, instalasi pengairan lahan kebun, langganan listrik, dan pemeliharaan peralatan laboratorium; serta 2) Pemenuhan kebutuhan anggaran untuk pembayaran honor bagi site manager dan fasilitator pada proyek ICARE. Revisi ini tidak mengakibatkan perubahan pagu total BSIP, hanya mengakibatkan perubahan pagu per satker.
- n. Revisi DIPA ke-14 pada tanggal 16 Desember 2024 tentang revisi penambahan target dan pagu PNBPN di 2 satker**, yaitu (1) BISIP untuk pemberian penghargaan dan motivasi kepada para inventor atas penerimaan dari penjualan hasil teknologi berupa lisensi paten maupun perlindungan varietas tanaman (PVT) dan (2) BPSIP Jatim untuk sarana produksi dan bahan pendukung kebun percobaan/penerapan dan pengadaan mesin pemotong rumput sebanyak 4 buah. Revisi ini mengakibatkan penambahan pagu sebesar Rp580.789.000 sehingga mengakibatkan perubahan pagu total BSIP dari semula sebesar Rp922.892.550.000,00 menjadi sebesar Rp923.473.339.000,00.

Selain revisi ke Direktorat Jenderal Anggaran, Kemenkeu dan Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, terdapat revisi penambahan pagu PNBPN dan Hibah Langsung Luar Negeri ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang dilakukan secara mandiri oleh beberapa satker, yaitu:

1. Satker BPSI Tanaman Industri dan Penyegar, penambahan pagu PNBPN sebesar Rp75.572.000,00 dengan persetujuan DIPA tanggal 3 Desember 2024;
2. Satker BPSIP Sulawesi Selatan, penambahan pagu PNBPN sebesar Rp142.650.000,00 dengan persetujuan DIPA tanggal 3 Desember 2024;
3. Satker BPSI Lingkungan Pertanian, penambahan pagu Hibah Langsung Luar Negeri sebesar Rp260.079.000,00 dengan persetujuan DIPA tanggal 10 Desember 2024;
4. Satker BPSIP Jawa Tengah, penambahan pagu PNBPN sebesar Rp231.400.000,00 dengan persetujuan DIPA tanggal 13 November 2024;
5. Satker PSI Perkebunan, penambahan pagu PNBPN sebesar Rp81.128.000,00 dengan persetujuan DIPA tanggal 17 Desember 2024.
6. Satker BPSIP Sumatera Barat, penambahan pagu PNBPN sebesar Rp481.972.000,00 dengan persetujuan DIPA tanggal 19 November 2024.
7. Satker BPSIP Riau, penambahan pagu PNBPN sebesar Rp54.000.000,00 dengan persetujuan DIPA tanggal 20 November 2024;
8. Satker BPSIP Banten, penambahan pagu PNBPN sebesar Rp89.790.000,00 dengan persetujuan DIPA tanggal 26 November 2024;
9. Satker BPSI Tanaman Aneka Kacang, penambahan pagu Hibah Langsung Luar Negeri sebesar Rp312.743.000,00 dengan persetujuan DIPA tanggal 29 November 2024;
10. Satker BPSI Tanaman Pemanis dan Serat, penambahan pagu Hibah Langsung Luar Negeri sebesar Rp19.000.000,00 dengan persetujuan DIPA tanggal 29 November 2024;



11. Satker BBPSI Mekanisasi Pertanian, penambahan pagu Hibah Langsung Luar Negeri sebesar Rp279.815.000,00 dengan persetujuan DIPA tanggal 20 Desember 2024.
12. Satker BPSI Tanaman Jeruk dan Sub Buah Tropika, penambahan pagu Hibah Langsung Luar Negeri sebesar Rp61.960.000,00 dengan persetujuan DIPA tanggal 23 Desember 2024.
13. Satker BPSI Tanaman Jeruk dan Sub Buah Tropika, penambahan pagu Hibah Langsung Luar Negeri sebesar Rp44.492.000,00 dengan persetujuan DIPA tanggal 27 Desember 2024.
14. Satker BPSI Tanaman Sayuran, penambahan pagu Hibah Langsung Luar Negeri sebesar Rp744.331.000,00 dengan persetujuan DIPA tanggal 31 Desember 2024.
15. Satker BBPSI Biogen, penambahan pagu Hibah Langsung Luar Negeri sebesar Rp451.257.000,00 dengan persetujuan DIPA tanggal 31 Desember 2024.
16. Satker BBPSI Padi, penambahan pagu Hibah Langsung Luar Negeri sebesar Rp1.306.172.000,00 dengan persetujuan DIPA tanggal 31 Desember 2024.
17. Satker BBPSI SDLP, penambahan pagu Hibah Langsung Luar Negeri sebesar Rp1.072.611.000,00 dengan persetujuan DIPA tanggal 31 Desember 2024.
18. Satker BPSI Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik, penambahan pagu Hibah Langsung Luar Negeri sebesar Rp30.800.000,00 dengan persetujuan DIPA tanggal 31 Desember 2024.
19. Satker BPSI Tanaman Hias, penambahan pagu Hibah Langsung Luar Negeri sebesar Rp954.161.000,00 dengan persetujuan DIPA tanggal 31 Desember 2024.
20. Satker BBPSI Pascapanen, penambahan pagu Hibah Langsung Luar Negeri sebesar Rp695.872.000,00 dengan persetujuan DIPA tanggal 31 Desember 2024.
21. Satker BBPSIP, penambahan pagu Hibah Langsung Luar Negeri sebesar Rp461.802.000,00 dengan persetujuan DIPA tanggal 31 Desember 2024.
22. Satker BPSI Tanah dan Pupuk, penambahan pagu Hibah Langsung Luar Negeri sebesar Rp3.229.293.000,00 dengan persetujuan DIPA tanggal 31 Desember 2024.
23. Satker BBPSI Biogen, penambahan pagu Hibah Langsung Luar Negeri sebesar Rp1.047.956.000,00 dengan persetujuan DIPA tanggal 20 Januari 2025

**Penambahan pagu di atas mengakibatkan perubahan pagu total BSIP per 20 Januari 2025 menjadi sebesar Rp933.853.861.000,00 dengan blokir sebesar Rp67.975.216.000,00.**

## F.7. CATATAN DALAM MONSAKTI

### 1. TO DO LIST

- a. Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan

Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan pada satker lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian terdapat pada satker Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi dikarenakan Terdapat kesalahan pencatatan barang persediaan pada aplikasi sakti dengan kode akun 521252 berupa belanja peralatan dan mesin ekstrakomptabel sebanyak 50 unit senilai Rp161.838,00

yang diinput melalui modul komitmen, terkait permasalahan tersebut telah dilakukan reklasifikasi dari persediaan ke aset.

b. Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB

Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB pada satker lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian terdapat pada satker Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Gorontalo senilai Rp132.619.050,00 merupakan kesalahan pencatatan kode bmn pada sakti modul komitmen, yg seharusnya dicatat dg kode 4 (Gedung dan Bangunan) tetapi dicatat dg kode 6 (Aset Tetap Lainnya) berupa renovasi pagar keliling IP2SIP TA 2024

## 2. Rekonsiliasi

a. Terdapat selisih nilai Neraca dengan Subledger pada akun Piutang antara lain

- Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Sayuran pada akun Piutang PNPB senilai Rp25.963.314,00 antara nilai neraca dan subledger masing masing senilai Rp0,00 dan Rp25.963.314,00 dikarenakan Dibentuk ditahun sebelumnya dineraca sebagai Bagian Lancar TPTGR namun pada pencatatan awal dan penyetoran pada modul piutang menggunakan akun TGR Sehingga terbaca piutang Tagihan TPTGR
- Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Sayuran pada akun Piutang Bagian Lancar TPTGR senilai Rp16.963.314,00 antara nilai neraca dan subledger masing masing senilai Rp16.963.314,00 dan Rp0,00 merupakan dibentuk awal menggunakan jurnal manual karena pada saat itu modul piutang belum tersedia sehingga setelah dilakukannya migrasi tercatat sebagai saldo awal di neraca sebagai Bagian Lancar TPTGR namun ketika dilakukan penyetoran menggunakan akun 425791 yang otomatis dalam aplikasi tercatat sebagai Piutang TPTGR, terkait permasalahan ini dalam modul piutang belum dapat dilakukan
- Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian pada akun Piutang PNPB senilai Rp92.772.880,00 antara nilai neraca dan subledger masing masing senilai Rp92.772.880,00 dikarenakan Pembentukan di awal sebagai Piutang PNPB namun berdasarkan hasil rekonsiliasi tiga pihak (Biro KBMN, BSIP dan Itjen saat penyusunan LK SM 2 2022 direvisi/diakui ke akun Piutang Lainnya
- Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian pada akun Piutang Lainnya senilai Rp8.515.000,00 antara nilai neraca dan subledger masing masing senilai Rp108.882.500,00 dan Rp117.398.000,00 belum dapat dilakukan settlement piutang karena tidak muncul menu settlement piutang terhadap pembayaran melalui gaji induk bulan desember
- Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat pada akun Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak senilai Rp9.660.000,00 antara nilai neraca dan subledger masing masing senilai Rp9.660.000,00 dan Rp0,00 dikarenakan belum diinputnya piutang dalam Modul Piutang karena belum lengkapnya dokumen pencatatan SKTJM sebagai dasar penginputan.
- Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan pada akun Piutang PNPB senilai Rp14.334.515,00 antara nilai neraca dan subledger

masing masing senilai Rp12.334.515,00 dan Rp26.669.030,00 dikarenakan Setelah dilakukan Reviu oleh Itjen pada TA 2022 setoran menggunakan 425912 agar dikoreksi menjadi 425811 di TA 2023, dan mengikuti arahan DJPB untuk melakukan Koreksi hapus dan Kemudian merekam lagi sebagai saldo awal dengan nilai piutang sesuai saldo terakhirnya , dampaknya nilai Subledger menjadi Double catat, terkait hal ini sudah bertiket melalui HaiDJPB

- Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian senilai Rp1.541.305.460,00 dikarenakan belum dilakukannya penginputan debitur pada aplikasi SAKTI Modul piutang
- Balai Penerapan Standar instrument Pertanian Nusa Tenggara Barat senilai Rp73.251.288,00 dikarenakan belum dilakukannya penginputan debitur pada aplikasi SAKTI Modul piutang
- Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak pada akun Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak senilai Rp5.000.000,00 antara nilai neraca dan subledger masing masing senilai R106.964.310,00 dan Rp111.964.310 terjadi karena dibentuk awal menggunakan piutang PNBPN namun ketika dilakukan penyetoran menggunakan akun 425791, terkait permasalahan ini dalam modul piutang belum dapat dilakukan penyesuaian atas perbedaan setoran tersebut
- Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat pada akun Piutang Lainnya senilai Rp1.000.000,00 antara nilai neraca dan subledger masing masing senilai Rp20.850.000,00 dan Rp21.850.000,00 Adanya double input atas pengembalian tunjangan fungsional. Hal ini sudah ditindaklanjutnya dengan koreksi hapus transaksi sehingga 1 transaksi double senilai Rp1.000.000,00 telah tereliminasi pada SAKTI Modul GLP, namun masih terbaca di MONSAKTInya terhadap selisih tersebut.
- Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur pada akun Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak senilai Rp49.048.480,00 antara nilai neraca dan subledger masing masing senilai Rp0,00 dan Rp49.048.480,00 merupakan Tindaklanjut CHR Itjen untuk melakukan reklasifikasi Piutang PNBPN ke Piutang Jangka Panjang Lainnya melalui jurnal pada GLP karena di modul piutang tidak ada menu terkait perubahan tersebut
- Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur pada akun Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi senilai Rp1,00 antara nilai neraca dan subledger masing masing senilai Rp51.876.659,00 dan Rp51.876.660,00 Tindaklanjut CHR Itjen untuk melakukan reklasifikasi Piutang PNBPN ke Piutang Jangka Panjang Lainnya melalui jurnal pada GLP karena di modul piutang tidak ada menu terkait perubahan tersebut
- Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur pada akun Piutang Jangka Panjang Lainnya senilai Rp49.048.481,00 antara nilai neraca dan subledger masing masing senilai Rp52.954.038,00 dan Rp3.905.557,00 Tindaklanjut CHR Itjen untuk melakukan reklasifikasi Piutang PNBPN ke Piutang Jangka Panjang Lainnya melalui jurnal pada GLP karena di modul piutang tidak ada menu terkait perubahan tersebut

- Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah pada akun Penerimaan Negara Bukan Pajak senilai Rp14.877.000,00 antara nilai neraca dan subledger masing masing senilai Rp14.877.000,00 dan Rp29.754.000,00 adanya Double catat pencatatan untuk debitur PT. Socio Komunikasi Indonesia, terkait permasalahan ini tidak dapat dilakukan penghapusan dalam modul piutang
- Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara pada akun Penerimaan Negara Bukan Pajak senilai Rp58.868.200,00 antara nilai neraca dan subledger masing masing senilai Rp58.868.200,00 dan Rp0,00 merupakan selisih Rekonsiliasi Internal terjadi karena dibentuk awal menggunakan jurnal manual karena pada saat itu modul piutang belum tersedia sehingga setelah dilakukannya migrasi tercatat sebagai saldo awal di neraca sebagai Piutang PNBPN namun ketika dilakukan penyetoran menggunakan akun 425791 yang otomatis dalam aplikasi tercatat sebagai Piutang TPTGR, terkait permasalahan ini dalam modul piutang belum dapat dilakukan
- Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara pada akun Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi senilai Rp58.868.200,00 antara nilai neraca dan subledger masing masing senilai Rp0,00 dan Rp58.868.200,00 merupakan selisih Rekonsiliasi Internal terjadi karena dibentuk awal menggunakan jurnal manual karena pada saat itu modul piutang belum tersedia sehingga setelah dilakukannya migrasi tercatat sebagai saldo awal di neraca sebagai Piutang PNBPN namun ketika dilakukan penyetoran menggunakan akun 425791 yang otomatis dalam aplikasi tercatat sebagai Piutang TPTGR, terkait permasalahan ini dalam modul piutang belum dapat dilakukan
- Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau senilai Rp40.467.750,00 dikarenakan adanya pembentukan awal piutang di modul piutang menggunakan akun Piutang PNBPN namun disetor menggunakan akun Piutang TPTGR
- Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat pada akun Piutang Lainnya senilai Rp73.251.288,00 antara nilai neraca dan subledger masing masing senilai Rp74.801.288,00 dan Rp1.550.000,00 karena belum dilakukannya penginputan debitur pada aplikasi SAKTI Modul piutang
- Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat pada akun Piutang Tagihan TPTGR senilai Rp264.075.333,00 antara nilai neraca dan subledger masing masing senilai Rp0,00 dan Rp264.075.333,00 dikarenakan Pembentukan di awal sebagai Piutang Tagihan TPTGR namun berdasarkan hasil rekonsiliasi tiga pihak (Biro KBMN, BSIP dan Itjen saat penyusunan LK SM 2 2022 direvisi/diakui ke akun Piutang Jangka Panjang Lainnya
- Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat pada akun Jangka Panjang Lainnya senilai Rp264.075.333,00 antara nilai neraca dan subledger masing masing senilai Rp264.075.333,00 dan Rp0,00 dikarenakan dibentuk awal menggunakan jurnal manual karena pada saat itu modul piutang belum tersedia sehingga setelah dilakukannya migrasi tercatat sebagai saldo awal di neraca sebagai Piutang Jangka Panjang

Laiinya namun ketika dilakukan penyetoran menggunakan akun 425791 yang otomatis dalam apikasi tercatat sebagai Piutang TPTGR, terkait permasalahan ini dalam modul piutang belum dapat dilakukan

- b. Informasi dari Dit APK terkait selisih Rekonsiliasi Piutang ini untuk menunggu pemuktahiran aplikasi SAKTI kembali.

## F.8. KELEBIHAN PEMBAYARAN TUNJANGAN FUNGSIONAL

Dalam rangka menindaklanjuti Catatan Hasil Reviu Itjen atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2023 terkait adanya Kelebihan Tunjangan Fungsional pada satker Lingkup Badan standardisasi instrumen Pertanian, Kepala Badan telah menginstruksikan seluruh satker lingkup Badan standardisasi instrumen Pertanian untuk melakukan perhitungan saldo piutang kelebihan tunjangan fungsional sampai dengan 30 Juni 2024 sebagai dasar pencatatan piutang pada Laporan Keuangan Semester 1 Tahun 2024 dan segera melakukan pelunasan piutang tersebut sesuai surat Nomor B-1560/KU.060/H.1/06/2024 Tanggal 20 Juni 2024.

Tabel Transaksi Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional  
Per 31 Desember 2024

DATA BAR DES 2023	MUTASI			PER 30 DES 2024
	TAMBAH TA. 2023	TAMBAH TA.2024 (JANUARI - DES 2024)	KURANG	
5.356.844.000	231.880.000	263.640.000	3.859.865.112	1.992.498.888

Penjelasan antara lain:

1. Data BAR Desember 2023 senilai Rp5.356.844.000,00 sesuai Berita Acara Rekonsiliasi antara Kepala Bagian Umum dengan Koordinator Kepegawaian Nomor 212/KU.050/H.1.3/03/2024 Tanggal 5 Maret 2024
2. Mutasi Tambah TA 2023 senilai Rp.231.880.000, merupakan tambahan data yang tertinggal dan belum masuk pada saat penetapan BAR Desember 2023 pada 8 satker lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yaitu BPSIP Tanaman Sayuran, BPSIP Tanaman Buah, BPSI Tanah dan Pupuk, BPSIP Biogen, BPSIP NTB, BPSIP Sulawesi Tenggara, BPSI Tanaman Kacang, dan BBPSIP.
3. Mutasi Tambah TA 2024 (Januari 2024 – Desember 2024) senilai Rp263.640.000,00 merupakan pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional yang belum dilakukan pemberhentian pada TA 2024 pada 19 satker lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yaitu BBPSI SDLP, BBPSIP, BPSI Agroklimat, BPSI Lahan rawa, BPSI Lingtan, BPSI Taka, BPSI Tanah dan Pupuk, BPSI UAT, BPSIP Jambi, BPSI NTB, BPSIP NTT, BPSIP Papua, BPSIP Tanaman Buah, BPSIP Tanaman Hias, BPSI Tanaman Sayuran, LPSI Ruminansia Besar, LPSI Ruminansia Kecil, PSI Hortikultura, PSI Tanaman Pangan

4. Mutasi Kurang senilai Rp3.859.865.112,00, senilai Rp423.535.000,00 merupakan pengurangan karena pada saat penerbitan BAR belum dilakukan perhitungan tunjangan umum, senilai Rp3.436.330.112,00.

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal terdapat Kelebihan saldo pembayaran tunjangan fungsional dengan mutasi debet senilai Rp1.03.000,00, sehingga terjadi perubahan pada total mutasi tambah TA. 2024 menjadi senilai Rp264.643.000,00 dan nilai kelebihan pembayaran tunjangan fungsional per 31 Desember 2024 Audited menjadi sebesar Rp1.993.501.888,00. Tambahan nilai kelebihan pembayaran tunjangan fungsional terdapat pada satker Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Yogyakarta atas Nama debitur Prasasti Wahyu Haryati, S.Si yang saat pembayaran tunjangan fungsional senilai Rp1.003.000,00 yang bersangkutan dibayarkan saat masih melaksanakan tugas belajar, dimana pada saat Laporan Keuangan per 31 Desember TA. 2024 Unaudited satker tersebut selaku entitas akuntansi belum melakukan pembentukan/pencatatan pada modul piutang. Berkenaan dengan persoalan ini, maka saat periode 14 laporan keuangan satker bersangkutan mengajukan Usulan Jurnal Koreksi (UJK) dengan melakukan pencatatan terlebih dahulu pada aplikasi SAKTI Modul Piutang, sehingga akan menambah saldo akun Piutang PNPB (Piutang Lainnya) pada Neraca Badan Standardisasi Instrumen Pertanian/Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Audited. Kemajuan Transaksi kelebihan pembayaran tunjangan fungsional disajikan pada tabel berikut :

Tabel Transaksi Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional  
Per 31 Desember 2024 Audited

DATA BAR DES 2023	MUTASI			PER 30 DES 2024
	TAMBAH TA. 2023	TAMBAH TA.2024 (JANUARI - DES 2024)	KURANG	
5.356.844.000	231.880.000	264.643.000	3.859.865.112	1.993.501.888

Berdasarkan tabel diatas, Mutasi Tambah TA 2024 (Januari 2024 – Desember 2024) senilai Rp264.643.000,00 merupakan pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional yang belum dilakukan pemberhentian pada TA 2024 pada 20 satker lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yaitu BBPSI SDLP, BBPSIP, BPSI Agroklimat, BPSI Lahan rawa, BPSI Lingtan, BPSI Taka, BPSI Tanah dan Pupuk, BPSI UAT, BPSIP Jambi, BPSI NTB, BPSIP NTT, BPSIP Papua, BPSIP Tanaman Buah, BPSIP Tanaman Hias, BPSI Tanaman Sayuran, LPSI Ruminansia Besar, LPSI Ruminansia Kecil, PSI Hortikultura, PSI Tanaman Pangan, dan BPSIP Yogyakarta.

Progres Pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional Pegawai Eks Litbangjirap yang Tetap di Kementan Per 31 Desember 2024 disajikan dalam lampiran.

## F.9. CAPAIAN OUTPUT

Menindaklanjuti Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-17/PB/PB.6/2024 tanggal 2 Oktober 2024,

Kementerian/Lembaga agar memastikan seluruh satker telah merekam dan mengungkapkan capaian output per fungsi dalam CaLK. Capaian Output Badan Standardisasi Instrumen Pertanian TA 2024 terealisasi sebesar 100% berdasarkan pagu efektif. Apabila berdasarkan pagu secara keseluruhan terdapat beberapa output yang tidak mencapai 100% seperti pada Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas kegiatan Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar Output Produk Instrumen Pertanian Tanaman Pangan Terstandar. Realisasi output kegiatan tersebut adalah sebesar 0,3% dari target 401.119 unit terealisasi 1.149 unit. Hal ini disebabkan karena terdapat target output sebesar 400.000 unit berupa Benih Dasar Ubi Jalar dan Ubi Kayu tidak dapat direalisasikan karena anggarannya terblokir *automatic adjustment*. Adapun rincian laporan kinerja Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun Anggaran 2024 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:



LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2024									
Kementerian/ Lembaga					Kementerian Pertanian				
Unit Organisasi					Badan Standardisasi Instrumen Pertanian				
Fungsi					Ekonomi				
Sub Fungsi					Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan				
Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
1	2	Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	10
3	4	5,00	6	7	8	9			
HA	Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas	25.000.000.000	21.957.961.704	87,83					
HA.6915	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	25.000.000.000	21.957.961.704	87,83					
HA.6915.CAG.101	Produk Instrumen Tanaman Pangan Terstandar	25.000.000.000	21.957.961.704	87,83	401.119	1149	Unit	0,3	
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	152.270.437.000	147.652.296.019	96,97					
EC.6916	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	152.270.437.000	147.652.296.019	96,97					
EC.6916.ADA.101	Rancangan Standar Instrumen Tanaman Pangan	750.000.000	689.013.975	91,87	5	5	Standar	100,0	
EC.6916.ADA.102	Rancangan Standar Instrumen Perkebunan	1.650.000.000	1.595.706.181	96,71	8	8	Standar	100,0	
EC.6916.ADA.103	Rancangan Standar Instrumen Peternakan dan Kesehatan	2.300.000.000	2.160.125.651	93,92	8	8	Standar	100,0	
EC.6916.ADA.104	Rancangan Standar Instrumen Hortikultura	1.850.000.000	1.710.129.497	92,44	7	7	Standar	100,0	
EC.6916.ADA.105	Rancangan Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Perta	1.700.000.000	1.668.982.674	98,18	8	8	Standar	100,0	
EC.6916.ADA.106	Rancangan Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian	3.079.815.000	2.945.987.087	95,65	12	12	Standar	100,0	
EC.6916.ADA.107	Rancangan Standar Instrumen Pascapanen	1.200.000.000	1.185.628.141	98,80	4	4	Standar	100,0	
EC.6916.ADA.108	Rancangan Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber	799.088.000	773.845.211	96,84	2	2	Standar	100,0	
EC.6916.ADA.109	Konsep Rancangan Standar Instrumen Tanaman Pangan	1.130.000.000	1.085.084.596	96,03	11	13	Standar	100,0	
EC.6916.ADA.110	Konsep Rancangan Standar Instrumen Perkebunan	600.000.000	548.276.155	91,38	8	8	Standar	100,0	
EC.6916.ADA.111	Konsep Rancangan Standar Instrumen Peternakan dan K	450.000.000	444.308.779	98,74	8	8	Standar	100,0	
EC.6916.ADA.112	Konsep Rancangan Standar Instrumen Hortikultura	1.440.000.000	1.301.355.178	90,37	7	7	Standar	100,0	
EC.6916.ADA.113	Konsep Rancangan Standar Instrumen Sumber Daya Laha	3.929.293.000	3.901.562.251	99,29	14	14	Standar	100,0	
EC.6916.ADA.114	Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik L	3.498.000.000	3.338.852.977	95,45	34	40	Standar	100,0	
EC.6916.AEF.102	Hasil Standardisasi Instrumen Perkebunan yang disebarl	100.350.000	97.026.123	96,69	145	145	Orang	100,0	
EC.6916.AEF.109	Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan	30.381.802.000	30.108.541.572	99,10	33261	46652	Orang	100,0	
EC.6916.BDB.101	Lembaga Penerap Standar yang didampingi	7.107.912.000	6.889.426.167	96,93	34	57	Lembaga	100,0	
EC.6916.BJA.101	Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diuji	677.538.000	650.081.302	95,95	500	500	Produk	100,0	
EC.6916.BJA.102	Instrumen Hortikultura yang diuji	2.743.351.000	2.691.720.202	98,12	354	369	Produk	100,0	
EC.6916.BJA.103	Instrumen Tanaman Pangan yang diuji	3.245.288.000	3.236.511.380	99,73	142	179	Produk	100,0	
EC.6916.BJA.104	Instrumen Tanaman Perkebunan yang diuji	475.885.000	463.520.255	97,40	673	673	Produk	100,0	
EC.6916.BJA.105	Instrumen Tanah, Air, Tanaman, Pembenahan Tanah dar	2.357.411.000	2.307.234.210	97,87	3425	3425	Produk	100,0	
EC.6916.AEF.106	Instrumen Mutu dan Kelayakan Lingkungan Pertanian ya	576.220.000	576.186.330	99,99	15550	15550	Produk	100,0	
EC.6916.BJA.107	Instrumen Alat dan Mesin Pertanian yang diuji	1.771.496.000	1.713.151.491	96,71	112	290	Produk	100,0	
EC.6916.BJA.108	Instrumen Mutu Pascapanen Pertanian yang diuji	874.722.000	860.401.930	98,36	199	212	Produk	100,0	
EC.6916.BJA.109	Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Perta	1.513.613.000	1.513.607.363	100,00	9	11	Produk	100,0	
EC.6916.BJA.110	Instrumen Pertanian Terstandar yang diuji	369.777.000	361.127.197	97,66	305	526	Produk	100,0	
EC.6916.CAG.101	Sarana Laboratorium Standardisasi Tanaman Pangan	96.962.000	96.097.500	99,11	7	7	Unit	100,0	
EC.6916.CAG.102	Sarana Laboratorium Standardisasi Perkebunan	380.105.000	367.991.000	96,81	40	40	Unit	100,0	
EC.6916.CAG.103	Sarana Laboratorium Standardisasi Hortikultura	44.520.000	44.520.000	100,00	4	4	Unit	100,0	
EC.6916.CAG.104	Sarana Laboratorium Standardisasi Peternakan dan Kese	70.000.000	69.362.200	99,09	15	15	Unit	100,0	
EC.6916.CAG.105	Sarana Laboratorium Standardisasi Sumber Daya Lahan P	93.289.000	91.250.000	97,81	14	14	Unit	100,0	
EC.6916.CAG.109	Sarana Laboratorium Standardisasi	14.000.000	14.000.000	100,00	2	2	Unit	100,0	
EC.6916.CBK.101	Seed Center Padi	50.000.000.000	47.250.532.842	94,50	1	1	Unit	100,0	
EC.6916.QDB.101	Integrated Corporation of Agriculture Resources Empow	25.000.000.000	24.901.148.602	99,60	9	20	Lembaga	100,0	
WA	Program Dukungan Manajemen	756.583.424.000	681.009.431.937	90,01					
WA.6918	Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen P	756.583.424.000	681.009.431.937	90,01					
WA.6918.AEC.502	Layanan Kerjasama	26.033.058.000	17.746.189.107	68,17	2	2	Kegiatan	100,0	
WA.6918.EBA.956	Layanan BMN	5.402.136.000	3.569.998.458	66,08	66	66	Layanan	100,0	
WA.6918.EBA.957	Layanan Hukum	481.498.000	454.652.166	94,42	1	1	Layanan	100,0	
WA.6918.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	2.075.568.000	1.600.385.335	77,11	9	9	Layanan	100,0	
WA.6918.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	130.918.000	120.812.100	92,28	1	1	Layanan	100,0	
WA.6918.EBA.962	Layanan Umum	26.253.080.000	16.298.729.343	62,08	63	63	Layanan	100,0	
WA.6918.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1.517.375.000	1.231.575.270	81,16	2	2	Layanan	100,0	
WA.6918.EBA.994	Layanan Perkantoran	612.342.010.000	601.644.798.384	98,25	64	64	Layanan	100,0	
WA.6918.EBB.951	Layanan Sarana Internal	2.324.789.000	2.208.471.419	95,00	106	162	Unit	100,0	
WA.6918.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	10.803.313.000	5.062.856.919	46,86	20	21	Unit	100,0	
WA.6918.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	3.624.811.000	2.588.303.445	71,41	463	1060	Orang	100,0	
WA.6918.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	10.948.680.000	2.857.286.308	26,10	1077	1077	Orang	100,0	
WA.6918.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	31.674.661.000	13.975.099.206	44,12	88	88	Layanan	100,0	
WA.6918.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	13.943.954.000	7.122.309.445	51,08	90	90	Layanan	100,0	
WA.6918.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	8.769.183.000	4.329.076.832	49,37	63	63	Layanan	100,0	
WA.6918.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	258.390.000	198.888.200	76,97	1	1	Layanan	100,0	
	Subtotal	933.853.861.000	850.619.689.660	91,09					
	Penyesuaian (Revisi DIPA/Pengembalian Belanja/dll)		600.571.013						
	Total	933.853.861.000	850.019.118.647	91,02					

## F.10. Proyek ICARE (Integrate Corporation of Agricultural Resources Empowerment (ICARE))

ICARE adalah Program Kementerian Pertanian bekerjasama dengan Bank Dunia yang bertujuan untuk mendukung pengelolaan kawasan dan rantai nilai komoditas pertanian secara berkelanjutan dan inklusif di lokasi-lokasi terpilih. Pengelolaan kawasan dan rantai nilai komoditas pertanian yang berkelanjutan mengandung arti dukungan

terhadap aspek lingkungan, sosial dan ekonomi. Inklusivitas mengandung pengertian keterlibatan integratif petani (*smallholder*) dan usaha agribisnis berskala mikro, kecil dan menengah dalam pengelolaan rantai nilai komoditas pertanian, serta menjamin keterlibatan petani wanita dan petani muda dalam implementasi program ICARE.

ICARE merupakan Program yang diusulkan sebagai implementasi prioritas pembangunan sektor pertanian yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yaitu peningkatan ketahanan pangan dan nilai tambah produk pertanian. RPJMN 2020-2024 menyebutkan bahwa korporasi petani dan nelayan merupakan salah satu prioritas strategis (*major proyek*) yang diamanatkan kepada Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian, badan usaha (BUMN/Swasta), dan Perguruan Tinggi. Pada kurun waktu tahun 2020-2024 ditargetkan terbangun sebanyak 350 korporasi petani dan nelayan dengan target manfaat program meningkatnya pendapatan petani/nelayan rata-rata 5% per tahun (sesuai target *Sustainable Development Goals*) dan meningkatnya produktivitas komoditas rata-rata 5% per tahun. Secara khusus, Program ICARE juga dirancang untuk merespon amanat Presiden Republik Indonesia, bahwa (i) petani perlu keluar dari *on farm* menuju *off farm* dengan memberikan nilai tambah melalui pengolahan produk pertanian, dan (ii) mendorong pelaku usaha yang bergerak di sektor pertanian (termasuk petani) untuk berkolaborasi dengan pihak terkait lainnya dan membentuk korporasi.

Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw mengamanatkan sejumlah Program yang harus dilaksanakan Kementerian Pertanian. Sebagai contoh, terdapat Lima program yang harus dilaksanakan Kementerian Pertanian, yaitu:

- (1) Pembangunan pusat pembenihan dan pengembangan kawasan sentra produksi tanaman lada,
- (2) Pengembangan kawasan sentra produksi tanaman jeruk yang menerapkan Teknologi Buah Berjenjang Sepanjang Tahun (BUJANGSETA),
- (3) Pengembangan budidaya padi rawa dan padi inbrida,
- (4) Pengembangan kawasan sentra produksi tanaman padi untuk menghasilkan beras premium dan
- (5) Pengembangan kawasan sentra produksi kelapa.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi, mendefinisikan Korporasi petani (KP) sebagai lembaga ekonomi petani berbadan hukum berbentuk koperasi, Badan Usaha Milik Petani, Perseroan Terbatas, Usaha Dagang dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki petani. Kementerian Pertanian juga telah menerbitkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472 tahun 2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional. Pada pengembangan kawasan pertanian tersebut kegiatan pembangunan dilakukan mulai dari aspek hulu hingga hilir yang dikelola dalam satu manajemen kawasan berbasis Korporasi dan inovasi pertanian dengan melibatkan masyarakat petani, industri/swasta, pemerintah, dan akademisi. Selanjutnya, Program ICARE berupaya untuk berkontribusi terhadap pencapaian program strategis pertanian yang difokuskan untuk:

- (1) Meningkatkan produksi dan produktivitas melalui gerakan nasional yang disertai pengembangan SDM pertanian. Kenaikan produksi dan produktivitas untuk komoditas utama minimal 7% dan kehilangan hasil harus ditekan maksimal 5%;
- (2) Menurunkan biaya usaha pertanian menjadi lebih efisien salah satunya dengan upaya pengembangan kawasan pertanian berbasis inovasi dan Korporasi;
- (3) Pengembangan dan implementasi mekanisasi pertanian, dan percepatan pemanfaatan teknologi pertanian;

Program ICARE juga menysasar modernisasi, digitalisasi, dan adopsi konsep pertanian modern dan digital tersebut di tingkat petani untuk menjadi salah satu pendekatan utama dalam transformasi sektor pertanian. Penguasaan dan penerapan teknologi modern telah menjadi prioritas dalam transformasi sektor pertanian Indonesia. Digitalisasi, otomatisasi, dan penerapan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) diprediksi akan mampu memberikan lompatan efisiensi dan daya saing sektor pertanian. Sebagai contoh, aplikasi sensor memungkinkan pengumpulan data dari lahan pertanian secara akurat dan *real time* untuk berbagai parameter, seperti, suhu, kelembaban (tanah dan udara), CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, cahaya, level air, status hara dan bahkan kondisi pertanamannya; pemanfaatan aplikasi digital untuk penanganan kesehatan hewan, formulasi ransum pakan, serta penanganan reproduksi ternak; sistem *monitoring* gudang penyimpanan hasil pertanian berbasis *Internet of Things* (IoT) memungkinkan petani/pelaku usaha pertanian untuk memantau dengan mudah kondisi penyimpanan dan mutu hasil pertaniannya melalui perangkat *smartphone*. Data dan informasi yang dikumpulkan secara cepat melalui teknologi tersebut, selanjutnya dapat menjadi landasan yang akurat dan presisi dalam penyusunan kebijakan, keputusan, tindakan praktis yang diperlukan di lapangan untuk mengoptimalkan produktivitas dan/atau meningkatkan efisiensi. Modernisasi pertanian juga diharapkan mampu mendorong minat generasi muda untuk menjadi petani-petani milenial.

Program ICARE difokuskan pada komoditas-komoditas bernilai tinggi untuk mengantisipasi jumlah impor yang terus meningkat, serta untuk meningkatkan nilai tambah sektor pertanian dan mendorong ekspor. Secara lengkap daftar lokasi dan komoditas pertanian yang diusulkan untuk tahap awal pembinaan Program ICARE ditampilkan dalam Tabel 1 berikut. Lokasi dan komoditas yang dibina dapat berubah seiring dengan progres pengembangan rencana bisnis kawasan di masing-masing Provinsi, berdasarkan hasil analisis kelayakan usaha, ketersediaan peluang pasar, kesesuaian agro-ekologi, kesiapan kapasitas petani, dan kebutuhan sistem usaha pertanian setempat (rotasi tanam, tanaman pendukung, dan seterusnya).

Tabel 1. Lokasi dan komoditas program

No.	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi	Komoditas
1	Ulu Belu, Air Naningan dan Pulau Panggung	Tanggamus	Lampung	Kopi, ternak Kambing
2	Cikajang, Cigedug, Cisirupan, Pasirwangi dan Sukaresmi	Garut	Jawa Barat	Kentang, ternak Domba
3	Losari	Brebes	Jawa Tengah	Pisang, Padi
4	Rembang, Sukorejo, dan Wonorejo	Pasuruan	Jawa Timur	Jagung, mangga

No.	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi	Komoditas
5	Tebas	Sambas	Kalimantan Barat	Jeruk, padi
6	Tombolo Pao dan Tinggimoncong	Gowa	Sulawesi Selatan	Kentang, sapi potong
7	Praya, Praya Barat, dan Praya Tengah	Lombok Tengah	Nusa Tenggara Barat	Jagung, ternak ayam
8	Airmadidi, Kalawat, Talawaan, Dimembe, dan Kauditan	Minahasa Utara	Sulawesi Utara	Kelapa, jagung
9	Aere dan Lambandia	Kolaka Timur	Sulawesi Tenggara	Kakao, sapi potong

- Kegiatan ICARE terdiri dari tiga komponen yaitu:

**Komponen A: Penguatan Rantai Nilai di Kawasan Pertanian Terpilih,**

**Komponen B: Penguatan Kapasitas Institusi untuk Pengelolaan Rantai Nilai,**

**Komponen C: Dukungan Manajemen Program.**

Ketiga komponen tersebut dijelaskan secara singkat sebagai berikut:



Sebagai acuan target dalam kegiatan ICARE berikut ini adalah tabel rekapitulasi target realisasi yang sudah di capai selama tahun 2024:

No	Indikator	Rekap		Target PDO	Satuan
		Capaian 2023	Capaian 2024		
I.	Untuk mendukung rantai nilai pertanian yang inklusif dan berkelanjutan secara lingkungan dan finansial				
1	Proporsi anggota Korporasi Petani yang didukung proyek yang mengalami peningkatan penjualan melalui saluran komersial	-	3,63	80	%
2	Persentase peningkatan produktivitas tanaman dan ternak terpilih dari penerapan teknologi pertanian cerdas iklim di antara penerima manfaat proyek	9,97	16,38	30	%
3	Jumlah kemitraan yang difasilitasi oleh proyek	2	10	30	jumlah
4	Petani yang dijangkau oleh aset atau layanan pertanian	3.733	14.024	90.000	jumlah
	- Petani yang dijangkau dengan aset atau layanan pertanian – perempuan	1.270	2.749	22.500	jumlah
	- Petani yang dijangkau dengan aset atau layanan pertanian – pemuda	2.152	4.382	30.000	jumlah
	- lainnya	-	6.894	37.500	jumlah
II.	Komponen A. Memperkuat rantai nilai di Kawasan Pertanian (klaster zona pertanian) terpilih	-	-		
1	Jumlah rencana pengembangan agribisnis lokal yang dikembangkan dan didanai	9,00	-	13	jumlah
2	Jumlah rencana bisnis/usaha Korporasi Petani yang didukung melalui hibah pendamping ( <i>matching grants</i> )	-	-	61	jumlah
3	Jumlah Korporasi Petani yang memperoleh keuntungan setelah 2 tahun diberikannya pembiayaan hibah pendamping	-	-	10	jumlah
4	Persentase petani yang dilatih keterampilan bisnis dan keuangannya di Korporasi Petani	-	32,55	80	%
	Persentase petani yang dilatih kesiampuan bisnis/usahanya di Korporasi Petani – perempuan	-	17,23	80	%
5	Proporsi perempuan di struktur kepemimpinan dan manajemen Korporasi Petani	-	27,38	25	%
6	Persentase petani di Korporasi Petani yang memperoleh manfaat dari infrastruktur yang didukung oleh proyek	0,56	11,67	80	%
7	Persentase klien sasaran yang puas dengan layanan pertanian yang difasilitasi oleh proyek	80	22,33	80	%
	Persentase klien sasaran yang puas dengan layanan pertanian yang difasilitasi oleh proyek – perempuan	80	21,67	80	%
	Persentase klien sasaran yang puas dengan layanan pertanian yang difasilitasi oleh proyek – laki-laki	80	22,44	80	%
		-	-		



III	Komponen B: Memperkuat kapasitas kelembagaan untuk pengembangan rantai nilai	-	-		
1	Proporsi jumlah kursi yang diduduki oleh perwakilan petani dalam komite evaluasi proposal hibah kompetitif (competitive grant)	-	30,00	30	%
	Proporsi perempuan di antara perwakilan petani yang menduduki kursi dalam komite evaluasi proposal hibah kompetitif	-	50,00	50	%
2	Jumlah hibah kompetitif yang diberikan untuk adaptasi dan diseminasi teknologi	-	-	150	jumlah
3	Jumlah teknologi yang diproduksi dan disebarluaskan melalui kemitraan kolaboratif	-	9,00	120	jumlah
4	Petani mengadopsi teknologi pertanian yang lebih baik	1.338	1.436,00	70.000	jumlah
	Petani mengadopsi teknologi pertanian yang lebih baik - perempuan	277	313,00	18.750	jumlah
	Petani mengadopsi teknologi pertanian yang lebih baik – laki laki	1.061	1.123,00	51.250	jumlah
5	Luas lahan pertanian di mana praktik-praktik yang mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan iklim diterapkan	5	698,10	7.200	Ha
6	Jumlah pelaku rantai nilai dan pekerja UKM agribisnis di rantai nilai terpilih yang dilatih dan didukung	277	673,00	500	jumlah
7	Jumlah pejabat publik dan penyuluh pertanian yang dilatih untuk memfasilitasi pengembangan rantai nilai dan memberikan layanan pertanian	1.026	1.704,00	5.000	jumlah
8	Porsi proposal hibah kompetitif teknologi (competitive technology grant) yang disetujui yang mencakup partisipasi dan investasi sektor swasta	-	2,22	70	%
IV	Komponen C: Manajemen Proyek	-	-		
1	Persentase Mekanisme Penanganan Keluhan (GRM) yang ditangani dari total klaim yang diterima	-	57,78	80	%
2	Jumlah produk-produk pengetahuan yang disusun dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendiseminasi pembelajaran proyek	-	7,00	30	jumlah

- Nilai pagu anggaran kegiatan ICARE bersumber dana dari Pinjaman Luar Negeri (PLN). Pagu dan realisasi belanja kegiatan ICARE lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian sampai dengan periode laporan keuangan tahun 2024 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel Pagu dan Realisasi ICARE per 31 Desember 2024

No	Kode   Nama Satker	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Outstanding Kontrak	Block Amount	Jml diblokir/ direvisi	Dana Tersedia
1	567296 BPSIP JAWA BARAT	3.000.000.000	2.999.761.503	99,99%	-	-		238.497
2	567318 BPSIP JAWA TENGAH	3.060.000.000	3.032.467.038	99,10%	-	-	24.934.000	2.598.962
3	567364 BPSIP JAWA TIMUR	3.197.000.000	3.195.015.760	99,94%	-	-		1.984.240
4	567517 BPSIP LAMPUNG	2.509.989.000	2.503.853.427	99,76%	-	-		6.135.573
5	567563 BPSIP KALIMANTAN BARAT	2.980.000.000	2.979.721.442	99,99%	-	-		278.558
6	567702 BPSIP SULAWESI TENGGARA	2.977.150.000	2.920.181.952	98,09%	-	-	14.000.000	42.968.048
7	634022 BPSIP SULAWESI UTARA	2.299.261.000	2.296.723.813	99,89%	-	-		2.537.187
8	634036 BPSIP SULAWESI SELATAN	2.000.000.000	1.999.922.910	100,00%	-	-		77.090
9	634040 BPSIP NUSA TENGGARA BARAT	2.976.600.000	2.973.500.757	99,90%	-	-		3.099.243
	<b>Jumlah</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>24.901.148.602</b>	<b>99,60%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>59.917.398</b>

#### F.11. KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SBSN)

Pada Tahun Anggaran 2024 terdapat kegiatan yang bersumber dari SBSN pada Satker Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi dengan tujuan melengkapi sarana prasarana *Seed Center* Padi untuk mendukung peningkatan kapasitas produksi benih sumber padi serta revitalisasi laboratorium sertifikasi mutu benih dan

membangun pusat produksi benih sumber padi yang modern, efisien dan bermutu mendukung pemenuhan benih sumber padi bersertifikat dan peningkatan produksi padi nasional sesuai *Directive* Presiden RI pada saat kunjungan ke BBPSI Padi pada tanggal 12 Juli 2022 kepada Kementerian PUPR.

Pagu anggaran sebesar Rp50.000.000.000,00 dengan rincian anggaran untuk beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pagu anggaran untuk kegiatan sarana *Seed Center* dan pengelolaan plasma nutfah sebesar Rp19.071.357.000,00
2. Pagu anggaran untuk kegiatan sarana laboratorium sertifikasi sebesar Rp9.685.736.000,00
3. Pagu anggaran untuk kegiatan pembuatan instalasi pengelolaan air limbah sebesar Rp428.145.000,00
4. Pagu anggaran untuk kegiatan pembuatan saluran irigasi kebun produksi sebesar Rp12.466.571.000,00
5. Pagu anggaran untuk kegiatan pembuatan embung penampungan air sebesar Rp8.348.191.000,00

Realisasi belanja kegiatan yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara Per 31 Desember 2024 sebesar Rp47.250.532.842,00 atau 94,50% dari pagu anggaran sebesar Rp50.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Realisasi belanja kegiatan pengadaan alat *Seed Center* sebesar Rp18.143.945.093 atau 95,14% dari pagu anggaran sebesar Rp19.071.357.000,00







2. Realisasi belanja kegiatan laboratorium tersertifikasi sebesar Rp9.035.309.691 atau 93,28% dari pagu anggaran sebesar Rp9.685.736.000,00
3. Realisasi belanja kegiatan pembuatan instalasi air limbah laboratorium sebesar Rp426.305.000,00 atau 99,57% dari pagu anggaran sebesar Rp428.145.000,00



4. Realisasi belanja kegiatan pembangunan saluran irigasi kebun produksi sebesar Rp12.280.794.766,00 atau 98,51% dari pagu anggaran sebesar Rp12.466.571.000,00



5. Realisasi belanja kegiatan pembuatan embung penampungan air sebesar Rp7.364.178.292 atau 88,21% dari pagu anggaran sebesar Rp8.348.191.000,00



## **F.12. PERUBAHAN NOMENKLATUR**

Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) merupakan lembaga baru berada dibawah Menteri Pertanian pengganti organisasi yang lama yaitu Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Perubahan ini berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2024 dan Permentan No 10 Tahun 2025, dimana peran BRMP yakni menggabungkan tugas dan fungsi litbang serta Standardisasi. BRMP berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian yang dipimpin oleh Kepala Badan. Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2024 pasal 33 dan pasal 34 mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian

Perubahan Nama nomenklatur organisasi dari semula (018.09) Badan Standaridisasi Instrumen Pertanian menjadi (018.09) Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian terdiri dari 1 (satu) Sekretariat Badan, 4 (empat) Pusat, dan 59 (lima puluh sembilan) satuan kerja Unit Pelaksana Teknis baru telah disetujui Kementerian Keuangan. Hal ini sesuai dengan Surat Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman DJA Kementerian Keuangan Nomor: S-397/AG/AG.3/2025 tanggal 22 April 2025 perihal Persetujuan atas Usulan Perbahan Nomenklatur Unit Eselon I Satuan Kerja lingkup Badan Standaridisasi Instrumen Pertanian (Surat Persetujuan Terlampir). Namun ketika akan melakukan pencetakan Neraca, Neraca Percobaan AkruaL Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2024 Audited pada periode 14 dalam SAKTI dan Monsakti tertulis Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, oleh permasalahan tersebut telah bertiket dengan HAI DJPB Nomor 20250421-JHWAKP pada tanggal 21 April 2025.



**Lampiran**

**NERACA  
NERACA PERCOBAAN  
LAPORAN OPERASIONAL  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
LAPORAN BMN**

Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Tahun Anggaran 2024 (*AUDITED*)

NERACA  
TINGKAT ESELON I  
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 018 ) KEMENTERIAN PERTANIAN  
UNIT ORGANISASI : ( 09 ) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

Tgl Data : 03/05/25 12:26 AM  
Tgl Cetak : 03/05/25 7:56 AM  
Halaman : 1  
lap\_neraca\_es1\_komparatif\_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	25,921,000	(25,921,000)	(100.00)
Kas di Bendahara Penerimaan	347,500	0	347,500	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	3,609,809,653	2,126,798,729	1,483,010,924	69.73
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	0	47,510,700	(47,510,700)	(100.00)
Piutang Bukan Pajak	4,361,695,016	2,947,035,664	1,414,659,352	48.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(1,436,451,936)	(1,666,178,084)	229,726,148	(13.79)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	2,925,243,080	1,280,857,580	1,644,385,500	128.38
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	16,963,314	755,254,127	(738,290,813)	(97.75)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(1,696,331)	(176,877,392)	175,181,061	(99.04)
BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)	15,266,983	578,376,735	(563,109,752)	(97.36)
Persediaan	14,801,788,839	12,199,218,675	2,602,570,164	21.33
JUMLAH ASET LANCAR	21,352,456,055	16,258,683,419	5,093,772,636	31.33
ASET TETAP				
Tanah	42,353,446,599,143	42,875,152,506,066	(521,705,906,923)	(1.22)
Peralatan dan Mesin	1,509,576,255,161	1,502,142,924,379	7,433,330,782	0.49
Gedung dan Bangunan	2,038,612,694,811	2,033,683,425,673	4,929,269,138	0.24
Jalan, Irigasi dan Jaringan	323,357,846,799	301,709,108,141	21,648,738,658	7.18
Aset Tetap Lainnya	11,346,628,479	11,283,239,779	63,388,700	0.56
Konstruksi Dalam Pengerjaan	2,370,184,532	4,332,570,451	(1,962,385,919)	(45.29)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(2,126,705,960,195)	(2,012,299,031,619)	(114,406,928,576)	5.69
JUMLAH ASET TETAP	44,112,004,248,730	44,716,004,742,870	(604,000,494,140)	(1.35)
Properti Investasi				
Properti Investasi	18,259,544,000	208,754,216,000	(190,494,672,000)	(91.25)
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(606,733,830)	(323,181,613)	(283,552,217)	87.74
JUMLAH Properti Investasi	17,652,810,170	208,431,034,387	(190,778,224,217)	(91.53)
PIUTANG JANGKA PANJANG				
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	842,155,657	81,046,376	761,109,281	939.10
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(104,126,864)	(405,232)	(103,721,632)	25,595.62
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)	738,028,793	80,641,144	657,387,649	815.20
Piutang Jangka Panjang lainnya	3,275,989,901	3,347,221,263	(71,231,362)	(2.13)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	(2,358,791,341)	(2,344,261,760)	(14,529,581)	0.62
PIUTANG JANGKA PANJANG LAINNYA(NETTO)	917,198,560	1,002,959,503	(85,760,943)	(8.55)
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG	1,655,227,353	1,083,600,647	571,626,706	52.75
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	29,940,204,831	29,948,319,831	(8,115,000)	(0.03)

NERACA  
TINGKAT ESELON I  
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 018 ) KEMENTERIAN PERTANIAN  
UNIT ORGANISASI : ( 09 ) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

Tgl Data : 03/05/25 12:26 AM  
Tgl Cetak : 03/05/25 7:56 AM  
Halaman : 2  
lap\_neraca\_es1\_komparatif\_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	7,480,811,324	3,860,308,590	3,620,502,734	93.79
Aset Lain-lain	116,495,016,660	111,088,009,886	5,407,006,774	4.87
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(54,150,836,568)	(47,016,681,135)	(7,134,155,433)	15.17
JUMLAH ASET LAINNYA	99,765,196,247	97,879,957,172	1,885,239,075	1.93
JUMLAH ASET	44,252,429,938,555	45,039,658,018,495	(787,228,079,940)	(1.75)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	8,311,253,041	4,129,901,942	4,181,351,099	101.25
Pendapatan Diterima Dimuka	1,775,162,816	1,293,274,962	481,887,854	37.26
Uang Muka dari KPPN	0	25,921,000	(25,921,000)	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	10,086,415,857	5,449,097,904	4,637,317,953	85.10
JUMLAH KEWAJIBAN	10,086,415,857	5,449,097,904	4,637,317,953	85.10
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	44,242,343,522,698	45,034,208,920,591	(791,865,397,893)	(1.76)
JUMLAH EKUITAS	44,242,343,522,698	45,034,208,920,591	(791,865,397,893)	(1.76)
JUMLAH EKUITAS	44,242,343,522,698	45,034,208,920,591	(791,865,397,893)	(1.76)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	44,252,429,938,555	45,039,658,018,495	(787,228,079,940)	(1.75)

Keterangan :  
FINAL

## NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

## TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 018 ) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : ( 09 ) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

Tgl Data : 03/05/25 12:26 AM

Tgl Cetak : 03/05/25 7:56 AM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_es1\_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	347,500	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	55,197	0
0.0	111822	Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah	3,609,754,456	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	648,673,500	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	3,713,021,516	0
0.0	115421	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	16,963,314	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNBP	0	489,812,541
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	946,639,395
0.0	116421	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0	1,696,331
0.0	117111	Barang Konsumsi	960,913,493	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	60,947,452	0
0.0	117114	Suku Cadang	14,135,000	0
0.0	117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	12,162,707,145	0
0.0	117131	Bahan Baku	1,306,970,040	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	296,115,709	0
0.0	131111	Tanah	42,353,446,599,143	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	1,509,576,255,161	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	2,038,612,694,811	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	111,187,541,684	0
0.0	134112	Irigasi	171,004,137,778	0
0.0	134113	Jaringan	41,166,167,337	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	24,733,200	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	11,321,895,279	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	2,370,184,532	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	1,396,786,446,533
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	569,313,763,631
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	88,293,967,894
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	56,014,040,880
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	16,297,741,257
0.0	138311	Properti Investasi	18,259,544,000	0
0.0	138411	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0	606,733,830
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	842,155,657	0
0.0	155111	Piutang Jangka Panjang lainnya	3,275,989,901	0
0.0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	0	104,126,864
0.0	156911	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	2,358,791,341
0.0	162121	Hak Cipta	28,025,000	0
0.0	162141	Paten	512,872,250	0



## NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

## TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 018 ) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : ( 09 ) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

Tgl Data : 03/05/25 12:26 AM

Tgl Cetak : 03/05/25 7:56 AM

Halaman : 2

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_es1\_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	162151	Software	4,212,716,717	0
0.0	162171	Hasil Kajian/Penelitian	24,710,591,864	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	475,999,000	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	7,480,811,324	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	116,469,045,419	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	25,971,241	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	49,355,223,390
0.0	169312	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	0	4,491,450
0.0	169314	Akumulasi Amortisasi Paten	0	440,528,665
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	4,212,716,717
0.0	169317	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	0	111,905,105
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	25,971,241
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	59,552,918
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	3,532,844,226
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	4,718,855,897
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	1,775,162,816
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	839,108,443,593
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	40,148,871,686	0
0.0	313211	Transfer Keluar	1,214,228,980,456	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	469,862,177,843
0.0	391111	Ekuitas	0	45,034,208,920,591
0.0	391113	Koreksi Nilai Persediaan	0	1,402,101,698
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	293,053,735,247	0
0.0	391119	Koreksi Lainnya	0	470,784,826
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	24,084,512,623
0.0	391132	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	24,816	0
0.0	391133	Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu	0	34,391,729,025
0.0	391151	Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0	278,101,002,922
3.0	425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	14,865,063,113
3.0	425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0	459,527,892
3.0	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	123,196,432
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	882,397,231
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	506,694,775
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	3,032,461,885
3.0	425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	0	24,677,886
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	969,925,000
3.0	425252	Pendapatan Perizinan Pertanian	0	128,300,000



## NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

## TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 018 ) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : ( 09 ) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

Tgl Data : 03/05/25 12:26 AM

Tgl Cetak : 03/05/25 7:56 AM

Halaman : 3

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_es1\_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	7,104,888,500
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	3,000,000
3.0	425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0	125,411,000
3.0	425432	Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan	0	222,984,000
3.0	425436	Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual	0	2,582,033,300
3.0	425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	0	6,610,000
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	2,307,707,227
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	6,772,794
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	486,102,576
3.0	425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	0	145,083,987
3.0	425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	0	28,963,988
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	46,191,059
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	5,581,047,164
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,166,561,988
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	156,777,298
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	4,213,545
3.0	491111	Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi	0	820,881
3.0	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	15,099,181,941
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	303,558,150
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	189,868,081,565	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	2,732,542	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	13,847,181,257	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	3,930,375,315	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	1,821,039,772	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	15,409,283,550	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	1,781,961,798	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	10,015,169,150	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	25,826,482,600	0
3.0	511135	Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	2,700,000	0
3.0	511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	356,500,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	4,502,626,664	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	3,577,774,987	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	67,728	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	170,360,940	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	34,845,438	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	541,450,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	165,334,860	0

## NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

## TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 018 ) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI

: ( 09 ) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

Tgl Data : 03/05/25 12:26 AM

Tgl Cetak : 03/05/25 7:56 AM

Halaman : 4

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_es1\_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	579,220,000	0
3.0	511632	Beban Tunjangan Khusus Papua PPPK	5,100,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	5,625,175,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	113,151,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	105,465,316,261	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	1,638,807,219	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	192,529,668	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	7,393,483,714	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	13,751,664,985	0
3.0	521211	Beban Bahan	42,435,036,208	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	2,917,458,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	39,120,081,117	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	12,292,840	0
3.0	521711	Beban Kontribusi pada Organisasi Internasional dan Trust Fund	744,142,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	28,633,105,291	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	1,499,049,121	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	1,979,148,431	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	6,762,614,492	0
3.0	522121	Beban Jasa Pos dan Giro	11,358,725	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	806,612,580	0
3.0	522141	Beban Sewa	3,074,425,382	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	5,238,383,500	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	16,133,662,633	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	59,096,748,817	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	2,058,996,492	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	42,182,790,259	0
3.0	523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	387,871,870	0
3.0	523131	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	216,657,000	0
3.0	523132	Beban Pemeliharaan Irigasi	398,185,000	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	1,600,474,027	0
3.0	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	1,687,434,274	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	68,023,424,274	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,810,269,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2,605,977,174	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	8,512,448,917	0
3.0	524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	333,131,484	0
3.0	524219	Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	605,393,379	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	47,064,213,363	0

## NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

## TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 018 ) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : ( 09 ) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

Tgl Data : 03/05/25 12:26 AM

Tgl Cetak : 03/05/25 7:56 AM

Halaman : 5

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_es1\_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	73,610,658,657	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	7,093,390,875	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	7,026,750,830	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	1,165,823,354	0
3.0	591611	Beban Penyusutan Properti Investasi	60,634,644	0
3.0	592112	Beban Amortisasi Hak Cipta	400,362	0
3.0	592114	Beban Amortisasi Paten	23,052,449	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	3,112,500	0
3.0	592117	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	13,470,613	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	721,033,717	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	27,343,405,964	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	1,412,623,304	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	337,575,193	0
3.0	593123	Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	10,464,223,656	0
3.0	593127	Beban Persediaan Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	432,413,600	0
3.0	593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	126,215,700	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	11,684,639,514	0
3.0	593149	Beban persediaan lainnya	1,514,255,212	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	1,267,104,368	0
3.0	594211	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNB	0	190,640,165
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	9,962,497	0
3.0	594411	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	450,000
3.0	594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tunjangan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	51,951,152	0
3.0	594991	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Piutang Jangka Panjang Lainnya	16,779,581	0
3.0	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	1,400,000	0
3.0	595113	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	6,650,000	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	4,756,057,498	0
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	691,624,124	0
3.0	596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	10,770,968	0
JUMLAH			48,933,641,929,820	48,933,641,929,820

Keterangan :

FINAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 018 ) KEMENTERIAN PERTANIAN  
UNIT ORGANISASI : ( 09 ) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

Tgl Data : 03/05/25 12:26 AM  
Tgl Cetak : 03/05/25 7:56 AM  
Halaman : 1  
lap\_neraca\_percobaan\_kas\_es1\_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	850,019,118,647
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	40,148,871,686	0
3.0	425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	15,260,582,513
3.0	425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0	459,529,548
3.0	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	123,196,432
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	882,397,231
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	506,694,775
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	3,552,200,439
3.0	425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	0	9,800,886
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	969,925,000
3.0	425252	Pendapatan Perizinan Pertanian	0	128,300,000
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	7,104,541,000
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	3,000,000
3.0	425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0	125,411,000
3.0	425432	Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan	0	222,984,000
3.0	425436	Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual	0	2,829,033,300
3.0	425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	0	6,610,000
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	2,307,707,227
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	6,772,794
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	427,428,357
3.0	425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	0	180,639,737
3.0	425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	0	147,243,831
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	48,691,059
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	3,500,458,276
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,166,561,988
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	174,948,748
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	4,213,545
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	189,893,554,770	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2,828,077	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	13,852,218,501	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	3,931,244,321	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	1,833,940,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	15,754,281,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1,781,965,257	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	10,016,183,080	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	25,953,708,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 018 ) KEMENTERIAN PERTANIAN  
UNIT ORGANISASI : ( 09 ) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

Tgl Data : 03/05/25 12:26 AM  
Tgl Cetak : 03/05/25 7:56 AM  
Halaman : 2  
lap\_neraca\_percobaan\_kas\_es1\_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	2,700,000	0
3.0	511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	356,500,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	4,642,735,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	3,583,861,700	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	68,288	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	170,360,940	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	34,845,438	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	542,790,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	165,479,700	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	578,518,000	0
3.0	511632	Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	5,100,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	5,625,175,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	113,151,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	105,542,075,053	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	1,638,807,219	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	192,529,668	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	7,393,483,714	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	13,773,937,407	0
3.0	521211	Belanja Bahan	42,430,656,208	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	2,917,458,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	38,967,218,522	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	20,384,740	0
3.0	521711	Belanja Kontribusi pada Organisasi Internasional dan Trust Fund	746,304,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	24,895,405,937	0
3.0	521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	926,652,220	0
3.0	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	15,516,175,054	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	28,739,552,054	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	1,494,487,555	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	1,934,873,422	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	6,760,382,842	0
3.0	522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	11,358,725	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	806,612,580	0
3.0	522141	Belanja Sewa	3,074,425,382	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	5,235,983,500	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	16,171,396,232	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	59,417,345,867	0
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	558,929,946	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	2,052,161,492	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 018 ) KEMENTERIAN PERTANIAN  
UNIT ORGANISASI : ( 09 ) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

Tgl Data : 03/05/25 12:26 AM

Tgl Cetak : 03/05/25 7:56 AM

Halaman : 3

lap\_neraca\_percobaan\_kas\_es1\_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	42,188,761,259	0
3.0	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	118,266,210	0
3.0	523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	387,871,870	0
3.0	523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	216,657,000	0
3.0	523132	Belanja Pemeliharaan Irigasi	398,185,000	0
3.0	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	1,696,474,027	0
3.0	523136	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	251,547,496	0
3.0	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	1,694,269,274	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	68,210,706,926	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,841,269,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2,715,977,174	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	8,395,058,917	0
3.0	524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	333,131,484	0
3.0	524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	612,196,607	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28,176,635,899	0
3.0	532115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	65,400,000	0
3.0	532118	Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	74,746,904	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,753,831,895	0
3.0	533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	22,534,000	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	3,931,538,649	0
3.0	534121	Belanja Modal Irigasi	19,644,973,058	0
3.0	534131	Belanja Modal Jaringan	1,829,851,600	0
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	19,954,404
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	95,428
3.1	511121	Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	4,846,604
3.1	511122	Pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS	0	787,350
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	12,900,228
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	293,548,350
3.1	511126	Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS	0	1,013,930
3.1	511129	Pengembalian Belanja Uang Makan PNS	0	10,138,400
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	127,493,336
3.1	511611	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PPPK	0	3,120,213
3.1	511619	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	464
3.1	511624	Pengembalian Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	800,000
3.1	511625	Pengembalian Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	72,420
3.1	521111	Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	0	1,121,500
3.1	521211	Pengembalian Belanja Bahan	0	100,000

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 018 ) KEMENTERIAN PERTANIAN  
UNIT ORGANISASI : ( 09 ) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

Tgl Data : 03/05/25 12:26 AM

Tgl Cetak : 03/05/25 7:56 AM

Halaman : 4

lap\_neraca\_percobaan\_kas\_es1\_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	522111	Pengembalian Belanja Langganan Listrik	0	39,113,289
3.1	522112	Pengembalian Belanja Langganan Telepon	0	561,300
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	1,700,000
3.1	522191	Pengembalian Belanja Jasa Lainnya	0	21,638,599
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	53,651,970
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	1,110,000
3.1	524219	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	0	6,803,228
JUMLAH			890,768,561,346	890,768,561,346

Keterangan :

FINAL



## LAPORAN OPERASIONAL

## TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)KEMENTERIAN/LEMBAGA : ( 018 ) KEMENTERIAN PERTANIAN  
ESELON I : ( 09 ) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

Tgl Data : 03/05/25 12:26 AM

Tgl Cetak : 03/05/25 7:57 AM

Halaman : 1

lap\_lo\_es1\_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Cukai	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	-
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	-
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	-
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	-
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	-
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	-
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	31,889,767,201	21,321,795,287	10,567,971,914	-
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	31,889,767,201	21,321,795,287	10,567,971,914	-
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	-
Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan	31,889,767,201	21,321,795,287	10,567,971,914	-
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	-
Beban Pegawai	278,176,614,166	269,059,233,162	9,117,381,004	-
Beban Persediaan	40,542,300,690	57,138,591,503	(16,596,290,813)	-
Beban Barang dan Jasa	277,810,572,167	288,853,260,981	(11,042,688,814)	-
Beban Pemeliharaan	109,386,006,236	74,498,767,385	34,887,238,851	-
Beban Perjalanan Dinas	87,890,644,228	117,889,176,146	(29,998,531,918)	-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	11,022,852,956	1,634,356,600	9,388,496,356	-

## LAPORAN OPERASIONAL

## TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA

: ( 018 ) KEMENTERIAN PERTANIAN

ESELON I

: ( 09 ) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

Tgl Data : 03/05/25 12:26 AM

Tgl Cetak : 03/05/25 7:57 AM

Halaman : 2

lap\_lo\_es1\_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	-
Beban Subsidi	0	0	0	-
Beban Hibah	0	0	0	-
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	136,782,541,364	155,540,148,915	(18,757,607,551)	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(112,396,935)	209,874,578	(322,271,513)	-
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	-
Beban Lain-Lain	0	0	0	-
JUMLAH BEBAN	941,499,134,872	964,823,409,270	(23,324,274,398)	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(909,609,367,671)	(943,501,613,983)	33,892,246,312	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	(3,243,769,060)	(5,235,388,377)	1,991,619,317	-
Pendapatan Pelepasan Aset	1,512,288,438	793,802,438	718,486,000	-
Beban Pelepasan Aset	4,756,057,498	6,029,190,815	(1,273,133,317)	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	20,998,598,513	16,505,520,165	4,493,078,348	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	22,968,097,973	16,991,083,439	5,977,014,534	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,969,499,460	485,563,274	1,483,936,186	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	17,754,829,453	11,270,131,788	6,484,697,665	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(891,854,538,218)	(932,231,482,195)	40,376,943,977	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
Beban Luar Biasa	0	0	0	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	(891,854,538,218)	(932,231,482,195)	40,376,943,977	-

Keterangan :

FINAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 018 ) KEMENTERIAN PERTANIAN  
UNIT ORGANISASI : ( 09 ) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

Tgl Data : 03/05/25 12:26 AM  
Tgl Cetak : 03/05/25 7:57 AM  
Halaman : 1  
lap\_lpe\_es1\_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	45,034,208,920,591	45,269,723,693,095	(235,514,772,504)	(0.52)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(891,854,538,218)	(932,231,482,195)	40,376,943,977	(4.33)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(13,079,845,801)	(20,348,814,731)	7,268,968,930	(35.72)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	1,402,101,698	1,347,601,350	54,500,348	4.04
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	278,101,002,922	(1,998,000)	278,103,000,922	(13,919,069.12)
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(293,053,735,247)	(21,896,107,588)	(271,157,627,659)	1,238.38
LAIN-LAIN	470,784,826	201,689,507	269,095,319	133.42
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	113,068,986,126	717,065,524,422	(603,996,538,296)	(84.23)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(791,865,397,893)	(235,514,772,504)	(556,350,625,389)	236.23
EKUITAS AKHIR	44,242,343,522,698	45,034,208,920,591	(791,865,397,893)	(1.76)

Keterangan :  
FINAL

**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA  
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2024 - AUDITED  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**UAPB : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**UAPPB-E1 : 09 BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN**

Tgl.Data : 14/05/25 6:25 PM  
Tgl.Cetak : 15/05/25 11:05 AM  
Halaman : 1  
Kode Lap : lap\_bmn\_neraca\_face\_es1\_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	2
117111	Barang Konsumsi	960,913,493
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	60,947,452
117114	Suku Cadang	14,135,000
117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada	12,162,707,145
117131	Bahan Baku	1,306,970,040
117199	Persediaan Lainnya	296,115,709
131111	Tanah	42,353,446,599,143
132111	Peralatan dan Mesin	1,509,576,255,161
133111	Gedung dan Bangunan	2,038,612,694,811
134111	Jalan dan Jembatan	111,187,541,684
134112	Irigasi	171,004,137,778
134113	Jaringan	41,166,167,337
135111	Aset Tetap Renovasi	24,733,200
135121	Aset Tetap Lainnya	11,321,895,279
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	2,370,184,532
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1,396,786,446,533)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(569,313,763,631)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(88,293,967,894)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(56,014,040,880)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(16,297,741,257)
138311	Properti Investasi	18,259,544,000
138411	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(606,733,830)
162121	Hak Cipta	28,025,000
162141	Paten	512,872,250
162151	Software	4,212,716,717
162171	Hasil Kajian/Penelitian	24,710,591,864
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	475,999,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	116,469,045,419
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	25,971,241
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(49,355,223,390)
169312	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	(4,491,450)
169314	Akumulasi Amortisasi Paten	(440,528,665)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(4,212,716,717)
169317	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	(111,905,105)
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	(25,971,241)
<b>J U M L A H</b>		<b>44,236,743,232,662</b>